



BUKU STATISTIK SEKTORAL

2026

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Visi Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Grobogan	2
1.2 Kondisi Geografis.....	3
1.3 Wilayah Administrasi	4
BAB II TATA KELOLA PEMERINTAHAN	6
2.1 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	7
2.2 Sekretariat DPRD.....	12
2.3 Pemerintah Daerah	18
2.4 Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pembangunan	21
2.5 Keuangan Daerah	25
2.6 Pengawasan	31
BAB III SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	36
3.1 Pendidikan.....	37
3.2 Kesehatan	58
3.3 Sosial.....	80
3.4 Kependudukan.....	87
3.5 Pencatatan Sipil	96
3.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	104
3.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111
3.8 Kepemudaan dan Olahraga	114
3.9 Perpustakaan	116
BAB IV SUMBER DAYA ALAM	121
4.1 Pertanian	122
4.2 Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.....	130
4.3 Lingkungan Hidup	136
BAB V INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	141
5.1 Pekerjaan dan Penataan Ruang.....	142
5.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	148
5.3 Perhubungan	156
BAB VI PEREKONOMIAN DAERAH	164
6.1 Penanaman Modal	165
6.2 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	167
6.3 Tenaga Kerja	170



6.4	Perdagangan	174
BAB VII KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....		177
7.1	Kebudayaan dan Pariwisata	178
BAB VIII KETAHANAN DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		182
8.1	Pangan	183
8.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	190
BAB IX PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT		203
9.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	204
9.2	Kesatuan Bangsa dan Politik.....	210
BAB X PENUTUP		215

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025	7
Tabel 2.2 Banyaknya Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025	12
Tabel 2.3 Rekapitulasi Rapat Paripurna, Rapat Fraksi, Rapat AKD Kabupaten Grobogan Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Kegiatan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	15
Tabel 2.5 Perkembangan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	21
Tabel 2.6 Jumlah Wajib Pajak Menurut Jenis Pajak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	25
Tabel 2.7 Pemasukan PBB-P2 Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.8 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025	28
Tabel 2.9 Daftar Objek Pemeriksaan Pemerintah Desa Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	31
Tabel 2.10 Audit yang Dilaksanakan dan Difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025	32
Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Grobogan Tahun 2025	38
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Grobogan Tahun 2025	39
Tabel 3.3 Banyaknya Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	41
Tabel 3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	43
Tabel 3.5 Jumlah Anak Tidak Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	45
Tabel 3.6 Lanjutan Tabel Jumlah Anak Tidak Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	45
Tabel 3.7 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	46
Tabel 3.8 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	48



Tabel 3.9 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	48
Tabel 3.10 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	50
Tabel 3.11 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	50
Tabel 3.12 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	51
Tabel 3.13 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	52
Tabel 3.14 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	53
Tabel 3.15 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	53
Tabel 3.16 Jumlah Sekolah Menurut Kondisi Bangunan di Kabupaten Grobogan per Kecamatan Tahun 2025.....	55
Tabel 3.17 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	58
Tabel 3.18 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	61
Tabel 3.19 Lanjutan Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	61
Tabel 3.20 Angka Kematian Bayi (AKB) per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	64
Tabel 3.21 Angka Kematian Ibu (AKI) per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	65
Tabel 3.22 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	66
Tabel 3.23 Persentase Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	68
Tabel 3.24 Hasil Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	70



Tabel 3.25 Banyaknya Kunjungan dan Penimbangan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	71
Tabel 3.26 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Lahir Mati, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	72
Tabel 3.27 Jumlah Balita Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	74
Tabel 3.28 Jumlah Pelayanan Rawat Inap di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Tahun 2025.....	76
Tabel 3.29 Jumlah Pelayanan Rawat Jalan di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Tahun 2025.....	76
Tabel 3.30 Jumlah Pelayanan Operasi di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Tahun 2025.....	78
Tabel 3.31 Banyaknya Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	80
Tabel 3.32 Lanjutan Tabel Banyaknya Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	81
Tabel 3.33 Banyaknya Lansia Terlantar menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	82
Tabel 3.34 Banyaknya Anak Jalanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	83
Tabel 3.35 Jumlah Panti Asuhan Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	84
Tabel 3.36 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	87
Tabel 3.37 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	90
Tabel 3.38 Tabel Lanjutan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	91
Tabel 3.39 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	92
Tabel 3.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	93
Tabel 3.41 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	96
Tabel 3.42 Jumlah Akta Kelahiran Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	97
Tabel 3.43 Jumlah Akta Perkawinan Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	98



Tabel 3.44 Jumlah Akta Perceraian Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	99
Tabel 3.45 Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	100
Tabel 3.46 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	101
Tabel 3.47 Lanjutan Tabel Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	101
Tabel 3.48 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Kesertaan Jaminan Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	104
Tabel 3.49 Jumlah Pengelola Program Keluarga Berencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	106
Tabel 3.50 Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	108
Tabel 3.51 Jumlah Desa Layak Anak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	111
Tabel 3.52 Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	117
Tabel 3.53 Jumlah Koleksi Buku dan Arsip di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	118
Tabel 4.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Padi Sawah dan Padi Gogo Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	122
Tabel 4.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	122
Tabel 4.3 Jumlah Kelembagaan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	125
Tabel 4.4 Jumlah Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	126
Tabel 4.5 Data Penyuluhan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	127
Tabel 4.6 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam) Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	134
Tabel 4.7 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Ikan Hias Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	134
Tabel 4.8 Luas Tutupan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2025	136
Tabel 4.9 Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	138
Tabel 5.1 Data Luas Daerah Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Grobogan 2025	146



Tabel 5.2 Jumlah Perumahan Menurut Kecamatan dan Jenis Perumahan di Kabupaten Grobogan 2025.....	150
Tabel 5.3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025	151
Tabel 5.4 Data Jumlah KK Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan, 2025	153
Tabel 5.5 Inventaris LPJU Kabupaten Grobogan	157
Tabel 5.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berdasarkan JBB dan Jenis 2025	159
Tabel 5.7 Bebas Uang Uji (BB).....	160
Tabel 6.1 Jumlah Usaha Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	167
Tabel 6.2 Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan dan Jenis Bangunan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	174
Tabel 6.3 Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	175
Tabel 8.1 Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg), Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD, dan Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar Yang Berlaku 2025.....	185
Tabel 8.2 Jumlah Ketersediaan Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025...	186
Tabel 8.3 Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Grobogan 2025	188
Tabel 8.4 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025	190
Tabel 8.5 Jumlah Korban Bencana Alam (KK/Jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025.....	192
Tabel 8.6 Banyaknya Korban Bencana Alam/Musibah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	194
Tabel 8.7 Jumlah Kerugian Bencana Alam (Rupiah) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2025	196
Tabel 8.8 Rekap Pelanggaran.....	198
Tabel 8.9 Jumlah Pelanggaran Ketertiban Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025	199
Tabel 9.1 Status Perkembangan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	205
Tabel 9.2 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	210
Tabel 9.3 Jumlah Ormas Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	212



Tabel 9.4 Lanjutan Tabel Jumlah Ormas Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	212
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah ASN di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	10
Gambar 2.2 Jumlah Kegiatan Rapat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025	13
Gambar 2.3 Rekapitulasi Kegiatan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	15
Gambar 2.4 Capaian Produk Hukum Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	18
Gambar 2.5 Banyaknya RUD, Krenova, LKT dan Pameran Produk Inovasi (PPI) Kabupaten Grobogan Tahun 2025	22
Gambar 2.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	26
Gambar 2.7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	33
Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Grobogan Tahun 2025	37
Gambar 3.2 Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	40
Gambar 3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	42
Gambar 3.4 Persentase Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	44
Gambar 3.5 Jumlah Sekolah Menurut Kondisi Bangunan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	55
Gambar 3.6 Persentase Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	60
Gambar 3.7 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	63
Gambar 3.8 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, dan Malaria Kabupaten Grobogan Tahun 2025	66
Gambar 3.9 Persentase Hasil Imunisasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	67
Gambar 3.10 Persentase Bayi Lahir, Bayi Lahir Mati, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	72
Gambar 3.11 Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	73
Gambar 3.12 Jumlah Ibu Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	75
Gambar 3.13 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	88
Gambar 3.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	89

Gambar 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	94
Gambar 3.16 Data Kampung KB di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	107
Gambar 3.17 Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	114
Gambar 3.18 Jumlah Perpustakaan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	116
Gambar 4.1 Luas Panen (Ha) Tanaman Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	124
Gambar 4.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	125
Gambar 4.3 Jumlah Pemilik Ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	130
Gambar 4.4 Jumlah Produksi (Kg) Daging Ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	131
Gambar 4.5 Jumlah Produksi (Kg) Daging Unggas di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	132
Gambar 4.6 Jumlah Produksi (Kg) Perikanan Budidaya dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	132
Gambar 4.7 Nilai Produksi (Rp) Perikanan Budidaya dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	133
Gambar 4.8 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	137
Gambar 4.9 Jumlah Daerah Pelayanan Sampah, Bank Sampah, dan TPS3R di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	138
Gambar 5.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Grobogan (Km) 2025	142
Gambar 5.2 Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Grobogan (Jembatan) 2025	144
Gambar 5.3 Rekap Jenis Perumahan di Kabupaten Grobogan, 2025	148
Gambar 5.4 Data Rekomendasi Perijinan Bidang Angkutan Jalan Kabupaten Grobogan Tahun 2025	156
Gambar 6.1 Jumlah Izin Berusaha yang Diterbitkan OSS per Bulan yang Berlokasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	165
Gambar 6.2 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	170
Gambar 6.3 Proporsi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	171
Gambar 6.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	172
Gambar 7.1 Jumlah Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	178
Gambar 7.2 Jumlah Hotel di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	179
Gambar 7.3 Tingkat Hunian Kamar Hotel Tahun 2025	180

Gambar 8.1 Angka Ketersedian Pangan Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	183
Gambar 8.2 Rekap Kerugian Bencana Alam	195
Gambar 9.1 Jumlah Desa Berdasarkan Status di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	204
Gambar 9.2 Jumlah Pasar Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025.....	207
Gambar 9.3 Jumlah Desa yang Memiliki BUMDes Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	208
Gambar 9.4 Jumlah Ormas Menurut Bidang di Kabupaten Grobogan Tahun 2025	211



BAB I

GAMBARAN

UMUM

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode 2025–2029

“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”



1.

Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.

2.

Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

4.

Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.

5.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Kondisi Geografis Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Luas Wilayah

2.023,85
Km²

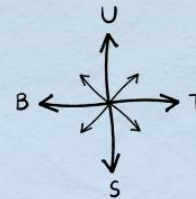
Letak Astronomis

110° 15' BT – 111° 25' BT
dan
7° LS – 7°30' LS

Batas Wilayah

Kab Demak, Kudus,
Pati, dan Blora

Kab Semarang
dan Demak



Kab Bolra

Kab Semarang, Boyolali,
Sragen, dan Ngawi
Provinsi Jawa Timur



Kecamatan Tanggunharjo
Memiliki Wilayah Terkecil

50,13
Km²

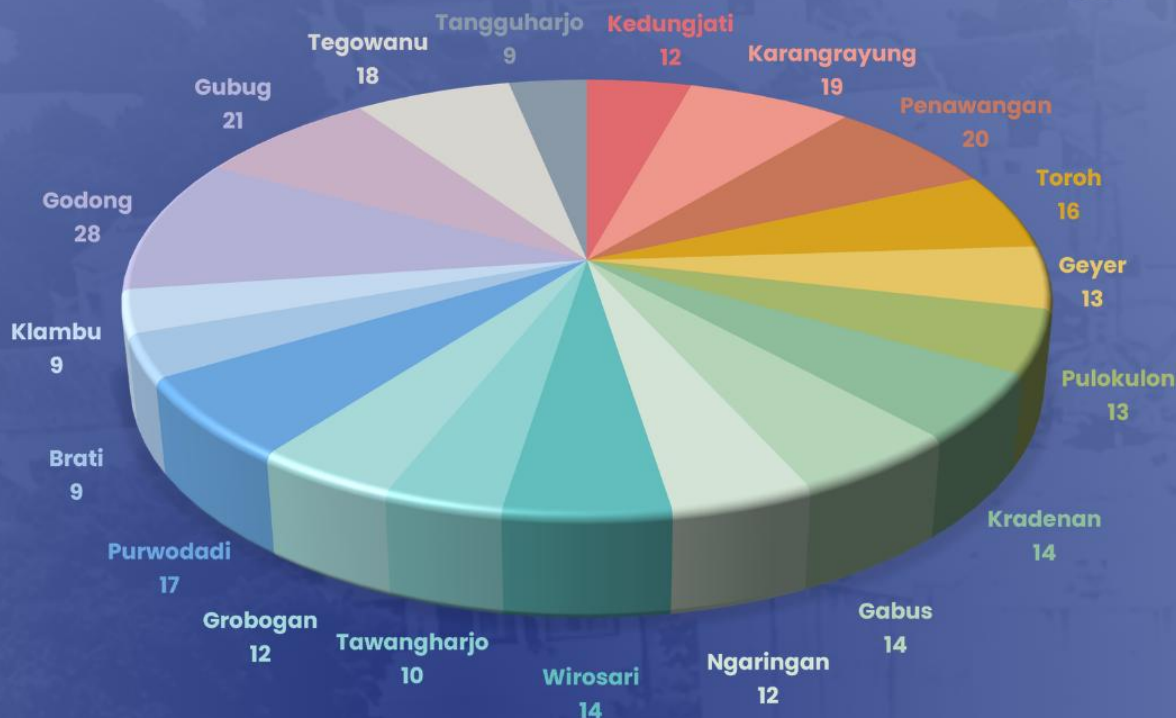
Kecamatan Geyer
Memiliki Wilayah Terluas

205,14
Km²

Statistik Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan



Jumlah RT dan RW Berdasarkan Kecamatan



Sumber : RPJMD Kabupaten Grobogan 2025-2029



BAB II

TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

Data Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

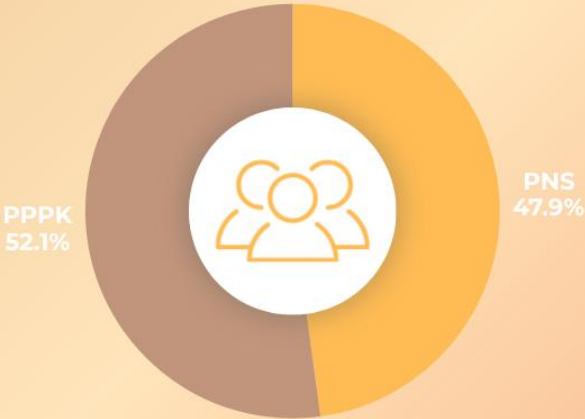


Jumlah ASN di Pemerintahan Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis

ASN Kabupaten Grobogan 2025 dalam Angka:

- **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak **6.001**
- **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)** sebanyak **6.540**

didukung oleh 12.541 aparatur siap bersama-sama menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan publik yang lebih optimal.



Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan

No	Jenis Golongan	Tahun 2025
1	I/a	0
2	I/a	0
3	I/a	6
4	I/a	12
5	I/a	18
6	I/a	32
7	I/a	255
8	I/a	346
9	I/a	811
10	I/a	1039
11	III/c	1231
12	III/d	952
13	IV/a	492
14	IV/b	484
15	IV/c	321
16	IV/d	2
17	IV/e	0



Jumlah PPPK di Pemerintah Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan

No	Jenis Golongan	Tahun 2025
1	Golongan II	0
2	Golongan III	0
3	Golongan IV	0
4	Golongan V	92
5	Golongan VI	0
6	Golongan VII	1.106
7	Golongan VII	0
8	Golongan IX	5.087
9	Golongan X	255
10	Golongan XI	0

2.1 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Sumber daya manusia merupakan aset strategis yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi kepegawaian perlu disajikan sebagai gambaran kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Salah satu gambaran kondisi kepegawaian tersebut dapat dilihat dari jumlah pegawai yang tersebar pada masing-masing perangkat daerah. Sebaran pegawai pada masing-masing perangkat daerah dapat memberikan gambaran mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Informasi mengenai jumlah pegawai Berdasarkan perangkat daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi pemerataan sumber daya manusia, mengidentifikasi kebutuhan formasi pegawai, serta merumuskan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun data terkait jumlah pegawai berdasarkan Perangkat Daerah disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah ASN di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025		
		PNS	PPPK	Total
1	Sekretariat Daerah	108	13	121
2	Sekretariat DPRD	26	7	33
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	39	6	45
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	21	3	24
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	5	27
6	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	60	9	69
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30	7	37
8	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	26	6	32
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	45	16	61
10	Dinas Kesehatan	1.276	1.313	2.589



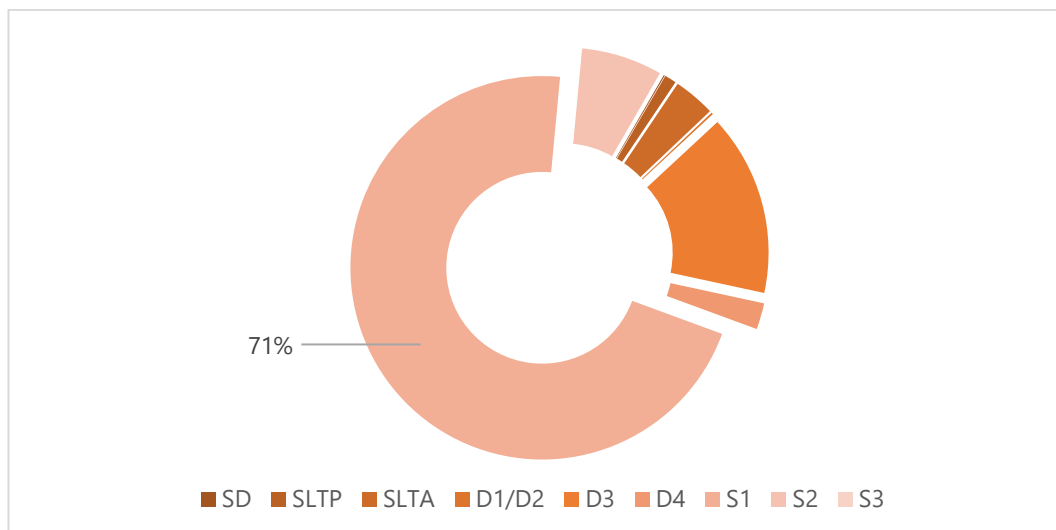
No	Perangkat Daerah	Tahun 2025		
		PNS	PPPK	Total
11	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	23	8	31
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	27	3	30
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	16	9	25
14	Dinas Lingkungan Hidup	34	10	44
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	109	26	135
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	34	7	41
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB	23	5	28
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	28	4	32
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26	2	28
20	Dinas Pendidikan	3.075	4.657	7.732
21	Dinas Perhubungan	42	8	50
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	46	13	59
23	Dinas Pertanian	47	82	129
24	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	21	11	32
25	Dinas Peternakan Dan Perikanan	40	31	71
26	Dinas Sosial	18	5	23
27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25	9	34
28	Inspektorat	50	2	52
29	Kecamatan Brati	12	2	14
30	Kecamatan Gabus	11	2	13
31	Kecamatan Geyer	17	2	19
32	Kecamatan Godong	16	2	18
33	Kecamatan Grobogan	17	2	19
34	Kecamatan Gubug	15	2	17
35	Kecamatan Karangrayung	14	2	16
36	Kecamatan Kedungjati	15	2	17
37	Kecamatan Klambu	15	2	17
38	Kecamatan Kradenan	12	2	14
39	Kecamatan Ngaringan	11	2	13
40	Kecamatan Penawangan	14	2	16
41	Kecamatan Pulokulon	10	2	12
42	Kecamatan Purwodadi	41	2	43
43	Kecamatan Tanggunharjo	12	1	13
44	Kecamatan Tawangharjo	16	2	18
45	Kecamatan Tegowanu	19	2	21
46	Kecamatan Toroh	14	2	16
47	Kecamatan Wirosari	28	1	29

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025		
		PNS	PPPK	Total
48	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	323	191	514
49	Satuan Polisi Pamong Praja	32	36	68
Total		6.001	6.540	12.541

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Grobogan

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah dengan jumlah pegawai terbanyak dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya yaitu sebanyak 7.732 dengan rincian 3.075 pegawai dengan status PNS dan 4.657 dengan status PPPK. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Tingginya jumlah pegawai pada perangkat daerah tersebut didukung oleh keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tersebar di berbagai satuan pendidikan di wilayah daerah.

Perbedaan jumlah pegawai antar perangkat daerah menunjukkan variasi kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh cakupan layanan perangkat daerah, beban kerja, maupun karakteristik tugas dan fungsi yang dijalankan oleh perangkat daerah. Selain ditinjau dari persebarannya pada setiap perangkat daerah, kondisi kepegawaian juga dapat dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun data terkait jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Jumlah ASN di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di Kabupaten Grobogan memiliki kualifikasi pendidikan S1 yaitu sebesar 71 persen atau sebanyak 8.890 orang. Tingginya pegawai dengan tingkat pendidikan S1 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai di Kabupaten Grobogan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, banyaknya pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup baik untuk mendukung inovasi pelayanan, pengembangan kebijakan, serta pencapaian target pembangunan.

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2024–2029



Keterwakilan perempuan masih berada di angka 20%

Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan, sebanyak 40 anggota merupakan laki-laki dan 10 anggota merupakan perempuan.



Komposisi Anggota Berdasarkan Partai



5 dari 9 partai

belum memiliki anggota perempuan

60% anggota perempuan

berasal dari PDI Perjuangan

50% anggota perempuan

tergabung dalam Komisi D

Komposisi Anggota Berdasarkan Komisi-komisi

Komisi D

Bidang Kesejahteraan Rakyat



28,3%

Komisi A

Bidang Pemerintahan



21,7%

Komisi C

Bidang Pembangunan



26,1%

Komisi B

Bidang Ekonomi



23,9%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

2.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD didukung oleh berbagai alat kelengkapan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alat kelengkapan DPRD berperan dalam membantu pelaksanaan tugas DPRD secara lebih efektif dan terstruktur sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun alat kelengkapan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disajikan seperti pada tabel berikut:

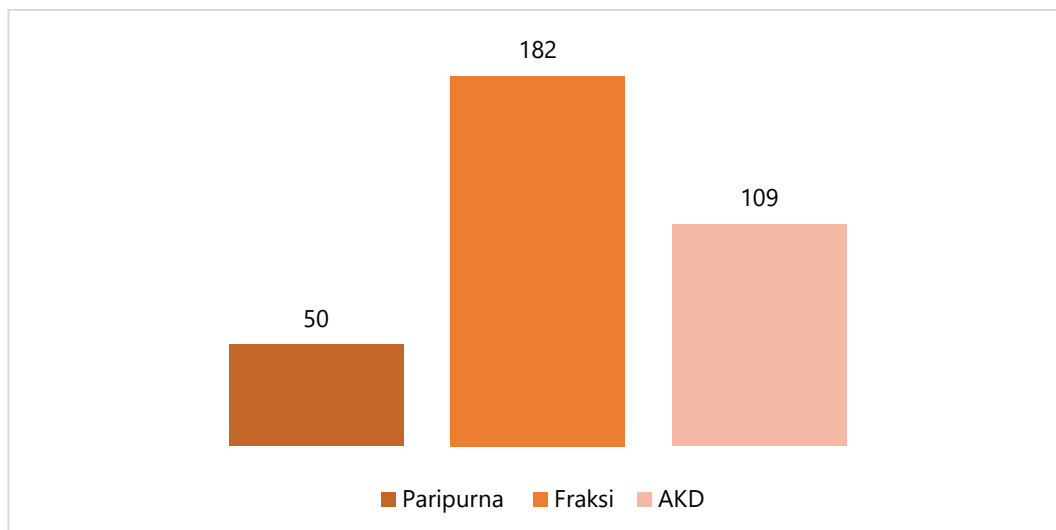
Tabel 2.2 Banyaknya Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah	Satuan
1	Pimpinan DPRD	4	Orang
2	Badan Musyawarah	25	Orang
3	Komisi	4	Komisi
4	Bapemperda	12	Orang
5	Badan Anggaran	25	Orang
6	Badan Kehormatan	5	Orang
7	Alat Kelengkapan Lain yang Diperlukan dan Dibentuk Berdasarkan Rapat Paripurna (Panitia Khusus)	7	AKD

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Alat Kelengkapan DPRD atau AKD merupakan pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional yang meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Secara lebih rinci, alat kelengkapan DPRD di Kabupaten Grobogan terdiri dari 4 orang pimpinan DPRD, 25 orang badan musyawarah, 4 komisi, 12 orang bapemperda, 25 badan anggaran, 5 badan kehormatan, dan 7 alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, alat kelengkapan DPRD melaksanakan berbagai kegiatan yang salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat. Rapat menjadi sarana utama bagi DPRD untuk melakukan pengambilan keputusan, koordinasi, maupun pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berikut disajikan data terkait jumlah kegiatan rapat DPRD yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan sepanjang tahun 2025.



Gambar 2.2 Jumlah Kegiatan Rapat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Sepanjang tahun 2025, terdapat tiga jenis rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Grobogan diantaranya, rapat paripurna sebanyak 50 kegiatan, rapat fraksi sebanyak 182 kegiatan, dan rapat AKD sebanyak 109 kegiatan. Tingginya rapat fraksi mencerminkan pentingnya proses komunikasi dan koordinasi internal dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD. Berbagai isu strategis, program pembangunan, maupun rancangan kebijakan daerah umumnya dibahas terlebih dahulu dalam rapat fraksi untuk memperoleh kesamaan pandangan antar anggota. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam forum DPRD yang lebih formal, termasuk rapat paripurna. Dengan demikian, rapat fraksi berperan sebagai tahapan awal dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Secara lebih rinci, berikut merupakan rekapitulasi rapat paripurna, rapat fraksi, dan rapat AKD yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan sepanjang tahun 2025.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Rapat Paripurna, Rapat Fraksi, Rapat AKD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

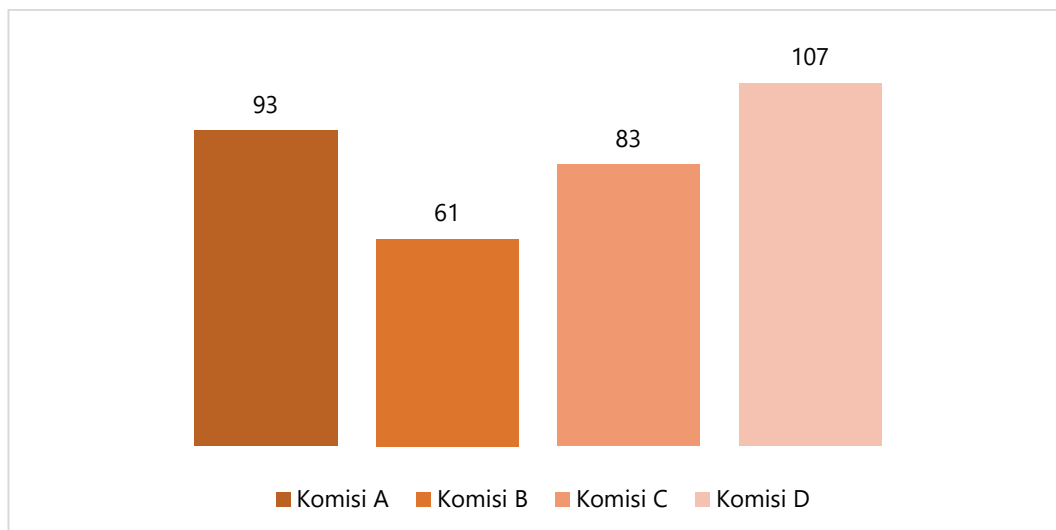
No	Jenis Rapat	Masa Sidang			Jumlah
		I	II	III	
1	Rapat Paripurna	10	19	21	50
	Jumlah	10	19	21	50
2	Rapat Fraksi				
	PDI Perjuangan	6	10	10	26
	PKB	6	10	10	26
	Gerindra	6	10	10	26

No	Jenis Rapat	Masa Sidang			Jumlah
		I	II	III	
	Partai Hanura	6	10	10	26
	PPP	6	10	10	26
	Karya Demokrat	6	10	10	26
	Keadilan Nasional	6	10	10	26
	Jumlah	42	70	70	182
3	Rapat AKD				
	Pimpinan	3	5	2	10
	Badan Anggaran	0	15	7	22
	Badan Musyawarah	7	5	7	19
	Badan Pembentukan Perda	1	3	4	8
	Badan Kehormatan	4	4	4	12
	Panitia Khusus	6	9	13	28
	Konsultasi	4	2	4	10
	Gabungan Komisi	0	0	0	0
	Jumlah	25	43	41	109

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan rapat DPRD selama satu tahun terbagi menjadi tiga masa sidang, diantaranya masa sidang I sebanyak 77 kegiatan, masa sidang II sebanyak 132 kegiatan, dan masa sidang III sebanyak 132 kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas rapat DPRD relatif meningkat pada masa sidang II yang mengindikasikan adanya agenda pembahasan yang lebih intensif pada periode tersebut.

Selain kegiatan rapat yang dilaksanakan pada berbagai masa sidang, kinerja DPRD juga dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan oleh komisi DPRD. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, komisi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi DPRD di Kabupaten Grobogan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Rekapitulasi Kegiatan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Secara umum, DPRD terdiri atas empat komisi yaitu, komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Di Kabupaten Grobogan Komisi A membidangi urusan bidang pemerintahan, komisi B membidangi urusan bidang ekonomi, komisi C membidangi urusan bidang pembangunan, dan komisi D membidangi urusan bidang kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data di atas, komisi D tercatat sebagai komisi dengan jumlah rapat terbanyak dibandingkan dengan komisi yang lain. Hal tersebut mencerminkan bahwa bidang kesejahteraan masyarakat memiliki dinamika yang cukup tinggi sehingga memerlukan koordinasi dan pembahasan yang lebih intensif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dibandingkan dengan bidang yang lain. Secara lebih rinci berikut merupakan rekapitulasi kegiatan komisi DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2025.

Tabel 2.4 Kegiatan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Masa Sidang	Komisi	Rapat Komisi	Rapat Kerja	Rapat Dengar Pendapat Umum	Kunjungan Kerja		Jumlah
					Dalam Daerah	Luar Daerah	
I	Komisi A	0	11	0	0	16	27
	Komisi B	0	5	0	0	16	21
	Komisi C	0	9	0	0	16	25
	Komisi D	0	14	0	2	16	32
II	Komisi A	0	13	0	8	12	33



Masa Sidang	Komisi	Rapat Komisi	Rapat Kerja	Rapat Dengar Pendapat Umum	Kunjungan Kerja		Jumlah
					Dalam Daerah	Luar Daerah	
	Komisi B	0	5	0	0	12	17
	Komisi C	0	13	0	6	12	31
	Komisi D	0	16	0	13	12	41
III	Komisi A	0	12	0	9	12	33
	Komisi B	0	6	0	5	12	23
	Komisi C	0	11	0	4	12	27
	Komisi D	0	13	0	9	12	34
Jumlah		0	128	0	56	160	344

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Indeks Reformasi Birokrasi

88,78 Predikat A

Menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Grobogan telah berjalan **sangat baik**, dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

Nilai Kematangan Organisasi

44,4 Kategori Tinggi

Menunjukkan organisasi perangkat daerah telah memiliki **tingkat kematangan yang tinggi** dalam pengelolaan organisasi sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Nilai SAKIP

66,48 Predikat B

Menunjukkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan **baik**, didukung oleh penerapan manajemen kinerja yang cukup efektif.

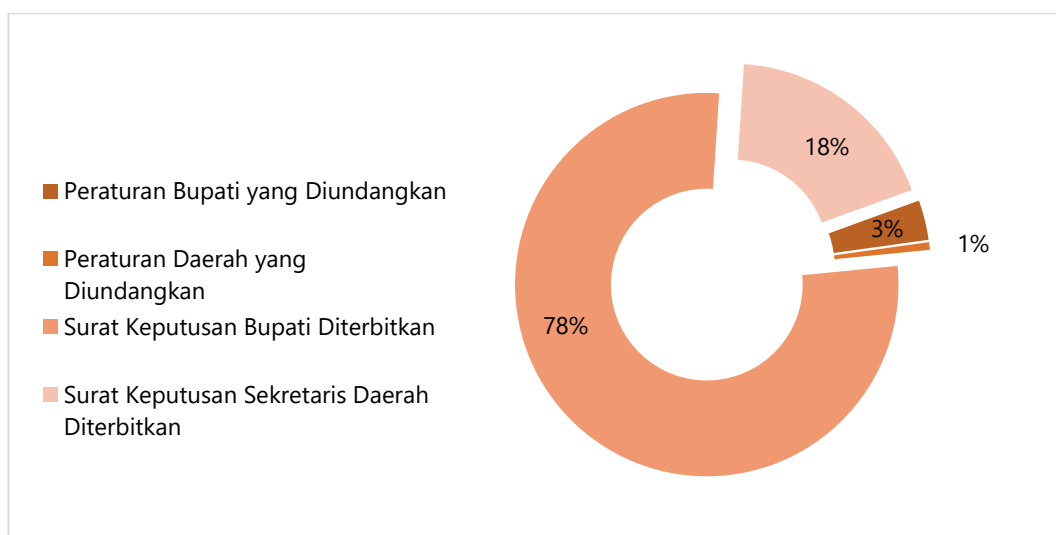
Indeks Reformasi Hukum

99,4 Predikat Istimewa

Menunjukkan pelaksanaan reformasi hukum telah berhasil dilaksanakan dengan **sangat baik**, tercermin dari tingginya kualitas tata kelola regulasi dan kepatuhan hukum.

2.3 Pemerintah Daerah

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan produk hukum yang berkualitas tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun capaian produk hukum di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.4 Capaian Produk Hukum Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan, berbagai produk hukum telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Capaian produk hukum tersebut meliputi Peraturan Daerah yang diundangkan, Peraturan Bupati yang diundangkan, Surat Keputusan Bupati yang diterbitkan, serta Surat Keputusan Sekretaris Daerah yang diterbitkan. Dari berbagai macam produk hukum tersebut, Surat Keputusan Bupati merupakan jenis produk hukum yang paling banyak diterbitkan sepanjang tahun 2025 yaitu sebesar 78 persen atau sebanyak 1.087 produk. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan pemerintah



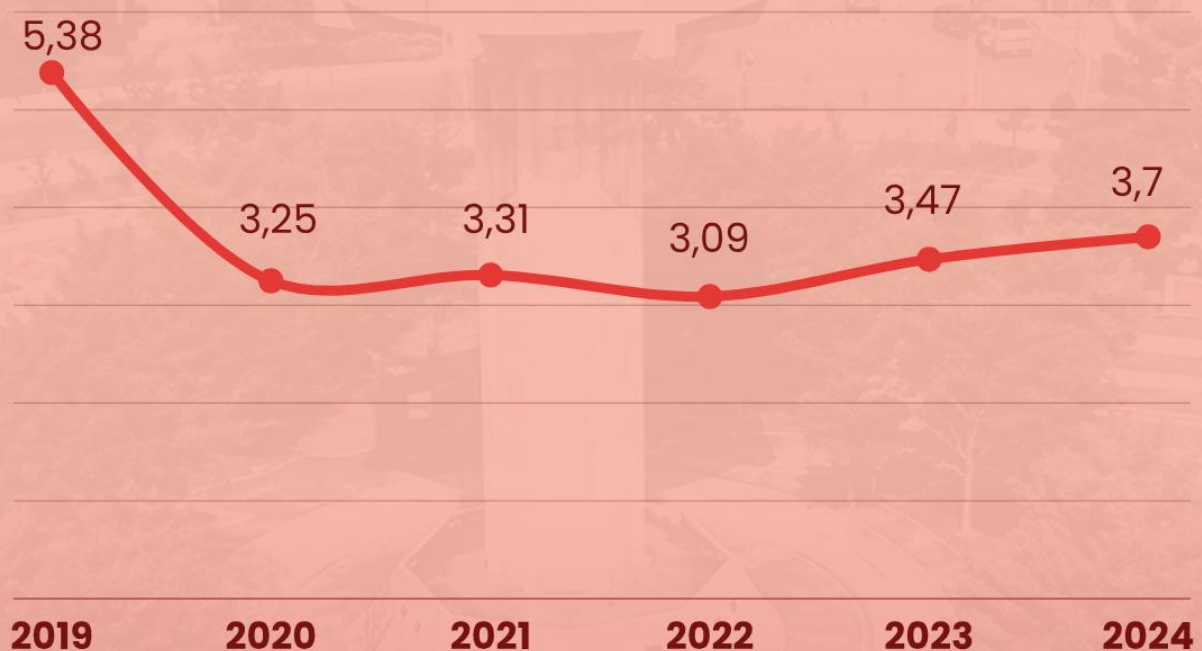
daerah terhadap keputusan yang bersifat administratif dan operasional sebagai dasar pelaksanaan berbagai program, kegiatan, penugasan, serta kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025



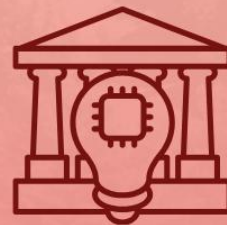
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Kabupaten Grobogan berhasil **mempertahankan kategori Tinggi** selama lima tahun berturut-turut (2020-2024). Pada tahun 2024, indeks meningkat menjadi 3,7 yang menunjukkan bahwa daya saing daerah yang semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2019-2024



31

Jumlah Inovasi
Masyarakat



203

Jumlah Inovasi
Perangkat Daerah

2.4 Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah, terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Di samping itu, perencanaan pembangunan juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan.

Untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara terarah dan berkesinambungan, diperlukan dokumen perencanaan daerah yang lengkap dan berkualitas. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 disajikan seperti pada tabel berikut:

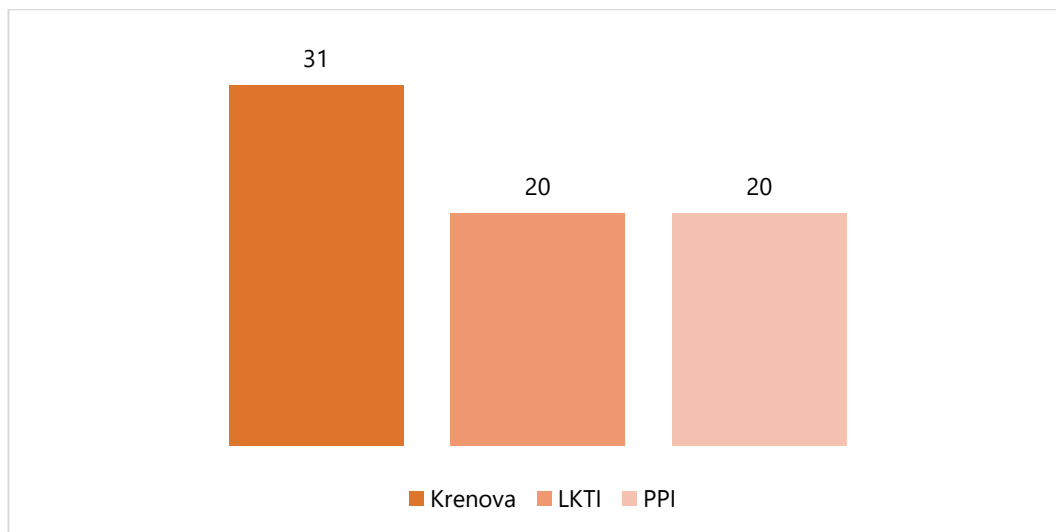
Tabel 2.5 Perkembangan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah di Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Elemen Data	Satuan	2025
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Grobogan

Ketersediaan dokumen perencanaan daerah di Kabupaten Grobogan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menunjukkan capaian yang optimal pada tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola perencanaan pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kualitas perencanaan tersebut semakin diperkuat dengan adanya data-data terkait inovasi daerah, seperti Riset Unggulan Daerah (RUD), Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova), Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), dan Pameran Produk Inovasi (PPI). Ketersediaan data tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membangun perencanaan yang tidak hanya berbasis kebutuhan pembangunan, tetapi juga berbasis inovasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun data terkait banyaknya RUD, Krenova, LKTI, dan PPI di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Banyaknya RUD, Krenova, LKTI dan Pameran Produk Inovasi (PPI) Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2025, Krenova memiliki kontribusi inovasi paling besar dibandingkan dengan kategori yang lain yaitu sebanyak 31 inovasi. Banyaknya jumlah Krenova tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Grobogan cukup tinggi dalam merespon berbagai permasalahan dan kebutuhan di lingkungan sekitarnya melalui solusi-solusi inovatif. Namun demikian, sepanjang tahun 2025 belum ditemukan adanya Riset Unggulan Daerah (RUD) di Kabupaten Grobogan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penelitian yang secara khusus ditetapkan sebagai riset unggulan daerah masih belum dilaksanakan. Oleh karena itu,



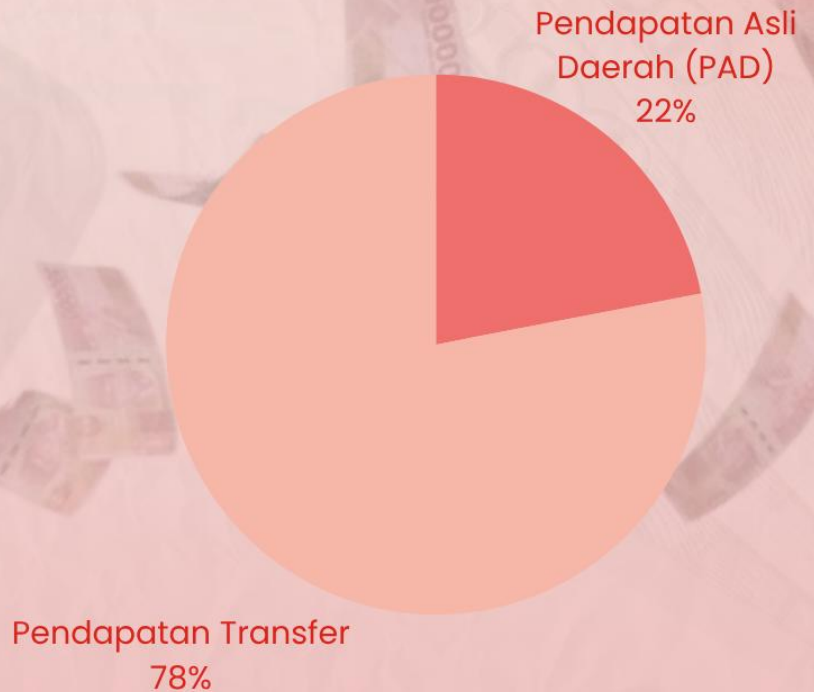
diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan riset unggulan daerah agar hasil penelitian yang relevan dengan potensi maupun permasalahan daerah dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah

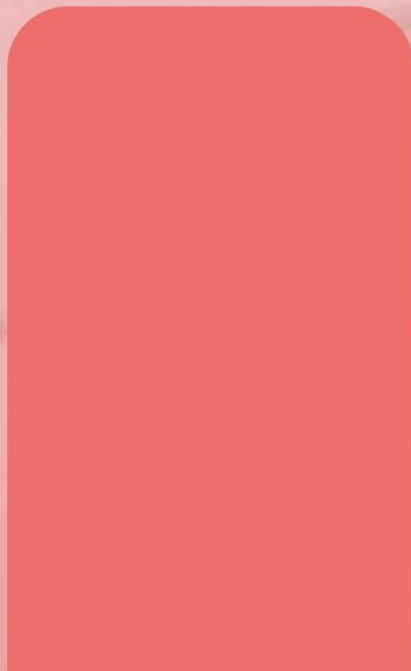


Total Pendapatan
Daerah
Rp3.058,61
Juta



Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah

Rp115.619.287.899



Penerimaan Pembiayaan

Rp4.950.000.000

Pengeluaran Pembiayaan

2.5 Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien akan menentukan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah pajak daerah, sehingga ketersediaan data jumlah wajib pajak menurut jenis pajak menjadi informasi yang penting untuk menggambarkan potensi penerimaan daerah, memperluas basis pajak, serta mendukung perumusan kebijakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun jumlah wajib pajak menurut jenis pajak di Kabupaten Grobogan tahun 2025 disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Wajib Pajak Menurut Jenis Pajak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

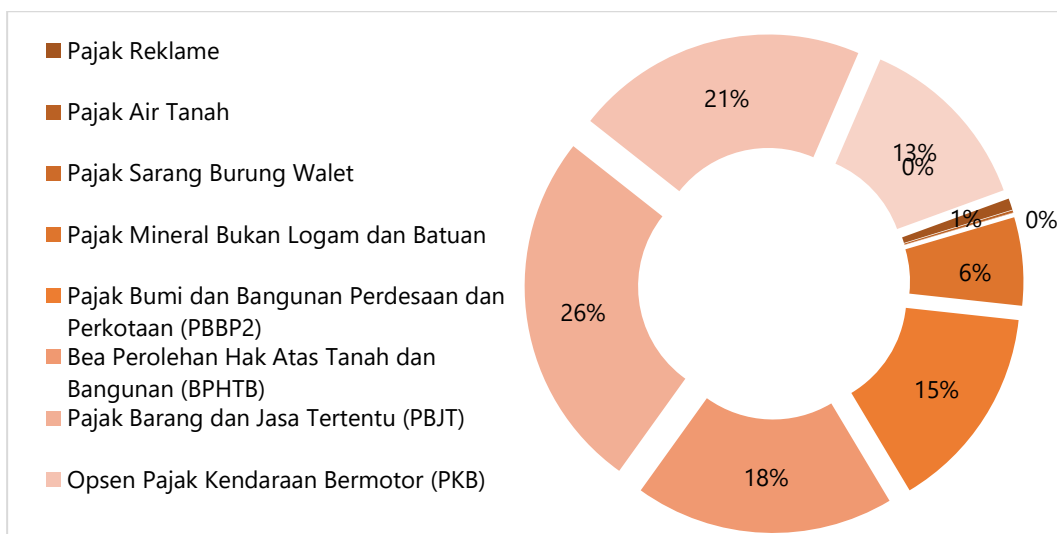
Pajak	Jumlah Wajib Pajak
Pajak Reklame	942
Pajak Air Tanah	39
Pajak Sarang Burung Walet	52
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	914.192
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.021
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.069
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	390.079
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30.689
Total	1.347.088

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) tercatat sebagai jenis pajak dengan jumlah wajib pajak terbanyak di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 914.192 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa objek pajak berupa tanah dan bangunan memiliki cakupan luas di masyarakat sehingga menjadi salah satu penerimaan daerah yang cukup besar dan potensial untuk dioptimalkan. Sementara itu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki jumlah wajib pajak paling sedikit di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelaku usaha.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan karakteristik perekonomian di Kabupaten Grobogan yang didominasi oleh sektor pertanian yang menyebabkan jumlah pelaku usaha di sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan relatif terbatas.

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) memiliki jumlah wajib pajak terbanyak dibandingkan dengan pajak yang lain, besarnya realisasi penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh jumlah wajib pajak melainkan juga oleh nilai objek pajak, tingkat kepatuhan pembayaran, serta efektivitas pemungutan pajak.



Gambar 2.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan, sepanjang tahun 2025, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Grobogan dengan kontribusi sebesar 26 persen. Tingginya realisasi PBJT mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat di Kabupaten Grobogan cukup berkembang. Meskipun jumlah wajib pajaknya tidak sebanyak PBBP2, nilai transaksi yang menjadi objek PBJT mampu menghasilkan penerimaan yang lebih besar sehingga menjadikan jenis pajak ini sebagai kontributor utama pendapatan pajak daerah.

Meski tidak menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Grobogan, PBBP2 tetap menjadi salah satu kontributor utama terhadap penerimaan daerah dengan kontribusi sebesar 15 persen. Besarnya kontribusi

tersebut didukung oleh luasnya basis objek pajak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga menjadikan PBB-P2 sebagai sumber penerimaan yang relatif stabil. Selain itu, besarnya kontribusi tersebut juga didukung oleh efektivitas pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. Hal tersebut didukung oleh capaian penerimaan pajak pada tahun 2025 yaitu sebesar 96,35 persen terhadap total ketetapan pajak yang mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas upaya penagihan dan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara lebih rinci, berikut pemasukan PBBP2 di Kabupaten Grobogan berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.7 Pemasukan PBB-P2 Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah SPPT (Rp)	Ketetapan (Rp)	Penerimaan (Rp)	(%)
33.15.01	Kedungjati	24.478	649.292.105	649.292.105	100
33.15.02	Karangrayung	61.444	2.933.564.677	2.773.314.127	94,54
33.15.03	Penawangan	43.584	2.494.634.263	2.447.084.969	98,09
33.15.04	Toroh	75.309	3.816.393.181	3.816.393.181	100
33.15.05	Geyer	45.346	1.464.463.208	1.464.463.208	100
33.15.06	Pulokulon	65.744	3.431.933.870	3.386.919.724	98,69
33.15.07	Kradenan	53.297	2.778.127.051	2.623.313.108	94,43
33.15.08	Gabus	53.634	2.764.331.933	2.516.895.456	91,05
33.15.09	Ngaringan	49.741	2.184.931.047	2.173.632.085	99,48
33.15.10	Wirosari	56.206	3.078.969.665	2.916.714.198	94,73
33.15.11	Tawangharjo	34.474	1.671.927.590	1.649.191.336	98,64
33.15.12	Grobogan	51.703	2.049.843.911	2.047.475.239	99,88
33.15.13	Purwodadi	65.474	4.990.294.293	4.210.542.441	84,37
33.15.14	Brati	34.444	1.557.012.637	1.557.012.637	100
33.15.15	Klambu	31.148	1.409.598.323	1.405.295.723	99,69
33.15.16	Godong	44.356	3.800.141.232	3.788.268.676	99,69
33.15.17	Gubug	51.373	2.692.387.218	2.692.387.218	100
33.15.18	Tegowanu	41.135	2.390.213.267	2.390.213.267	100
33.15.19	Tanggunharjo	29.590	1.420.196.511	1.335.490.823	94,04
Jumlah		912.480	47.578.255.982	4.990.294.293	96,35

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari data di atas, Kecamatan Purwodadi menjadi kecamatan dengan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PBBP2 di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025. Hal tersebut didukung oleh kondisi Purwodadi yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi daerah yang ditandai dengan padatnya

kawasan permukiman serta tingginya aktivitas perdagangan, jasa, perkantoran, serta fasilitas publik. Aktivitas pembangunan yang lebih intensif dibandingkan kecamatan lainnya menyebabkan jumlah dan nilai objek pajak berupa tanah dan bangunan di Kecamatan Purwodadi relatif lebih tinggi, sehingga berkontribusi terhadap besarnya penerimaan PBB-P2 yang berhasil dihimpun.

Meskipun beberapa jenis pajak mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah, tidak semua jenis pajak memiliki peran yang sama dalam struktur penerimaan pajak, salah satunya adalah pajak sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak dengan realisasi penerimaan paling rendah dibandingkan dengan jenis pajak yang lain yaitu sebesar 0,02 persen. Rendahnya realisasi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas usaha sarang burung walet di Kabupaten Grobogan relatif terbatas baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun nilai produksi yang dihasilkan sehingga menyebabkan penerimaan pajak daerah masih tergolong kecil.

Pendapatan daerah yang optimal merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan. Namun demikian, kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang berhasil dihimpun, melainkan juga oleh pengelolaan pembiayaan daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Di Kabupaten Grobogan, capaian penerimaan pembiayaan menunjukkan capaian yang cukup baik yaitu sebesar 99,94 persen dan pengeluaran pembiayaan sebesar 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan kebutuhan pembiayaan serta melaksanakan penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam APBD sehingga pengelolaan pembiayaan di Kabupaten Grobogan sudah berjalan cukup baik.

Tabel 2.8 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
PEMBIAYAAN DAERAH	110.733.430.714	110.669.287.899	99,94
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.683.430.714	115.619.287.899	99,94



Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.683.430.714	115.619.287.899	99,94
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000	4.950.000.000	100,00
Penyertaan Modal Daerah	4.950.000.000	4.950.000.000,	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T)
Skor 2,974 | Level 2

Menunjukkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi telah **mencapai Level 2 (Berkembang)**, yang mencerminkan proses pengendalian intern mulai **diterapkan secara lebih terstruktur**.

Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Skor 2,905 | Level 2

Menunjukkan penerapan manajemen risiko telah **mencapai level 2 (Berkembang)**, dengan proses identifikasi dan pengelolaan risiko yang mulai terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)
Skor 3,000 | Level 3

Menunjukkan upaya pencegahan korupsi telah **mencapai Level 3 (Terdefinisi)**, dengan mekanisme pengendalian dan pencegahan yang **semakin terstruktur dan terdokumentasi**.

2.6 Pengawasan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan fungsi pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan pengawasan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah dan desa berjalan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemerintah desa yang bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan program, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, telah disusun daftar objek pemeriksaan pemerintah desa berdasarkan wilayah kecamatan sebagai dasar penentuan sasaran pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Daftar Objek Pemeriksaan Pemerintah Desa Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	2025
33.15.01	Kedungjati	1
33.15.02	Karangrayung	4
33.15.03	Penawangan	1
33.15.04	Toroh	0
33.15.05	Geyer	1
33.15.06	Pulokulon	2
33.15.07	Kradenan	0
33.15.08	Gabus	2
33.15.09	Ngaringan	1
33.15.10	Wirosari	0
33.15.11	Tawangharjo	1
33.15.12	Grobogan	0
33.15.13	Purwodadi	1
33.15.14	Brati	1
33.15.15	Klambu	2
33.15.16	Godong	4
33.15.17	Gubug	5
33.15.18	Tegowanu	2
33.15.19	Tanggunharjo	0
Jumlah		28

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan Gubug merupakan kecamatan dengan jumlah pemeriksaan pemerintah desa paling banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan di wilayah tersebut memiliki cakupan yang lebih luas sehingga memerlukan perhatian dan dukungan sumber daya pengawasan yang lebih banyak untuk memastikan seluruh objek pemeriksaan dapat diawasi secara menyeluruh.

Selain pemeriksaan terhadap pemerintah desa, pelaksanaan urusan pengawasan juga diwujudkan melalui audit yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan audit tersebut berperan penting dalam menilai kepatuhan, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun audit yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Audit yang Dilaksanakan dan Difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

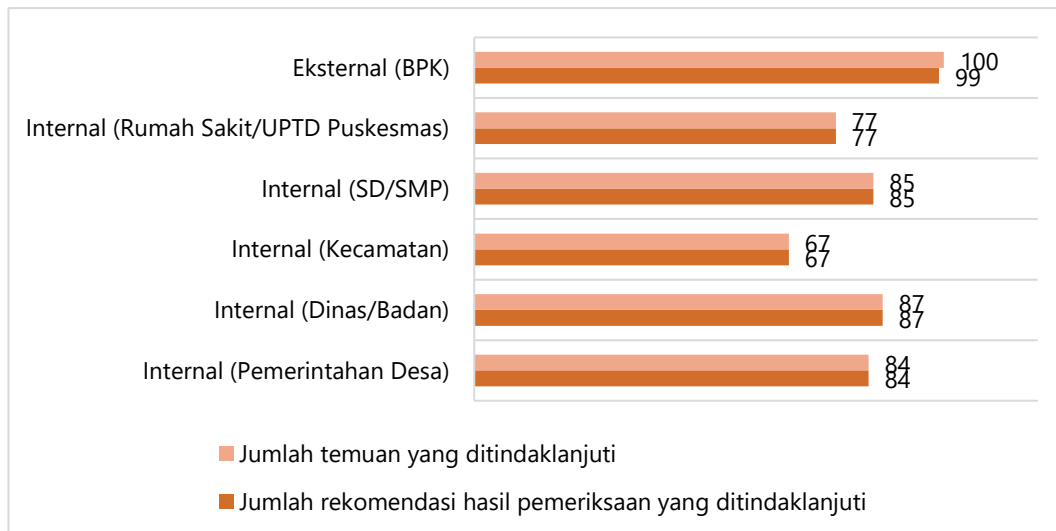
Indikator	2025
Persentase jumlah audit Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan	100
Persentase jumlah audit kinerja yang telah dilaksanakan	100
Persentase jumlah audit tujuan tertentu yang telah dilaksanakan	100
Persentase jumlah audit kasus/investigatif yang telah dilaksanakan	100
Persentase jumlah audit Dana BOS SD/SMP yang telah dilaksanakan	100
Persentase jumlah audit Ketaatan OPD yang telah dilaksanakan	100

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan audit yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Inspektorat pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh kegiatan audit yang telah direncanakan mendapatkan realisasi sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Grobogan sudah optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Namun demikian, keberhasilan audit tidak hanya diukur dari tercapainya target pelaksanaan kegiatan tetapi juga diukur dari sejauh mana rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti oleh pihak yang diperiksa. Tindak lanjut tersebut merupakan

bentuk komitmen perangkat daerah dan objek pemeriksaan dalam melaksanakan rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data yang tersaji pada grafik di atas menunjukkan bahwa, tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Grobogan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Terbukti seluruh temuan hasil pemeriksaan dari pihak eksternal yaitu BPK menunjukkan capaian yang optimal yaitu sebesar 100 persen yang menunjukkan bahwa semua temuan hasil pemeriksaan dari BPK telah ditindaklanjuti secara penuh. Sementara itu, persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti mencapai 99 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti, meskipun masih ada sebagian kecil rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses penyelesaian.

Meskipun tindak lanjut hasil temuan menunjukkan capaian yang sudah optimal, namun hasil pemeriksaan internal menunjukkan masih adanya temuan yang belum ditindaklanjuti secara optimal pada beberapa objek pemeriksaan seperti Rumah Sakit/UPTD Puskesmas, SD, SMP, Kecamatan, Dinas/Badan,



Kecamatan serta Pemerintah Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan internal masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, monitoring, dan komitmen dari masing-masing perangkat daerah serta unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tuntas.



BAB III

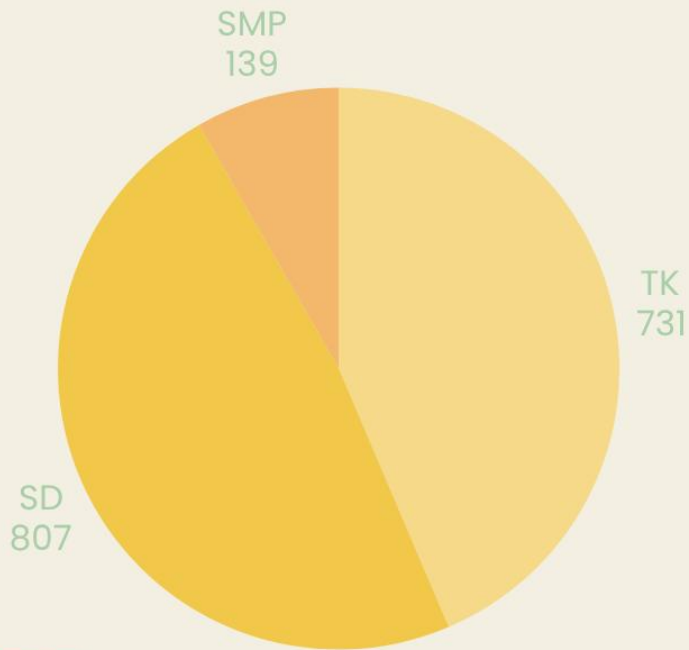
SOSIAL DAN

KEPENDUDUKAN

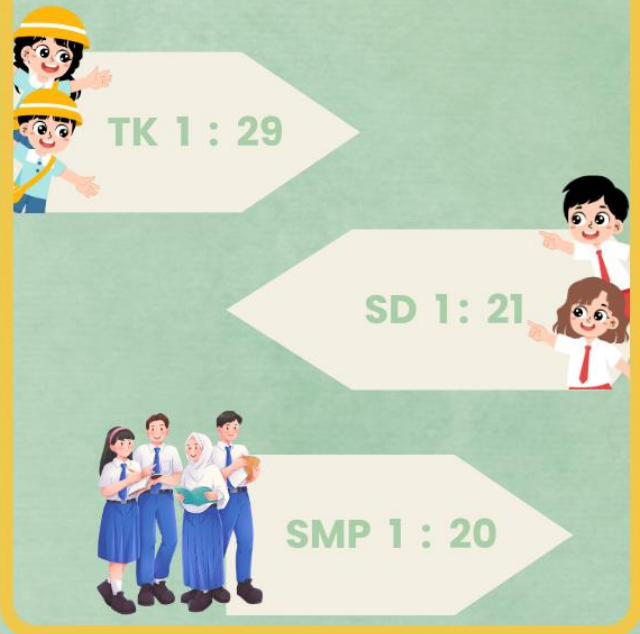
Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kabupaten Grobogan memiliki 1.677 satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP dengan total 8.453 tenaga pendidik dan 175.579 peserta didik.

Jumlah Sekolah TK, SD, dan SMP

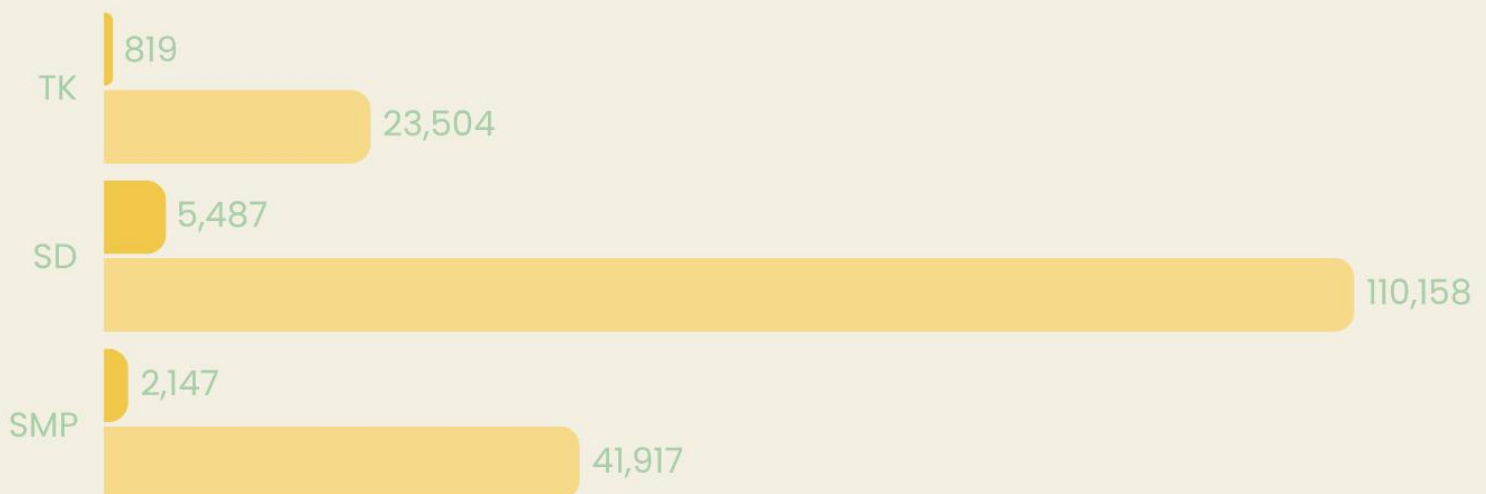


Rasio Guru Terhadap Siswa



Jumlah Guru dan Siswa TK, SD, dan SMP

● Guru ● Siswa

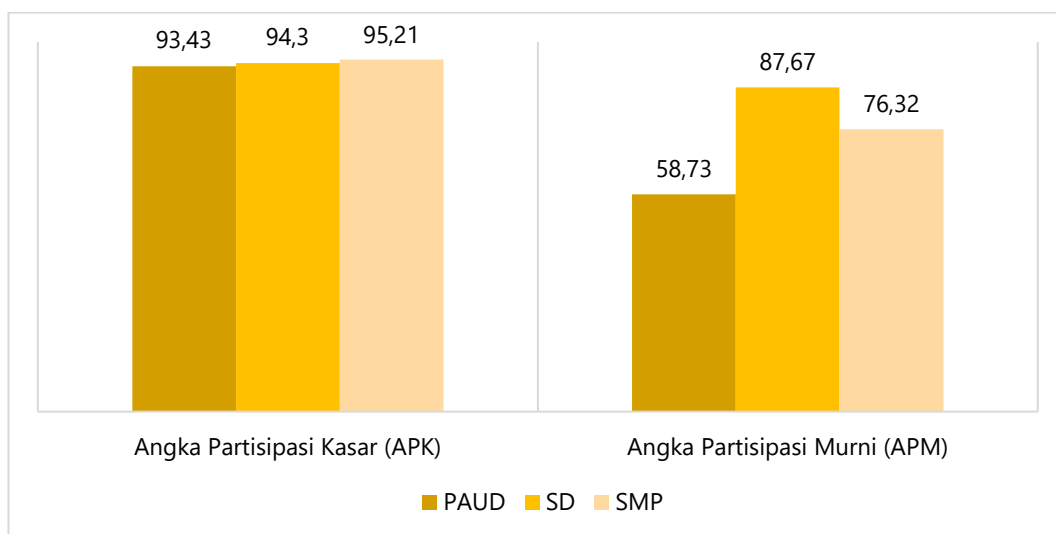


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

3.1 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat partisipasi penduduk dalam mengakses layanan pendidikan. Untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam mengakses layanan pendidikan digunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk pada berbagai jenjang pendidikan.

Secara garis besar, capaian APK dan APM di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Grobogan telah memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan. Secara lebih rinci, data terkait APK dan APM berdasarkan jenjang pendidikan disajikan seperti pada tabel berikut:



Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan secara keseluruhan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. Berdasarkan grafik

yang disajikan, capaian Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM). Selisih antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasikan bahwa masih ditemukan siswa yang masuk sekolah lebih awal, terlambat masuk sekolah, atau masih bersekolah di SD meskipun usianya sudah melewati usia resmi jenjang tersebut.

Semakin kecil selisih antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan semakin sedikit penduduk yang bersekolah tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Sebaliknya, semakin besar selisih antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Secara lebih rinci, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Grobogan berdasarkan jenjang pendidikan disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	PAUD	SD	SMP
1	33.15.01	Kedungjati	117,15	91,85	77,22
2	33.15.02	Karangrayung	85,06	91,54	79,95
3	33.15.03	Penawangan	95,84	90,07	79,19
4	33.15.04	Toroh	83,08	87,58	62,01
5	33.15.05	Geyer	74,08	89,69	69,39
6	33.15.06	Pulokulon	99,16	90,23	80,32
7	33.15.07	Kradenan	88,28	92,78	107,11
8	33.15.08	Gabus	99,21	97,49	82,76
9	33.15.09	Ngaringan	84,74	93,47	120,62
10	33.15.10	Wirosari	86,17	93,3	102,53
11	33.15.11	Tawangharjo	93,9	94,4	123,75
12	33.15.12	Grobogan	72,02	91,46	100,08
13	33.15.13	Purwodadi	110,32	111,87	127,29
14	33.15.14	Brati	92,07	93,89	64,93
15	33.15.15	Klambu	80,75	91,29	68,55
16	33.15.16	Godong	107,88	93,65	68,67
17	33.15.17	Gubug	116,34	103,6	132,9
18	33.15.18	Tegowanu	78,95	85,97	75,67
19	33.15.19	Tanggunganharjo	99,78	91,63	191,2
Jumlah			93,43	94,3	95,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Secara garis besar, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP memiliki capaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenjang yang lainnya

yaitu sebesar 95,21. Tingginya nilai APK pada jenjang SMP tersebut menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang SMP tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang tersebut. Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tidak memperhitungkan ketepatan usia, Angka Partisipasi Murni (APM) memperhatikan ketepatan usia untuk menghitung partisipasi penduduk sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berikut merupakan data terkait Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Grobogan berdasarkan jenjang pendidikannya:

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Grobogan Tahun 2025

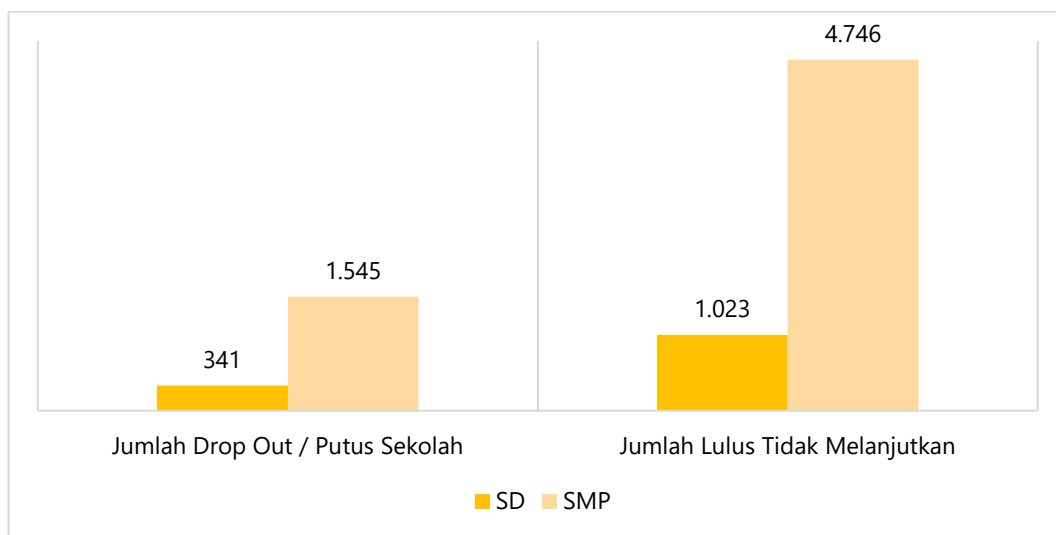
No	Kode Kecamatan	Kecamatan	PAUD	SD	SMP
1	33.15.01	Kedungjati	65,04	85,56	56,98
2	33.15.02	Karangrayung	55,36	83,57	64,81
3	33.15.03	Penawangan	63,86	83,45	70,70
4	33.15.04	Toroh	53,79	80,59	53,84
5	33.15.05	Geyer	51,52	84,48	58,55
6	33.15.06	Pulokulon	63,41	85,24	65,72
7	33.15.07	Kradenan	45,59	79,74	79,73
8	33.15.08	Gabus	68,94	103,57	81,42
9	33.15.09	Ngaringan	47,96	87,83	46,79
10	33.15.10	Wirosari	53,57	78,68	74,01
11	33.15.11	Tawangharjo	61,29	87,33	87,84
12	33.15.12	Grobogan	43,96	87,21	82,29
13	33.15.13	Purwodadi	74,15	104,63	104,96
14	33.15.14	Brati	71,77	95,08	51,30
15	33.15.15	Klambu	35,56	82,53	54,23
16	33.15.16	Godong	68,65	89,19	69,68
17	33.15.17	Gubug	67,83	93,16	113,53
18	33.15.18	Tegowanu	47,25	80,34	61,92
19	33.15.19	Tanggunharjo	59,73	84,10	168,69
Jumlah			58,73	87,67	76,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Sepanjang tahun 2025, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Grobogan secara garis besar menunjukkan capaian yang cukup baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan capaian tersebut agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Berdasarkan jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD memiliki capaian yang tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya

yaitu sebesar 87,67. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia SD sudah memperoleh akses terhadap pendidikan dasar sesuai dengan usianya. Meski demikian, masih terdapat 12,33 anak usia SD yang belum bersekolah pada jenjang semestinya baik karena belum bersekolah, putus sekolah, maupun berada pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

Meskipun capaian Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah telah mengakses pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, namun masih ditemukan adanya anak yang belum memiliki kesempatan penuh untuk mengakses pendidikan baik karena *drop out*/putus sekolah maupun lulus tidak melanjutkan. Hal tersebut didukung dengan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 sebanyak 1.886 anak mengalami *drop out*/putus sekolah dengan rincian 341 berasal dari jenjang SD dan 1.545 berasal dari jenjang SMP. Sementara itu, sebanyak 5.769 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu dengan rincian 1.023 anak berasal dari jenjang pendidikan SD dan 4.746 anak berasal dari jenjang pendidikan SMP.



Gambar 3.2 Banyaknya Anak Putus Sekolah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Banyaknya anak putus sekolah tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan yang menyebabkan sebagian peserta didik tidak dapat melanjutkan pendidikannya baik karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor

geografis, maupun faktor lainnya. Keberadaan anak putus sekolah tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi pendidikan belum sepenuhnya menjamin keberlangsungan pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara lebih rinci, jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2025 disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Banyaknya Anak Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

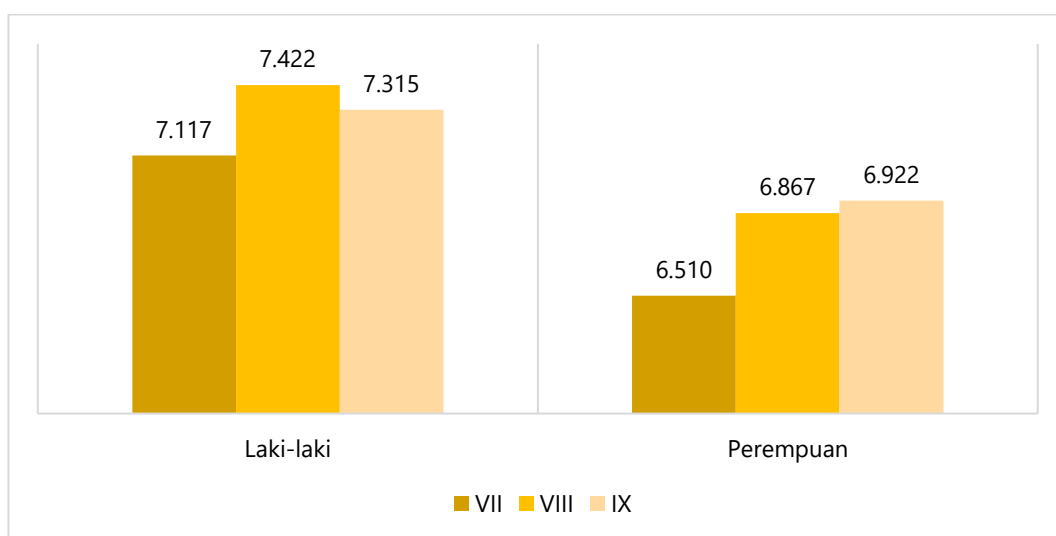
Kode Kec.	Kecamatan	Drop Out / Putus Sekolah		Total	Lulus Tidak Melanjutkan		Total
		SD	SMP		SD	SMP	
33.15.01	Kedungjati	14	29	43	27	71	98
33.15.02	Karangrayung	25	99	124	50	404	454
33.15.03	Penawangan	11	43	54	24	86	110
33.15.04	Toroh	28	108	136	55	305	360
33.15.05	Geyer	10	49	59	38	320	358
33.15.06	Pulokulon	20	113	133	61	445	506
33.15.07	Kradenan	14	97	111	57	309	366
33.15.08	Gabus	18	100	118	57	369	426
33.15.09	Ngaringan	16	185	201	180	625	805
33.15.10	Wirosari	24	117	141	103	391	494
33.15.11	Tawangharjo	21	79	100	27	192	219
33.15.12	Grobogan	17	99	116	82	310	392
33.15.13	Purwodadi	22	115	137	59	176	235
33.15.14	Brati	20	53	73	35	199	234
33.15.15	Klambu	4	32	36	32	91	123
33.15.16	Godong	15	54	69	38	115	153
33.15.17	Gubug	31	83	114	50	148	198
33.15.18	Tegowanu	18	28	46	36	119	155
33.15.19	Tanggungharjo	13	62	75	12	71	83
Jumlah		341	1.545	1.886	1.023	4.746	5.769

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan Ngaringan menjadi kecamatan penyumbang anak putus sekolah terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Tingginya anak putus sekolah tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya motivasi siswa, kurangnya dukungan dari keluarga, faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan faktor lainnya. Maka dari itu, untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Ngaringan perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan

program pencegahan dan penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan secara merata.

Sementara itu, dari segi jenjang pendidikan mayoritas anak putus sekolah berasal dari jenjang pendidikan SMP yaitu sebanyak 6.291 anak dengan rincian 1.545 anak *drop out*/putus sekolah dan sisanya sebanyak 4.746 anak lulus tidak melanjutkan. Tingginya jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP dibandingkan dengan jenjang SD menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menengah pertama masih menjadi fase yang rentan terjadinya putus sekolah sehingga tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan cenderung meningkat seiring bertambahnya jenjang pendidikan. Secara lebih rinci, data mengenai angka putus sekolah SMP/MTs Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Di Kabupaten Grobogan, dibandingkan dengan perempuan, laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk tidak melanjutkan pendidikan hingga tuntas. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa angka putus sekolah penduduk laki-laki pada jenjang pendidikan SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan dengan angka putus sekolah penduduk perempuan. Tingginya angka putus sekolah pada penduduk laki-laki disebabkan oleh beberapa

faktor seperti, rendahnya motivasi belajar, pengaruh lingkungan pergaulan, serta faktor ekonomi yang menuntut laki-laki untuk terlibat dalam aktivitas produktif atau bekerja membantu orang tua.

Tingginya angka putus sekolah pada kelompok laki-laki menunjukkan adanya perbedaan kerentanan berdasarkan karakteristik peserta didik. Namun demikian, risiko putus sekolah juga dapat dipengaruhi oleh faktor kewilayahan yang berbeda pada masing-masing kecamatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persebaran kasus putus sekolah, selanjutnya disajikan data jumlah anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs berdasarkan kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Tabel 3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

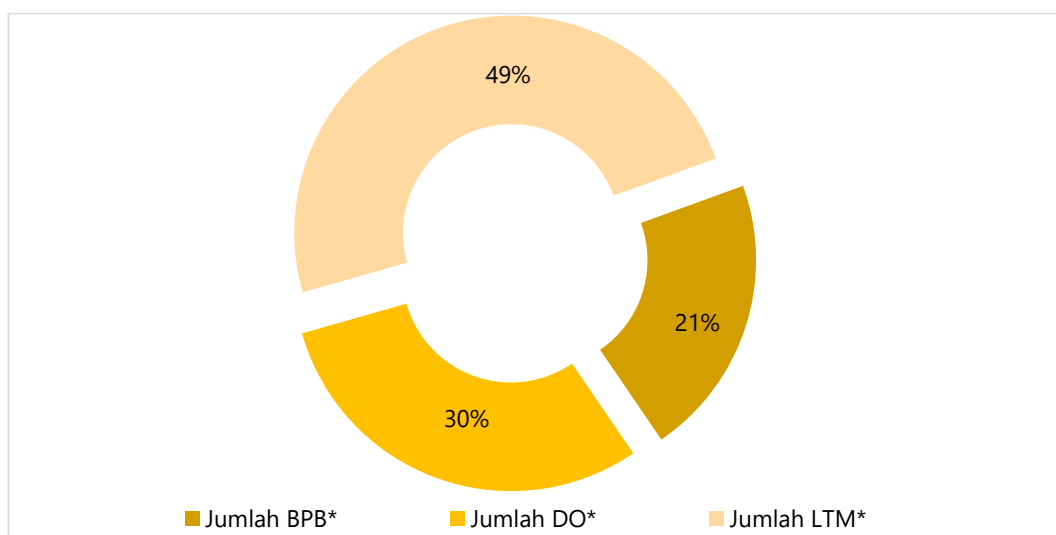
Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-laki (L) / Male (M)				Perempuan (P) / Female (F)				L+P/M+F		
		Tingkat / Grade			Sub Tot	Tingkat / Grade			Sub Tot	Tingkat / Grade		
		VII	VIII	IX		VII	VIII	IX		VII	VIII	IX
33.15.01	Kedungjati	113	154	105	372	102	145	120	367	215	299	225
33.15.02	Karangrayung	326	349	328	1.003	283	334	331	948	609	683	659
33.15.03	Penawangan	331	382	335	1.048	304	291	326	921	635	673	661
33.15.04	Toroh	259	270	264	793	241	255	297	793	500	525	561
33.15.05	Geyer	373	371	379	1.123	360	368	367	1.095	733	739	746
33.15.06	Pulokulon	620	650	697	1.967	502	594	580	1.676	1.122	1.244	1.277
33.15.07	Kradenan	623	630	663	1.916	557	572	602	1.731	1.180	1.202	1.265
33.15.08	Gabus	212	226	229	667	166	157	201	524	378	383	430
33.15.09	Ngaringan	107	124	123	354	93	102	80	275	200	226	203
33.15.10	Wirosari	488	460	452	1.400	460	460	429	1.349	948	920	881
33.15.11	Tawangharjo	313	335	330	978	264	263	294	821	577	598	624
33.15.12	Grobogan	257	295	323	875	216	245	247	708	473	540	570
33.15.13	Purwodadi	350	416	427	1.193	406	409	384	1.199	756	825	811
33.15.14	Brati	1.180	1.190	1.091	3.461	1.096	1.131	1.105	3.332	2.276	2.321	2.196
33.15.15	Klambo	256	289	303	848	233	282	242	757	489	571	545
33.15.16	Godong	249	237	212	698	208	222	229	659	457	459	441
33.15.17	Gubug	346	299	317	962	306	342	352	1.000	652	641	669
33.15.18	Tegowanu	340	371	374	1.085	340	360	378	1.078	680	731	752
33.15.19	Tanggunharjo	374	374	363	1.111	373	335	358	1.066	747	709	721
Jumlah		7.117	7.422	7.315	21.854	6.510	6.867	6.922	20.299	13.627	14.289	14.237

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Pada jenjang pendidikan SMP, mayoritas anak putus sekolah berasal dari Kecamatan Brati yaitu sebanyak 6.793 yang tersebar dari berbagai jenjang. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Brati sebagai wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pada jenjang SMP.

Tingginya jumlah anak putus sekolah menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang yang seharusnya. Namun demikian, anak putus sekolah merupakan salah satu bagian

dari kelompok anak tidak sekolah. Selain anak yang pernah bersekolah kemudian berhenti, kelompok anak tidak sekolah juga mencakup anak yang belum pernah bersekolah maupun anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Di Kabupaten Grobogan, mayoritas anak tidak sekolah berasal dari kelompok lulus tidak melanjutkan dengan persentase sebesar 49 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada anak yang putus sekolah di tengah jenjang pendidikan, melainkan ditemukan juga pada fase transisi antar jenjang pendidikan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya motivasi untuk melanjutkan sekolah, keterbatasan akses pendidikan, maupun faktor sosial dan lingkungan.



Gambar 3.4 Persentase Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Sebaran anak tidak sekolah di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa permasalahan anak tidak sekolah masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Perbedaan jumlah anak putus sekolah antar kecamatan mengindikasikan adanya variasi kondisi sosial, ekonomi, maupun akses pendidikan yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan intervensi lebih lanjut dalam menekan jumlah anak tidak sekolah, maka disajikan data seperti pada tabel berikut yang menunjukkan persebaran anak tidak sekolah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Grobogan.



Tabel 3.5 Jumlah Anak Tidak Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah BPB*	Jumlah DO*					
			Kelas					
			1	2	3	4	5	6
33.15.01	Kedungjati	100	2	1	2	3	3	3
33.15.02	Karangrayung	182	2	0	4	7	11	1
33.15.03	Penawangan	114	0	0	2	2	6	1
33.15.04	Toroh	163	1	4	3	3	15	2
33.15.05	Geyer	135	3	1	1	1	4	0
33.15.06	Pulokulon	230	4	2	2	5	2	5
33.15.07	Kradenan	112	0	2	3	1	3	5
33.15.08	Gabus	138	0	3	6	5	4	0
33.15.09	Ngaringan	91	1	4	3	0	7	1
33.15.10	Wirosari	201	3	2	4	3	4	8
33.15.11	Tawangharjo	93	3	0	1	4	4	9
33.15.12	Grobogan	126	3	3	4	1	4	2
33.15.13	Purwodadi	184	0	3	6	2	8	3
33.15.14	Brati	86	1	3	4	3	5	4
33.15.15	Klambu	76	0	0	1	1	1	1
33.15.16	Godong	111	2	1	2	2	7	1
33.15.17	Gubug	154	2	7	2	7	12	1
33.15.18	Tegowanu	119	1	3	5	2	3	4
33.15.19	Tanggunharjo	67	1	0	2	2	7	1
Jumlah		2.482	29	39	57	54	110	52

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tabel 3.6 Lanjutan Tabel Jumlah Anak Tidak Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Do*						Jumlah LTM*		Total
		Kelas						Kelas		
		7	8	9	10	11	12	6	9	
33.15.01	Kedungjati	11	7	11	21	40	2	27	71	190
33.15.02	Karangrayung	10	36	53	63	143	9	50	404	768
33.15.03	Penawangan	10	16	17	30	51	1	24	86	235
33.15.04	Toroh	6	19	83	36	64	2	55	305	570
33.15.05	Geyer	13	13	23	9	61	2	38	320	479
33.15.06	Pulokulon	14	24	75	34	37	7	61	445	697
33.15.07	Kradenan	7	18	72	15	25	9	57	309	512
33.15.08	Gabus	12	19	69	33	50	3	57	369	612
33.15.09	Ngaringan	21	68	96	38	42	10	180	625	1.080
33.15.10	Wirosari	13	37	67	37	38	1	103	391	687
33.15.11	Tawangharjo	7	13	59	28	49	2	27	192	377
33.15.12	Grobogan	9	18	72	60	71	1	82	310	623
33.15.13	Purwodadi	10	24	81	60	62	4	59	176	476
33.15.14	Brati	9	12	32	27	27	4	35	199	345
33.15.15	Klambu	2	7	23	12	29	12	32	91	208
33.15.16	Godong	8	19	27	23	49	3	38	115	282
33.15.17	Gubug	9	15	59	30	78	3	50	148	392

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Do*						Jumlah LTM*		Total
		Kelas						Kelas		
		7	8	9	10	11	12	6	9	
33.15.18	Tegowanu	6	12	10	29	40	4	36	119	256
33.15.19	Tanggungharjo	16	14	32	12	35	2	12	71	194
Jumlah		193	391	961	597	991	81	1.023	4.746	8.983

Keterangan:

BPB : Belum Pernah Bersekolah

DO : Drop Out (kelas 1 sampai 12)

LTM : Lulus Tidak Melanjutkan (kelas 9 dan kelas 12)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tingginya jumlah anak yang putus sekolah berpotensi meningkatkan jumlah anak tidak sekolah (ATS), mengingat anak yang keluar dari sistem pendidikan dan tidak kembali melanjutkan sekolah akan masuk ke dalam kelompok tersebut apabila tidak segera mendapatkan intervensi yang tepat. Kondisi ini tercermin pada Kecamatan Ngaringan yang tidak hanya menjadi salah satu penyumbang jumlah anak putus sekolah yang tinggi, tetapi juga tercatat memiliki jumlah anak tidak sekolah (ATS) terbanyak di Kabupaten Grobogan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan pendidikan di Kecamatan Ngaringan tidak hanya terjadi pada peserta didik yang berhenti sekolah di tengah jenjang pendidikan, tetapi juga pada anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau belum kembali mengakses layanan pendidikan.

Keberadaan anak tidak sekolah menjadi salah satu indikator bahwa masih ditemukan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan partisipasi pendidikan adalah ketersediaan sarana pendidikan. Jumlah sekolah menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kapasitas dan pemerataan layanan pendidikan di suatu wilayah. Keberadaan sekolah yang memadai dapat mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Tabel 3.7 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/2025	2025/2026
		2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026		
33.15.01	Kedungjati	0	0	25	25	25	25

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/ 2025	2025/ 2026
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026		
33.15.02	Karangrayung	0	0	52	51	52	51
33.15.03	Penawangan	0	0	39	40	39	40
33.15.04	Toroh	0	0	56	56	56	56
33.15.05	Geyer	0	0	31	31	31	31
33.15.06	Pulokulon	0	0	49	48	49	48
33.15.07	Kradenan	0	0	41	42	41	42
33.15.08	Gabus	0	0	35	35	35	35
33.15.09	Ngaringan	0	0	35	35	35	35
33.15.10	Wirosari	1	1	51	51	52	52
33.15.11	Tawangharjo	0	0	27	27	27	27
33.15.12	Grobogan	0	0	34	34	34	34
33.15.13	Purwodadi	1	1	73	73	74	74
33.15.14	Brati	0	0	23	23	23	23
33.15.15	Klambu	0	0	19	19	19	19
33.15.16	Godong	0	0	46	46	46	46
33.15.17	Gubug	1	1	39	39	40	40
33.15.18	Tegowanu	0	0	29	29	29	29
33.15.19	Tanggungharjo	0	0	24	24	24	24
Jumlah		3	3	728	728	731	731

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, keberadaan sarana pendidikan khususnya Taman Kanak-kanak (TK) yang berstatus negeri masih relatif terbatas dibandingkan dengan Taman Kanak-kanak (TK) swasta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Grobogan masih didominasi oleh peran lembaga pendidikan swasta. Meskipun demikian, keberadaan Taman Kanak-kanak (TK) swasta turut mendukung perluasan akses pendidikan bagi anak usia dini sehingga kebutuhan layanan pendidikan pra-sekolah tetap dapat terpenuhi di berbagai wilayah.

Dominasi sekolah swasta tersebut juga tercermin pada ketersediaan tenaga pendidik, di mana jumlah guru TK swasta tercatat lebih banyak dibandingkan jumlah guru TK negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Grobogan tidak hanya bergantung pada keberadaan satuan pendidikan swasta, tetapi juga pada kontribusi tenaga pendidik yang bekerja di lembaga swasta. Oleh karena itu, peran sekolah dan guru swasta

menjadi sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini serta meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Grobogan.

Tabel 3.8 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Guru				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/2025	2025/2026
		2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026		
33.15.01	Kedungjati	0	-	29	-	29	-
33.15.02	Karangrayung	0	-	111	-	111	-
33.15.03	Penawangan	0	-	31	-	31	-
33.15.04	Toroh	0	-	51	-	51	-
33.15.05	Geyer	0	-	31	-	31	-
33.15.06	Pulokulon	0	-	49	-	49	-
33.15.07	Kradenan	0	-	37	-	37	-
33.15.08	Gabus	0	-	35	-	35	-
33.15.09	Ngaringan	0	-	32	-	32	-
33.15.10	Wirosari	1	-	41	-	42	-
33.15.11	Tawangharjo	0	-	22	-	22	-
33.15.12	Grobogan	0	-	22	-	22	-
33.15.13	Purwodadi	2	-	129	-	131	-
33.15.14	Brati	0	-	10	-	10	-
33.15.15	Klambu	0	-	15	-	15	-
33.15.16	Godong	0	-	44	-	44	-
33.15.17	Gubug	1	-	46	-	47	-
33.15.18	Tegowanu	0	-	49	-	49	-
33.15.19	Tanggunharjo	0	-	31	-	31	-
Jumlah		4	-	815	-	819	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Kecamatan Purwodadi tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah guru terbanyak di Kabupaten Grobogan. Kondisi tersebut selaras dengan ketersediaan sarana pendidikan terbanyak berada di Kecamatan Purwodadi. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi memiliki kebutuhan layanan pendidikan yang relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Banyaknya jumlah satuan pendidikan yang tersedia turut mendorong tingginya kebutuhan tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran.

Tabel 3.9 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Murid				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/2025	2025/2026
		2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026		
33.15.01	Kedungjati	0	-	726	-	726	-
33.15.02	Karangrayung	0	-	1.965	-	1.965	-
33.15.03	Penawangan	0	-	1.053	-	1.053	-
33.15.04	Toroh	0	-	1.596	-	1.596	-
33.15.05	Geyer	0	-	892	-	892	-
33.15.06	Pulokulon	0	-	1.457	-	1.457	-
33.15.07	Kradenan	0	-	1.216	-	1.216	-
33.15.08	Gabus	0	-	1.007	-	1.007	-
33.15.09	Ngaringan	0	-	877	-	877	-
33.15.10	Wirosari	34	-	1.480	-	1.514	-
33.15.11	Tawangharjo	0	-	845	-	845	-
33.15.12	Grobogan	0	-	949	-	949	-
33.15.13	Purwodadi	47	-	3.327	-	3.374	-
33.15.14	Brati	0	-	463	-	463	-
33.15.15	Klambu	0	-	464	-	464	-
33.15.16	Godong	0	-	1.581	-	1.581	-
33.15.17	Gubug	52	-	1.378	-	1.430	-
33.15.18	Tegowanu	0	-	1.122	-	1.122	-
33.15.19	Tanggunharjo	0	-	973	-	973	-
Jumlah		133	-	23.371	-	23.504	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tingginya ketersediaan tenaga pendidik di Kecamatan Purwodadi tidak terlepas dari banyaknya sarana pendidikan yang tersedia di wilayah tersebut. Hubungan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara jumlah sarana pendidikan, peserta didik, dan kebutuhan tenaga pendidik. Semakin banyak jumlah ketersediaan sarana pendidikan, semakin banyak pula jumlah murid yang terdaftar dan guru yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, dominasi Kecamatan Purwodadi pada ketiga indikator tersebut mencerminkan perannya sebagai pusat pelayanan pendidikan yang mampu menampung kebutuhan pendidikan masyarakat dalam jumlah yang lebih besar.

Sama halnya dengan jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Kecamatan Purwodadi juga tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Dasar (SD) terbanyak di Kabupaten Grobogan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan layanan pendidikan dasar di

wilayah tersebut diimbangi dengan ketersediaan sarana pendidikan dan guru yang memadai. Banyaknya jumlah murid Sekolah Dasar (SD) mendorong kebutuhan akan lebih banyak satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran. Secara lebih rinci, jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Dasar (SD) menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta			
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026
33.15.01	Kedungjati	29	-	0	-	29	-
33.15.02	Karangrayung	60	-	1	-	61	-
33.15.03	Penawangan	35	-	1	-	36	-
33.15.04	Toroh	62	-	0	-	62	-
33.15.05	Geyer	44	-	0	-	44	-
33.15.06	Pulokulon	54	-	2	-	56	-
33.15.07	Kradenan	44	-	2	-	46	-
33.15.08	Gabus	42	-	1	-	43	-
33.15.09	Ngaringan	37	-	0	-	37	-
33.15.10	Wirosari	48	-	3	-	51	-
33.15.11	Tawangharjo	29	-	0	-	29	-
33.15.12	Grobogan	41	-	0	-	41	-
33.15.13	Purwodadi	60	-	7	-	67	-
33.15.14	Brati	29	-	0	-	29	-
33.15.15	Klambu	26	-	0	-	26	-
33.15.16	Godong	44	-	2	-	46	-
33.15.17	Gubug	43	-	3	-	47	-
33.15.18	Tegowanu	30	-	0	-	30	-
33.15.19	Tanggunharjo	26	-	1	-	27	-
Jumlah		783	-	23	-	807	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tabel 3.11 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta			
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026
33.15.01	Kedungjati	179	-	0	-	179	-
33.15.02	Karangrayung	399	-	4	-	395	-
33.15.03	Penawangan	247	-	3	-	250	-
33.15.04	Toroh	456	-	0	-	456	-



Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta			
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026
33.15.05	Geyer	262	-	0	-	262	-
33.15.06	Pulokulon	366	-	11	-	377	-
33.15.07	Kradenan	294	-	17	-	311	-
33.15.08	Gabus	291	-	12	-	303	-
33.15.09	Ngaringan	244	-	0	-	244	-
33.15.10	Wirosari	303	-	14	-	317	-
33.15.11	Tawangharjo	186	-	0	-	186	-
33.15.12	Grobogan	263	-	0	-	263	-
33.15.13	Purwodadi	488	-	95	-	583	-
33.15.14	Brati	181	-	0	-	181	-
33.15.15	Klambu	170	-	0	-	170	-
33.15.16	Godong	305	-	10	-	315	-
33.15.17	Gubug	290	-	18	-	308	-
33.15.18	Tegowanu	208	-	0	-	208	-
33.15.19	Tanggunharjo	175	-	4	-	179	-
Jumlah		5.307	-	188	-	5.487	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tabel 3.12 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta			
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026
33.15.01	Kedungjati	3.138	-	0	-	3.138	-
33.15.02	Karangrayung	8.173	-	43	-	8.216	-
33.15.03	Penawangan	4.614	-	71	-	4.685	-
33.15.04	Toroh	7.327	-	0	-	7.327	-
33.15.05	Geyer	4.906	-	0	-	4.906	-
33.15.06	Pulokulon	6.808	-	188	-	6.996	-
33.15.07	Kradenan	5.850	-	370	-	6.220	-
33.15.08	Gabus	5.084	-	382	-	5.466	-
33.15.09	Ngaringan	5.336	-	0	-	5.336	-
33.15.10	Wirosari	6.436	-	463	-	6.899	-
33.15.11	Tawangharjo	3.745	-	0	-	3.745	-
33.15.12	Grobogan	5.633	-	0	-	5.633	-
33.15.13	Purwodadi	10.210	-	2.271	-	12.481	-
33.15.14	Brati	3.332	-	0	-	3.332	-
33.15.15	Klambu	3.037	-	0	-	3.037	-
33.15.16	Godong	6.120	-	320	-	6.440	-
33.15.17	Gubug	7.172	-	558	-	7.730	-
33.15.18	Tegowanu	4.897	-	0	-	4.897	-
33.15.19	Tanggungharjo	3.632	-	42	-	3.674	-
Jumlah		105.450	-	4.708	-	110.158	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Dominasi Kecamatan Purwodadi dalam penyelenggaraan pendidikan juga terlihat pada jenjang pendidikan SMP, dimana jumlah satuan pendidikan, guru, dan murid tercatat sebagai yang tertinggi di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini tidak terlepas dari peran Kecamatan Purwodadi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat yang memiliki kebutuhan layanan pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Selain didukung oleh jumlah penduduk usia sekolah yang cukup tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih lengkap juga menjadikan Kecamatan Purwodadi sebagai tujuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. Tingginya jumlah peserta didik tersebut pada akhirnya diikuti oleh kebutuhan akan satuan pendidikan dan guru yang lebih banyak, sehingga jumlah sekolah dan guru di Kecamatan Purwodadi turut menjadi yang tertinggi di Kabupaten Grobogan.

Tabel 3.13 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/2025	2025/2026
		2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026		
33.15.01	Kedungjati	4	-	2	-	6	-
33.15.02	Karangrayung	4	-	8	-	12	-
33.15.03	Penawangan	3	-	1	-	4	-
33.15.04	Toroh	3	-	5	-	8	-
33.15.05	Geyer	6	-	3	-	9	-
33.15.06	Pulokulon	4	-	4	-	8	-
33.15.07	Kradenan	3	-	5	-	8	-
33.15.08	Gabus	5	-	3	-	8	-
33.15.09	Ngaringan	4	-	2	-	6	-
33.15.10	Wirosari	6	-	4	-	10	-
33.15.11	Tawangharjo	3	-	2	-	5	-
33.15.12	Grobogan	5	-	3	-	8	-
33.15.13	Purwodadi	7	-	9	-	16	-
33.15.14	Brati	2	-	0	-	2	-
33.15.15	Klambu	2	-	0	-	2	-
33.15.16	Godong	3	-	3	-	6	-
33.15.17	Gubug	4	-	7	-	11	-
33.15.18	Tegowanu	3	-	2	-	5	-
33.15.19	Tanggunharjo	2	-	3	-	5	-
Jumlah		73	-	66	-	139	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tabel 3.14 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/ 2025	2025/ 2026
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026		
33.15.01	Kedungjati	61	-	5	-	66	-
33.15.02	Karangrayung	117	-	68	-	185	-
33.15.03	Penawangan	66	-	8	-	74	-
33.15.04	Toroh	97	-	22	-	119	-
33.15.05	Geyer	94	-	16	-	110	-
33.15.06	Pulokulon	83	-	49	-	132	-
33.15.07	Kradenan	87	-	42	-	129	-
33.15.08	Gabus	89	-	11	-	100	-
33.15.09	Ngaringan	71	-	24	-	95	-
33.15.10	Wirosari	107	-	20	-	127	-
33.15.11	Tawangharjo	60	-	13	-	73	-
33.15.12	Grobogan	105	-	14	-	119	-
33.15.13	Purwodadi	288	-	51	-	339	-
33.15.14	Brati	44	-	0	-	44	-
33.15.15	Klambu	33	-	0	-	33	-
33.15.16	Godong	74	-	14	-	88	-
33.15.17	Gubug	107	-	58	-	165	-
33.15.18	Tegowanu	80	-	11	-	91	-
33.15.19	Tanggunharjo	42	-	16	-	58	-
Jumlah		1.705	-	442	-	2.147	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tabel 3.15 Lanjutan Tabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

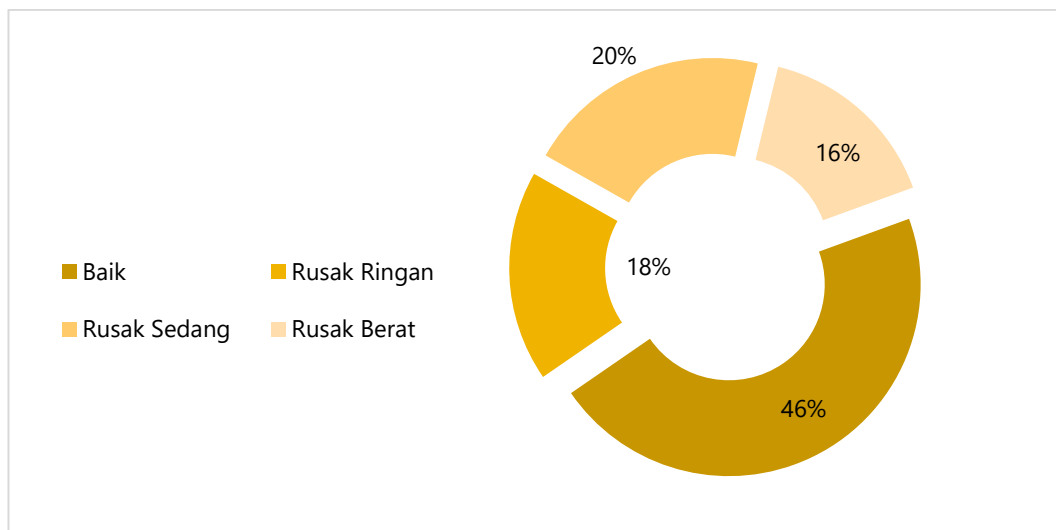
Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/ 2025	2025/ 2026
		2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026		
33.15.01	Kedungjati	1.138	-	67	-	1.205	-
33.15.02	Karangrayung	2.427	-	1.319	-	3.746	-
33.15.03	Penawangan	1.389	-	216	-	1.605	-
33.15.04	Toroh	1.922	-	315	-	2.237	-
33.15.05	Geyer	1.732	-	259	-	1.991	-
33.15.06	Pulokulon	1.695	-	744	-	2.439	-
33.15.07	Kradenan	1.789	-	849	-	2.638	-
33.15.08	Gabus	1.716	-	205	-	1.921	-
33.15.09	Ngaringan	1.435	-	386	-	1.821	-
33.15.10	Wirosari	1.785	-	369	-	2.154	-
33.15.11	Tawangharjo	1.193	-	153	-	1.346	-

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sekolah				Jumlah	
		Negeri		Swasta		2024/2025	2025/2026
		2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026		
33.15.12	Grobogan	1.908	-	253	-	2.161	-
33.15.13	Purwodadi	5.872	-	592	-	6.464	-
33.15.14	Brati	743	-	0	-	743	-
33.15.15	Klambu	620	-	0	-	620	-
33.15.16	Godong	1.404	-	221	-	1.625	-
33.15.17	Gubug	2.145	-	1.555	-	3.700	-
33.15.18	Tegowanu	1.825	-	105	-	1.930	-
33.15.19	Tanggunharjo	1.019	-	552	-	1.571	-
Jumlah		33.757	-	8.160	-	41.917	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Ketersediaan sekolah yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung akses dan pemerataan layanan pendidikan. Namun demikian, jumlah sekolah yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Selain kuantitas, kondisi fisik bangunan sekolah juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap kenyamanan, keamanan, dan efektivitas proses pembelajaran.

Ketersediaan sekolah di Kabupaten Grobogan didukung oleh kondisi sarana pendidikan yang relatif memadai. Hal ini terlihat dari data yang disajikan seperti pada grafik di bawah yang menunjukkan bahwa 46 persen sekolah di Kabupaten Grobogan berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki lingkungan belajar yang layak untuk mendukung proses pembelajaran. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah sekolah dengan kondisi selain baik yang memerlukan perhatian guna memastikan kualitas layanan pendidikan dapat terjaga secara merata. Secara lebih rinci, kondisi sekolah berdasarkan kecamatan disajikan seperti pada tabel berikut:



Gambar 3.5 Jumlah Sekolah Menurut Kondisi Bangunan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tabel 3.16 Jumlah Sekolah Menurut Kondisi Bangunan di Kabupaten Grobogan per Kecamatan
Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Kategori				Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
33.15.01	Kedungjati	32	56	78	50	216
33.15.02	Karangrayung	93	62	57	33	245
33.15.03	Penawangan	65	12	12	36	125
33.15.04	Toroh	76	18	51	19	164
33.15.05	Geyer	46	19	14	15	94
33.15.06	Pulokulon	36	32	39	20	127
33.15.07	Kradenan	83	24	20	15	142
33.15.08	Gabus	69	14	27	39	149
33.15.09	Ngaringan	19	23	12	55	109
33.15.10	Wirosari	58	51	59	30	198
33.15.11	Tawangharjo	59	3	7	5	74
33.15.12	Grobogan	81	8	23	13	125
33.15.13	Purwodadi	201	69	59	17	346
33.15.14	Brati	30	0	26	6	62
33.15.15	Klambu	30	3	4	8	45
33.15.16	Godong	41	28	10	25	104
33.15.17	Gubug	107	26	26	19	178
33.15.18	Tegowanu	37	22	17	5	81
33.15.19	Tanggunganharjo	59	3	7	6	75
Jumlah		1.222	473	548	416	2.659

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah kerusakan sekolah terbanyak berasal dari Kecamatan Kedungjati. Tingginya jumlah sekolah yang

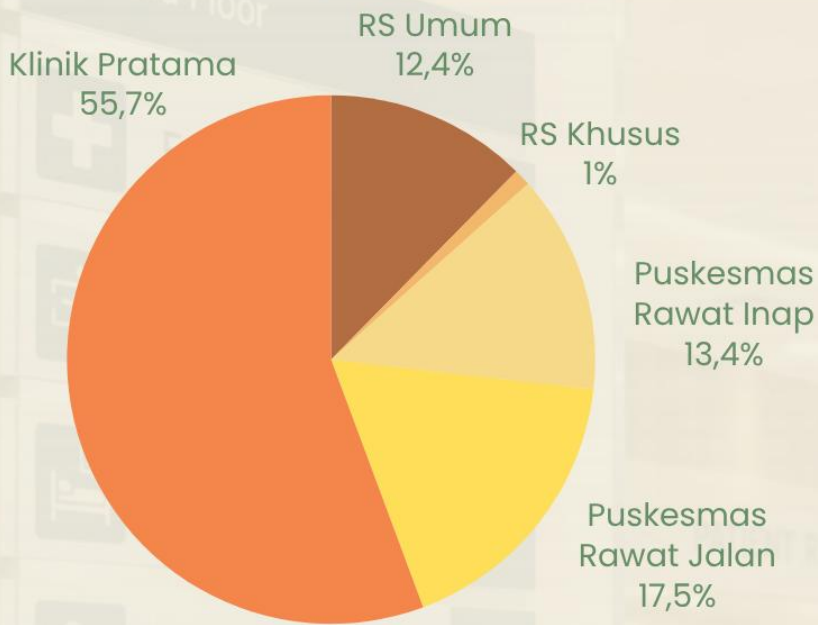


mengalami kerusakan berpotensi memengaruhi kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar apabila tidak segera ditangani. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan yang lebih besar terhadap program rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan sekolah agar seluruh peserta didik dapat memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan di Kecamatan Kedungjati menjadi penting untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kabupaten Grobogan memiliki **1.718 fasilitas kesehatan**. Sebanyak **1.621** di antaranya merupakan **Posyandu** yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

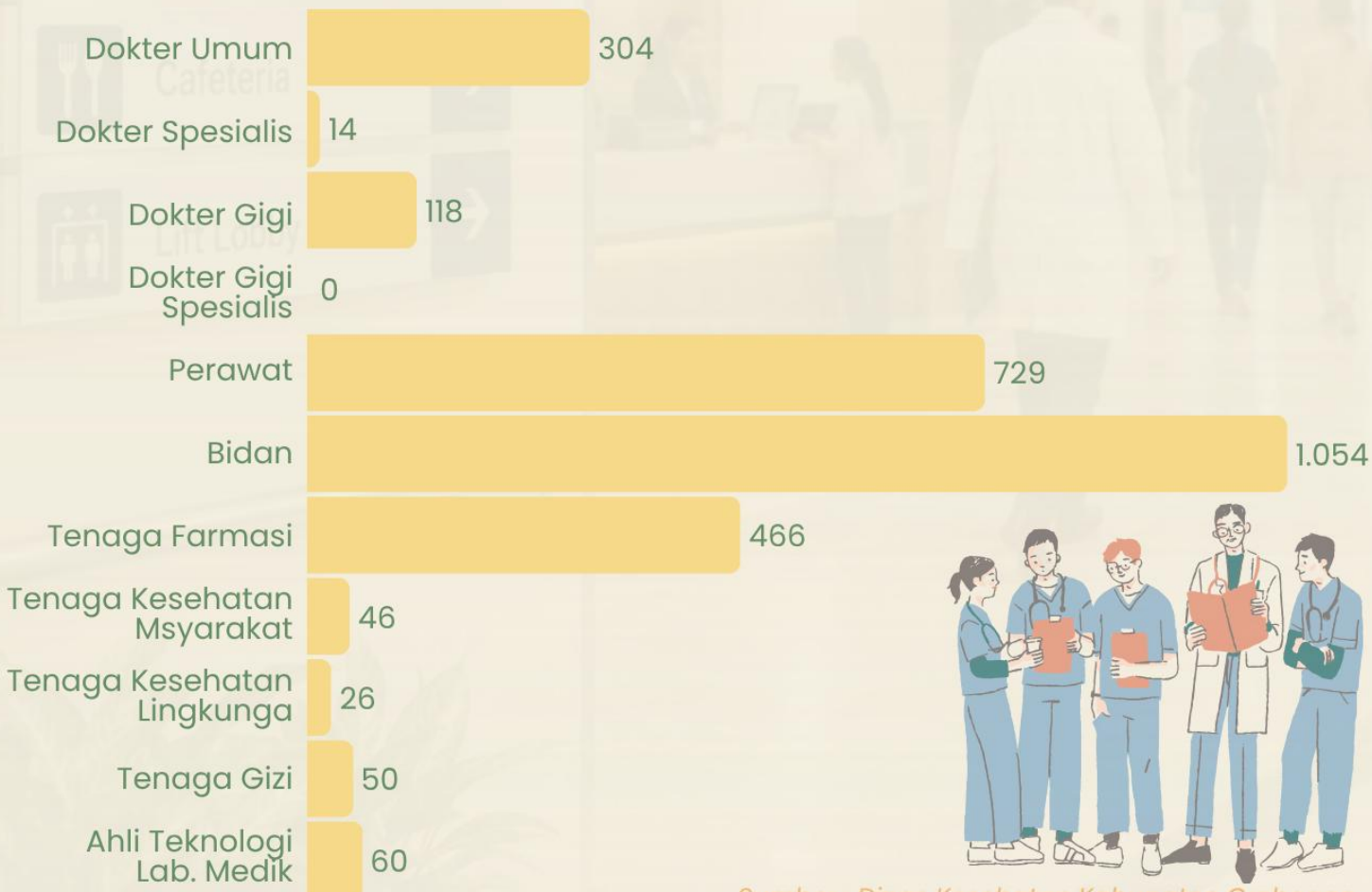
Komposisi Fasilitas Kesehatan Lainnya



Kelas Rumah Sakit

- Tipe B = 1
- Tipe C = 4
- Tipe D = 8

Jumlah Tenaga Kesehatan



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

3.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan manusia karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya peningkatan derajat kesehatan tidak hanya ditentukan oleh perilaku hidup sehat dan kondisi lingkungan tetapi juga oleh ketersediaan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan menjadi unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai gambaran mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Grobogan, berikut disajikan data mengenai jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Grobogan:

Tabel 3.17 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	RSU	RS Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Rawat Jalan	Klinik Pratama	Posyandu
33.15.01	Kedungjati	0	0	1	0	2	73
33.15.02	Karangrayung	0	0	1	1	1	72
33.15.03	Penawangan	0	0	0	2	3	97
33.15.04	Toroh	0	0	1	1	6	125
33.15.05	Geyer	0	0	1	1	1	84
33.15.06	Pulokulon	0	0	1	1	1	91
33.15.07	Kradenan	0	0	1	1	1	88
33.15.08	Gabus	1	0	1	1	2	77
33.15.09	Ngaringan	0	0	1	0	0	84
33.15.10	Wirosari	1	0	1	1	5	112
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0	1	1	76
33.15.12	Grobogan	2	0	1	0	2	72
33.15.13	Purwodadi	6	0	0	2	17	135
33.15.14	Brati	0	1	0	1	2	53
33.15.15	Klambu	0	0	1	0	2	42
33.15.16	Godong	0	0	1	1	2	136
33.15.17	Gubug	2	0	1	1	5	86
33.15.18	Tegowanu	0	0	0	1	0	82
33.15.19	Tanggungharjo	0	0	0	1	1	36
Jumlah		12	1	13	17	54	1.621

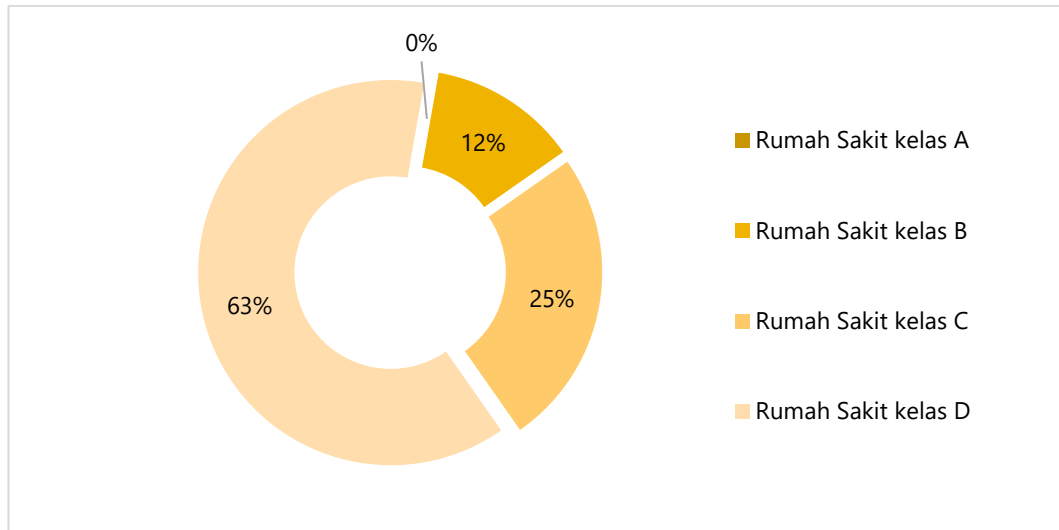
Sumber: Dinas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Grobogan sudah cukup memadai, namun untuk persebarannya masih belum merata di setiap kecamatan. Ketimpangan tersebut terlihat pada fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK) yang keberadaannya masih terpusat di

kecamatan-kecamatan tertentu yaitu dua Kecamatan Gabus, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Gubug, dan Kecamatan Brati. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang berada di wilayah yang tidak memiliki rumah sakit harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh layanan kesehatan.

Sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan lanjutan, keberadaan rumah sakit tidak cukup jika hanya dilihat dari segi persebarannya saja, tetapi perlu juga dilihat dari segi kapasitas pelayanan yang dimiliki. Perbedaan kapasitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari pengelompokan rumah sakit berdasarkan kelas. Di Kabupaten Grobogan, pembagian kelas tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori diantaranya rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C, dan rumah sakit kelas D dimana mayoritas rumah sakit masih berada di kelas D.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kapasitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Grobogan masih berada pada tingkat dasar karena rumah sakit kelas D umumnya memiliki fasilitas yang terbatas pada pelayanan medik spesialis dasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah sakit yang tersedia belum memiliki kapasitas layanan spesialis yang lengkap. Akibatnya, untuk penanganan kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, masyarakat masih harus dirujuk ke rumah sakit dengan kelas yang lebih tinggi di luar wilayah tertentu. Secara lebih rinci, persentase rumah sakit berdasarkan kelas di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Persentase Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

Meskipun ketersediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit masih belum merata, namun ketersediaan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Dengan tersedianya fasilitas kesehatan dasar tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan dasar dengan lebih mudah meskipun fasilitas kesehatan rujukan belum tersedia secara merata di setiap kecamatan.

Secara keseluruhan, Kecamatan Purwodadi memiliki jumlah fasilitas kesehatan paling banyak di Kabupaten Grobogan dengan rincian 6 unit Rumah Sakit Umum, 2 unit Puskesmas Rawat Jalan, 17 unit Klinik Pratama, dan 135 unit posyandu. Tingginya ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut juga didukung oleh kondisi Kecamatan Purwodadi sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian, sehingga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Banyaknya fasilitas kesehatan yang terpusat di Kecamatan Purwodadi tentunya juga didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Semakin banyak fasilitas kesehatan yang tersedia, maka kebutuhan akan tenaga kesehatan juga meningkat untuk memastikan setiap layanan dapat berjalan secara efektif. Secara lebih rinci

berikut data-data terkait jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025:

Tabel 3.18 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Perawat
33.15.01	Kedungjati	5	0	1	0	18
33.15.02	Karangrayung	9	0	4	0	59
33.15.03	Penawangan	27	1	4	0	29
33.15.04	Toroh	18	2	4	0	65
33.15.05	Geyer	18	0	6	0	29
33.15.06	Pulokulon	19	0	4	0	45
33.15.07	Kradenan	19	1	11	0	48
33.15.08	Gabus	9	0	4	0	48
33.15.09	Ngaringan	7	0	2	0	35
33.15.10	Wirosari	15	2	16	0	52
33.15.11	Tawangharjo	10	0	3	0	21
33.15.12	Grobogan	18	0	2	0	39
33.15.13	Purwodadi	53	7	31	0	52
33.15.14	Brati	6	0	3	0	13
33.15.15	Klambu	9	0	2	0	14
33.15.16	Godong	16	0	4	0	52
33.15.17	Gubug	19	1	7	0	56
33.15.18	Tegowanu	10	0	9	0	35
33.15.19	Tanggunharjo	17	0	1	0	19
Jumlah		304	14	118	0	729

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 3.19 Lanjutan Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
33.15.01	34	10	2	0	1	2
33.15.02	75	20	2	0	1	5
33.15.03	59	18	3	0	3	2
33.15.04	89	47	3	2	4	6
33.15.05	50	21	3	3	3	3
33.15.06	68	30	3	2	3	6
33.15.07	39	25	3	3	4	5
33.15.08	55	15	4	1	4	3
33.15.09	53	11	1	1	1	2
33.15.10	73	28	4	2	3	4
33.15.11	49	14	1	2	1	1
33.15.12	45	30	2	1	1	2
33.15.13	70	83	2	2	3	3
33.15.14	48	13	1	1	1	2

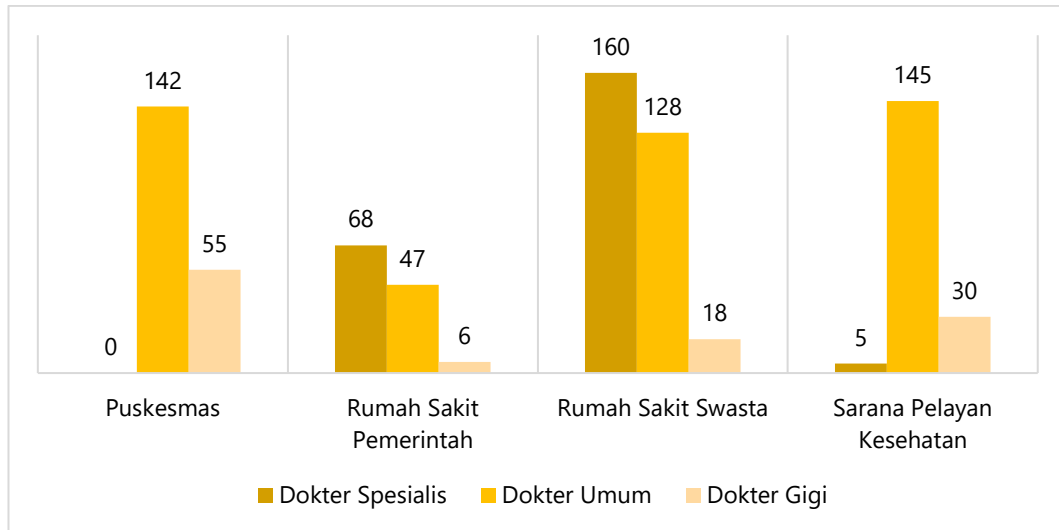
Kode Kecamatan	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
33.15.15	38	13	2	0	2	2
33.15.16	77	48	2	2	3	3
33.15.17	41	16	4	1	6	5
33.15.18	63	14	1	1	3	1
33.15.19	28	10	3	2	3	3
Jumlah	1.054	466	46	26	50	60

Sumber: Dinas Kesehatan

Secara keseluruhan, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Grobogan didominasi oleh bidan dengan jumlah sebanyak 1.054 orang sedangkan tenaga kesehatan dengan jumlah paling sedikit yaitu dokter spesialis dengan jumlah sebanyak 14 orang. Sementara itu, terdapat juga tenaga kesehatan yang belum tersedia di Kabupaten Grobogan yaitu dokter gigi spesialis. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih didominasi oleh tenaga kesehatan dasar, terutama bidan yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan primer.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pada tenaga kesehatan tingkat lanjut, khususnya dokter spesialis yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan rujukan masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas pelayanan spesialis, sehingga untuk kasus-kasus tertentu masih diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan yang lebih tinggi.

Setiap jenis fasilitas kesehatan memiliki kebutuhan tenaga kesehatan yang berbeda, tergantung pada tingkat layanan diberikan. Umumnya fasilitas kesehatan dasar memiliki jumlah tenaga kesehatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat layanan yang diberikan, dimana fasilitas kesehatan dasar lebih berfokus pada penanganan kasus-kasus ringan sedangkan fasilitas kesehatan rujukan seperti rumah sakit memiliki cakupan pelayanan kesehatan yang lebih luas. Untuk melihat persebaran tenaga kesehatan berdasarkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Grobogan, disajikan grafik berikut:



Gambar 3.7 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data tersebut, rumah sakit swasta memiliki tenaga kesehatan paling banyak dibandingkan dengan fasilitas kesehatan lainnya yaitu sebanyak 306 orang dengan rincian 160 dokter spesialis, 128 dokter umum, dan 18 orang dokter gigi. Sementara itu, puskesmas memiliki tenaga kesehatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain yaitu sebanyak 197 orang dengan rincian 142 dokter umum dan 55 dokter gigi.

Dengan adanya tenaga kesehatan yang memadai dan tersebar secara merata, memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan tepat sehingga risiko kesehatan dapat dicegah maupun ditangani sejak dini. Hal tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk menggambarkan keberhasilan pelayanan ibu dan anak disajikan data terkait angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas serta awal kehidupan bayi.

Tabel 3.20 Angka Kematian Bayi (AKB) per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Bayi Laki-laki	Jumlah Kematian Bayi Perempuan	Jumlah Kematian Bayi	AKB
33.15.01	Kedungjati	457	3	1	4	8,75
33.15.02	Karangrayung	1.117	8	2	10	8,95
33.15.03	Penawangan	689	4	1	5	7,26
33.15.04	Toroh	1.116	4	8	12	10,75
33.15.05	Geyer	641	3	8	11	17,16
33.15.06	Pulokulon	1.172	9	4	13	46,276
33.15.07	Kradenan	876	2	4	6	6,85
33.15.08	Gabus	715	4	2	6	8,39
33.15.09	Ngaringan	781	4	5	9	11,52
33.15.10	Wirosari	1.029	9	4	13	12,63
33.15.11	Tawangharjo	609	3	3	6	9,85
33.15.12	Grobogan	889	3	4	7	7,87
33.15.13	Purwodadi	1.460	8	7	15	10,27
33.15.14	Brati	560	6	3	9	46,219
33.15.15	Klambu	374	2	0	2	5,35
33.15.16	Godong	955	5	3	8	8,38
33.15.17	Gubug	990	7	3	10	46,31
33.15.18	Tegowanu	648	4	1	5	7,72
33.15.19	Tanggungharjo	451	2	2	4	8,87

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain ada Kecamatan Gubug dengan nilai AKB sebesar 46,31. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada bayi dan ibu. Tingginya nilai AKB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kurangnya pemeriksaan kehamilan secara rutin (*antenatal care*), serta proses persalinan yang belum sepenuhnya ditangani oleh tenaga kesehatan.

Berbeda dengan AKB yang menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan anak, AKI menggambarkan keberhasilan penanganan kesehatan ibu selama proses kehamilan dan persalinan. Namun demikian, keduanya dipengaruhi oleh faktor yang serupa, seperti kurangnya pemeriksaan kehamilan secara rutin serta proses persalinan yang belum sepenuhnya ditangani oleh tenaga kesehatan. Untuk mengetahui Angka Kematian Ibu berdasarkan kecamatan disajikan data seperti berikut:

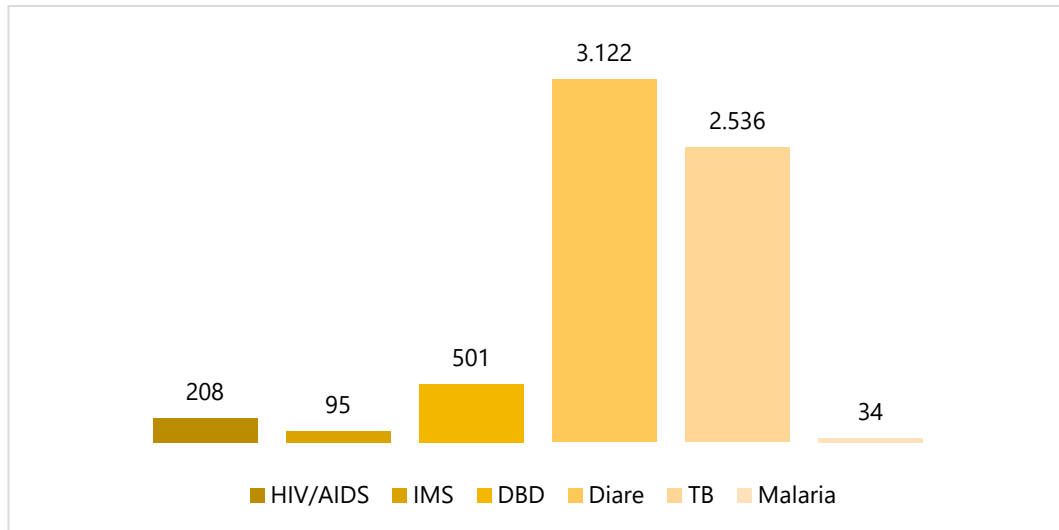
Tabel 3.21 Angka Kematian Ibu (AKI) per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI
33.15.01	Kedungjati			1	1	457	218,8
33.15.02	Karangrayung	1		1	2	1.117	179,1
33.15.03	Penawangan			1	1	689	145,1
33.15.04	Toroh			1	1	1.116	89,6
33.15.05	Geyer				0	641	0,0
33.15.06	Pulokulon				0	1.172	0,0
33.15.07	Kradenan			1	1	876	114,2
33.15.08	Gabus	1			1	715	139,9
33.15.09	Ngaringan				0	781	0,0
33.15.10	Wirosari				0	1.029	0,0
33.15.11	Tawangharjo			1	1	609	164,2
33.15.12	Grobogan			3	3	889	337,5
33.15.13	Purwodadi	1			1	1.460	68,5
33.15.14	Brati			1	1	560	178,6
33.15.15	Klambu				0	374	0,0
33.15.16	Godong				0	955	0,0
33.15.17	Gubug				0	990	0,0
33.15.18	Tegowanu				0	648	0,0
33.15.19	Tanggungharjo				0	451	0,0

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan Grobogan merupakan kecamatan dengan nilai AKI tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 337,5. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya penguatan peran tenaga kesehatan dalam menangani ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan persalinan. Dengan demikian, tingginya angka AKI di Kecamatan Grobogan menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak.

Tingginya AKI tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesehatan masyarakat secara umum, termasuk keberadaan dan sebaran kasus penyakit yang terjadi di wilayah tersebut. Keberadaan kasus penyakit dapat meningkatkan risiko komplikasi pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, sehingga turut memengaruhi kondisi kesehatan ibu secara keseluruhan. Adapun data terkait kasus penyakit di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.8 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, dan Malaria Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data yang ada, penyakit dengan jumlah kasus terbanyak yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah diare dengan kasus sebanyak 3.122 kasus. Tingginya kasus diare menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan yang masih cukup dominan berkaitan dengan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta gaya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kondisi tersebut tentunya tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, melainkan berdampak juga pada kesehatan ibu hamil dan anak jika tidak segera mendapatkan penanganan. Secara lebih rinci sebaran kasus penyakit di Kabupaten Grobogan berdasarkan kecamatan disajikan seperti pada tabel berikut:

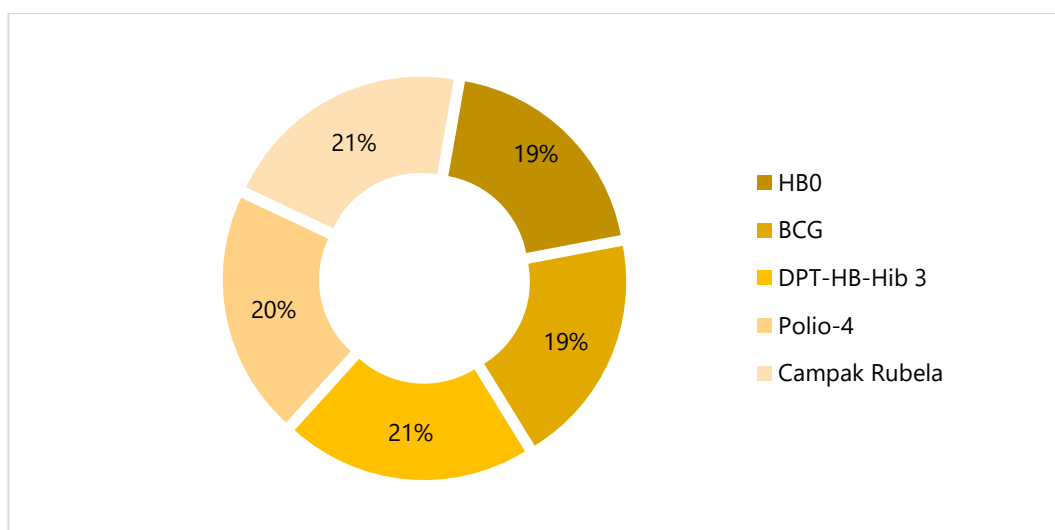
Tabel 3.22 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
33.15.01	Kedungjati	5	2	18	239	41	1
33.15.02	Karangrayung	9	1	30	257	175	1
33.15.03	Penawangan	14	2	20	75	104	4
33.15.04	Toroh	23	28	58	248	190	10
33.15.05	Geyer	4	8	9	235	117	0
33.15.06	Pulokulon	15	6	18	277	174	1
33.15.07	Kradenan	22	5	15	175	171	2
33.15.08	Gabus	22	4	15	181	198	0
33.15.09	Ngaringan	8	6	22	70	124	5
33.15.10	Wirosari	17	8	8	193	205	2

Kode Kecamatan	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
33.15.11	Tawangharjo	7	2	29	54	131	1
33.15.12	Grobogan	7	0	19	43	133	0
33.15.13	Purwodadi	21	2	71	311	288	3
33.15.14	Brati	5	2	25	14	98	0
33.15.15	Klambu	3	4	23	46	50	0
33.15.16	Godong	13	1	42	119	137	4
33.15.17	Gubug	3	6	42	347	107	0
33.15.18	Tegowanu	7	2	28	168	50	0
33.15.19	Tanggungharjo	3	6	9	70	43	0
	Luar Wilayah	29	23	0	0	245	0
Jumlah		237	118	501	3.122	2.781	34

Sumber: Dinas Kesehatan

Dalam upaya pencegahan kasus penyakit, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui program imunisasi. Imunisasi berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu sehingga dapat menurunkan risiko kematian, khususnya pada bayi dan anak. Cakupan imunisasi yang baik juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Dengan adanya berbagai imunisasi tersebut seperti HB0, BCG, DPT-HB_Hib 3, Polio-4, dan campak rubela, masyarakat dapat memperoleh perlindungan terhadap berbagai penyakit menular yang berpotensi menyebabkan kesakitan atau bahkan kematian. Adapun data terkait hasil imunisasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Persentase Hasil Imunisasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa hasil imunisasi yang telah dilaksanakan menunjukkan jumlah yang relatif merata antar jenis vaksin sehingga tidak hanya terfokus pada satu jenis vaksin tertentu. Namun demikian, di antara berbagai jenis vaksin tersebut vaksin DPT-HB-Hib 3 tercatat memiliki proporsi pemberian yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis vaksin yang lain. Dilihat dari tingkat persebarannya, pemberian vaksin DPT-HB-Hib 3 juga relatif merata antar wilayah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan imunisasi telah tersedia secara luas dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Kondisi ini sejalan dengan tingginya persentase Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*) di Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 97,9 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa dan kelurahan telah mencapai target cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Tingginya capaian UCI tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program imunisasi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi telah terlaksana secara merata hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga mendukung pemerataan perlindungan kesehatan bagi anak di seluruh wilayah kabupaten. Secara lebih rinci, data terkait persentase desa/kelurahan UCI berdasarkan kecamatan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Persentase Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Persentase Desa/Kelurahan UCI
33.15.01	Kedungjati	12	12	100
33.15.02	Karangrayung	19	19	100
33.15.03	Penawangan	20	20	100
33.15.04	Toroh	16	15	93,8
33.15.05	Geyer	13	12	92,3
33.15.06	Pulokulon	13	13	100
33.15.07	Kradenan	14	14	100
33.15.08	Gabus	14	14	100
33.15.09	Ngaringan	12	12	100
33.15.10	Wirosari	14	14	100
33.15.11	Tawangharjo	10	10	100
33.15.12	Grobogan	12	12	100

Kode Kecamatan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	Persentase Desa/Kelurahan UCI
33.15.13	Purwodadi	17	13	76,5
33.15.14	Brati	9	9	100
33.15.15	Klambu	9	9	100
33.15.16	Godong	28	28	100
33.15.17	Gubug	21	21	100
33.15.18	Tegowanu	18	18	100
33.15.19	Tanggungharjo	9	9	100
Jumlah		280	274	97,9

Sumber: Dinas Kesehatan

Secara keseluruhan, persentase desa/kelurahan UCI di Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan capaian yang cukup baik dimana hampir semua kecamatan memiliki capaian sebesar 100 persen yang artinya seluruh desa/kelurahan di wilayah tersebut telah memenuhi target cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan kecamatan dengan capaian yang masih di bawah 100 persen yaitu Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, dan Kecamatan Purowdadi yang artinya belum semua desa/kelurahan di wilayah tersebut telah mencapai status UCI, yaitu telah memenuhi target capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun belum seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Purwodadi berstatus UCI (*Universal Child Immunization*), kecamatan ini mencatat jumlah penerima imunisasi tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan sasaran bayi di Kecamatan Purwodadi, sehingga jumlah imunisasi yang diberikan lebih tinggi. Dengan demikian, tingginya jumlah penerima imunisasi tidak selalu berbanding lurus dengan persentase desa/kelurahan berstatus UCI, karena status UCI lebih mencerminkan pemerataan dan pencapaian cakupan imunisasi di setiap desa/kelurahan, sedangkan jumlah penerima imunisasi dipengaruhi oleh banyaknya sasaran yang dilayani. Secara lebih rinci, sebaran hasil imunisasi menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Hasil Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	HB0	BCG	DPT-HB-Hib 3	Polio-4	Campak Rubela
33.15.01	Kedungjati	453	482	505	476	487
33.15.02	Karangrayung	1.095	1.135	1.063	1.035	1.146
33.15.03	Penawangan	684	668	685	693	707
33.15.04	Toroh	1.114	1.103	1.192	1.198	1.238
33.15.05	Geyer	644	607	632	645	752
33.15.06	Pulokulon	1.153	1.250	1.318	1.160	1.298
33.15.07	Kradenan	846	891	1.004	998	1.000
33.15.08	Gabus	711	730	710	729	747
33.15.09	Ngaringan	742	770	714	761	866
33.15.10	Wirosari	1.026	997	1.082	1.090	1.074
33.15.11	Tawangharjo	609	617	710	727	694
33.15.12	Grobogan	881	482	1.117	1.019	920
33.15.13	Purwodadi	1.290	1.396	1.574	1.598	1.448
33.15.14	Brati	553	573	588	596	565
33.15.15	Klambu	374	362	382	400	402
33.15.16	Godong	953	945	876	887	974
33.15.17	Gubug	1.029	1.053	946	919	969
33.15.18	Tegowanu	654	690	719	732	721
33.15.19	Tanggungharjo	434	457	439	414	461
Jumlah		15.245	15.208	16.256	16.077	16.469

Sumber: Dinas Kesehatan

Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan dengan penerimaan imunisasi terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 7.306 imunisasi dengan rincian 1.290 imunisasi HB0, 1.396 imunisasi BCG, 1.574 imunisasi DPT-HB-Hib 3, 1.598 imunisasi Polio-4, dan 1.448 imunisasi campak rubela. Tingginya capaian imunisasi tersebut juga didukung oleh posisi Kecamatan Purwodadi yang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Grobogan. Banyaknya jumlah penduduk tersebut menyebabkan jumlah sasaran bayi dan balita yang harus dilayani juga lebih banyak, sehingga Kecamatan Purwodadi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap capaian imunisasi secara keseluruhan.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) di Kecamatan Purwodadi yaitu sebanyak 8.449 balita. Kepemilikan Kartu Menuju Sehat (KMS) mencerminkan keterlibatan balita dalam kegiatan pemantauan kesehatan secara rutin, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam memastikan kelengkapan imunisasi sesuai jadwal. Meskipun

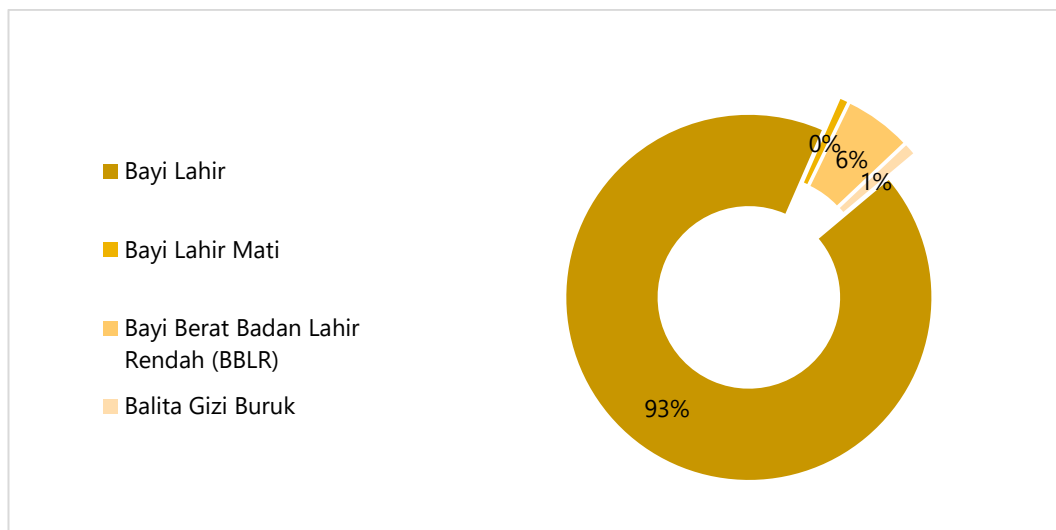
demikian, banyaknya balita yang memiliki KMS tidak sebanding dengan banyaknya balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya layanan penimbangan balita. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan KMS belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan layanan secara rutin. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, tingkat kehadiran balita di posyandu, mobilitas penduduk, maupun faktor akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penimbangan balita. Secara lebih rinci, banyaknya kunjungan dan penimbangan balita menurut kecamatan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.25 Banyaknya Kunjungan dan Penimbangan Balita Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Posyandu	Balita dengan KMS	Balita yang Ditimbang
33.15.01	Kedungjati	73	2.690	1.666
33.15.02	Karangrayung	72	6.644	4.267
33.15.03	Penawangan	97	4.454	2.674
33.15.04	Toroh	125	6.314	5.707
33.15.05	Geyer	84	4.188	3.434
33.15.06	Pulokulon	91	6.667	5.695
33.15.07	Kradenan	88	5.272	4.044
33.15.08	Gabus	77	4.128	4.014
33.15.09	Ngaringan	84	4.229	3.742
33.15.10	Wirosari	112	5.527	4.064
33.15.11	Tawangharjo	76	3.458	2.876
33.15.12	Grobogan	72	4.959	4.388
33.15.13	Purwodadi	135	8.449	5.687
33.15.14	Brati	53	3.124	2.703
33.15.15	Klambu	42	2.254	2.141
33.15.16	Godong	136	5.627	4.893
33.15.17	Gubug	86	5.737	3.978
33.15.18	Tegowanu	82	4.103	3.832
33.15.19	Tanggungharjo	36	2.747	2.316
Jumlah		1.621	90.571	72.121

Sumber: Dinas Kesehatan

Banyaknya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) tidak menjamin banyak juga jumlah balita yang ditimbang di suatu wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan KMS perlu diimbangi dengan upaya untuk mendorong kehadiran balita pada kegiatan penimbangan secara rutin agar pemantauan status gizi dan pertumbuhan dapat berlangsung secara optimal. Pemantauan gizi dan pertumbuhan pada bayi dan balita menjadi semakin penting mengingat masih ditemukannya kasus bayi dengan berat badan lahir rendah dan balita gizi buruk.



Gambar 3.10 Persentase Bayi Lahir, Bayi Lahir Mati, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 3.26 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Lahir Mati, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

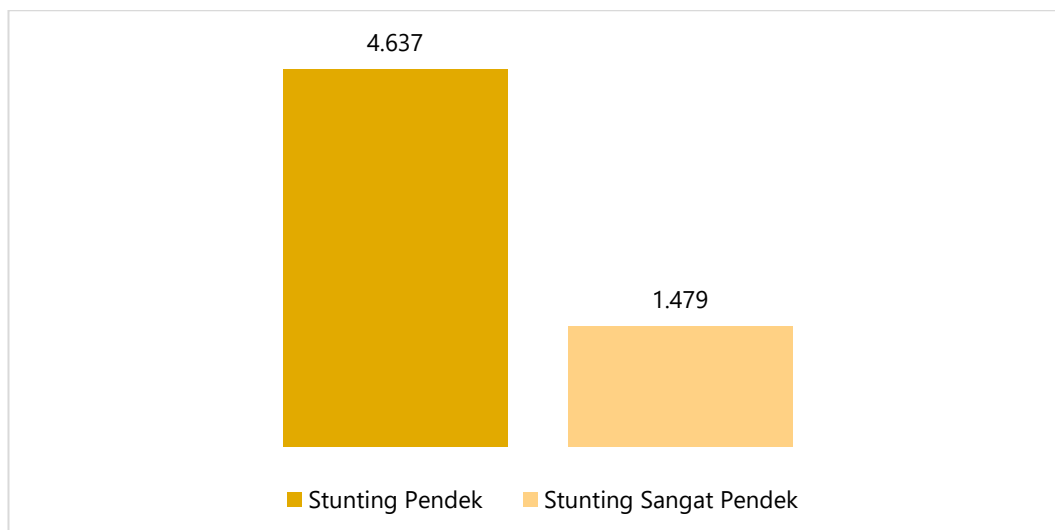
Kode Kecamatan	Kecamatan	Bayi Lahir	Bayi Lahir Mati	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Balita Gizi Buruk
33.15.01	Kedungjati	457	8	22	0
33.15.02	Karangrayung	1.117	6	63	3
33.15.03	Penawangan	689	5	43	3
33.15.04	Toroh	1.116	8	74	11
33.15.05	Geyer	641	2	49	5
33.15.06	Pulokulon	1.172	5	75	18
33.15.07	Kradenan	876	5	84	2
33.15.08	Gabus	715	4	52	7
33.15.09	Ngaringan	781	1	35	4
33.15.10	Wirosari	1.029	9	78	9
33.15.11	Tawangharjo	609	6	43	27
33.15.12	Grobogan	889	9	35	8
33.15.13	Purwodadi	1.460	10	61	4
33.15.14	Brati	560	4	50	13
33.15.15	Klambu	374	5	36	0
33.15.16	Godong	955	5	51	17
33.15.17	Gubug	990	3	56	8
33.15.18	Tegowanu	648	9	34	3
33.15.19	Tanggungharjo	451	4	25	14
Jumlah		15.529	108	966	156

Sumber: Dinas Kesehatan

Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025 jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Grobogan sebanyak 15.529 bayi dimana kecamatan dengan jumlah

kelahiran terbanyak berada di Kecamatan Purwodadi yaitu sebanyak 1.460 bayi. Kondisi tersebut sejalan dengan status Purwodadi sebagai kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Grobogan. Adanya kelahiran bayi di suatu wilayah tentunya tidak terlepas dari adanya kematian. Selain menjadi kecamatan dengan penyumbang bayi lahir terbanyak di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi juga menjadi kecamatan dengan jumlah bayi lahir mati di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 10 bayi pada tahun 2025. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah kelahiran paling sedikit adalah Kecamatan Klambu yaitu sebanyak 374 bayi. Rendahnya kelahiran di kecamatan tersebut sejalan dengan karakteristik demografinya yang juga memiliki jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Kondisi kelahiran menjadi salah satu gambaran awal kesehatan ibu dan anak di suatu daerah. Namun, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah kelahiran hidup maupun rendahnya angka bayi lahir mati, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi tersebut adalah jumlah balita stunting, yang menunjukkan banyaknya balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan.



Gambar 3.11 Jumlah Balita *Stunting* di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

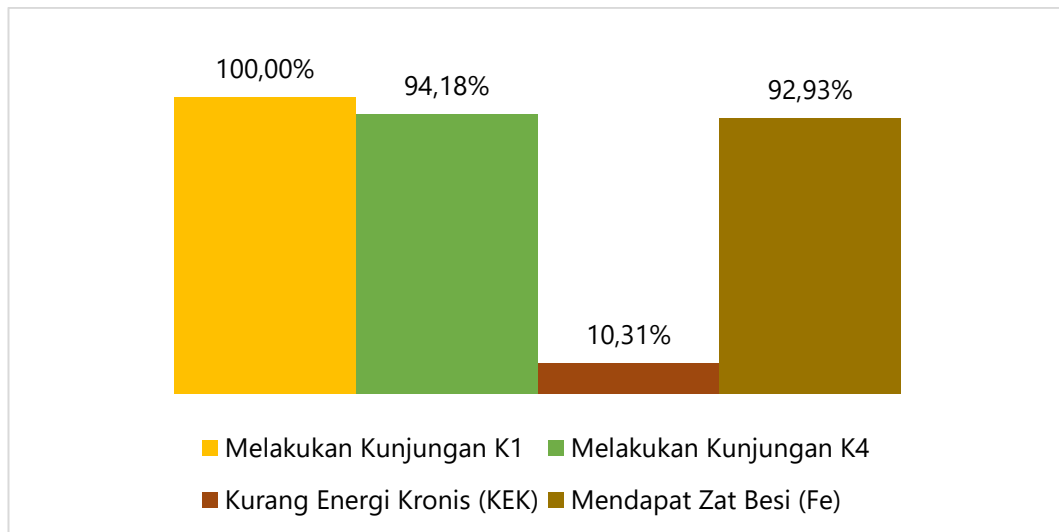
Tabel 3.27 Jumlah Balita Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Balita	Stunting Pendek	Stunting Sangat Pendek
33.15.01	Kedungjati	2.690	175	57
33.15.02	Karangrayung	6.644	127	62
33.15.03	Penawangan	4.454	186	33
33.15.04	Toroh	6.314	200	107
33.15.05	Geyer	4.188	374	83
33.15.06	Pulokulon	6.667	451	94
33.15.07	Kradenan	5.272	212	142
33.15.08	Gabus	4.128	304	84
33.15.09	Ngaringan	4.229	92	86
33.15.10	Wirosari	5.527	190	118
33.15.11	Tawangharjo	3.458	464	95
33.15.12	Grobogan	4.959	253	64
33.15.13	Purwodadi	8.449	264	90
33.15.14	Brati	3.124	76	9
33.15.15	Klambu	2.254	121	41
33.15.16	Godong	5.627	482	116
33.15.17	Gubug	5.737	333	115
33.15.18	Tegowanu	4.103	139	31
33.15.19	Tanggungharjo	2.747	194	52
Jumlah		90.571	4637	1479

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, jumlah balita penderita stunting di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 6.116 balita dengan rincian sebanyak 4.637 balita masuk dalam kategori balita stunting pendek dan sisanya sebanyak 1.479 balita masuk dalam kategori balita stunting sangat pendek. Sementara itu, dilihat dari segi geografis kecamatan dengan jumlah balita stunting paling banyak berada di Kecamatan Godong dengan jumlah balita stunting sebanyak 598 balita.

Upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak setelah lahir, tetapi juga dimulai sejak masa kehamilan melalui pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas. Pelayanan antenatal, seperti kunjungan ibu hamil pertama (K1) dan kunjungan sesuai standar (K4), menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan ibu hamil memperoleh pemantauan kesehatan secara rutin, deteksi dini risiko kehamilan, serta edukasi mengenai pemenuhan gizi dan persiapan persalinan.



Gambar 3.12 Jumlah Ibu Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan capaian yang cukup baik. Sepanjang tahun 2025, seluruh ibu hamil di Kabupaten Grobogan telah mendapatkan pelayanan kunjungan K1, yang menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan antenatal pada awal kehamilan telah menjangkau seluruh sasaran. Selain itu, sebesar 94,18 persen ibu hamil telah menyelesaikan kunjungan antenatal sesuai standar (K4), yang mencerminkan tingginya kepatuhan ibu hamil dalam memanfaatkan layanan kesehatan selama masa kehamilan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil telah memperoleh pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, sehingga kondisi kesehatan ibu dan janin dapat dipantau secara optimal serta berbagai faktor risiko kehamilan dapat dideteksi dan ditangani lebih dini.

Melalui pelayanan antenatal, kondisi gizi ibu juga dapat dipantau sehingga ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dapat diidentifikasi lebih dini dan memperoleh penanganan yang sesuai. Selain itu, pemberian tablet tambah darah (zat besi) kepada ibu hamil merupakan salah satu intervensi penting yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama kehamilan, mencegah anemia, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Dengan demikian, cakupan pelayanan antenatal yang tinggi diharapkan mampu

mendukung perbaikan status gizi ibu hamil dan mengurangi risiko gangguan kesehatan pada ibu maupun bayi.

Meskipun sebagian besar kebutuhan pelayanan kesehatan baik kesehatan ibu hamil, kesehatan anak, maupun kesehatan masyarakat umum dapat dipenuhi melalui fasilitas kesehatan dasar, namun demikian beberapa kasus dengan risiko tinggi atau komplikasi memerlukan pelayanan lanjutan di rumah sakit. Rumah sakit juga berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara lebih luas melalui layanan rawat inap, layanan rawat jalan, maupun layanan operasi.

Sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Grobogan, RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat, termasuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Melalui layanan rawat inap, rumah sakit ini mendukung penanganan berbagai kondisi medis, mulai dari penyakit umum hingga kasus-kasus yang memerlukan perawatan intensif, sehingga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Grobogan. Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi disajikan data seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.28 Jumlah Pelayanan Rawat Inap di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Tahun 2025

Kelas	2025
Utama/VIP	1.131
Kelas I	1.424
Kelas II	2.521
Kelas III	13.180
ICU	545
HND	0
Neoristi	395
PICU/NICU	0
Isolasi	0
Isolasi Tak Negatif	175
Isolasi Bertekanan Negatif	836
Jumlah	20.207

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 3.29 Jumlah Pelayanan Rawat Jalan di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Tahun 2025

Klinik	Jumlah Pasien	Jumlah Hari Buka	Rata-rata Pasien Per Hari
Anak	4.932	295	17
Bedah	2.236	295	8



Klinik	Jumlah Pasien	Jumlah Hari Buka	Rata-rata Pasien Per Hari
CST	3.033	295	10
Dalam	5.793	295	20
Fisioterapi	7.140	295	24
Geriatri	0	0	0
Gigi Dan Mulut	350	295	1
Gizi	0	0	0
Hemodialisa	15.726	295	53
Home Care	0	0	0
Jantung Dan Pembuluh Darah	9.509	295	32
Kanker Dan Kelainan Darah	6.516	295	22
Kebidanan & Kandungan	898	295	3
Keluarga Berencana	50	295	0
Kulit Dan Kelamin	5.377	295	18
Mata	6.166	295	21
Mcu	13	295	0
Orthopedy	1.937	295	7
Paru	10.317	295	35
Pav Anak	0	0	0
Pav Bedah	0	0	0
Pav Dalam	0	0	0
Pav Kanker Dan Kelainan Darah	0	0	0
Pav Kulit Dan Kelamin	0	0	0
Pav Obsgyn	0	0	0
Pav Paru	0	0	0
Pav Saraf	0	0	0
Pav THT	0	0	0
Poli Khusus	0	0	0
Psikiatri	8.503	295	29
Psikologi	267	295	1
Rehabilitasi Medis	8.842	295	30
Saraf	10.154	295	34
Tb Dots	109	295	0
THT	4.211	295	14
Tumbuh Kembang Anak	0	0	0
Umum	3.645	295	12
Urologi	0	0	0
VCT	123	295	0
Jumlah	115.847	7.080	392

Sumber: Dinas Kesehatan

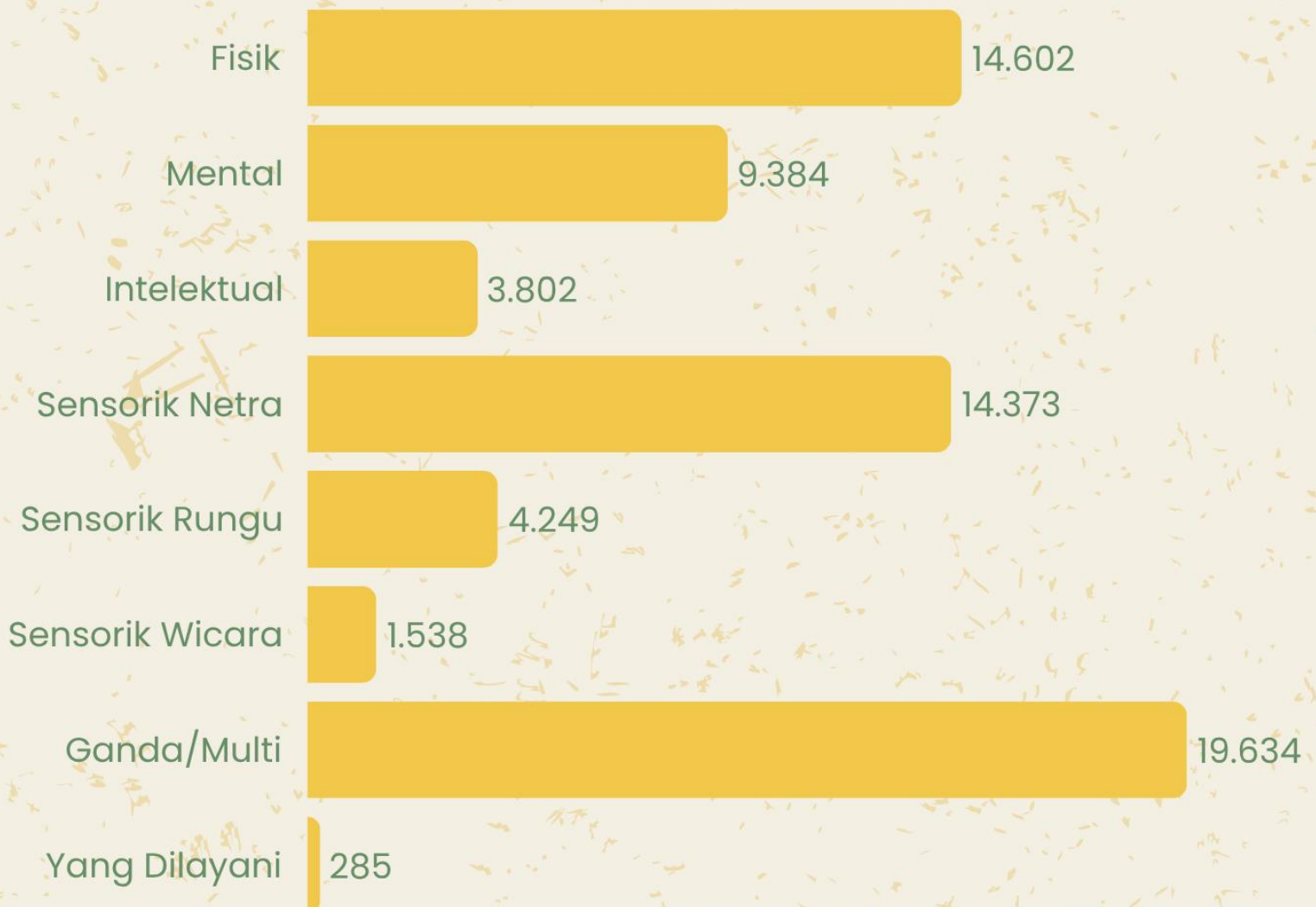
Tabel 3.30 Jumlah Pelayanan Operasi di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Tahun 2025

Kelas	2025
Utama/VIP	184
Kelas I	282
Kelas II	502
Kelas III	2.414
ICU	60
HND	0
Neoristi	1
PICU/NICU	0
Isolasi	14
Isolasi Tak Negatif	7
Isolasi Bertekanan Negatif	16
Jumlah	3.480

Sumber: Dinas Kesehatan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pasien pelayanan rawat inap di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi pada tahun 2025 sebanyak 20.207 pasien yang terbagi menjadi beberapa jenis layanan seperti layanan utama/VIP, layanan kelas I hingga III, layanan ICU, HND, neorisiti, hingga layanan isolasi bertekanan negatif. Jumlah pasien tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pasien layanan rawat jalan di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi yaitu sebanyak 115.847 pasien pada tahun 2025. Jumlah pelayanan rawat inap umumnya lebih rendah dibandingkan pelayanan rawat jalan karena tidak semua pasien memerlukan perawatan di rumah sakit. Sebagian besar kasus dapat ditangani melalui pelayanan rawat jalan, sedangkan layanan rawat inap hanya diberikan kepada pasien dengan indikasi medis tertentu yang memerlukan observasi, tindakan lanjutan, atau pemantauan secara intensif.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Grobogan Tahun 2025



3.3 Sosial

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwujudkan melalui penyediaan pelayanan sosial yang merata dan inklusif. Sebagai perwujudan dari pelayanan sosial yang merata, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum melainkan juga kepada kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, jumlah masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 67.582 orang dengan rincian 14.602 orang disabilitas fisik, 9.384 disabilitas mental, 3.802 disabilitas intelektual, 3.802 disabilitas sensorik netra, 4.249 disabilitas sensorik rungu, 1.538 disabilitas sensorik wicara, dan 19.634 disabilitas ganda/multi. Untuk mengetahui persebaran penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3.31 Banyaknya Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Fisik	Mental	Intelektual	Sensorik Netra
33.15.01	Kedungjati	452	81	114	294
33.15.02	Karangrayung	1.093	326	264	985
33.15.03	Penawangan	489	251	169	710
33.15.04	Toroh	912	595	337	823
33.15.05	Geyer	547	282	172	492
33.15.06	Pulokulon	728	280	230	754
33.15.07	Kradenan	796	146	150	490
33.15.08	Gabus	2.069	211	286	2.005
33.15.09	Ngaringan	791	271	220	1.145
33.15.10	Wirosari	759	1.200	214	800
33.15.11	Tawangharjo	416	274	124	445
33.15.12	Grobogan	507	778	175	770
33.15.13	Purwodadi	2.340	1.411	306	1.800
33.15.14	Brati	454	198	130	425
33.15.15	Klambu	291	478	99	375
33.15.16	Godong	864	713	376	696
33.15.17	Gubug	520	665	195	709
33.15.18	Tegowanu	357	123	140	427
33.15.19	Tanggunharjo	217	1.101	101	228
Jumlah		14.602	9.384	3.802	14.373

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 3.32 Lanjutan Tabel Banyaknya Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sensorik Rungu	Sensorik Wicara	Ganda/ Multi	Jumlah
33.15.01	Kedungjati	105	58	373	1.477
33.15.02	Karangrayung	320	124	1.259	4.371
33.15.03	Penawangan	210	97	675	2.601
33.15.04	Toroh	331	131	1.325	4.454
33.15.05	Geyer	243	79	718	2.533
33.15.06	Pulokulon	267	101	1.059	3.419
33.15.07	Kradenan	214	68	693	2.557
33.15.08	Gabus	444	108	2.448	7.571
33.15.09	Ngaringan	363	91	1.314	4.195
33.15.10	Wirosari	226	76	995	4.270
33.15.11	Tawangharjo	142	47	712	2.160
33.15.12	Grobogan	155	90	879	3.354
33.15.13	Purwodadi	397	113	2.873	9.240
33.15.14	Brati	123	51	621	2.002
33.15.15	Klambu	99	43	517	1.902
33.15.16	Godong	208	107	1.195	4.159
33.15.17	Gubug	184	68	819	3.160
33.15.18	Tegowanu	129	53	676	1.905
33.15.19	Tanggunharjo	89	33	483	2.252
Jumlah		4.249	1.538	19.634	67.582

Sumber: Dinas Sosial

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi juga memiliki masyarakat dengan penyandang disabilitas terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu sebanyak 9.240 orang dengan rincian 2.340 orang penyandang disabilitas fisik, 1.411 orang penyandang disabilitas mental, 306 orang penyandang disabilitas intelektual, 1.800 orang penyandang disabilitas sensorik netra, 397 orang penyandang disabilitas sensorik rungu, 113 orang penyandang disabilitas sensorik wicara, dan 2.873 orang penyandang disabilitas ganda/multi. Banyaknya penyandang disabilitas multi/ganda di Kecamatan Purwodadi menunjukkan bahwa banyak masyarakat dengan gangguan disabilitas lebih dari satu jenis yang menyebabkan kebutuhan akan layanan perlindungan sosial di kecamatan tersebut memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit di Kabupaten Grobogan adalah Kecamatan Kedungjati yaitu sebanyak 1.477

orang dengan rincian 452 orang penyandang disabilitas fisik, 81 orang penyandang disabilitas mental, 114 orang penyandang disabilitas intelektual, 294 orang penyandang disabilitas sensorik netra, 105 orang penyandang disabilitas sensorik rungu, 58 orang penyandang disabilitas sensorik wicara, dan 373 orang penyandang disabilitas ganda/multi. Meskipun jumlah penyandang disabilitas di wilayah tersebut lebih sedikit, pemenuhan hak dan akses terhadap pelayanan bagi penyandang disabilitas tetap perlu menjadi perhatian.

Selain penyandang disabilitas, keberadaan lansia terlantar juga perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Seiring bertambahnya usia, sebagian lansia mengalami penurunan kemampuan fisik maupun mental yang dapat meningkatkan ketergantungan terhadap keluarga atau lingkungan sekitar. Apabila tidak memperoleh dukungan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan lansia mengalami keterlantaran dan membutuhkan intervensi sosial dari pemerintah. Untuk mengetahui persebaran lansia terlantar di Kabupaten Grobogan disajikan data seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.33 Banyaknya Lansia Terlantar menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
33.15.01	Kedungjati	1	0	1
33.15.02	Karangrayung	0	0	0
33.15.03	Penawangan	0	0	0
33.15.04	Toroh	1	1	2
33.15.05	Geyer	0	0	0
33.15.06	Pulokulon	0	2	2
33.15.07	Kradenan	0	0	0
33.15.08	Gabus	0	1	1
33.15.09	Ngaringan	0	0	0
33.15.10	Wirosari	0	0	0
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0
33.15.12	Grobogan	0	0	0
33.15.13	Purwodadi	1	1	2
33.15.14	Brati	0	0	0
33.15.15	Klambu	0	0	0
33.15.16	Godong	0	0	0
33.15.17	Gubug	0	0	0
33.15.18	Tegowanu	0	1	1
33.15.19	Tanggungharjo	0	0	0
Tahun 2025		3	6	9

Sumber: Dinas Sosial

Secara keseluruhan, jumlah lansia terlantar di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 9 orang dengan rincian 3 orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang berjenis kelamin perempuan yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Toroh, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Gabus, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Tegowanu. Persebaran jumlah lansia terlantar di Kabupaten Grobogan dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia yang membutuhkan.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial juga perlu mencakup perlindungan terhadap anak jalanan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Di Kabupaten Grobogan, jumlah anak jalanan tercatat sebanyak 2 orang sepanjang tahun 2025. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sedikit anak yang memerlukan perhatian melalui program perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak dasar untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk mengetahui sebaran anak jalanan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.34 Banyaknya Anak Jalanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Anak Jalanan
33.15.01	Kedungjati	0
33.15.02	Karangrayung	0
33.15.03	Penawangan	0
33.15.04	Toroh	0
33.15.05	Geyer	0
33.15.06	Pulokulon	0
33.15.07	Kradenan	1
33.15.08	Gabus	0
33.15.09	Ngaringan	0
33.15.10	Wirosari	0
33.15.11	Tawangharjo	0
33.15.12	Grobogan	0
33.15.13	Purwodadi	1
33.15.14	Brati	0
33.15.15	Klambu	0
33.15.16	Godong	0
33.15.17	Gubug	0

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Anak Jalanan
33.15.18	Tegowanu	0
33.15.19	Tanggungharjo	0
Jumlah		2

Sumber: Dinas Sosial

Tidak semua wilayah di Kabupaten Grobogan memiliki anak jalanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan tidak tersebar secara merata di seluruh kecamatan. Meskipun demikian, keberadaan anak jalanan di beberapa wilayah tetap memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan layak.

Untuk memastikan bahwa anak jalanan memperoleh perlindungan dan pelayanan yang memadai, pemerintah menyediakan berbagai bentuk layanan sosial, salah satunya melalui penyediaan panti asuhan yang tersebar di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, jumlah panti asuhan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 24 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Secara lebih rinci persebaran panti asuhan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Jumlah Panti Asuhan Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Panti Asuhan Anak
33.15.01	Kedungjati	0
33.15.02	Karangrayung	1
33.15.03	Penawangan	1
33.15.04	Toroh	2
33.15.05	Geyer	0
33.15.06	Pulokulon	0
33.15.07	Kradenan	1
33.15.08	Gabus	1
33.15.09	Ngaringan	0
33.15.10	Wirosari	2
33.15.11	Tawangharjo	1
33.15.12	Grobogan	1
33.15.13	Purwodadi	5
33.15.14	Brati	0
33.15.15	Klambu	0
33.15.16	Godong	4
33.15.17	Gubug	1
33.15.18	Tegowanu	2
33.15.19	Tanggungharjo	2
Jumlah		24

Sumber: Dinas Sosial



Berdasarkan data di atas, ketersediaan panti asuhan belum tersebar secara merata antar wilayah di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukan perlindungan masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, sehingga diperlukan upaya untuk memastikan bahwa seluruh anak yang membutuhkan tetap dapat memperoleh pelayanan sosial secara optimal.

Kondisi Demografis Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Total Penduduk
1.525.214
Jiwa

Persentase Jenis Kelamin



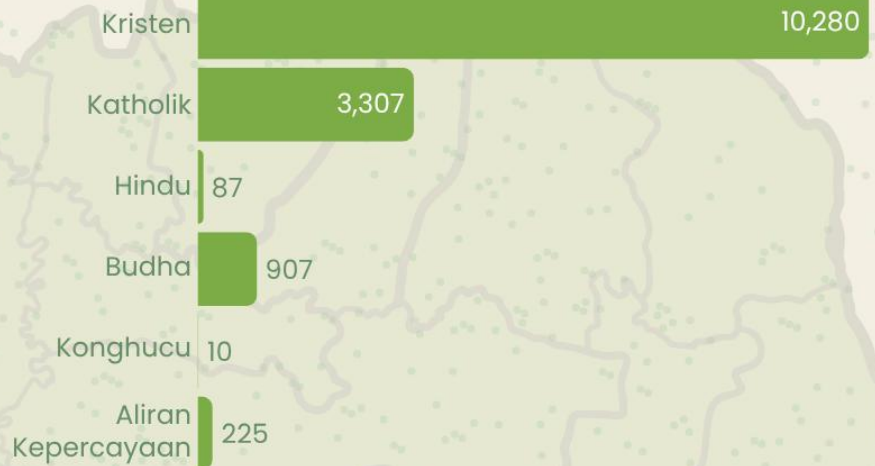
50,3%

49,7%

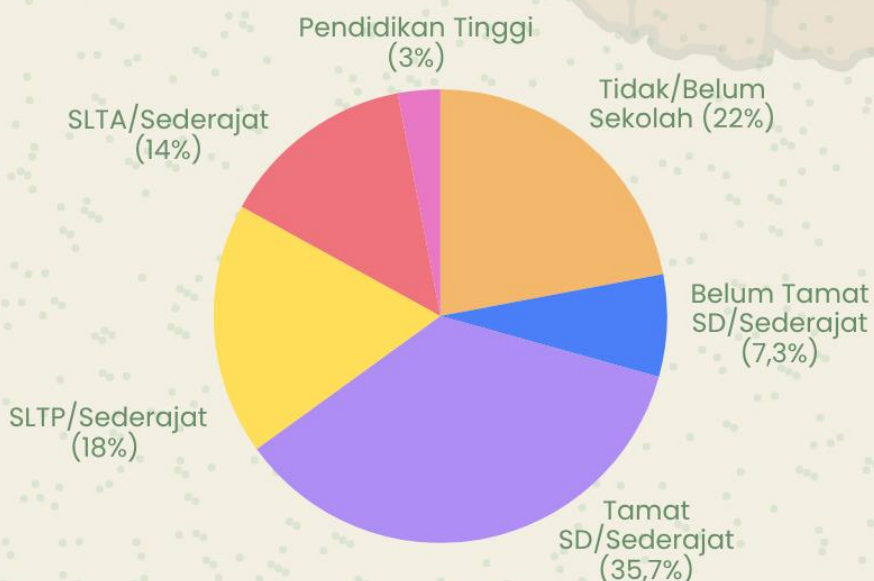
Distribusi 1% Penduduk Non-Islam



99%
Penduduk
Beragama Islam



Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan



Distribusi Penduduk Berpendidikan Tinggi

- D1/D2 = 2.981
- Akdemi/D3 = 8.698
- D4/S1 = 32.866
- S2 = 1.582
- S3 = 41

3.4 Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang krusial dalam perencanaan pembangunan karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kebijakan publik. Oleh karena itu, ketersediaan data kependudukan yang akurat sangat diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.525.214 orang sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 767.149 orang, sedangkan sisanya penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 758.065 orang. Untuk mengetahui persebaran penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan, disajikan tabel seperti berikut.

Tabel 3.36 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

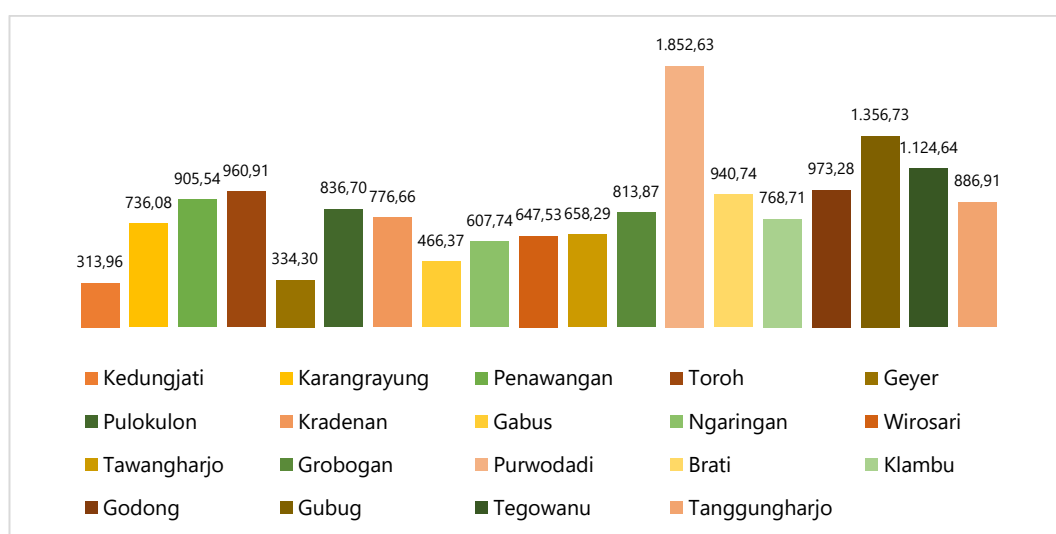
Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
33.15.01	Kedungjati	22.839	22.776	45.615
33.15.02	Karangrayung	53.670	52.525	106.195
33.15.03	Penawangan	34.353	33.771	68.124
33.15.04	Toroh	60.840	60.923	121.763
33.15.05	Geyer	34.400	34.179	68.579
33.15.06	Pulokulon	57.799	56.786	114.585
33.15.07	Kradenan	43.575	43.149	86.724
33.15.08	Gabus	38.393	38.059	76.452
33.15.09	Ngaringan	36.783	35.632	72.415
33.15.10	Wirosari	49.215	48.579	97.794
33.15.11	Tawangharjo	31.062	30.202	61.264
33.15.12	Grobogan	41.730	40.869	82.599
33.15.13	Purwodadi	72.266	72.568	144.834
33.15.14	Brati	26.905	26.304	53.209
33.15.15	Klambu	20.326	19.915	40.241
33.15.16	Godong	45.390	45.061	90.451
33.15.17	Gubug	44.583	44.307	88.890
33.15.18	Tegowanu	30.652	30.371	61.023
33.15.19	Tanggunharjo	22.368	22.089	44.457
Jumlah		767.149	758.065	1.525.214

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai pusat ibu kota, Kecamatan Purwodadi menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan sehingga menarik lebih banyak penduduk untuk tinggal maupun bekerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa Kecamatan Purwodadi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Grobogan dengan jumlah penduduk sebanyak 144.834 orang dengan rincian 72.266 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 72.568 penduduk berjenis kelamin perempuan.

Banyaknya penduduk di Kecamatan Purwodadi juga beriringan dengan tingginya kepadatan penduduk di kecamatan tersebut, dimana pada tahun 2025 kepadatan penduduk di Kecamatan Purwodadi tercatat sebesar 1.852,63 jiwa/km². Artinya, dalam setiap 1 km² terdapat rata-rata 1.852 penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah dengan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kedungjati dengan kepadatan penduduk sebesar 313,96 jiwa/km².

Tingginya rendahnya kepadatan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, melainkan luas wilayah sehingga kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak belum tentu memiliki kepadatan tinggi apabila luas wilayahnya relatif luas. Begitu pula sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit belum tentu memiliki kepadatan rendah apabila luas wilayahnya relatif terbatas. Secara lebih rinci kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan disajikan seperti pada tabel berikut.

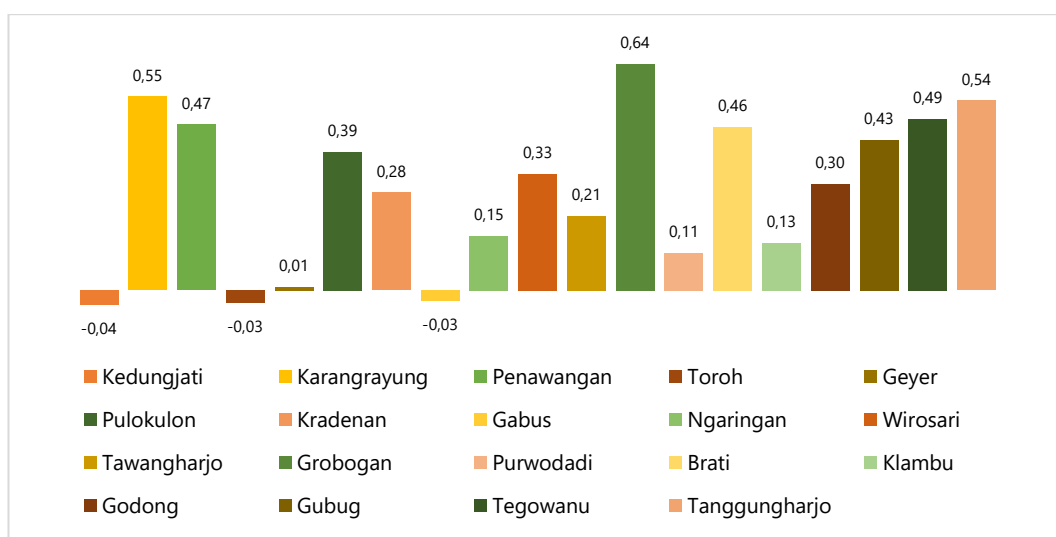


Gambar 3.13 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepadatan penduduk merupakan salah satu dampak dari dinamika pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, semakin besar juga potensi peningkatan kepadatan penduduk apabila luas wilayahnya relatif terbatas. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut juga tinggi, karena tingkat kepadatan dipengaruhi oleh akumulasi jumlah penduduk selama bertahun-tahun serta pola persebaran penduduk.

Sebagai kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kabupaten Grobogan, kecamatan Purwodadi memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu sebesar 0,11 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di kecamatan tersebut relatif lebih lambat. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan menurut kecamatan disajikan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan sangat beraneka ragam antar wilayah. Bahkan ditemukan beberapa kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk negatif yaitu Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Toroh, dan Kecamatan Gabus dengan laju pertumbuhan penduduk berturut-turut sebesar -0,04; -0,03; dan -0,03. Laju

pertumbuhan penduduk yang bernilai negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengurangan jumlah penduduk lebih besar daripada penambahannya, yang dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk (migrasi).

Perubahan dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi tidak hanya berdampak pada jumlah populasi melainkan berdampak juga pada karakteristik demografi di suatu wilayah. Karakteristik demografi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti agama, pendidikan, maupun kelompok usia. Dilihat dari segi agama, persebaran agama di Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok diantaranya, islam, kristen, katholik, hindu, budha, konghucu, dan aliran kepercayaan.

Secara keseluruhan, mayoritas penduduk di Kabupaten Grobogan merupakan pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 1.510.398 penduduk yang tersebar di masing-masing kecamatan. Hal tersebut juga sejalan dengan kondisi penduduk Indonesia yang didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam. Selain Islam, terdapat juga penduduk yang beragama Kristen dengan jumlah yang cukup besar yaitu sebanyak 10.280 penduduk. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa terdapat tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas keagamaan yang inklusif bagi seluruh penduduk di Kabupaten Grobogan. Secara lebih rinci, untuk mengetahui persebaran penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.37 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik
33.15.01	Kedungjati	45.165	158	88
33.15.02	Karangrayung	105.844	258	37
33.15.03	Penawangan	67.825	260	22
33.15.04	Toroh	121.211	379	137
33.15.05	Geyer	68.171	325	75
33.15.06	Pulokulon	114.206	328	36
33.15.07	Kradenan	86.145	502	52
33.15.08	Gabus	75.975	429	15
33.15.09	Ngaringan	71.291	686	20
33.15.10	Wirosari	96.250	1.305	208
33.15.11	Tawangharjo	61.053	117	83

Kode Kecamatan	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik
33.15.12	Grobogan	82.052	399	97
33.15.13	Purwodadi	140.713	3.014	982
33.15.14	Brati	52.957	183	9
33.15.15	Klambu	40.190	33	3
33.15.16	Godong	90.127	262	48
33.15.17	Gubug	87.235	439	1.182
33.15.18	Tegowanu	60.110	707	132
33.15.19	Tanggunharjo	43.878	496	81
Jumlah		1.510.398	10.280	3.307

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.38 Tabel Lanjutan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Hindu	Budha	Konghuchu	Aliran Kepercayaan
33.15.01	Kedungjati	1	201	0	2
33.15.02	Karangrayung	34	15	0	7
33.15.03	Penawangan	0	4	0	13
33.15.04	Toroh	2	29	0	5
33.15.05	Geyer	0	5	0	3
33.15.06	Pulokulon	0	5	0	10
33.15.07	Kradenan	0	0	0	25
33.15.08	Gabus	3	0	0	30
33.15.09	Ngaringan	2	413	0	3
33.15.10	Wirosari	4	16	5	6
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0	11
33.15.12	Grobogan	6	6	0	39
33.15.13	Purwodadi	26	63	5	31
33.15.14	Brati	0	45	0	15
33.15.15	Klambu	4	0	0	11
33.15.16	Godong	1	9	0	4
33.15.17	Gubug	4	22	0	8
33.15.18	Tegowanu	0	74	0	0
33.15.19	Tanggunharjo	0	0	0	2
Jumlah		87	907	10	225

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Purwodadi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 140.713 penduduk. Sementara itu, penduduk pemeluk agama Konghucu memiliki komposisi paling sedikit di Kecamatan Purwodadi yaitu sebanyak 5 orang. Pola tersebut tidak hanya ditemukan di Kecamatan Purwodadi, melainkan juga

ditemukan di Kecamatan Wirosari di mana mayoritas penduduk menganut agama Islam sedangkan minoritas penduduk menganut agama Konghucu.

Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dilihat dari segi pendidikan. Komposisi penduduk menurut pendidikan dapat menggambarkan tingkat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang dicapai penduduk menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan produktivitas, serta beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan mayoritas memiliki tingkat pendidikan terakhir SD/Sederajat yaitu sebanyak 544.769 penduduk dengan rincian 258.176 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 286.593 penduduk berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, masih terdapat penduduk yang belum pernah bersekolah dengan jumlah yang relatif cukup besar yaitu sebanyak 336.033 penduduk dengan rincian 170.928 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 165.105 penduduk berjenis kelamin perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih perlu terus ditingkatkan, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masih perlunya upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 3.39 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	170.928	165.105	336.033
2	Belum Tamat SD/Sederajat	57.746	53.363	111.109
3	Tamat SD/Sederajat	258.176	286.593	544.769
4	SLTP/Sederajat	141.354	132.837	274.191
5	SLTA/Sederajat	118.307	94.637	212.944
6	Diploma I/II	1.307	1.674	2.981
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3.325	5.373	8.698
8	Diploma IV/Strata I	15.026	17.840	32.866
9	Strata II	950	632	1582
10	Strata III	30	11	41
Jumlah		767.149	758.065	1.525.214

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meskipun penduduk Kabupaten Grobogan didominasi oleh kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir SD/Sederajat, terdapat juga penduduk yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S3 meskipun dengan jumlah yang masih sedikit yaitu sebanyak 41 orang dengan rincian 30 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang penduduk berjenis kelamin perempuan. Keberadaan penduduk tersebut, mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi akademik yang tinggi meskipun dengan jumlah yang relatif kecil.

Kemudian dari segi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan mayoritas berasal dari kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 119.759 yang terdiri dari 61.583 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 58.176 penduduk berjenis kelamin perempuan. Banyaknya penduduk dari usia produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan, dan peningkatan produktivitas apabila didukung oleh kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit berasal dari kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 36.149 penduduk dengan rincian 18.044 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 18.105 penduduk berjenis kelamin perempuan.

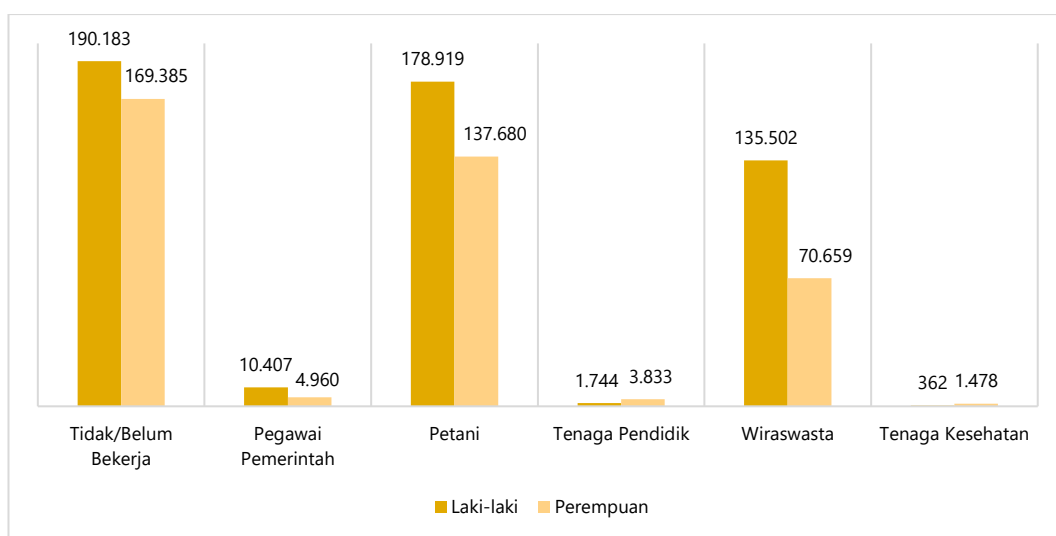
Tabel 3.40 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	49.263	46.386	95.649
2	5-9	59.758	56.168	115.926
3	10-14	60.139	56.754	116.893
4	15-19	59.464	55.877	115.341
5	20-24	56.878	54.225	111.103
6	25-29	61.583	58.176	119.759
7	30-34	58.630	54.985	113.615
8	35-39	57.473	54.956	112.429
9	40-44	56.155	55.227	111.382
10	45-49	51.755	51.891	103.646
11	50-54	46.589	48.123	94.712
12	55-59	43.158	46.475	89.633
13	60-64	38.383	41.896	80.279
14	65-69	30.823	31.450	62.273
15	70-74	18.044	18.105	36.149
16	>= 75	19.054	27.371	46.425

No	Kelompok Umur Jumlah	Laki-laki 767.149	Perempuan 758.065	Jumlah 1.525.214
----	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mengetahui kontribusi penduduk dalam aktivitas ekonomi, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan. Secara garis besar, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan didominasi oleh penduduk yang tidak/belum bekerja yaitu sebanyak 359.568 penduduk dengan rincian 190.183 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 169.385 penduduk berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum berpartisipasi dalam dunia kerja, baik karena faktor usia, pendidikan, maupun karakteristik sosial lainnya. Sementara itu, penduduk dengan komposisi paling sedikit berasal dari kelompok tenaga kesehatan yaitu sebanyak 1.840 penduduk dengan rincian, 362 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.478 penduduk berjenis kelamin perempuan.



Gambar 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Statistik Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Total Penduduk
1.525.214
Jiwa

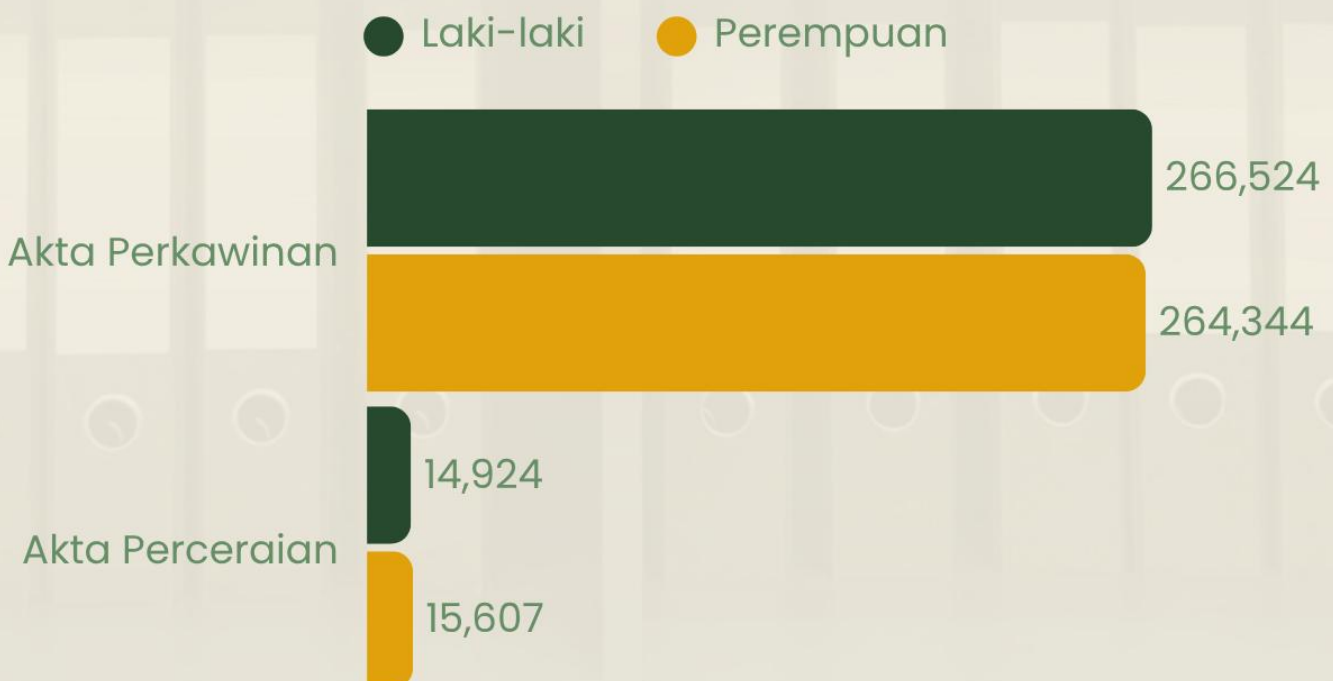


50,7%
Kepemilikan
Akta Kelahiran



Dari **1.149.522 penduduk wajib KTP** di Kabupaten Grobogan, sebanyak **99,38%** telah memiliki **KTP elektronik**.

Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian



3.5 Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan, khususnya pencatatan sipil, merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui pencatatan sipil, setiap peristiwa penting dalam kehidupan penduduk dapat didokumentasikan secara resmi sehingga memberikan kepastian hukum atas status kependudukan. Salah satu bentuk ketertiban administrasi kependudukan dapat dilihat dari kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta perceraian, kepemilikan akta perkawinan, dan lain sebagainya.

Dari segi kepemilikan KTP, sebesar 99,38 persen penduduk wajib KTP di Kabupaten Grobogan telah memiliki KTP. Capaian tersebut menunjukkan bahwa administrasi kependudukan di Kabupaten Grobogan sudah berjalan cukup baik sehingga hampir seluruh penduduk di Kabupaten Grobogan telah memiliki KTP sebagai dokumen identitas resmi. Untuk mengetahui persebaran kepemilikan KTP di Kabupaten Grobogan berdasarkan kecamatan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.41 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Kepemilikan KTP Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Persentase
33.15.01	Kedungjati	34.265	34.074	99,44
33.15.02	Karangrayung	78.634	78.096	99,32
33.15.03	Penawangan	51.144	50.890	99,50
33.15.04	Toroh	92.994	92.556	99,53
33.15.05	Geyer	52.724	52.444	99,47
33.15.06	Pulokulon	86.875	86.197	99,22
33.15.07	Kradenan	65.901	65.490	99,38
33.15.08	Gabus	59.046	58.675	99,37
33.15.09	Ngaringan	54.874	54.519	99,35
33.15.10	Wirosari	73.565	73.072	99,33
33.15.11	Tawangharjo	45.904	45.633	99,41
33.15.12	Grobogan	61.939	61.467	99,24
33.15.13	Purwodadi	109.849	109.254	99,46
33.15.14	Brati	40.098	39.817	99,30
33.15.15	Klambu	30.329	30.124	99,32
33.15.16	Godong	67.811	67.456	99,48
33.15.17	Gubug	65.506	65.131	99,43
33.15.18	Tegowanu	44.798	44.486	99,30

Kode Kecamatan	Kecamatan	Wajib KTP	Kepemilikan KTP	Persentase
33.15.19	Tanggungharjo	33.266	33.051	99,35
Jumlah		1.149.522	1.142.432	99,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, kepemilikan KTP telah tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan yang ditunjukkan oleh capaian kepemilikan KTP yang berkisar antara 99,22 persen hingga 99,53 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan penerbitan KTP, telah menjangkau hampir seluruh wilayah sehingga sebagian besar penduduk yang memenuhi persyaratan telah memiliki dokumen identitas resmi.

Berbeda dengan kepemilikan KTP yang memiliki capaian yang cukup tinggi, kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Grobogan memiliki capaian yang relatif rendah yaitu sebesar 50,70 persen. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan pencatatan sipil, khususnya akta kelahiran agar cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat terus meningkat. Untuk mengetahui persebaran kepemilikan akta kelahiran di masing-masing kecamatan di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.42 Jumlah Akta Kelahiran Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran	Persentase
33.15.01	Kedungjati	23.354	51,20
33.15.02	Karangrayung	55.348	52,12
33.15.03	Penawangan	36.428	53,47
33.15.04	Toroh	57.136	46,92
33.15.05	Geyer	31.461	45,88
33.15.06	Pulokulon	56.494	49,30
33.15.07	Kradenan	46.772	53,93
33.15.08	Gabus	34.274	44,83
33.15.09	Ngaringan	38.534	53,21
33.15.10	Wirosari	49.304	50,42
33.15.11	Tawangharjo	34.726	56,68
33.15.12	Grobogan	40.077	48,52
33.15.13	Purwodadi	73.550	50,78
33.15.14	Brati	26.576	49,95

Kode Kecamatan	Kecamatan	Memiliki Akta Kelahiran	Persentase
33.15.15	Klambu	20.053	49,83
33.15.16	Godong	48.688	53,83
33.15.17	Gubug	45.156	50,80
33.15.18	Tegowanu	32.952	54,00
33.15.19	Tanggungharjo	22.386	50,35
Jumlah		773.269	50,70

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara keseluruhan, capaian kepemilikan akta kelahiran berada di rentang 44,83 persen hingga 54 persen yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran antar kecamatan cenderung tidak berbeda jauh dengan kecamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Grobogan relatif merata meskipun belum semua penduduk memiliki akta kelahiran. Adapun kecamatan dengan capaian kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Kecamatan Tegowanu dengan capaian sebesar 54 persen. Artinya, layanan pencatatan sipil di kecamatan tersebut telah menjangkau lebih banyak penduduk yang menjadi sasaran di wilayah tersebut. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran sebagai dokumen pencatatan sipil yang resmi.

Selain pencatatan tentang kelahiran, penyelenggaraan administrasi kependudukan juga mencakup peristiwa penting lainnya, salah satunya perkawinan dan perceraian. Secara keseluruhan, jumlah akta perkawinan di Kabupaten Grobogan yang diterbitkan pada tahun 2025 sebanyak 530.868 akta sedangkan jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 30.531 akta. Untuk mengetahui persebaran kepemilikan kata perkawinan dan akta perceraian disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.43 Jumlah Akta Perkawinan Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Akta Perkawinan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
33.15.01	Kedungjati	8.804	8.911	17.715
33.15.02	Karangrayung	18.810	18.639	37.449
33.15.03	Penawangan	11.931	11.791	23.722
33.15.04	Toroh	19.381	19.288	38.669
33.15.05	Geyer	12.057	11.859	23.916
33.15.06	Pulokulon	19.244	19.231	38.475
33.15.07	Kradenan	17.249	17.219	34.468



Kode Kecamatan	Kecamatan	Akta Perkawinan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
33.15.08	Gabus	16.100	15.632	31.732
33.15.09	Ngaringan	14.930	14.749	29.679
33.15.10	Wirosari	16.521	16.307	32.828
33.15.11	Tawangharjo	11.677	11.324	23.001
33.15.12	Grobogan	13.519	13.084	26.603
33.15.13	Purwodadi	24.255	24.307	48.562
33.15.14	Brati	8.778	8.640	17.418
33.15.15	Klambu	5.637	5.594	11.231
33.15.16	Godong	16.088	16.114	32.202
33.15.17	Gubug	13.612	13.473	27.085
33.15.18	Tegowanu	10.447	10.507	20.954
33.15.19	Tanggungharjo	7.484	7.675	15.159
Jumlah		266.524	264.344	530.868

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.44 Jumlah Akta Perceraian Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Akta Perceraian		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
33.15.01	Kedungjati	378	434	812
33.15.02	Karangrayung	1.048	1.168	2.216
33.15.03	Penawangan	841	893	1.734
33.15.04	Toroh	1.206	1.256	2.462
33.15.05	Geyer	521	572	1.093
33.15.06	Pulokulon	1.024	902	1.926
33.15.07	Kradenan	690	691	1.381
33.15.08	Gabus	616	556	1.172
33.15.09	Ngaringan	590	531	1.121
33.15.10	Wirosari	910	902	1.812
33.15.11	Tawangharjo	628	646	1.274
33.15.12	Grobogan	777	783	1.560
33.15.13	Purwodadi	1.651	1.829	3.480
33.15.14	Brati	505	535	1.040
33.15.15	Klambu	361	441	802
33.15.16	Godong	1.237	1.323	2.560
33.15.17	Gubug	895	1.011	1.906
33.15.18	Tegowanu	600	662	1.262
33.15.19	Tanggungharjo	446	472	918
Jumlah		14.924	15.607	30.531

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Purwodadi memiliki jumlah kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Grobogan. Kondisi ini sejalan dengan status Kecamatan Purwodadi sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar. Semakin besar jumlah penduduk, semakin

banyak pula penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk perkawinan maupun perceraian. Oleh karena itu, tingginya jumlah akta perkawinan dan akta perceraian di Kecamatan Purwodadi lebih mencerminkan besarnya populasi penduduk daripada tingginya intensitas peristiwa perkawinan atau perceraian dibandingkan kecamatan lainnya.

Setiap perubahan status perkawinan maupun susunan anggota keluarga perlu diikuti dengan pembaruan data pada Kartu Keluarga. Oleh karena itu, kepemilikan KK menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Grobogan menunjukkan capaian yang relatif bagus yaitu sebesar 99,87 persen. Artinya, hampir seluruh kepala rumah tangga di Kabupaten Grobogan memiliki kartu keluarga sebagai salah satu dokumen resmi pencatatan sipil. Secara lebih rinci, kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.45 Jumlah Kepala Rumah Tangga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kepala Rumah Tangga			Kepemilikan Kartu Keluarga	Persentase
		L	P	Total		
33.15.01	Kedungjati	12.660	3.441	16.101	16.041	99,63
33.15.02	Karangrayung	29.760	7.648	37.408	37.353	99,85
33.15.03	Penawangan	19.399	5.061	24.460	24.435	99,90
33.15.04	Toroh	35.373	9.098	44.471	44.420	99,89
33.15.05	Geyer	19.891	5.025	24.916	24.872	99,82
33.15.06	Pulokulon	33.102	7.860	40.962	40.905	99,86
33.15.07	Kradenan	25.308	5.880	31.188	31.154	99,89
33.15.08	Gabus	23.087	5.077	28.164	28.131	99,88
33.15.09	Ngaringan	21.703	4.473	26.176	26.149	99,90
33.15.10	Wirosari	28.264	6.702	34.966	34.936	99,91
33.15.11	Tawangharjo	17.257	4.239	21.496	21.464	99,85
33.15.12	Grobogan	23.303	5.885	29.188	29.162	99,91
33.15.13	Purwodadi	40.227	11.222	51.449	51.404	99,91
33.15.14	Brati	15.167	3.710	18.877	18.853	99,87
33.15.15	Klambu	11.171	3.224	14.395	14.379	99,89
33.15.16	Godong	24.898	7.331	32.229	32.190	99,88
33.15.17	Gubug	24.012	6.570	30.582	30.538	99,86
33.15.18	Tegowanu	16.982	4.084	21.066	21.029	99,82
33.15.19	Tanggungharjo	12.227	3.464	15.691	15.640	99,67
Jumlah		433.791	109.994	543.785	543.055	99,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Grobogan sudah relatif merata antar kecamatan. Hal tersebut tercermin dari capaian kepemilikan kartu keluarga antar kecamatan yang memiliki rentang yang tidak terlalu jauh. Meski demikian, masih terdapat tantang dalam meningkatkan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Grobogan agar seluruh kepala keluarga memiliki dokumen kependudukan yang sah serta tercatat secara tertib dalam administrasi kependudukan.

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tidak hanya mencerminkan tertib administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik rumah tangga. Karakteristik rumah tangga salah satunya bisa dilihat dari kepemilikan kartu keluarga menurut umur yang secara lebih rinci disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.46 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
33.15.01	Kedungjati	0	0	0	12	216	998	1.477	1.767
33.15.02	Karangrayung	0	1	2	51	668	2.563	3.657	4.218
33.15.03	Penawangan	0	0	1	34	397	1.527	2.433	2.732
33.15.04	Toroh	0	0	1	43	614	2.550	3.950	4.273
33.15.05	Geyer	0	1	1	22	392	1.497	2.065	2.345
33.15.06	Pulokulon	0	0	1	36	648	2.579	3.694	4.063
33.15.07	Kradenan	0	0	0	28	443	1.993	2.745	3.057
33.15.08	Gabus	0	0	2	35	474	1.791	2.421	2.703
33.15.09	Ngaringan	0	0	1	24	469	1.838	2.416	2.552
33.15.10	Wirosari	0	1	2	35	633	2.248	3.086	3.545
33.15.11	Tawangharjo	0	1	0	17	361	1.392	2.008	2.345
33.15.12	Grobogan	1	0	0	22	433	1.750	2.780	3.154
33.15.13	Purwodadi	0	0	0	59	648	2.977	4.506	5.382
33.15.14	Brati	1	0	0	22	266	1.193	1.741	1.949
33.15.15	Klambu	0	0	0	18	217	839	1.387	1.487
33.15.16	Godong	0	0	2	52	463	1.783	2.978	3.493
33.15.17	Gubug	0	0	1	44	415	1.668	2.915	3.374
33.15.18	Tegowanu	0	0	0	34	363	1.470	2.228	2.440
33.15.19	Tanggungharjo	0	0	1	22	277	994	1.463	1.614
Jumlah		2	4	15	610	8.397	33.650	49.950	56.493

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.47 Lanjutan Tabel Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
33.15.01	Kedungjati	1.630	1.655	1.498	1.601	1.474	1.414	966	1.393

Kode Kecamatan	Kecamatan	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
33.15.02	Karangrayung	4.172	3.963	3.497	3.414	3.568	2.941	1.926	2.767
33.15.03	Penawangan	2.727	2.635	2.353	2.377	2.442	2.000	1.212	1.590
33.15.04	Toroh	4.645	4.740	4.674	4.438	4.264	3.924	2.598	3.757
33.15.05	Geyer	2.676	2.585	2.417	2.426	2.394	2.232	1.587	2.276
33.15.06	Pulokulon	4.243	4.051	4.185	4.110	3.948	3.588	2.341	3.475
33.15.07	Kradenan	3.225	3.115	3.113	3.232	3.199	2.681	1.903	2.454
33.15.08	Gabus	2.744	2.742	2.934	2.911	2.931	2.484	1.740	2.252
33.15.09	Ngaringan	2.815	2.884	2.792	2.769	2.586	2.049	1.279	1.702
33.15.10	Wirosari	3.887	3.777	3.652	3.478	3.423	2.933	1.866	2.400
33.15.11	Tawangharjo	2.441	2.224	2.113	2.120	2.053	1.761	1.186	1.474
33.15.12	Grobogan	3.272	3.012	2.851	2.938	2.888	2.451	1.454	2.182
33.15.13	Purwodadi	5.764	5.668	5.498	5.456	4.912	4.374	2.808	3.397
33.15.14	Brati	2.145	2.012	1.875	1.968	1.849	1.546	976	1.334
33.15.15	Klambu	1.561	1.621	1.522	1.573	1.312	1.161	705	992
33.15.16	Godong	3.762	3.787	3.195	3.255	3.247	2.735	1.589	1.888
33.15.17	Gubug	3.623	3.391	3.082	3.153	2.954	2.472	1.523	1.967
33.15.18	Tegowanu	2.382	2.300	2.142	2.157	1.950	1.571	920	1.109
33.15.19	Tanggunharjo	1.731	1.639	1.624	1.567	1.544	1.359	830	1.026
Jumlah		59.445	57.801	55.017	54.943	52.938	45.676	29.409	39.435

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

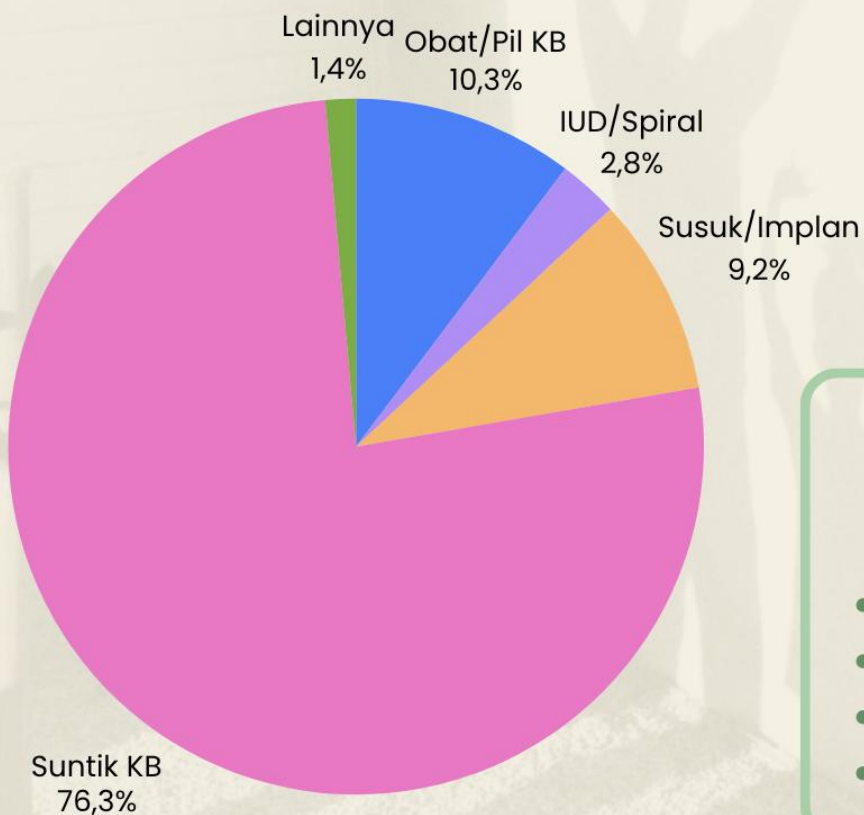
Berdasarkan data jumlah kepala keluarga menurut kelompok umur, masih terdapat kepala keluarga yang tercatat pada kelompok umur 0–4 tahun. Meskipun jumlahnya sangat kecil dibandingkan kelompok umur lainnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi karakteristik kepala keluarga yang tercatat dalam administrasi kependudukan. Namun demikian, temuan tersebut memerlukan validasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa data kepala keluarga menurut kelompok umur telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hasil validasi tersebut penting agar data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan memiliki tingkat akurasi yang memadai.

Statistik Peserta KB Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Jumlah
Peserta KB
172.480

Jumlah Peserta KB Berdasarkan Jenis Kontrasepsi



Distribusi Pengguna Kontrasepsi Lainnya

- Kondom = 1.828
- Vasektomi = 109
- Mal = 48
- Obat Tradisional = 358

3.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Kelompok ini menjadi sasaran utama berbagai program kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi karena memiliki potensi untuk melahirkan. Oleh karena itu, jumlah dan persebaran pasangan usia subur di suatu wilayah menjadi indikator penting dalam perencanaan pelayanan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Secara keseluruhan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Grobogan sebanyak 246.796 orang, dimana sebanyak 122.681 pasangan tersebut telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan sedangkan sisanya masih belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Untuk mengetahui persebaran pasangan usia subur di Kabupaten Grobogan disajikan tabel seperti berikut:

Tabel 3.48 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Kesertaan Jaminan Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah PUS	Keikutsertaan Jaminan Kesehatan		Tidak Memiliki JKN
			JKN-PBI	JKN-Non PBI	
33.15.01	Kedungjati	7.331	3.921	565	2.810
33.15.02	Karangrayung	16.905	4.673	2.075	9.984
33.15.03	Penawangan	10.116	3.852	1.228	4.939
33.15.04	Toroh	19.763	5.634	3.024	10.866
33.15.05	Geyer	10.601	5.672	871	3.991
33.15.06	Pulokulon	18.590	6.682	1.796	10.030
33.15.07	Kradenan	14.675	4.912	1.942	7.759
33.15.08	Gabus	12.782	4.077	1.072	7.536
33.15.09	Ngaringan	12.843	5.446	824	6.515
33.15.10	Wirosari	16.051	5.818	2.822	7.212
33.15.11	Tawangharjo	10.148	3.591	1.145	5.313
33.15.12	Grobogan	14.955	5.757	1.402	7.607
33.15.13	Purwodadi	21.836	6.477	5.351	9.497
33.15.14	Brati	7.566	3.719	918	2.865
33.15.15	Klambu	6.574	2.557	723	3.268
33.15.16	Godong	13.512	3.595	2.657	7.092
33.15.17	Gubug	15.194	4.309	3.142	7.495

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah PUS	Keikutsertaan Jaminan Kesehatan		Tidak Memiliki JKN
			JKN-PBI	JKN-Non PBI	
33.15.18	Tegowanu	10.315	2.826	3.190	4.131
33.15.19	Tanggunharjo	7.039	3.021	1.395	2.488

Sumber: DP3AKB Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah Pasangan Usia Subur terbanyak berada di Kecamatan Purwodadi yaitu sebanyak 21.836 pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purwodadi memiliki potensi kelahiran yang relatif lebih besar yang disebabkan oleh banyaknya penduduk pada usia reproduktif. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Kecamatan Purwodadi yang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Meskipun banyaknya penduduk di setiap wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pasangan usia subur, akan tetapi keberadaan pasangan usia subur turut berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.

Banyaknya pasangan usia subur di suatu wilayah tentunya menuntut adanya ketersediaan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan keluarga berencana, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang memadai sehingga kepesertaan jaminan kesehatan bagi pasangan usia subur menjadi faktor pendukung yang penting untuk memastikan bahwa seluruh pasangan usia subur dapat memperoleh layanan. Berdasarkan data yang tersedia, sebanyak 122.681 pasangan usia subur di Kabupaten Grobogan sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dengan rincian sebanyak 86.539 terdaftar sebagai peserta JKN-PBI dan sisanya sebanyak 36.142 pasangan terdaftar sebagai peserta JKN-Non PBI. Dilihat dari persebaran wilayahnya, Kecamatan Purwodadi memiliki kontribusi yang besar terhadap kepesertaan jaminan kesehatan. Kondisi ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk dan pasangan usia subur di wilayah tersebut, sehingga kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan juga relatif lebih tinggi.

Tingginya pasangan usia subur di Kabupaten Grobogan menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan

keluarga berencana. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan pengelola program keluarga berencana yang tersebar di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, pengelola program keluarga berencana di Kabupaten Grobogan dikelompokkan menjadi 3 kategori diantaranya PLKB/PKB yaitu sebanyak 69 orang, PPKBD sebanyak 321 orang, dan sub PPKBD sebanyak 1.707 orang. Secara lebih rinci jumlah pengelola program keluarga berencana di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut

Tabel 3.49 Jumlah Pengelola Program Keluarga Berencana di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

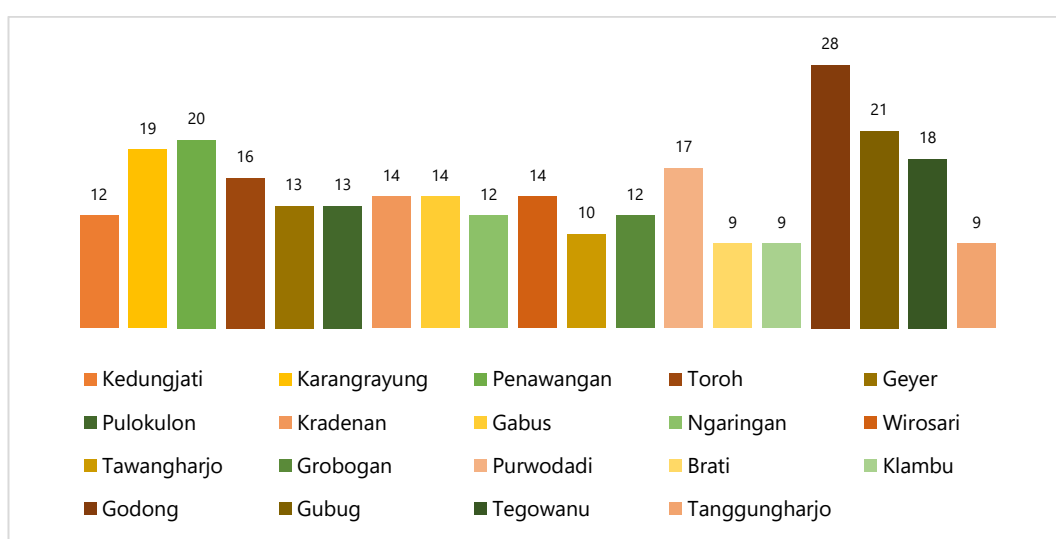
Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	PLKB/PKB (orang)	PPKBD (orang)	Sub PPKBD (orang)
33.15.01	Kedungjati	12	2	12	82
33.15.02	Karangrayung	19	3	22	107
33.15.03	Penawangan	20	5	32	86
33.15.04	Toroh	16	5	17	120
33.15.05	Geyer	13	3	20	102
33.15.06	Pulokulon	13	3	17	105
33.15.07	Kradenan	14	4	15	84
33.15.08	Gabus	14	3	14	100
33.15.09	Ngaringan	12	3	12	92
33.15.10	Wirosari	14	4	14	94
33.15.11	Tawangharjo	10	4	11	73
33.15.12	Grobogan	12	3	17	80
33.15.13	Purwodadi	17	5	21	156
33.15.14	Brati	9	3	9	62
33.15.15	Klambu	9	2	9	47
33.15.16	Godong	28	4	28	106
33.15.17	Gubug	21	6	23	105
33.15.18	Tegowanu	18	3	19	63
33.15.19	Tanggunharjo	9	4	9	43

Sumber: DP3AKB Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, distribusi pengelola program keluarga berencana belum sepenuhnya proporsional terhadap cakupan wilayah yang harus dilayani. Beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak belum tentu memiliki jumlah pengelola program KB yang lebih banyak juga. Hal tersebut tentunya berpotensi terhadap beban kerja dan efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Grobogan. Maka dari itu, diperlukan upaya penataan dan pemerataan distribusi pengelola program keluarga berencana agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah

tentunya dengan tetap memperhatikan jumlah pasangan usia subur, jumlah penduduk, dan luas wilayah.

Optimalisasi peran Pengelola Program Keluarga Berencana tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu bentuk implementasi program tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kampung KB sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Adapun persebaran kampung KB di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.16 Data Kampung KB di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: DP3AKB Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Grobogan telah ditetapkan menjadi kampung KB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana telah menjangkau seluruh wilayah administrasi. Dengan cakupan yang menyeluruh, masyarakat di setiap desa dan kelurahan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pembangunan keluarga termasuk upaya percepatan penurunan stunting. Melalui berbagai kegiatan edukasi, pendampingan keluarga, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan pola asuh dan pemenuhan gizi, Kampung KB diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga sekaligus

menurunkan jumlah keluarga yang berisiko mengalami stunting. Adapun jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.50 Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Tahapan Keluarga Sejahtera				
			KS I	KS II	KS III	KS III+	Pra Sejahtera
33.15.01	Kedungjati	15.995	4.944	2.597	1.311	112	7.031
33.15.02	Karangrayung	33.743	335	5.504	6.940	270	20.694
33.15.03	Penawangan	23.260	1.640	3.489	1.071	104	16.956
33.15.04	Toroh	44.219	4.850	4.155	4.989	167	30.058
33.15.05	Geyer	23.855	5.368	2.008	705	182	15.592
33.15.06	Pulokulon	42.025	2.600	9.940	3.236	546	25.704
33.15.07	Kradenan	30.549	1.332	5.243	7.255	393	16.326
33.15.08	Gabus	27.218	703	598	5.378	96	20.443
33.15.09	Ngaringan	27.627	1.203	547	2.325	109	23.443
33.15.10	Wirosari	34.467	4.422	4.861	1.989	264	22.887
33.15.11	Tawangharjo	21.386	3.651	1.933	1.410	531	13.861
33.15.12	Grobogan	29.070	4.045	2.523	3.509	662	18.331
33.15.13	Purwodadi	45.146	12.003	8.223	7.417	1.613	15.890
33.15.14	Brati	18.647	4.085	2.161	1.043	215	9.069
33.15.15	Klambu	13.256	2.902	3.713	1.152	215	5.274
33.15.16	Godong	30.835	7.561	8.203	4.420	2.521	8.130
33.15.17	Gubug	29.412	6.529	3.388	5.278	780	13.437
33.15.18	Tegowanu	20.925	8.075	1.743	1.450	131	9.526
33.15.19	Tanggunganharjo	15.702	5.036	4.359	1.816	75	4.416
Jumlah		527.337	81.284	75.188	62.694	8.986	297.068

Sumber: DP3AKB Kabupaten Grobogan

Keterangan:

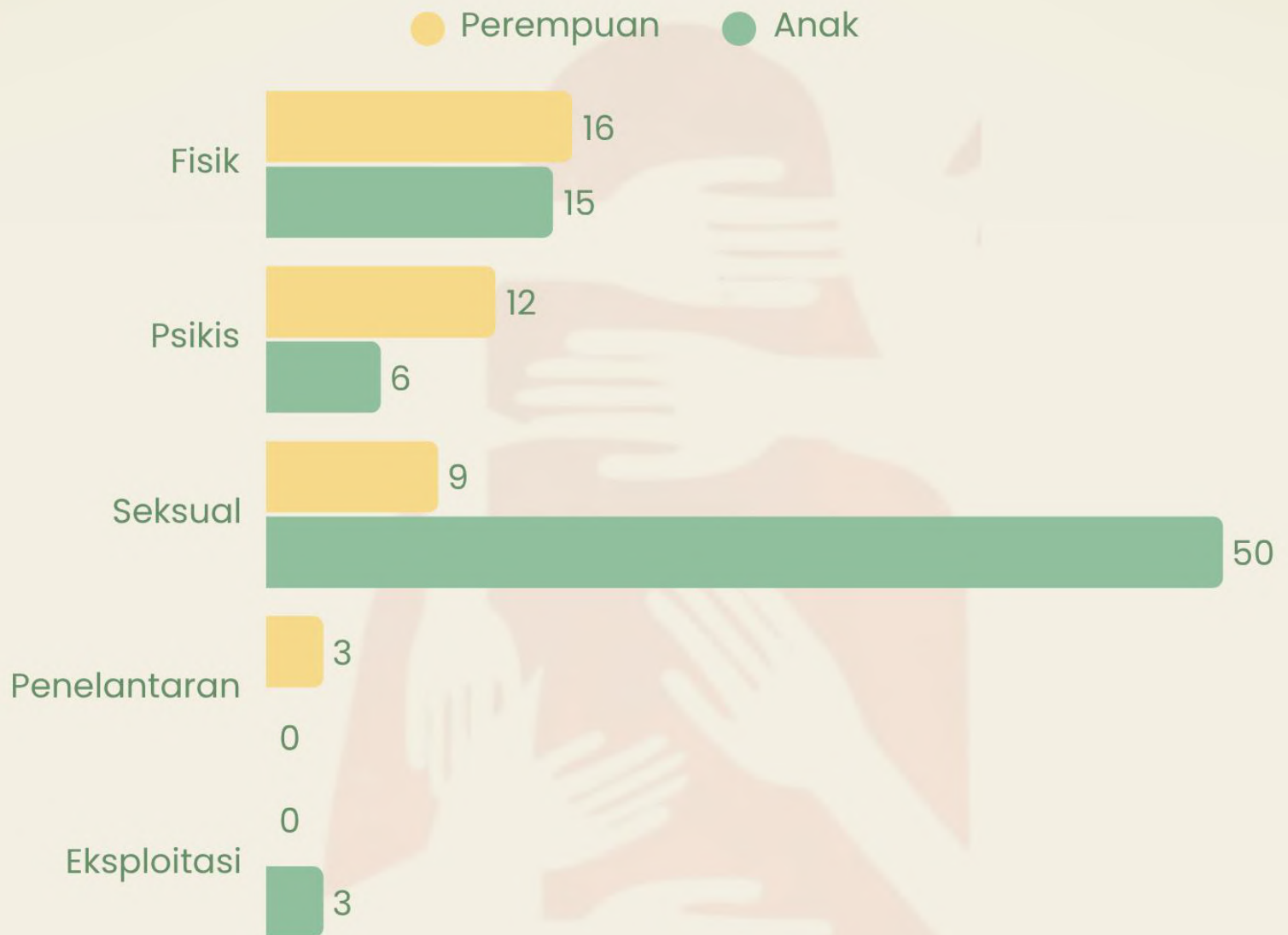
- Rekap data hingga bulan November 2025
- Tahapan Keluarga Pra Sejahtera: Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)
- Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) : Keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II
- Tahapan Keluarga Sejahtera II: Keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III
- Tahapan Keluarga Sejahtera III: keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III,

tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus

- Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus: keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus

Meskipun berbagai program pembangunan keluarga telah dilaksanakan, tetapi masih banyak ditemukan jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Grobogan sepanjang tahun 2025 yaitu sebanyak 297.068 keluarga. Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, masih banyak ditemukan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang belum memadai di Kabupaten Grobogan sehingga dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai permasalahan, termasuk masalah kesehatan dan gizi.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

3.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan diwujudkan melalui pengembangan Desa Layak Anak. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak dengan mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, jumlah desa layak anak di Kabupaten Grobogan sebanyak 199 desa dari 280 desa yang ada di Kabupaten Grobogan. Untuk mengetahui persebaran desa layak anak di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.51 Jumlah Desa Layak Anak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	2025
33.15.01	Kedungjati	12
33.15.02	Karangrayung	16
33.15.03	Penawangan	8
33.15.04	Toroh	16
33.15.05	Geyer	13
33.15.06	Pulokulon	13
33.15.07	Kradenan	14
33.15.08	Gabus	4
33.15.09	Ngaringan	12
33.15.10	Wirosari	7
33.15.11	Tawangharjo	10
33.15.12	Grobogan	12
33.15.13	Purwodadi	17
33.15.14	Brati	9
33.15.15	Klambu	4
33.15.16	Godong	4
33.15.17	Gubug	21
33.15.18	Tegowanu	3
33.15.19	Tanggungharjo	4

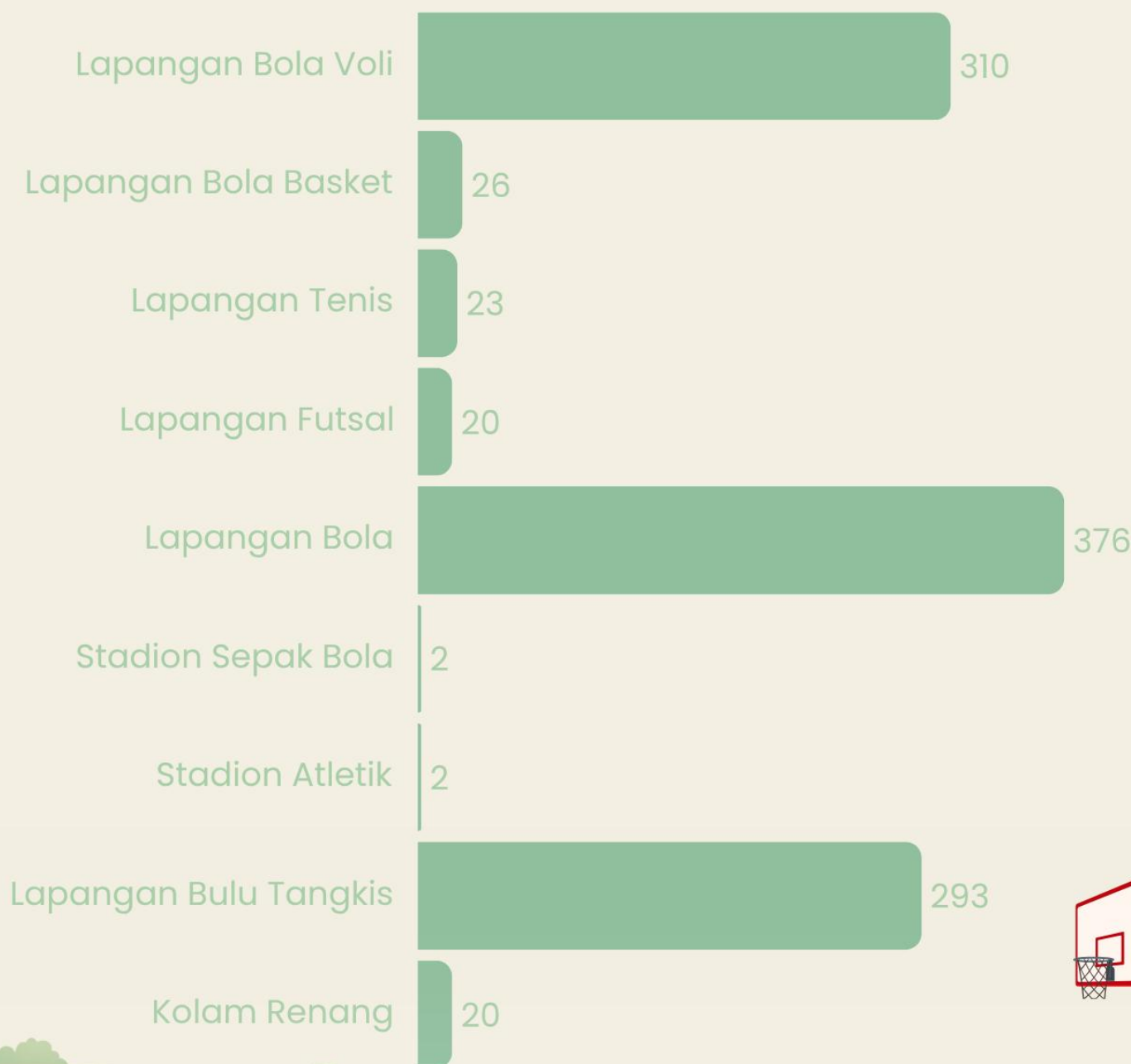
Sumber: DP3AKB Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, kecamatan dengan jumlah desa layak anak terbanyak di Kabupaten Grobogan adalah Kecamatan Purwodadi dengan jumlah desa layak anak sebanyak 17 desa, dari 17 desa di wilayah tersebut. Artinya, secara keseluruhan seluruh desa di Kecamatan Purwodadi telah

menerapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah desa layak anak paling sedikit adalah Kecamatan Tegowanu yaitu sebanyak 3 desa, dari 18 desa di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan implementasi program Desa Layak Anak di Kecamatan Tegowanu masih relatif terbatas dibandingkan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta *stakeholder* terkait untuk memperluas penerapan Desa Layak Anak sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih merata di seluruh desa.



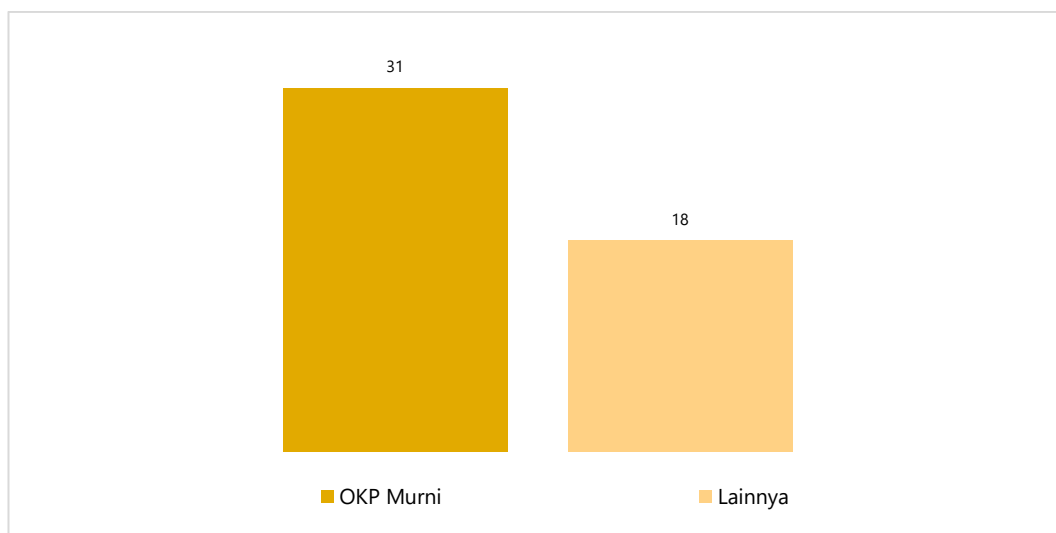
Jumlah Fasilitas Olahraga di Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber : Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Grobogan

3.8 Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan merupakan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan kemampuan, menyalurkan aspirasi, meningkatkan kepedulian sosial, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di daerah. Keberadaan organisasi kepemudaan di suatu wilayah dapat memberikan gambaran mengenai ketersediaan sarana partisipasi bagi pemuda sekaligus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas generasi muda. Secara keseluruhan, jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Grobogan sebanyak 49 organisasi dengan rincian sebanyak 31 organisasi merupakan organisasi kepemudaan murni dan sisanya sebanyak 18 organisasi merupakan organisasi lainnya yang tidak termasuk dalam kategori organisasi kepemudaan murni.



Gambar 3.17 Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Groboga

Statistik Perpustakaan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Jumlah Juduk
Koleksi Perpustakaan
29.049



Jumlah Peminjam
Koleksi Perpustakaan
8.506

Jumlah Perpustakaan

Sesuai Standar Nasional

40

Kelurahan

194

Kecamatan

Sekolah/Madrasah

964

Perguruan Tinggi

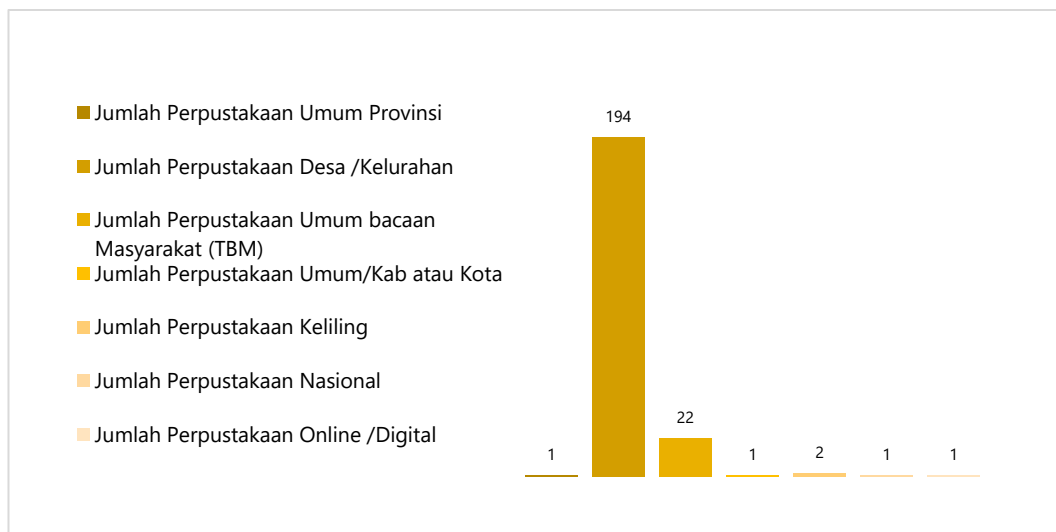
1

Khusus

24

3.9 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses terhadap informasi, ilmu pengetahuan, dan berbagai bahan bacaan. Keberadaan perpustakaan yang mudah diakses menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, berpengetahuan, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara keseluruhan, jumlah perpustakaan di Kabupaten Grobogan sebanyak 222 unit yang terbagi menjadi beberapa kategori seperti perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan umum bacaan masyarakat, perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan keliling, dan perpustakaan online/digital. Secara lebih rinci ketersediaan perpustakaan menurut jenisnya disajikan seperti pada tabel berikut.



Gambar 3.18 Jumlah Perpustakaan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, mayoritas perpustakaan yang tersedia di Kabupaten Grobogan adalah perpustakaan desa/kelurahan yaitu sebanyak 194 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan layanan perpustakaan telah menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber informasi dan bahan bacaan. Keberadaan perpustakaan desa/kelurahan diharapkan dapat

mendukung peningkatan budaya literasi, memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat, serta menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif.

Keberadaan perpustakaan tentunya harus didukung oleh kualitas pengelolaan dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga perpustakaan dan kearsipan yang kompeten menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan koleksi, penyelenggaraan layanan perpustakaan, pengembangan budaya baca, serta pengelolaan arsip yang tertib dan akuntabel. Untuk mengetahui kondisi ketersediaan tenaga perpustakaan dan kearsipan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.52 Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Variabel	2025
Jumlah Peminjam Koleksi Perpustakaan	8.506
Jumlah Masyarakat gemar membaca di masyarakat	8.864
Jumlah tenaga perpustakaan yang tersertifikasi	26
Jumlah tenaga perpustakaan yang belum tersertifikasi	1.180
Jumlah SDM pengelola kearsipan tersertifikasi	1
Jumlah SDM pengelola kearsipan yang belum tersertifikasi	53

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui beberapa informasi seperti, jumlah peminjam koleksi perpustakaan di Kabupaten Grobogan yang pada tahun 2025 sebanyak 8.506 orang dan jumlah masyarakat yang gemar membaca sebanyak 8.864 orang. Selain itu, terdapat juga tenaga perpustakaan baik yang sudah tersertifikasi maupun belum tersertifikasi yaitu sebanyak 1.206 orang dengan rincian 26 orang sudah tersertifikasi dan sisanya 1.180 orang belum tersertifikasi. Banyaknya tenaga perpustakaan yang belum tersertifikasi menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi agar kualitas layanan perpustakaan dapat terus ditingkatkan.

Dibandingkan dengan jumlah tenaga perpustakaan, jumlah tenaga kearsipan di Kabupaten Grobogan jauh lebih sedikit jumlahnya yaitu sebanyak 54 orang dengan rincian 1 orang sudah tersertifikasi dan sisanya 53 orang belum tersertifikasi. Banyaknya tenaga kearsipan yang belum tersertifikasi menunjukkan

bahwa penguatan kompetensi aparatur di bidang kearsipan masih perlu terus ditingkatkan. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kemudahan dalam penyediaan informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Keberhasilan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, melainkan juga oleh kelengkapan koleksi yang tersedia. Semakin banyak koleksi buku dan arsip yang dimiliki, semakin besar pula kebutuhan akan pengelolaan yang tertib, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun perangkat daerah. Adapun jumlah koleksi buku dan arsip yang tersedia di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.53 Jumlah Koleksi Buku dan Arsip di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Variabel	2025
Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	53.429
Jumlah judul koleksi perpustakaan	29.049
Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	13.676
Jumlah pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	10.000
Jumlah jenis perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1.000
Jumlah Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga Kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	1.340

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui beberapa informasi seperti, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten Grobogan sebanyak 53.429 buku sedangkan jumlah judul koleksi perpustakaan di Kabupaten Grobogan sebanyak 29.049 buku. Jumlah tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah buku yang dibaca di perpustakaan di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 13.676 buku.

Dari segi kearsipan, terdapat beberapa informasi yang dapat disimpulkan dari tabel di atas seperti jumlah pemusnahan arsip sesuai NSPK sebanyak 10.000 arsip, jumlah jenis perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK sebanyak 1.000 arsip, dan jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga Kearsipan daerah Kab/Kota yang



sesuai NSPK sebanyak 1.340 arsip. Dengan ketersediaan data di bidang perpustakaan dan kearsipan tersebut harapannya dapat dijadikan pemerintah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpustakaan dan kearsipan.



BAB IV

SUMBER DAYA

ALAM

Statistik Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Luas Panen
Padi Sawah
157.452 Ha



Luas Panen
Jagung
144.802 Ha



Luas Panen
Padi Gogo
2.622 Ha

Luas Panen
Kedelai
2.769 Ha

Jumlah Produksi (Ton)

Padi Sawah

939.155

Padi Gogo

11.509

Jagung

899.179

Kedelai

5.854

Produktivitas (Ton/Ha)

Padi Sawah

59,65

Padi Gogo

43,89

Jagung

62,10

Kedelai

21,14

4.1 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Grobogan. Kondisi geografis yang didominasi lahan pertanian menjadikan sektor ini sebagai penopang utama ketahanan pangan sekaligus sumber mata pencaharian masyarakat. Informasi mengenai luas panen, produksi, dan produktivitas komoditas pertanian dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kinerja sektor pertanian serta potensi pengembangan komoditas unggulan di setiap kecamatan. Adapun data luas panen, produksi, dan produktivitas komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, dan kedelai di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Padi Sawah dan Padi Gogo Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Komoditi Padi Sawah			Komoditi Padi Gogo		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
33.15.01	Kedungjati	1.471	8.701	59,17	25	118	47,18
33.15.02	Karangrayung	6.826	40.597	59,48	50	236	47,18
33.15.03	Penawangan	9.214	55.408	60,13	-	-	-
33.15.04	Toroh	10.773	64.607	59,97	-	-	-
33.15.05	Geyer	7.755	46.065	59,40	-	-	-
33.15.06	Pulokulon	12.697	75.935	59,81	-	-	-
33.15.07	Kradenan	10.107	60.500	59,86	174	816	46,91
33.15.08	Gabus	11.056	65.265	59,03	-	-	-
33.15.09	Ngarigan	11.892	70.384	59,19	-	-	-
33.15.10	Wirosari	11.800	70.747	59,96	-	-	-
33.15.11	Tawangharjo	6.584	39.321	59,72	990	4.322	43,65
33.15.12	Grobogan	7.209	42.962	59,60	995	4.309	43,31
33.15.13	Purwodadi	9.903	58.931	59,51	16	71	44,67
33.15.14	Brati	4.205	25.187	59,90	372	1.637	43,99
33.15.15	Klambu	4.608	27.255	59,14	-	-	-
33.15.16	Godong	12.973	78.530	60,53	-	-	-
33.15.17	Gubug	7.606	45.298	59,56	-	-	-
33.15.18	Tegowanu	6.809	40.230	59,08	-	-	-
33.15.19	Tanggunharjo	3.967	23.231	58,56	-	-	-
Total		157.452	939.155	59,65	2.622	11.509	43,89

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Tabel 4.2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Komoditi Jagung			Komoditi Kedelai		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
33.15.01	Kedungjati	13.882	86.140	62,05	-	-	-
33.15.02	Karangrayung	10.325	64.532	62,50	1	2	21,44
33.15.03	Penawangan	3.002	18.351	61,13	-	-	-
33.15.04	Toroh	10.450	65.034	62,23	315	696	22,10



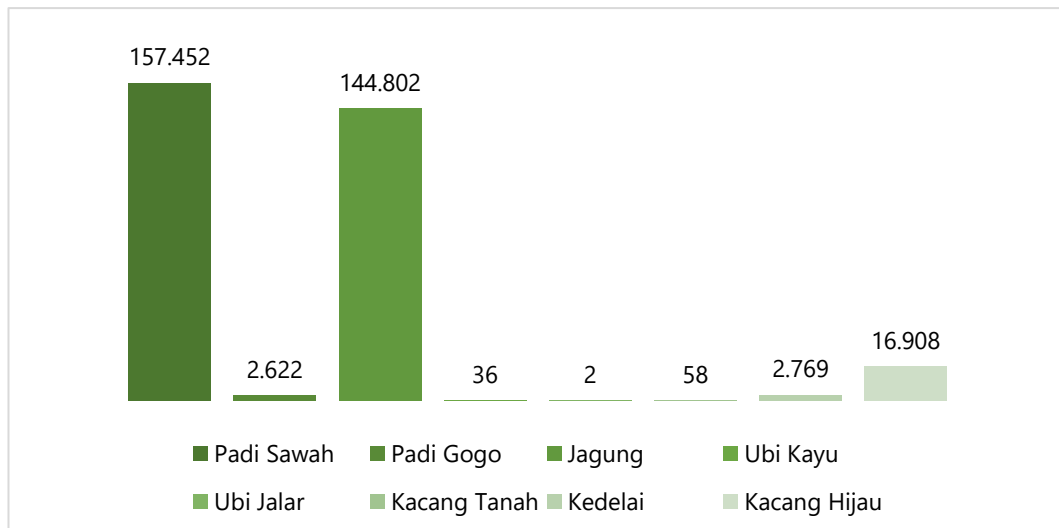
Kode Kecamatan	Kecamatan	Komoditi Jagung			Komoditi Kedelai		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
33.15.05	Geyer	21.855	136.595	62,50	-	-	-
33.15.06	Pulokulon	15.421	96.278	62,43	645	1.307	20,27
33.15.07	Kradenan	8.923	55.483	62,18	5	10	20,24
33.15.08	Gabus	11.920	74.445	62,45	-	-	-
33.15.09	Ngaringan	5.345	33.236	62,18	1.304	2.767	21,22
33.15.10	Wirosari	12.012	74.820	62,29	111	213	19,19
33.15.11	Tawangharjo	4.794	29.851	62,27	300	682	22,73
33.15.12	Grobogan	8.741	52.684	60,27	-	-	-
33.15.13	Purwodadi	1.667	10.047	60,27	62	126	20,33
33.15.14	Brati	3.222	19.798	61,45	-	-	-
33.15.15	Klambu	2.997	18.544	61,88	-	-	-
33.15.16	Godong	-	-	-	-	-	-
33.15.17	Gubug	1.646	9.944	60,42	26	51	19,57
33.15.18	Tegowanu	1.412	8.487	60,10	-	-	-
33.15.19	Tanggungharjo	7.188	44.911	62,48	-	-	-
Total		144.802	899.179	62,10	2.769	5.854	21,14

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Komoditi padi sawah dan jagung merupakan komoditi tanaman pangan utama yang dibudidayakan di wilayah Kabupaten Grobogan. Sedangkan padi gogo dan kedelai merupakan komoditi tanaman pangan lainnya yang memiliki kontribusi signifikan di Kabupaten Grobogan. Secara keseluruhan, luas panen padi sawah di Kabupaten Grobogan mencapai 157.452 hektare dengan produksi sebesar 939.155 ton dan produktivitas rata-rata 59,65 ton per hektare. Kecamatan Godong menjadi wilayah dengan produktivitas padi sawah tertinggi yaitu sebesar 60,53 ton per hektare. Sementara itu, Kabupaten Grobogan memiliki luas panen komoditas padi gogo sebesar 2.622 hektare dengan produksi 11.509 ton dan produktivitas rata-rata 43,89 ton per hektare. Produksi padi gogo terkonsentrasi pada beberapa kecamatan, terutama Tawangharjo dan Grobogan yang memiliki luas panen dan produksi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya.

Pada tahun 2025, luas panen jagung mencapai 144.802 hektare dengan produksi sebesar 899.179 ton dan produktivitas rata-rata 62,10 ton per hektare. Kecamatan Geyer menjadi sentra utama produksi jagung dengan luas panen mencapai 21.855 hektare dan produksi sebesar 136.595 ton. Adapun komoditas kedelai memiliki luas panen sebesar 2.769 hektare dengan produksi 5.854 ton dan produktivitas rata-rata 21,14 ton per hektare. Produksi kedelai terbesar berada di Kecamatan Ngaringan dengan produksi mencapai 2.767 ton. Namun, kecamatan

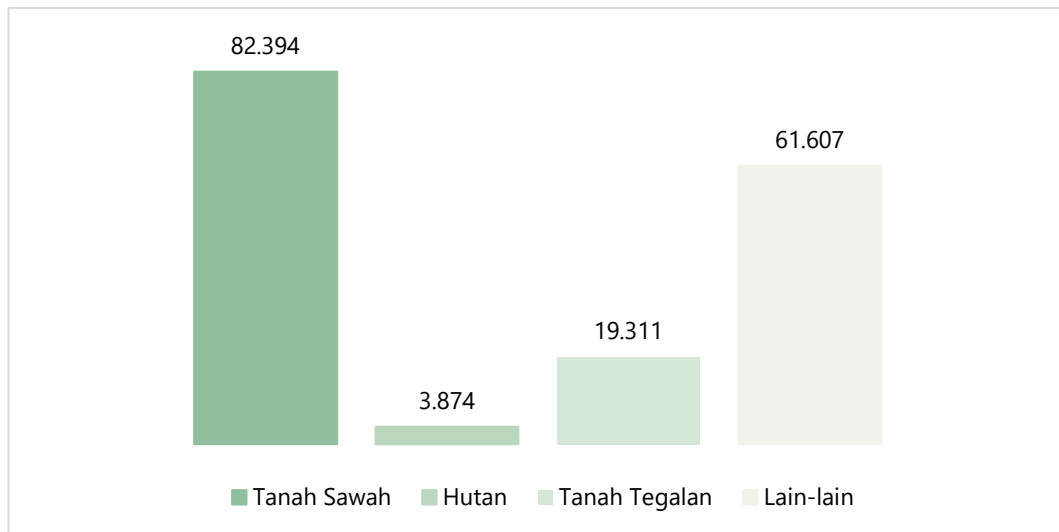
dengan rata-rata produktivitas kedelai tertinggi adalah Tawangharjo yang mencapai 22,73 ton per hektare. Rendahnya produktivitas kedelai dibandingkan komoditi lainnya menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan komoditi ini ke depannya.



Gambar 4.1 Luas Panen (Ha) Tanaman Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Gambar di atas menunjukkan luas panen berbagai komoditas tanaman pangan di Kabupaten Grobogan tahun 2025. Padi sawah merupakan komoditas dengan luas panen terbesar yaitu 157.452 hektare, diikuti oleh jagung seluas 144.802 hektare. Sementara itu, komoditas lain seperti kacang hijau, kedelai, padi gogo, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah memiliki luas panen yang relatif lebih kecil. Besarnya luas panen padi sawah dan jagung menunjukkan bahwa kedua komoditas tersebut masih menjadi andalan utama dalam sistem pertanian Kabupaten Grobogan.



Gambar 4.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan tahun 2025 sebagaimana disajikan pada gambar di atas menunjukkan bahwa tanah sawah memiliki luas terbesar yaitu 82.394 hektare. Tanah tegalan yang merupakan lahan pertanian kering memiliki luas sebesar 19.311. Selain itu terdapat kawasan hutan seluas 19.311 hektare dan penggunaan lahan lainnya seluas 61.607 hektare. Komposisi penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertanian baik di lahan basah maupun lahan kering masih mendominasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Grobogan.

Tabel 4.3 Jumlah Kelembagaan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Kelembagaan Pertanian (Kelompok)			
		Gapoktan	Kelompok Tani	Kelompok Ternak	KWT
33.15.01	Kedungjati	12	38	3	0
33.15.02	Karangrayung	19	99	6	7
33.15.03	Penawangan	20	75	3	13
33.15.04	Toroh	16	122	8	19
33.15.05	Geyer	13	82	16	6
33.15.06	Pulokulon	13	143	10	8
33.15.07	Kradenan	14	83	3	4
33.15.08	Gabus	14	97	10	10
33.15.09	Ngaringan	12	112	2	5
33.15.10	Wirosari	14	107	22	10
33.15.11	Tawangharjo	10	70	8	8
33.15.12	Grobogan	12	72	18	5
33.15.13	Purwodadi	17	93	2	22

Kode Kecamatan	Kecamatan	Kelembagaan Pertanian (Kelompok)			
		Gapoktan	Kelompok Tani	Kelompok Ternak	KWT
33.15.14	Brati	9	56	2	8
33.15.15	Klambu	9	44	2	3
33.15.16	Godong	28	103	3	10
33.15.17	Gubug	21	94	3	7
33.15.18	Tegowanu	18	63	8	8
33.15.19	Tanggungharjo	9	47	13	11
Total		280	1.600	142	164

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Kelembagaan pertanian memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Pada tahun 2025, Kabupaten Grobogan memiliki 280 gabungan kelompok tani (Gapoktan), 1.600 kelompok tani, 142 kelompok ternak, dan 164 kelompok wanita tani (KWT). Jumlah kelompok tani yang cukup besar menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian serta menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan pertanian di daerah. Keberadaan kelembagaan pertanian ini menjadi wadah bagi petani untuk meningkatkan kapasitas dan akses terhadap informasi pertanian, permodalan, serta pasar.

Tabel 4.4 Jumlah Kelompok Tani Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Kelompok Tani (Kelompok)				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Jumlah
33.15.01	Kedungjati	0	9	28	1	38
33.15.02	Karangrayung	20	29	42	8	99
33.15.03	Penawangan	3	3	48	21	75
33.15.04	Toroh	2	45	57	18	122
33.15.05	Geyer	9	38	31	4	82
33.15.06	Pulokulon	12	76	39	16	143
33.15.07	Kradenan	0	41	28	14	83
33.15.08	Gabus	3	63	27	4	97
33.15.09	Ngaringan	23	49	20	20	112
33.15.10	Wirosari	6	42	46	13	107
33.15.11	Tawangharjo	0	11	40	19	70
33.15.12	Grobogan	1	22	45	4	72
33.15.13	Purwodadi	1	29	46	17	93
33.15.14	Brati	26	17	13	0	56
33.15.15	Klambu	3	14	21	6	44
33.15.16	Godong	0	28	46	29	103
33.15.17	Gubug	0	63	30	1	94
33.15.18	Tegowanu	3	28	27	5	63

Kode Kecamatan	Kecamatan	Kelompok Tani (Kelompok)				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Jumlah
33.15.19	Tanggungharjo	12	22	10	3	47
Total		124	629	644	203	1.600

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Berdasarkan klasifikasi kelompok tani sebagaimana disajikan pada tabel di atas, sebagian besar kelompok tani di Kabupaten Grobogan berada pada kategori madya sebanyak 644 kelompok dan kategori lanjut sebanyak 629 kelompok. Sementara itu terdapat 203 kelompok tani kategori utama dan 124 kelompok kategori pemula. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok tani telah berkembang dan memiliki kapasitas organisasi yang cukup baik dalam mendukung kegiatan usaha tani.

Tabel 4.5 Data Penyuluhan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Penyuluhan Pertanian	THLT BPP	Jumlah Penyuluhan	Jumlah Wilayah Binaan
33.15.01	Kedungjati	4	0	4	12
33.15.02	Karangrayung	6	0	6	19
33.15.03	Penawangan	8	0	8	20
33.15.04	Toroh	8	0	8	16
33.15.05	Geyer	6	0	6	13
33.15.06	Pulokulon	5	0	5	13
33.15.07	Kradenan	6	0	6	14
33.15.08	Gabus	6	0	6	14
33.15.09	Ngaringan	6	0	6	12
33.15.10	Wirosari	6	0	6	14
33.15.11	Tawangharjo	6	0	6	10
33.15.12	Grobogan	5	0	5	12
33.15.13	Purwodadi	6	0	6	17
33.15.14	Brati	7	0	7	9
33.15.15	Klambu	6	0	6	9
33.15.16	Godong	8	0	8	28
33.15.17	Gubug	7	0	7	21
33.15.18	Tegowanu	5	0	5	18
33.15.19	Tanggungharjo	2	0	2	9
Total		113	0	113	280

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Keberhasilan pembangunan pertanian juga didukung oleh keberadaan tenaga penyuluh pertanian. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 113 penyuluh pertanian yang membina 280 wilayah binaan di Kabupaten



Grobogan. Kecamatan Penawangan, Toroh, dan Godong memiliki jumlah penyuluh terbanyak yaitu masing-masing sebanyak delapan orang. Ketersediaan penyuluh pertanian yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mendukung adopsi teknologi pertanian untuk peningkatan produktivitas, serta penguatan kelembagaan petani di tingkat lapangan.

Populasi Ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Populasi Ternak
Ayam
11.766.863
Ekor



Populasi Ternak
Itik
123.225
Ekor

Jumlah Populasi Ternak (Ekor)

Sapi Potong

151.888

Kuda 53

Kambing

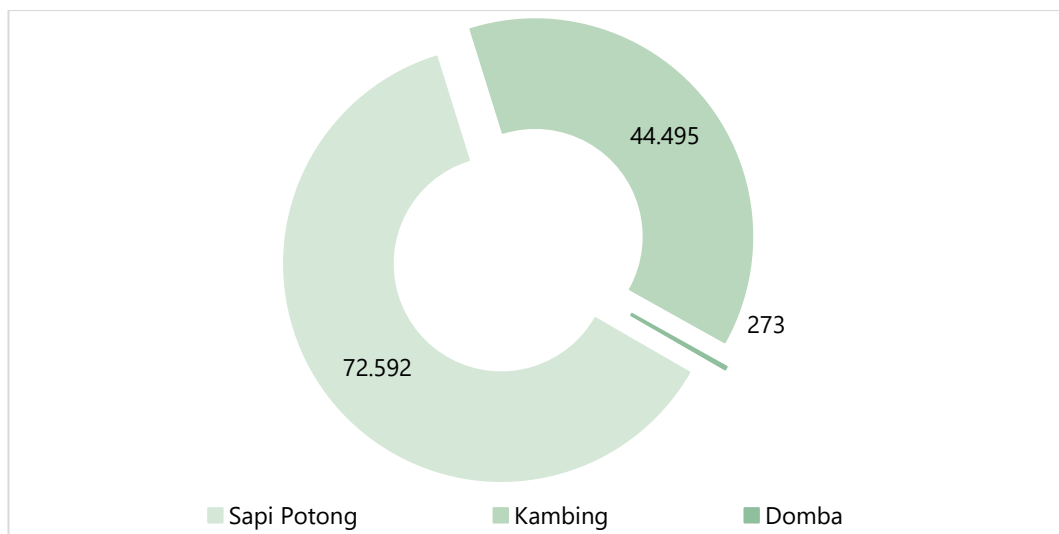
170.377

Domba

73.269

4.2 Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Subsektor peternakan dan perikanan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat di Kabupaten Grobogan. Ketersediaan hasil peternakan dan perikanan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sektor pangan secara berkelanjutan. Selain berperan dalam penyediaan pangan, kedua subsektor tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Grobogan turut mendukung berkembangnya berbagai kegiatan usaha peternakan dan perikanan, baik yang dikelola dalam skala rumah tangga maupun skala komersial. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah pemilik ternak, produksi hasil peternakan, serta produksi dan nilai produksi perikanan perlu disajikan sebagai gambaran kondisi dan potensi subsektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Grobogan.

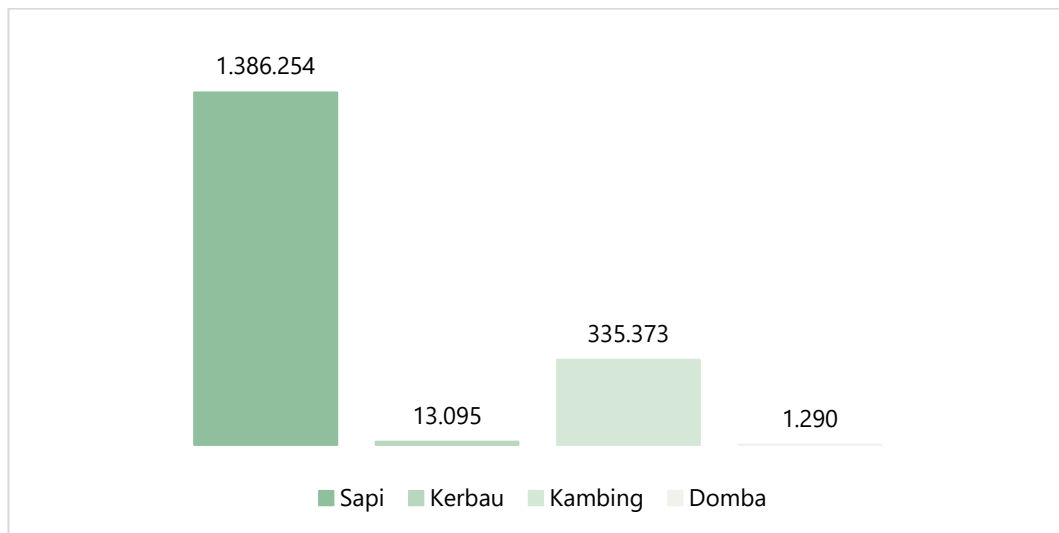


Gambar 4.3 Jumlah Pemilik Ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data jumlah pemilik ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025, populasi pemilik ternak sapi potong merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 72.592 orang, diikuti oleh pemilik ternak kambing sebanyak 44.495 orang, dan pemilik ternak domba sebanyak 273 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa

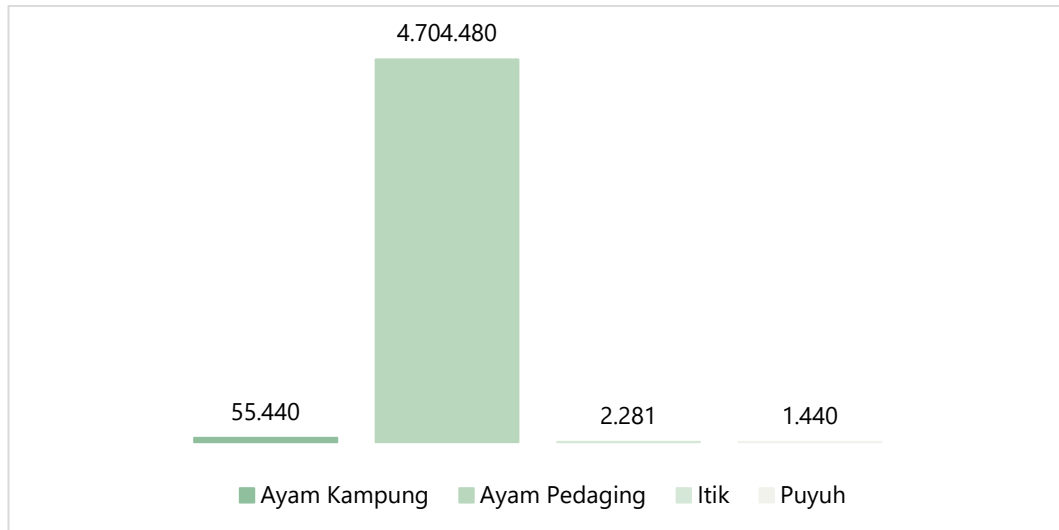
usaha peternakan sapi potong dan kambing masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam kegiatan peternakan. Tingginya populasi pemilik ternak sapi potong mencerminkan potensi subsektor peternakan sapi yang cukup besar di Kabupaten Grobogan, sekaligus menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat peternak.



Gambar 4.4 Jumlah Produksi (Kg) Daging Ternak di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

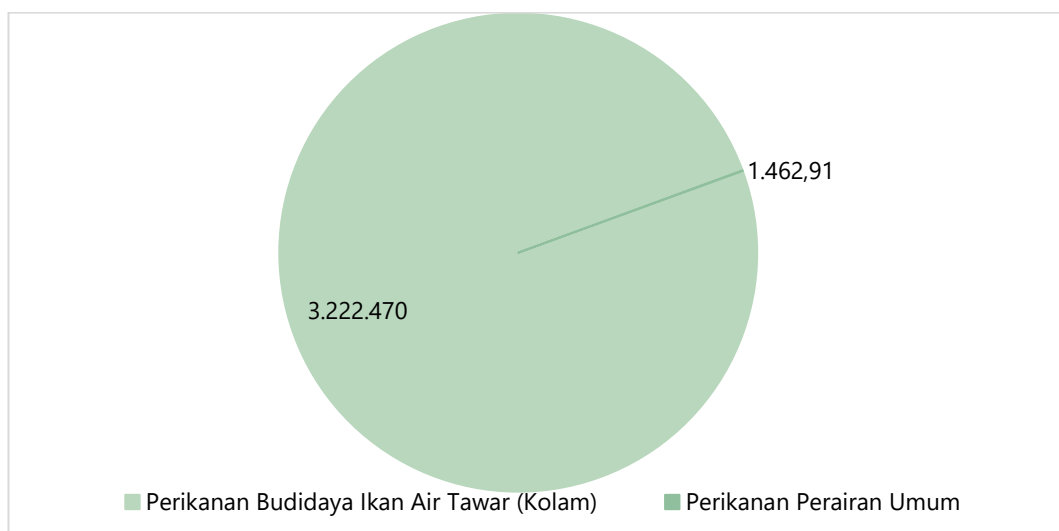
Produksi daging ternak pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sapi menjadi komoditi daging ternak dengan produksi tertinggi yaitu sebesar 1.386.254 kilogram. Produksi daging kambing sebesar 335.373 kilogram, sedangkan produksi daging kerbau dan domba masing-masing sebesar 13.095 kilogram dan 1.290 kilogram. Dominasi produksi daging sapi ini mencerminkan besarnya peran ternak sapi dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.



Gambar 4.5 Jumlah Produksi (Kg) Daging Unggas di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Selain ternak ruminansia, produksi daging unggas juga memberikan kontribusi yang signifikan. Ayam pedaging (broiler) menjadi jenis unggas dengan produksi daging terbesar yaitu sebesar 4.704.480 kilogram, jauh melampaui ayam kampung sebesar 55.440 kilogram, itik sebesar 2.281 kilogram, dan puyuh sebesar 1.440 kilogram. Tingginya produksi ayam pedaging menunjukkan berkembangnya usaha peternakan ayam komersial yang menjadi sumber penyediaan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat.



Gambar 4.6 Jumlah Produksi (Kg) Perikanan Budidaya dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Pada subsektor perikanan, Kabupaten Grobogan mengembangkan dua jenis usaha perikanan, yaitu perikanan budidaya ikan air tawar (kolam) dan perikanan perairan umum. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di atas, produksi perikanan budidaya ikan air tawar mencapai 3.222.470 kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan perairan umum yang sebesar 1.462,91 kilogram. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan budidaya perikanan menjadi kontributor utama dalam produksi perikanan Kabupaten Grobogan.



Gambar 4.7 Nilai Produksi (Rp) Perikanan Budidaya dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Dari sisi nilai ekonomi, Gambar 4.7 menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan budidaya ikan air tawar mencapai Rp64,49 miliar, sedangkan nilai produksi perikanan perairan umum mencapai Rp34,42 miliar. Meskipun jumlah produksi perikanan budidaya ikan air tawar mencapai lebih dari 2.000 kali lipat dibandingkan produksi perikanan perairan umum, nilai produksinya hanya sekitar dua kali lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil perikanan perairan umum memiliki nilai ekonomi per satuan produksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan perikanan budidaya ikan air tawar. Secara keseluruhan, kedua subsektor tersebut memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Grobogan serta menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi pelaku usaha perikanan.

Tabel 4.6 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar (Kolam)

Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jenis Ikan	Jumlah Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
Ikan Lele	2.755.537	51.542.000.000
Ikan Nila	254.453	6.783.031.000
Ikan Tawes	18.430	331.728.000
Ikan Gurame	147.102	5.177.863.000
Ikan Patin	20.581	165.010.000
Ikan Bawal	20.101	361.805.000
Ikan Mas	6.266	125.300.000
Total	3.222.470	64.486.737.000

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan jenis ikan air tawar yang dibudidayakan, ikan lele menjadi komoditas utama dengan produksi sebesar 2.755.537 kilogram atau sekitar 85 persen dari total produksi perikanan air tawar, dengan nilai produksi mencapai Rp51,54 miliar. Komoditas lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah ikan nila dan gurame. Dominasi ikan lele menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki prospek usaha yang paling unggul karena didukung oleh permintaan pasar yang tinggi dan teknologi budidaya yang relatif mudah diterapkan.

Tabel 4.7 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Ikan Hias Berdasarkan Jenis Ikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jenis Ikan	Jumlah Prosuksi (Ekor)	Nilai Produksi (Rp)
Ikan Koi	75.030	375.150.000
Ikan Komet	2.620	9.170.000
Ikan Cupang	62.695	188.085.000
Ikan Guppy	41.520	41.520.000
Total	181.865	613.925.000

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Selain ikan konsumsi, Kabupaten Grobogan juga mengembangkan budidaya ikan hias yang memberikan nilai tambah bagi usaha perikanan. Total produksi ikan hias pada Tahun 2025 mencapai 181.865 ekor dengan nilai produksi sebesar Rp613,92 juta. Ikan koi menjadi jenis ikan hias dengan produksi terbesar yaitu 75.030 ekor bernilai Rp375,15 juta, diikuti ikan cupang sebesar 62.695 ekor dengan nilai Rp188,08 juta, ikan guppy sebesar 41.520 ekor dengan nilai Rp41,42 juta, dan ikan komet sebesar 2.620 ekor dengan nilai Rp9,17 juta. Pengembangan ikan hias ini merupakan diversifikasi usaha perikanan yang berpotensi memberikan nilai ekonomi yang tinggi.

Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Indeks Kualitas Air

72,28

Menunjukkan kualitas air di Kabupaten Grobogan berada pada kondisi yang baik sebagai hasil upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran air.

Indeks Kualitas Udara

73,52

Menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Grobogan berada pada kondisi yang baik sehingga mendukung lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Indeks Kualitas Lahan

67,14

Menunjukkan kualitas lahan berada pada kondisi yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan lahan dan upaya pelestarian lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

71,66

Menunjukkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Grobogan secara keseluruhan berada pada kondisi yang baik.

4.3 Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan. Kondisi lingkungan hidup yang baik akan mendukung kualitas kehidupan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan lahan, pengelolaan sampah, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai.

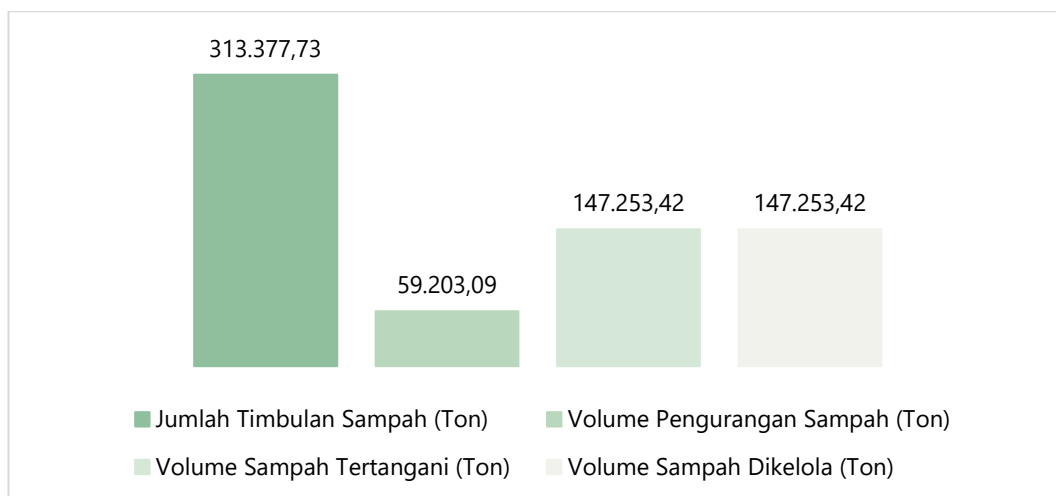
Tabel 4.8 Luas Tutupan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	2022	2023	2024	2025
33.15.01	Kedungjati	645,02	1.086,01	1.086,01	1.318,50
33.15.02	Karangrayung	393,60	393,60	393,60	1.244,39
33.15.03	Penawangan	476,09	476,09	476,09	202,80
33.15.04	Toroh	152,49	152,49	152,49	632,65
33.15.05	Geyer	56,07	186,68	186,73	574,20
33.15.06	Pulokulon	691,54	691,54	691,54	571,87
33.15.07	Kradenan	261,05	201,80	201,80	538,30
33.15.08	Gabus	290,40	290,40	290,40	514,48
33.15.09	Ngaringan	347,16	1.047,42	1.047,42	838,56
33.15.10	Wirosari	226,28	632,11	632,11	1.215,89
33.15.11	Tawangharjo	478,97	497,87	497,87	754,19
33.15.12	Grobogan	739,57	751,48	751,48	1.372,59
33.15.13	Purwodadi	261,69	261,70	262,23	184,75
33.15.14	Brati	603,18	603,18	603,18	684,38
33.15.15	Klambu	252,45	252,45	252,45	466,20
33.15.16	Godong	50,23	345,59	345,59	108,31
33.15.17	Gubug	882,60	882,60	882,60	276,09
33.15.18	Tegowanu	156,92	178,83	178,88	0
33.15.19	Tanggungharjo	476,43	381,94	381,94	252,81
Total		7.441,74	9.313,78	9.314,41	11.750,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

Luas tutupan lahan di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, luas tutupan lahan Kabupaten Grobogan tahun 2025 mencapai 11.750,96 hektare, meningkat sebesar 57 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7.441,74 hektare. Peningkatan luas tutupan lahan menunjukkan adanya upaya konservasi dan penghijauan yang dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah guna mendukung kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan.

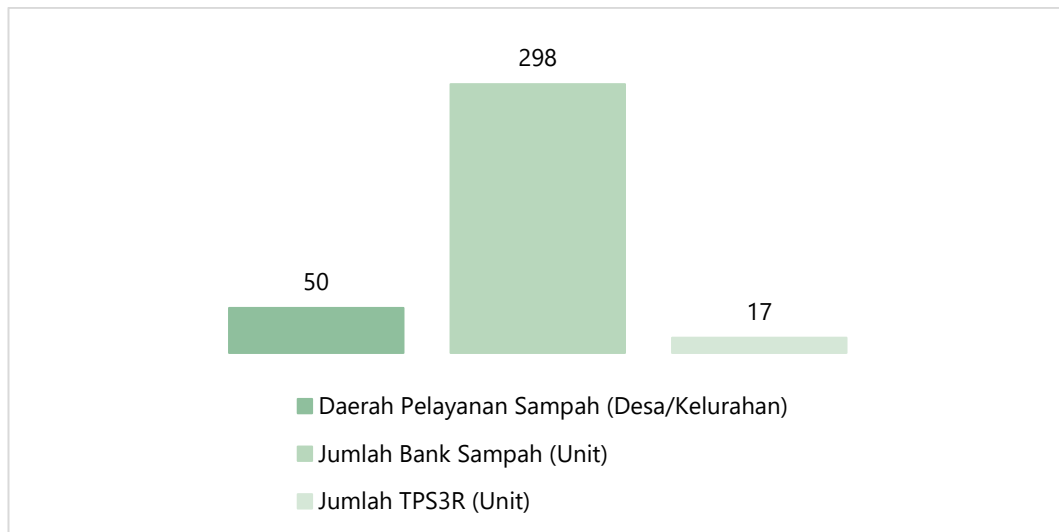
Berdasarkan sebaran per kecamatan, Kecamatan Grobogan memiliki luas tutupan lahan terbesar pada tahun 2025 yaitu 1.372,59 hektare, diikuti Kecamatan Kedungjati sebesar 1.318,50 hektare dan Kecamatan Karangrayung sebesar 1.244,39 hektare. Di sisi lain, Kecamatan Tegowanu tercatat tidak memiliki tutupan lahan pada Tahun 2025. Sementara itu, Kecamatan Penawangan, Pulokulon, dan Tangguharjo mengalami tren penurunan sejak 2022 hingga 2025. Variasi luas tutupan lahan antar kecamatan ini mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah dan intensitas kegiatan penghijauan di masing-masing kecamatan.



Gambar 4.8 Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, jumlah timbulan sampah mencapai 313.377,73 ton. Dari total timbulan tersebut, volume sampah yang berhasil dikurangi mencapai 59.203,09 ton, sedangkan volume sampah yang tertangani dan dikelola masing-masing sebesar 147.253,42 ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat selisih antara timbulan sampah dengan kapasitas penanganan yang ada, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.



Gambar 4.9 Jumlah Daerah Pelayanan Sampah, Bank Sampah, dan TPS3R di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

Dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Kabupaten Grobogan telah memiliki jaringan infrastruktur persampahan yang cukup. Pada tahun 2025, layanan pengelolaan sampah telah menjangkau 50 desa/kelurahan sebagai daerah pelayanan sampah. Selain itu, terdapat 298 unit Bank Sampah yang tersebar di berbagai wilayah, serta 17 unit Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R). Keberadaan Bank Sampah dan TPS3R ini menjadi sarana penting dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah melalui pemilahan dan daur ulang sejak dari sumbernya.

Tabel 4.9 Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Rincian	Jumlah	Luas (Ha)
Taman Utama / Taman Aktif	12	156,97
Taman Pengisi	21	12,04
Taman Pengiring	9	111,18
Taman Halaman	0	0
Taman Pembagi Jalan	4	4,21
Hutan Kota	2	10,05
Total	48	294,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam sistem ekologi perkotaan yang berfungsi sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, serta ruang rekreasi dan interaksi sosial masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025, terdapat 48 unit RTH dengan



total luas 294,45 hektare. Adapun komposisi RTH Kabupaten Grobogan terdiri dari Taman Utama/Taman Aktif sebanyak 12 unit dengan luas 156,97 hektare, Taman Pengisian sebanyak 21 unit seluas 12,04 hektare, Taman Pengiring sebanyak 9 unit seluas 111,18 hektare, Taman Pembagi Jalan sebanyak 4 unit seluas 4,21 hektare, serta Hutan Kota sebanyak 2 unit seluas 10,05 hektare. Ketersediaan RTH yang beragam ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis dan sosial yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Grobogan. Pengembangan dan pemeliharaan RTH secara berkelanjutan perlu terus dilakukan guna memenuhi standar kebutuhan RTH kawasan perkotaan dan mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lestari.



BAB V

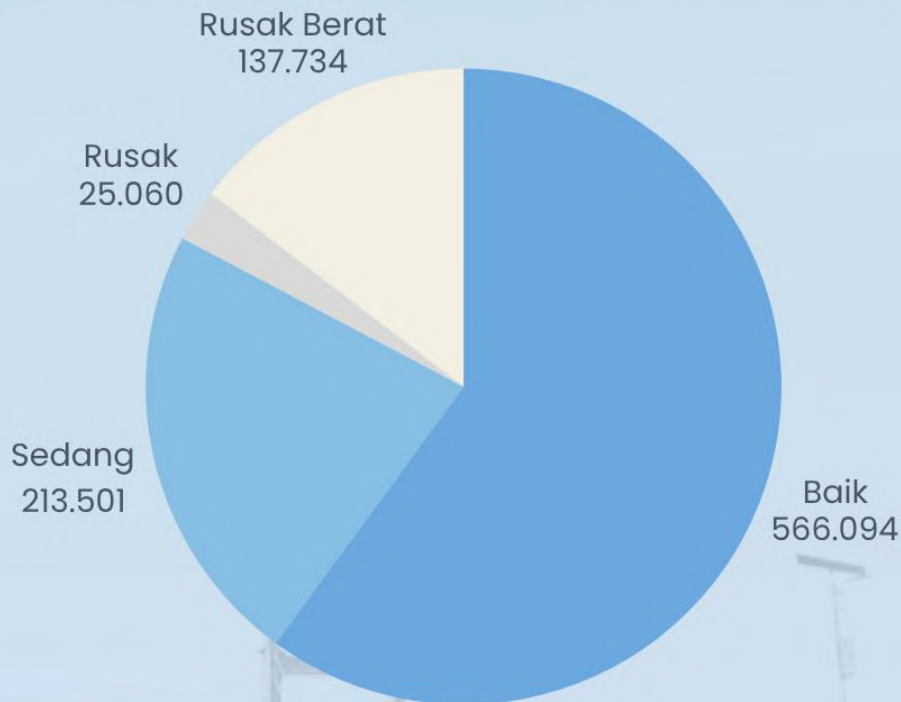
INFRASTRUKTUR

DAN

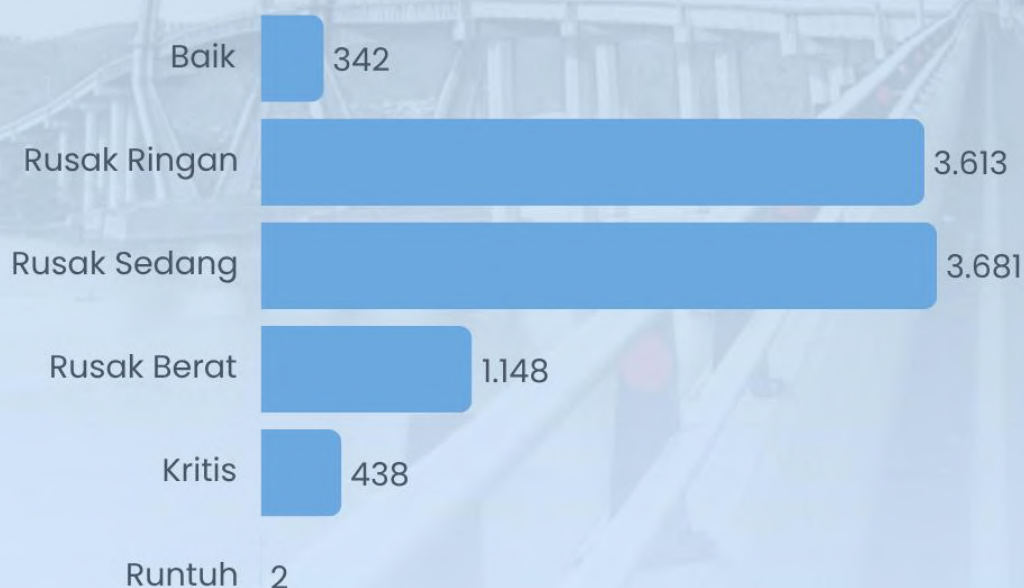
KEWILAYAHAN

Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Km)

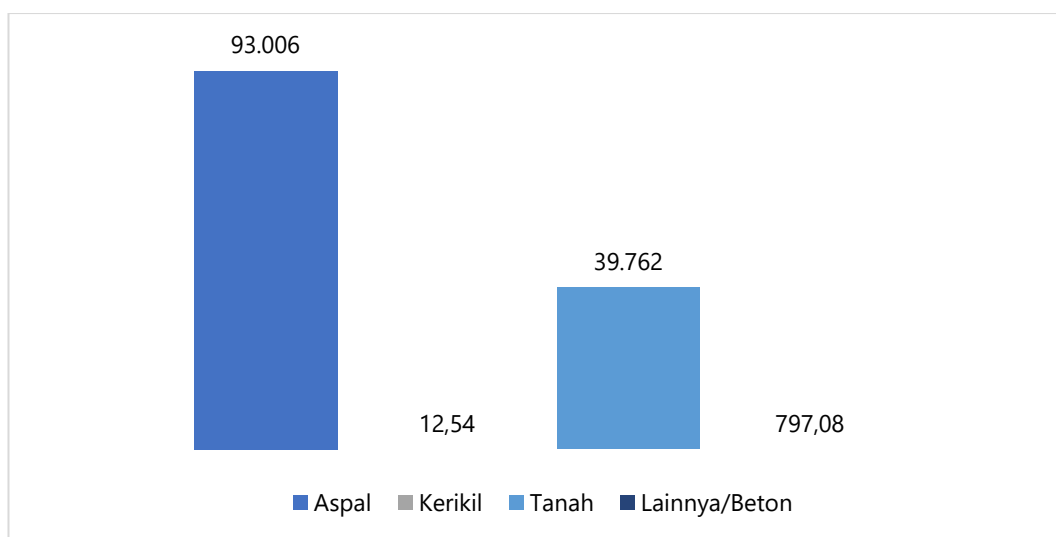


Panjang Jembatan Berdasarkan Kondisi (Meter)



5.1 Pekerjaan dan Penataan Ruang

Penyediaan infrastruktur jalan yang andal merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jaringan jalan kabupaten berfungsi sebagai pembentuk struktur ruang sekaligus pemacu pertumbuhan pola ruang, terutama dalam memfasilitasi distribusi barang, jasa, dan mobilitas penduduk lintas wilayah. Melalui manajemen penataan ruang yang berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyelenggaraan urusan infrastruktur jalan diarahkan untuk mendukung konektivitas antarkawasan, mempercepat mobilitas logistik, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. Sektor ini menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan orientasi kebijakan teknis pemeliharaan maupun peningkatan kualitas konektivitas wilayah demi terwujudnya pemerataan pembangunan serta aksesibilitas pelayanan publik yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun data terkait Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Grobogan tahun 2025 disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 5.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Grobogan (Km) 2025

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

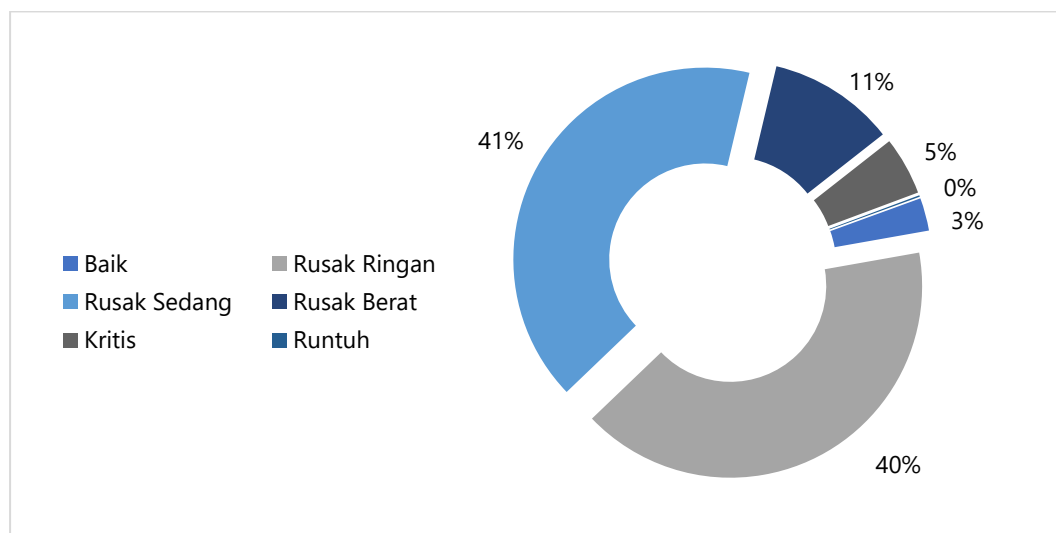
Berdasarkan data sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan tahun 2025, total panjang jaringan jalan kabupaten tercatat sepanjang 942,39 kilometer. Mempertimbangkan karakteristik geologis daerah yang didominasi struktur tanah lempung ekspansif dengan daya dukung rendah, Pemerintah

Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan strategis dengan mengoptimalkan konstruksi perkerasan kaku. Alhasil, jenis permukaan jalan Lainnya/Beton mendominasi secara absolut sepanjang 797,08 kilometer (84,58 persen), disusul oleh permukaan Aspal sepanjang 93,006 kilometer (9,87 persen) yang diorientasikan pada kawasan perkotaan berkondisi tanah stabil, sementara sisa jaringan jalan masih berupa permukaan Tanah sepanjang 39,762 kilometer (4,22 persen) serta Kerikil sepanjang 12,54 kilometer (1,33 persen).

Capaian kumulatif struktur jalan keras (Beton dan Aspal) yang telah mencapai 94,45 persen mengindikasikan keberhasilan integrasi sistem jaringan transportasi daerah. Konektivitas yang mantap ini memperlancar arus pergerakan komoditas dari sektor pertanian dan industri pengolahan, yang merupakan sektor unggulan domestik, menuju pasar regional. Namun demikian, keberadaan 5,55 persen jalan yang masih berupa tanah dan kerikil menuntut perhatian khusus dalam dokumen perencanaan tata ruang. Eksistensi jalan tersebut umumnya memisahkan kawasan perdesaan terpencil dan wilayah sentra produksi sekunder dari pusat pelayanan lokal. Guna mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka sinkronisasi program pembangunan antara Bidang Penataan Ruang dan Bidang Bina Marga pada tahun-tahun anggaran berikutnya perlu difokuskan pada peningkatan (*upgrading*) kualitas ruas-ruas jalan tanah dan kerikil tersebut menjadi struktur yang mantap, demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Selain jaringan jalan, infrastruktur jembatan memegang peranan yang tidak kalah krusial sebagai elemen interkoneksi yang menghubungkan simpul-simpul wilayah yang terpisah oleh kendala geografis seperti sungai, lembah, maupun jaringan drainase makro. Dalam kerangka kerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jembatan berfungsi sebagai komponen penjamin kontinuitas arus lalu lintas pada sistem jaringan jalan kabupaten. Keberadaan jembatan yang mantap secara struktural sangat menentukan efisiensi aksesibilitas spasial, mengingat kegagalan struktur pada satu titik jembatan dapat mengakibatkan terputusnya akses ekonomi dan sosial secara total (*total gridlock*) pada koridor wilayah yang dilayaninya. Berdasarkan inventarisasi data

sektoral Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, tercatat total aset jembatan yang dikelola berjumlah 795 unit dengan sebaran tingkat keandalan struktur yang bervariasi. Berikut disajikan data terkait jumlah jembatan menurut kondisi di Kabupaten Grobogan tahun 2025.



Gambar 5.2 Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Grobogan (Jembatan) 2025

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

Analisis performa teknis terhadap 795 unit jembatan tersebut menunjukkan tantangan yang cukup besar dalam hal pemeliharaan dan rehabilitasi struktural. Komponen jembatan dengan kategori kondisi Baik tercatat hanya sebanyak 22 unit. Sementara itu, akumulasi jembatan yang mengalami degradasi performa didominasi oleh kategori Rusak Ringan sebanyak 323 unit dan Rusak Sedang sebanyak 325 unit. Kerusakan pada fase ini umumnya berupa penurunan kualitas minor pada elemen sandaran (*railing*), lapis permukaan lantai jembatan, maupun sumbatan pada saluran drainase jembatan yang memerlukan tindakan pemeliharaan rutin dan berkala. Namun demikian, perhatian khusus secara regulatif dan anggaran harus diprioritaskan pada jembatan dengan kategori kondisi Rusak Berat sebanyak 85 unit, kondisi Kritis sebanyak 39 unit, serta jembatan yang telah dinyatakan Runtuh sebanyak 1 unit. Kondisi kritis dan runtuh ini mengindikasikan telah terjadinya kelelahan bahan (*fatigue*) atau kerusakan struktural utama pada bangunan bawah (*substructure*) maupun bangunan atas (*superstructure*) yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

Data kondisi jembatan tahun 2025 ini memberikan landasan empiris bagi pemerintah daerah untuk melakukan penajaman prioritas dalam rencana aksi pembangunan daerah. Tingginya angka jembatan dalam kategori rusak ringan hingga kritis (mencapai 97,10 persen dari total aset) menuntut adanya sinkronisasi yang kuat antara Bidang Penataan Ruang sebagai perencana struktur ruang dan Bidang Bina Marga selaku eksekutor teknis. Mitigasi risiko bencana terhadap jembatan-jembatan strategis, terutama yang memotong aliran sungai besar dengan kerawanan gerusan arus (*scouring*) tinggi di wilayah Grobogan, harus diintegrasikan ke dalam program prioritas tahun anggaran berikutnya. Melalui skema rehabilitasi berat pada jembatan rusak berat/kritis serta rekonstruksi total pada jembatan yang runtuh, diharapkan disparitas geografis antarwilayah dapat dieliminasi, keamanan jalur logistik pangan dan komoditas daerah dapat terjamin, serta perwujudan ruang wilayah Kabupaten Grobogan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dapat diakselerasi secara optimal.

Selain sektor transportasi, pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) melalui penyediaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten menjadi pilar penataan ruang operasional yang krusial, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama Kabupaten Grobogan. Berdasarkan rekapitulasi spasial tahun 2025, total Luas Areal Baku irigasi yang berada di bawah wewenang pengelolaan pemerintah kabupaten tercatat sebesar 17.840,29 Hektar (Ha). Distribusi luasan irigasi ini tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi area baku terbesar berada di Kecamatan Geyer seluas 191,40 Ha, diikuti oleh Kecamatan Kradenan (104,00 Ha), Grobogan (102,90 Ha), dan Godong (101,90 Ha). Sebaliknya, karakteristik wilayah dengan luas areal baku terkecil tercatat di Kecamatan Karangrayung seluas 4,00 Ha dan Kedungjati (akumulasi dua sistem pembagian sebesar 28,90 Ha), yang menunjukkan variasi pemanfaatan ruang budidaya pertanian basah dan ketergantungan sumber air permukaan di masing-masing sub-wilayah. Secara lebih rinci, berikut merupakan rekapitulasi rapat data daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Grobogan tahun 2025.

Tabel 5.1 Data Luas Daerah Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Grobogan 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Luas Areal Baku (Ha)
33.15.01	Kedungjati	20,10
33.15.02	Karangrayung	4,00
33.15.03	Penawangan	15,00
33.15.04	Toroh	19,00
33.15.05	Geyer	191,40
33.15.06	Pulokulon	78,20
33.15.07	Kradenan	104,00
33.15.08	Gabus	15,00
33.15.09	Ngaringan	25,60
33.15.10	Wirosari	12,95
33.15.11	Tawangharjo	45,23
33.15.12	Grobogan	102,90
33.15.13	Purwodadi	17,80
33.15.14	Brati	53,00
33.15.15	Klambu	25,63
33.15.16	Godong	101,90
33.15.17	Gubug	56,00
33.15.18	Tegowanu	42,00
33.15.19	Tanggungharjo	71,45
33.15.01	Kedungjati	8,80
Jumlah		17.840,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

Ditinjau dari aspek penataan ruang, capaian kumulatif struktur jalan keras yang mantap (94,45 persen) serta kepastian luasan areal baku irigasi mencerminkan arah kebijakan daerah yang integratif dalam menyatukan sistem jaringan prasarana wilayah. Interkoneksi yang kuat antara jalan produksi yang memadai dan ketersediaan air irigasi yang stabil secara langsung mengeliminasi risiko isolasi geografis terpencil sekaligus melekatkan fungsi fungsional kawasan agropolitan di Kabupaten Grobogan. Ke depan, sinkronisasi program anggaran antara Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air DPUPR harus difokuskan pada peningkatan kualitas sisa 5,55 persen jalan non-permanen serta modernisasi operasi-pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten. Pendekatan lintas sektor yang komprehensif ini esensial untuk menjamin pemerataan pelayanan publik, mengoptimalkan produktivitas lahan, serta mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan

Kondisi Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

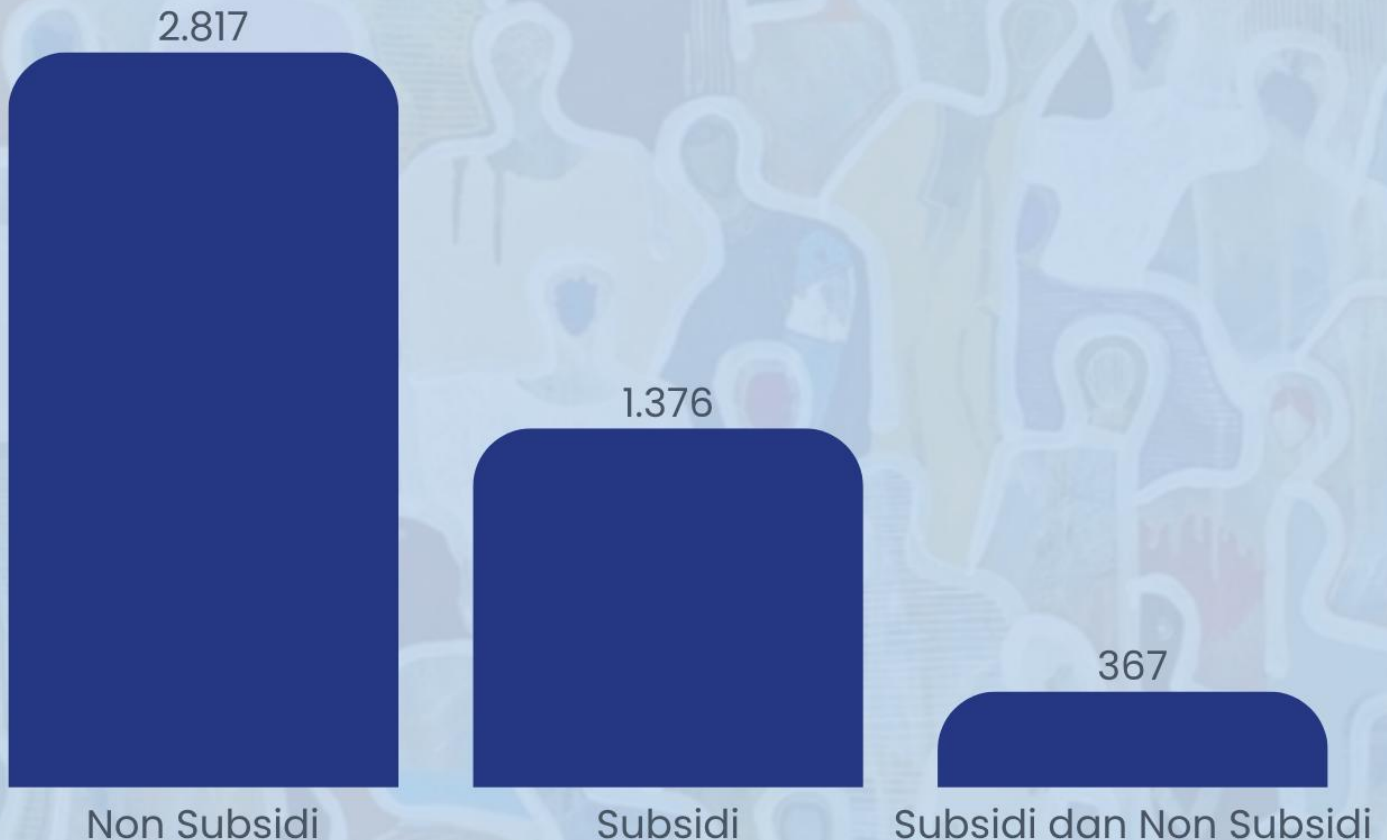


Luas
Permukiman Kumuh
82,76
Hektare



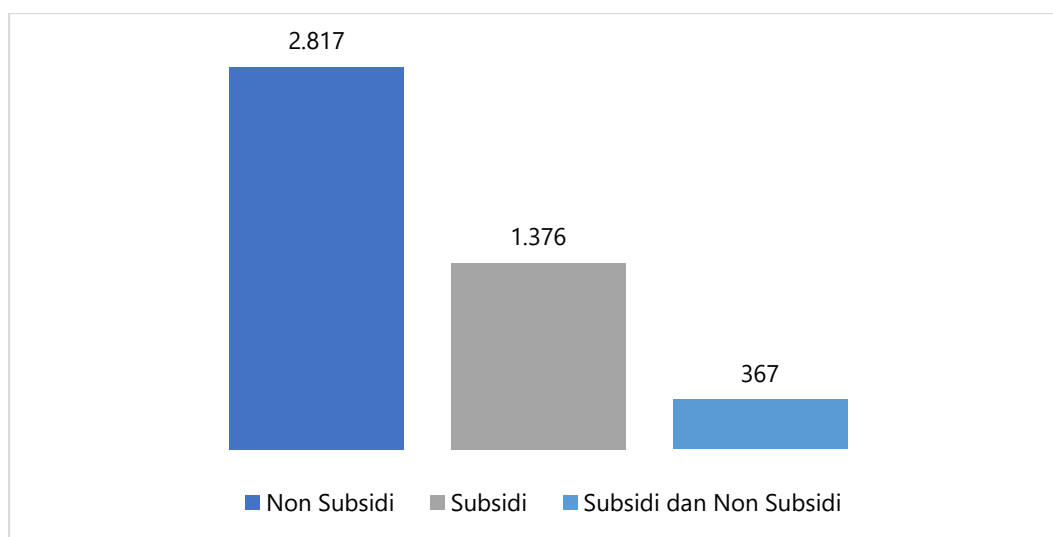
Jumlah Rumah Tidak
Layak Huni (RLTH)
79.904
Unit

Jumlah Perumahan Berdasarkan Jenisnya



5.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu sektor krusial dalam pembangunan daerah yang berfungsi memenuhi hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, sekaligus sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta penataan ruang wilayah yang berkelanjutan. Berdasarkan data grafik rekapitulasi jenis perumahan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, tercatat total volume pembangunan mencapai 4.560 unit perumahan yang terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Non-Subsidi, Subsidi, serta perumahan kombinasi Subsidi dan Non-Subsidi. Komposisi sebaran ini didominasi secara signifikan oleh sektor komersial atau perumahan Non-Subsidi yang mencapai angka tertinggi, yakni sebanyak 2.817 unit atau berkisar 61,78% dari keseluruhan total penyediaan hunian. Hal tersebut mengindikasikan tingginya daya beli serta kuatnya minat pasar masyarakat kelas menengah ke atas di wilayah Kabupaten Grobogan terhadap properti komersial murni tanpa bantuan stimulus pemerintah. Adapun data terkait rekapan jenis perumahan di Kabupaten Grobogan tahun 2025 disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 5. 3 Rekap Jenis Perumahan di Kabupaten Grobogan, 2025

Sumber: Disperakim Kabupaten Grobogan

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan hunian berpenghasilan rendah tetap menunjukkan kontribusi yang proporsional melalui keberadaan perumahan Subsidi yang mencatatkan angka sebesar 1.376 unit atau setara dengan 30,18%. Angka ini mencerminkan keberlanjutan implementasi kebijakan program jaminan rumah rakyat

yang didorong oleh sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak pengembang demi memperkecil angka kesenjangan kepemilikan rumah (*backlog* perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Grobogan. Sementara itu, kategori perumahan yang memadukan kawasan Subsidi dan Non-Subsidi menempati proporsi paling kecil dengan total 367 unit atau sekitar 8,05%. Kehadiran model kawasan terpadu (kombinasi) ini menunjukkan adanya upaya inovasi tata ruang spasial guna menciptakan inklusivitas sosial di dalam lingkungan permukiman, sehingga meminimalisir adanya segregasi permukiman berdasarkan kelas ekonomi. Secara umum, analisis data spasial perumahan tahun 2025 ini memberikan gambaran strategis bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam merumuskan kebijakan izin pemanfaatan ruang, pengendalian zonasi permukiman, serta pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana umum yang seimbang di masa mendatang.

Di sisi lain, jika ditinjau berdasarkan sebaran spasial menurut wilayah kecamatan, penyediaan perumahan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 memperlihatkan adanya konsentrasi pembangunan yang sangat tinggi di pusat kegiatan wilayah. Kecamatan Purwodadi menjadi pusat pertumbuhan utama dengan total akumulasi mencapai 2.359 unit, yang digerakkan secara masif oleh sektor komersial dengan penyediaan perumahan Non-Subsidi yang mencapai angka tertinggi sebanyak 2.270 unit. Kondisi ini mencerminkan peran strategis Kecamatan Purwodadi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang memiliki daya tarik investasi properti serta kepadatan penduduk yang tinggi. Sementara itu, persebaran perumahan Subsidi menunjukkan pola distribusi yang lebih meluas ke beberapa kawasan penyangga, di mana Kecamatan Grobogan tercatat sebagai wilayah penyedia perumahan Subsidi terbesar dengan jumlah 451 unit, diikuti oleh Kecamatan Wirosari sebanyak 281 unit, Kecamatan Godong sebanyak 226 unit, dan Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 215 unit. Untuk model perumahan kombinasi, pengembangan terbesar terpusat di Kecamatan Grobogan dengan 259 unit dan Kecamatan Toroh sebanyak 91 unit. Melalui potret disparitas data antar-kecamatan ini, jajaran instansi pemerintahan terkait dapat merancang kebijakan tata ruang dan pemerataan infrastruktur permukiman yang lebih seimbang di masa mendatang. Adapun jumlah perumahan menurut kecamatan dan

jenis perumahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Jumlah Perumahan Menurut Kecamatan dan Jenis Perumahan di Kabupaten Grobogan 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jenis Perumahan			Jumlah
		Non Subsidi	Subsidi	Subsidi dan Non Subsidi	
33.15.01	Kedungjati	-	-	-	-
33.15.02	Karangrayung	-	-	-	-
33.15.03	Penawangan	-	22	-	22
33.15.04	Toroh	40	60	91	191
33.15.05	Geyer	-	-	-	-
33.15.06	Pulokulon	-	-	-	-
33.15.07	Kradenan	21	-	-	21
33.15.08	Gabus	-	-	-	-
33.15.09	Ngaringan	-	-	-	-
33.15.10	Wirosari	85	281	-	366
33.15.11	Tawangharjo	-	49	-	49
33.15.12	Grobogan	68	451	259	778
33.15.13	Purwodadi	2.270	72	17	2.359
33.15.14	Brati	-	-	-	-
33.15.15	Klambu	45	-	-	45
33.15.16	Godong	222	226	-	448
33.15.17	Gubug	66	-	-	66
33.15.18	Tegowanu	-	-	-	-
33.15.19	Tanggunharjo	-	215	-	215
Jumlah		2.817	1.376	367	4.560

Sumber: Disperakim Kabupaten Grobogan 2025

karakteristik tipologi hunian di setiap wilayah menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh fungsi strategis masing-masing kecamatan. Kawasan koridor barat dan timur, seperti Kecamatan Godong dan Kecamatan Wirosari, menunjukkan pertumbuhan yang dinamis pada segmen perumahan Subsidi dan Non-Subsidi secara berdampingan, yang mengindikasikan adanya pergeseran sosiologis masyarakat lokal menuju kawasan permukiman yang lebih terstruktur. Fenomena ini juga terlihat pada pola pengembangan perumahan terpadu di Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Toroh, di mana integrasi antara hunian bersubsidi dan komersial dalam satu kawasan mulai diimplementasikan demi menekan biaya pembebasan lahan sekaligus mengoptimalkan efisiensi penyediaan utilitas umum. Sebaliknya, nihilnya pencatatan pembangunan perumahan formal di beberapa kecamatan pinggiran, seperti Kedungjati,

Karangrayung, dan Geyer, menjadi indikator bahwa pemenuhan kebutuhan papan di wilayah-wilayah tersebut masih bertumpu pada pembangunan rumah swadaya oleh masyarakat secara mandiri. Evaluasi komparatif atas jenis perumahan menurut kecamatan ini memberikan landasan empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan klasterisasi wilayah permukiman, sehingga intervensi program perumahan rakyat di masa depan dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis pada karakteristik riil kebutuhan masyarakat setempat.

Selain penyediaan perumahan baru, aspek krusial lain dalam pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Keberadaan RTLH menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat serta kualitas lingkungan permukiman di suatu daerah, di mana rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penunjang dapat memicu kerawanan sosial dan penurunan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 menaruh perhatian serius terhadap program rehabilitasi dan stimulan perbaikan rumah swadaya ini guna menjamin hak masyarakat terhadap hunian yang aman dan bermartabat. Upaya intervensi penuntasan RTLH tersebut dirancang secara terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemenuhan infrastruktur dasar seperti sarana air bersih dan sanitasi yang layak. Adapun jumlah RTLH menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah RTLH	Satuan
1	33.15.01	Kedungjati	3.263	Unit
2	33.15.02	Karangrayung	5.096	Unit
3	33.15.03	Penawangan	4.133	Unit
4	33.15.04	Toroh	5.423	Unit
5	33.15.05	Geyer	6.447	Unit
6	33.15.06	Pulokulon	7.482	Unit
7	33.15.07	Kradenan	4.835	Unit
8	33.15.08	Gabus	4.927	Unit
9	33.15.09	Ngaringan	6.322	Unit
10	33.15.10	Wirosari	5.262	Unit
11	33.15.11	Tawangharjo	3.058	Unit
12	33.15.12	Grobogan	4.512	Unit

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah RTLH	Satuan
13	33.15.13	Purwodadi	3.899	Unit
14	33.15.14	Brati	2.574	Unit
15	33.15.15	Klambu	1.683	Unit
16	33.15.16	Godong	3.522	Unit
17	33.15.17	Gubug	3.214	Unit
18	33.15.18	Tegowanu	2.219	Unit
19	33.15.19	Tanggunharjo	2.033	Unit
Jumlah			79.904	Unit

Sumber: Disperakim Kabupaten Grobogan 2025

Di sisi lain, jika ditinjau berdasarkan hasil data kuantitatif per kecamatan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, tercatat total akumulasi Rumah Tidak Layak Huni di seluruh wilayah mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 79.904 unit. Sebaran spasial data tersebut memperlihatkan tingkat urgensi penanganan yang bervariasi antar-wilayah, di mana Kecamatan Pulokulon mencatatkan jumlah RTLH tertinggi dengan total mencapai 7.482 unit, disusul oleh Kecamatan Geyer sebanyak 6.447 unit, dan Kecamatan Ngaringan sebanyak 6.322 unit. Karakteristik wilayah geografis dan kepadatan penduduk pedesaan di kecamatan-kecamatan tersebut ditengarai menjadi salah satu faktor dominan tingginya angka rumah swadaya yang memerlukan rehabilitasi struktur. Sebaliknya, volume RTLH terendah berada di Kecamatan Klambu dengan jumlah 1.683 unit, diikuti oleh Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 2.033 unit, dan Kecamatan Tegowanu sebanyak 2.219 unit. Rekapitulasi sebaran angka RTLH menurut kecamatan ini memberikan peta prioritas yang riil bagi instansi pemerintahan daerah dalam mengalokasikan anggaran stimulan perbaikan rumah secara proporsional dan tepat sasaran pada tahun anggaran berjalan.

Selain penyediaan perumahan fisik, pemenuhan infrastruktur lingkungan berupa akses sanitasi yang layak juga menjadi salah satu pilar penentu keberhasilan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang sehat. Akses terhadap sanitasi yang layak bagi setiap Kepala Keluarga (KK) bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan instrumen strategis yang berdampak langsung pada peningkatan indeks kesehatan masyarakat, penurunan angka stunting, serta pencegahan pencemaran lingkungan berbasis permukiman. Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 menetapkan target pemenuhan sanitasi secara makro guna mendorong terciptanya lingkungan perdesaan dan perkotaan yang bersih

dan tangguh. Target pemenuhan ini diselaraskan dengan komitmen daerah untuk terus memperkecil kesenjangan (*gap*) antara ketersediaan infrastruktur sanitasi eksisting dengan laju pertumbuhan penduduk di setiap wilayah. Informasi mengenai data jumlah Kartu Keluarga yang memiliki akses sanitasi layak menurut kecamatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Data Jumlah KK Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan, 2025

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Target Tahun 2025	Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan
1	33.15.01	Kedungjati	15.072	11.229
2	33.15.02	Karangrayung	34.396	23.905
3	33.15.03	Penawangan	21.224	16.539
4	33.15.04	Toroh	40.029	36.138
5	33.15.05	Geyer	24.089	18.506
6	33.15.06	Pulokulon	40.620	29.309
7	33.15.07	Kradenan	29.196	20.994
8	33.15.08	Gabus	22.746	11.955
9	33.15.09	Ngaringan	23.783	16.711
10	33.15.10	Wirosari	31.738	28.413
11	33.15.11	Tawangharjo	17.829	10.625
12	33.15.12	Grobogan	23.651	15.183
13	33.15.13	Purwodadi	48.560	46.041
14	33.15.14	Brati	17.548	15.024
15	33.15.15	Klambu	13.298	12.348
16	33.15.16	Godong	28.972	25.516
17	33.15.17	Gubug	23.963	21.275
18	33.15.18	Tegowanu	15.172	11.070
19	33.15.19	Tanggunharjo	12.671	11.224
Jumlah			484.557	382.005

Sumber: Disperakim Kabupaten Grobogan 2025

Berdasarkan pencapaian data jumlah KK yang memiliki akses sanitasi dasar atau layak per kecamatan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, tercatat realisasi pemenuhan secara keseluruhan telah mencapai 382.005 KK dari total target sebesar 484.557 KK. Sebaran data spasial menunjukkan bahwa Kecamatan Purwodadi mencatatkan angka akses tertinggi di tingkat kabupaten, yakni sebanyak 46.041 KK yang telah memiliki akses layak dari total target 48.560 KK, disusul oleh Kecamatan Toroh sebanyak 36.138 KK dan Kecamatan Pulokulon sebanyak 29.309 KK. Tingginya capaian di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan tingkat kesadaran sanitasi masyarakat yang baik serta efektivitas realisasi program pembangunan jamban sehat dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S). Sebaliknya, jumlah



KK dengan akses sanitasi layak terkecil berada di Kecamatan Tawangharjo sebanyak 10.625 KK, diikuti oleh Kecamatan Tegowanu sebanyak 11.070 KK, dan Kecamatan Tanggunharjo sebanyak 11.224 KK. Rekapitulasi capaian pemenuhan sanitasi menurut kecamatan ini memberikan basis data empiris yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan intervensi program replikasi pendanaan, baik melalui APBD maupun sinergi sektor swasta, guna menuntaskan area-area prioritas yang serapan capaian sanitasinya masih membutuhkan akselerasi.

Kondisi Lalu Lintas di Terminal Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Banyaknya Lalu Lintas Kendaraan Umum



Micro Bus

Datang : 22.557

Berangkat : 22.557



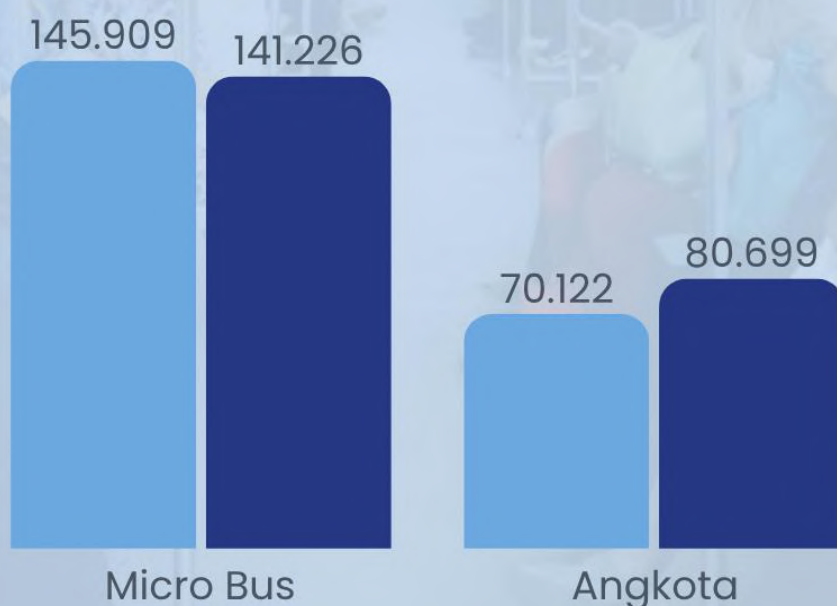
Angkota

Datang : 19.780

Berangkat : 19.780

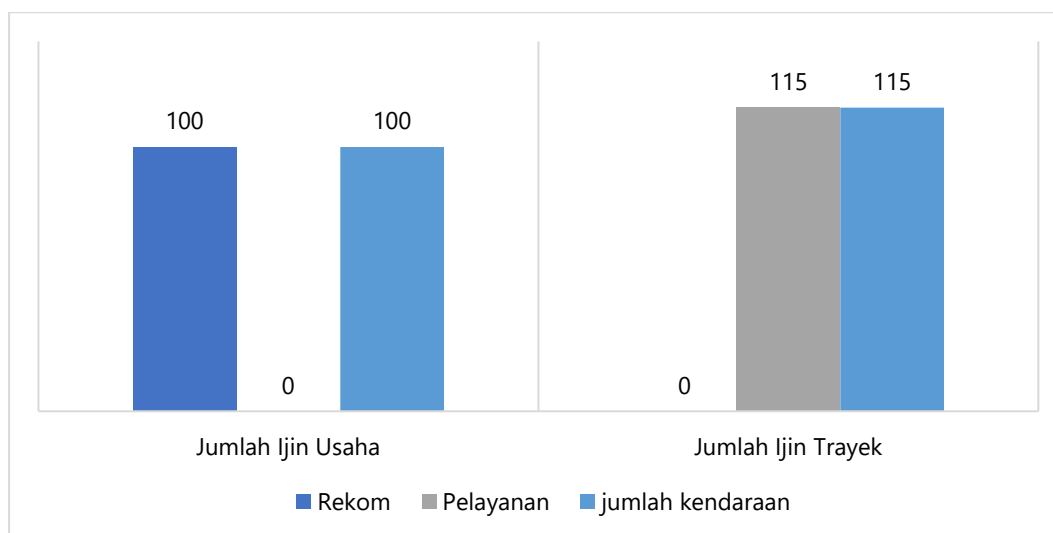
Banyaknya Lalu Lintas Penumpang Kendaraan Umum

● Turun ● Naik



5.3 Perhubungan

Sektor perhubungan merupakan salah satu pilar krusial dalam struktur pemerintahan daerah yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan menyelenggarakan pelayanan transportasi guna menjamin kelancaran mobilitas orang dan barang secara aman, tertib, dan lancar. Kondisi sektor perhubungan di Kabupaten Grobogan saat ini menghadapi tantangan sekaligus peluang strategis seiring dengan berkembangnya koridor aktivitas industri, pertanian, dan perdagangan interregional yang menuntut penguatan jaringan trayek serta modernisasi manajemen angkutan jalan. Dalam ranah angkutan jalan tersebut, urusan perhubungan memegang peranan strategis dalam tata kelola perizinan angkutan umum, pengendalian operasional armada, serta standarisasi kelaikan kendaraan demi terciptanya integrasi transportasi wilayah yang kondusif. Melalui fungsi pengawasan regulasi dan pemberian rekomendasi perizinan ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha angkutan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan serta mengoptimalkan kualitas layanan moda transportasi publik secara berkelanjutan. Adapun data terkait rekomendasi perijinan bidang angkutan jalan Kabupaten Grobogan tahun 2025 disajikan seperti pada gambar berikut:



Gambar 5.4 Data Rekomendasi Perijinan Bidang Angkutan Jalan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Di sisi lain, jika ditinjau berdasarkan data kuantitatif dari gambar grafik data rekomendasi perizinan bidang angkutan jalan Kabupaten Grobogan tahun 2025 pada

dokumen tata kelola administrasi perizinan dipetakan ke dalam dua instrumen utama, yaitu Jumlah Izin Usaha dan Jumlah Izin Trayek. Pada aspek Jumlah Izin Usaha, tercatat volume Rekomendasi (Rekom) yang diterbitkan mencapai angka 100 unit dengan pemenuhan Jumlah Kendaraan yang bergerak sebanding, yakni sebanyak 100 unit, sementara instrumen Pelayanan berada pada angka nihil (0). Sementara itu, pada aspek Jumlah Izin Trayek, instrumen Rekomendasi tercatat berada di angka nihil (0), sedangkan instrumen Pelayanan menunjukkan realisasi sebesar 115 unit yang juga diikuti dengan pemenuhan Jumlah Kendaraan sebanyak 115 unit. Keselarasan kuantitas antara volume izin dengan jumlah kendaraan operasional tersebut mencerminkan tertib administrasi serta efektivitas pengawasan pemenuhan kuota armada angkutan jalan di Kabupaten Grobogan pada tahun berjalan.

Sektor perhubungan dan sarana prasarana jalan tidak hanya bertumpu pada manajemen lalu lintas dan angkutan, melainkan juga sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas penunjang keselamatan, salah satunya melalui penyelenggaraan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Urusan penataan LPJU memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada malam hari, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta meminimalisir potensi kerawanan tindakan kriminalitas di ruang publik. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi aset dan kondisi fisik LPJU menjadi langkah krusial bagi pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi konsumsi energi, memastikan ketepatan alokasi anggaran pemeliharaan, serta merencanakan pemerataan titik pencahayaan secara proporsional. Melalui basis data penataan yang terstruktur, pemerintah daerah dapat mewujudkan infrastruktur keselamatan transportasi yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung aktivitas produktif masyarakat secara aman di seluruh wilayah. Adapun data inventaris LPJU Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Inventaris LPJU Kabupaten Grobogan

Kode Kecamatan	Kecamatan	Total
33.15.01	Kedungjati	6
33.15.02	Karangrayung	17
33.15.03	Penawangan	7
33.15.04	Toroh	6
33.15.05	Geyer	22
33.15.06	Pulokulon	7

Kode Kecamatan	Kecamatan	Total
33.15.07	Kradenan	6
33.15.08	Gabus	6
33.15.09	Ngaringan	8
33.15.10	Wirosari	14
33.15.11	Tawangharjo	13
33.15.12	Grobogan	14
33.15.13	Purwodadi	61
33.15.14	Brati	9
33.15.15	Klambu	24
33.15.16	Godong	11
33.15.17	Gubug	2
33.15.18	Tegowanu	2
33.15.19	Tanggungharjo	14
Jumlah		249

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil data kuantitatif Inventarisasi LPJU Kabupaten Grobogan pada tahun berjalan, tata kelola fasilitas pencahayaan jalan ini dipetakan secara rinci mencakup status kepemilikan aset, kondisi operasional jaringan, serta pemetaan sebaran titik di setiap wilayah kecamatan tercatat total keseluruhan infrastruktur penerangan jalan yang terdata mencapai 249 titik. Sebaran data spasial menunjukkan bahwa Kecamatan Purwodadi mencatatkan jumlah inventarisasi LPJU tertinggi di tingkat kabupaten, yakni sebanyak 61 titik, disusul oleh Kecamatan Klambu sebanyak 24 titik, dan Kecamatan Geyer sebanyak 22 titik. Tingginya angka penataan di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan prioritas pemenuhan aspek keselamatan di pusat perkotaan serta jalur-jalur penghubung utama yang memiliki intensitas mobilitas tinggi pada malam hari. Sebaliknya, volume titik LPJU terendah berada di Kecamatan Gubug dan Kecamatan Tegowanu yang masing-masing hanya mencatatkan 2 titik. Rekapitulasi sebaran angka hasil inventarisasi ini memberikan basis data teknis yang riil bagi instansi pemerintahan terkait dalam memetakan kebutuhan penambahan unit baru serta mengoptimalkan program pemeliharaan jaringan penerangan jalan secara lebih merata dan tepat sasaran.

Pengujian kendaraan bermotor atau *kir* merupakan salah satu instrumen pengendalian teknis yang vital dalam urusan pemerintahan di sektor perhubungan Kabupaten Grobogan guna menjamin aspek keselamatan, kelayakan jalan, serta kelestarian lingkungan. Pelaksanaan uji berkala di daerah ini difokuskan pada

pemenuhan standarisasi teknis kendaraan angkutan barang maupun angkutan orang, yang pengelompokannya disesuaikan berdasarkan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB). Melalui klasifikasi JBB dan jenis armada tersebut, pemerintah daerah dapat memetakan karakteristik, populasi, serta beban muatan moda angkutan yang melintasi koridor jalan raya di wilayah administratif Kabupaten Grobogan. Tata kelola administrasi pengujian berkala yang terstruktur ini tidak hanya berkontribusi langsung pada penurunan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kegagalan fungsi teknis kendaraan, melainkan juga menjadi basis evaluasi kebijakan manajemen lalu lintas dan pemeliharaan kapasitas infrastruktur jalan secara jangka panjang. Secara lebih rinci, berikut merupakan rekapitulasi kendaraan bermotor wajib uji berdasarkan JBB dan jenisnya tahun 2025.

Tabel 5.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berdasarkan JBB dan Jenis 2025

Jenis	0	2.501 - 3.500	3.501 - 9.000	9.001 - 12.000	DIATAS 12.000
Mobil Barang Bak Terbuka	4.867	6	0	0	0
Mobil Bus Kecil	425	17	0	0	0
Mobil Barang Bak Tertutup	885	7	0	0	0
Mobil Bus Sedang	238	6	0	0	0
Mobil Bus Besar	168	22	0	0	0
Mobil Barang	0	7	0	0	0
Tangki	29	6	0	0	0
Kereta Tempelan Bak Tertutup	2	6	0	0	0
Kendaraan Khusus	5	8	0	0	0
Kendaraan Khusus	29	14	0	0	0
Kendaraan Khusus	21	13	0	0	0
Kereta Tempelan Tangki	17	14	0	0	0
Mobil Penarik	1	61	0	0	0
Mobil Bus Maxi	1	9	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berdasarkan JBB dan Jenis Kabupaten Grobogan sebaran armada wajib uji didominasi secara

signifikan oleh kendaraan dengan kategori JBB "0". Pada kategori tersebut, Mobil Barang Bak Terbuka mencatatkan volume tertinggi dengan jumlah mencapai 4.867 unit, diikuti oleh Mobil Barang Bak Tertutup sebanyak 885 unit, dan Mobil Bus Kecil sebanyak 425 unit. Sementara itu pada rentang JBB 2.501 – 3.500, klasifikasi kendaraan didominasi oleh Mobil Penarik yang mencatatkan angka sebanyak 61 unit dan Mobil Bus Besar sebanyak 22 unit. Adapun untuk kategori JBB yang lebih tinggi, yakni rentang 3.501 – 9.000, rentang 9.001 – 12.000, hingga kategori di atas 12.000, seluruh jenis kendaraan angkutan jalan berada pada angka nihil (0). Hasil inventarisasi angka wajib uji ini mengindikasikan bahwa struktur angkutan barang dan moda transportasi massal yang beroperasi di Kabupaten Grobogan saat ini masih didominasi oleh jenis armada ringan hingga sedang.

Kebijakan pembebasan tarif retribusi atau yang dikenal sebagai program Bebas Uang Uji (BB) merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di sektor perhubungan. Kebijakan ini diterapkan secara terintegrasi guna mereduksi beban finansial para pelaku usaha angkutan serta merangsang kesadaran pemilik kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Grobogan untuk senantiasa memeriksakan kelaikan armadanya. Melalui pengosongan biaya uji berkala ini, pemerintah daerah berupaya mengeliminasi praktik pungutan liar sekaligus mengoptimalkan pengawasan teknis terhadap kelaikan operasional angkutan barang dan orang yang melintasi koridor jalan raya daerah. Pada jangka panjang, implementasi program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan hukum (*compliance rate*) masyarakat, yang secara linier akan berkontribusi terhadap penurunan angka kecelakaan akibat kegagalan fungsi teknis kendaraan di wilayah administratif, berikut disajikan data terkait jumlah kendaraan bebas uang tahun 2025.

Tabel 5.7 Bebas Uang Uji (BB)

No	Jenis Kendaraan	Bebas Uang Uji (BB)		
		Jumlah		Jumlah Total
		U	TU	
1	Mobil Barang Bak Terbuka	491	4.375	4.866
2	Mobil Bus Kecil	45	380	425
3	Mobil Barang Bak Tertutup	57	828	885
4	Mobil Bus Sedang	156	82	238

No	Jenis Kendaraan	Bebas Uang Uji (BB)		
		Jumlah		Jumlah Total
		U	TU	
5	Mobil Bus Besar	167	1	168
6	Mobil Tangki	2	27	29
7	Kereta Tempelan Bak Tertutup	1	1	2
8	Kereta Tempelan Tangki	5	0	5
9	Kendaraan Khusus	3	26	29
10	Kereta Tempelan Bak Terbuka	6	15	21
11	Mobil Penarik	3	14	17
12	Mobil Bus Maxi	1	0	1
13	Mobil Barang	0	1	1
Jumlah		937	5.750	6.687

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif pelayanan pengujian berkala akumulasi realisasi program Bebas Uang Uji (BB) di Kabupaten Grobogan secara keseluruhan mencatatkan angka yang cukup masif, yaitu mencapai total 6.687 unit kendaraan. Total realisasi tersebut terbagi ke dalam dua klasifikasi, yakni kategori U sebanyak 937 unit dan kategori TU sebanyak 5.750 unit. Secara spesifik, klaster kendaraan yang paling mendominasi pemanfaatan fasilitas bebas biaya ini adalah Mobil Barang Bak Terbuka dengan jumlah total mencapai 4.866 unit (terdiri dari 491 unit U dan 4.375 unit TU), disusul oleh Mobil Barang Bak Tertutup sebanyak 885 unit, serta Mobil Bus Kecil sebanyak 425 unit. Sebaliknya, volume pemanfaatan terendah tercatat pada jenis Mobil Bus Maxi dan Mobil Barang yang masing-masing hanya mencatatkan 1 unit kendaraan. Rekapitulasi sebaran angka hasil realisasi bebas biaya ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi instansi pemerintahan terkait untuk mengukur efektivitas program, memproyeksikan potensi kehilangan pendapatan asli daerah (*opportunity cost*), serta menyusun strategi manajemen keselamatan transportasi jalan yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, analisis terhadap sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Perhubungan di Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Optimalisasi prasarana jalan melalui penggunaan *rigid pavement* untuk mengatasi tanah ekspansif, penyediaan hunian layak serta sanitasi bagi masyarakat, hingga tata kelola sektor perhubungan melalui tertib administrasi pengujian kendaraan bermotor (JBB) dan implementasi program Bebas Uang Uji (BB)



menjadi pilar utama dalam mendukung mobilitas serta kesejahteraan daerah. Melalui sinkronisasi data kuantitatif yang terstruktur pada ketiga sektor strategis ini, pemerintah daerah memiliki landasan empiris yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan, merumuskan strategi pembangunan yang inklusif, serta memastikan keberlanjutan roda perekonomian dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan secara jangka panjang.



BAB VI

PEREKONOMIAN

DAERAH

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Rp2,819,944,959,572



PMDN

Rp920,938,029,255



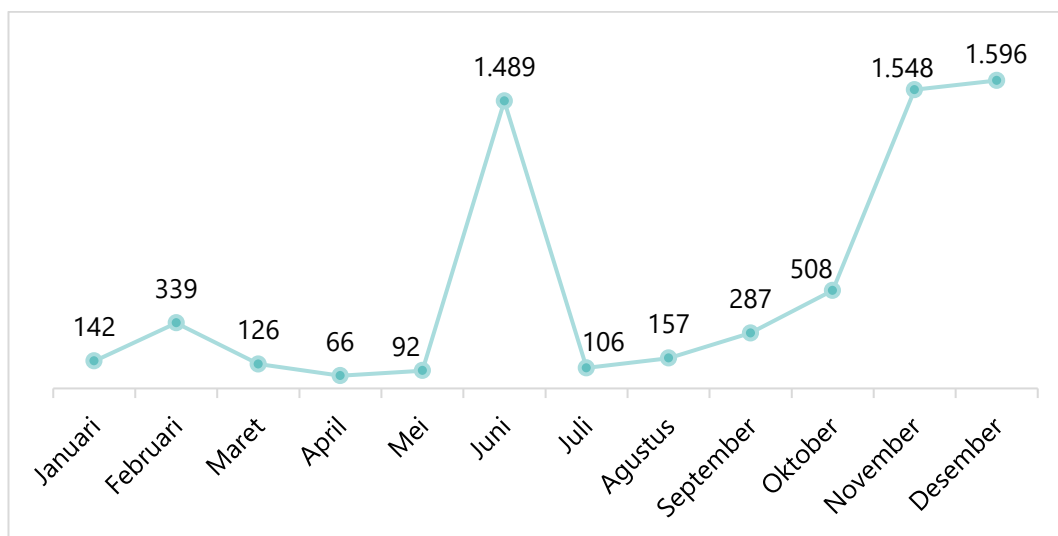
PMA



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

6.1 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan kegiatan usaha. Kemudahan pelayanan perizinan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Informasi mengenai jumlah izin berusaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat memberikan gambaran mengenai dinamika aktivitas investasi dan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Grobogan.



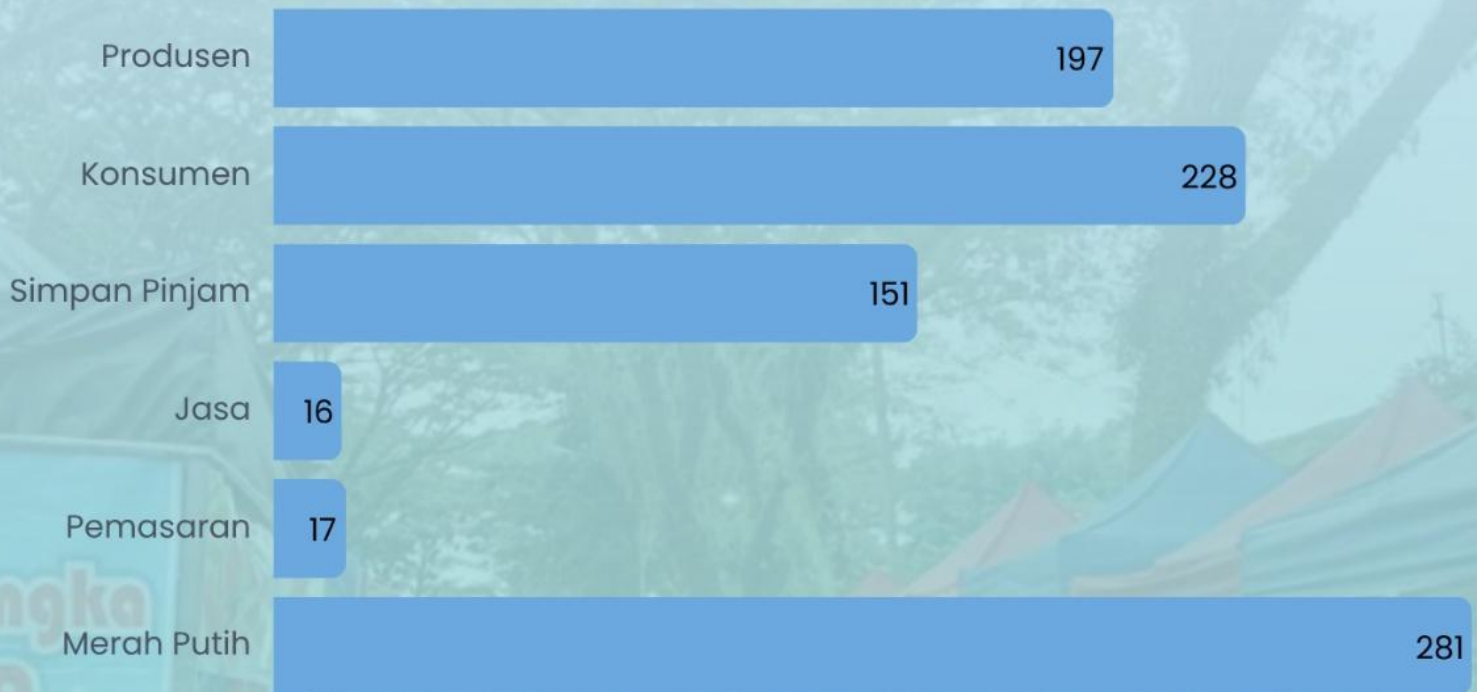
Gambar 6.1 Jumlah Izin Berusaha yang Diterbitkan OSS per Bulan yang Berlokasi di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

Jumlah izin berusaha menunjukkan fluktuasi dari bulan ke bulan, yang mencerminkan adanya variasi aktivitas investasi dan pembukaan usaha baru sepanjang tahun. Perbedaan jumlah izin yang diterbitkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian, tingkat permintaan pasar, maupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Secara umum, penerbitan izin berusaha melalui sistem OSS menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi guna mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Grobogan.

Koperasi dan UMKM di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya



Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



43.846
UMKM

99,83% merupakan usaha **mikro**, sedangkan usaha **kecil** sebanyak **38 unit** dan usaha **menengah** sebanyak **36 unit**.

6.2 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dominasi UMKM dalam struktur perekonomian daerah menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha produktif. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah usaha menurut skala usaha dan persebarannya di setiap kecamatan perlu disajikan sebagai gambaran kondisi UMKM di Kabupaten Grobogan.

Tabel 6.1 Jumlah Usaha Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
33.15.01	Kedungjati	1.836	0	0	1.836
33.15.02	Karangrayung	3.658	0	0	3.658
33.15.03	Penawangan	2.353	0	0	2.353
33.15.04	Toroh	5.742	2	0	5.744
33.15.05	Geyer	2.870	0	0	2.870
33.15.06	Pulokulon	1.539	0	0	1.539
33.15.07	Kradenan	1.293	0	0	1.293
33.15.08	Gabus	1.080	0	0	1.080
33.15.09	Ngaringan	1.001	0	0	1.001
33.15.10	Wirosari	2.356	0	0	2.356
33.15.11	Tawangharjo	1.082	0	0	1.082
33.15.12	Grobogan	1.362	8	0	1.370
33.15.13	Purwodadi	7.352	22	12	7.386
33.15.14	Brati	1.261	0	0	1.261
33.15.15	Klambu	758	0	0	758
33.15.16	Godong	469	2	6	477
33.15.17	Gubug	2.794	4	5	2.803
33.15.18	Tegowanu	2.925	0	8	2.933
33.15.19	Tanggunharjo	2.041	0	5	2.046
Total		43.772	38	36	43.846

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan

Pada tahun 2025, terdapat sebanyak 43.846 unit usaha di Kabupaten Grobogan yang terdiri atas 43.772 usaha mikro, 38 usaha kecil, dan 36 usaha menengah. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur usaha di Kabupaten Grobogan masih didominasi oleh usaha mikro dengan proporsi lebih dari 99 persen dari total usaha yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi

masyarakat sebagian besar masih dijalankan dalam skala mikro yang umumnya dikelola secara mandiri maupun berbasis rumah tangga.

Ditinjau berdasarkan kecamatan, Kecamatan Purwodadi memiliki jumlah usaha terbanyak yaitu 7.386 unit, diikuti Kecamatan Toroh sebanyak 5.744 unit, dan Kecamatan Karangrayung sebanyak 3.658 unit. Sebaliknya, Kecamatan Godong memiliki jumlah usaha paling sedikit yaitu 477 unit. Banyaknya jumlah usaha di Kecamatan Purwodadi menunjukkan perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Grobogan. Sementara itu, persebaran usaha di seluruh kecamatan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat telah berkembang di berbagai wilayah, meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda.

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Jumlah
Angkatan Kerja
918.835
Jiwa

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin



56,3%



43,7%

Jumlah Pengangguran Terbuka

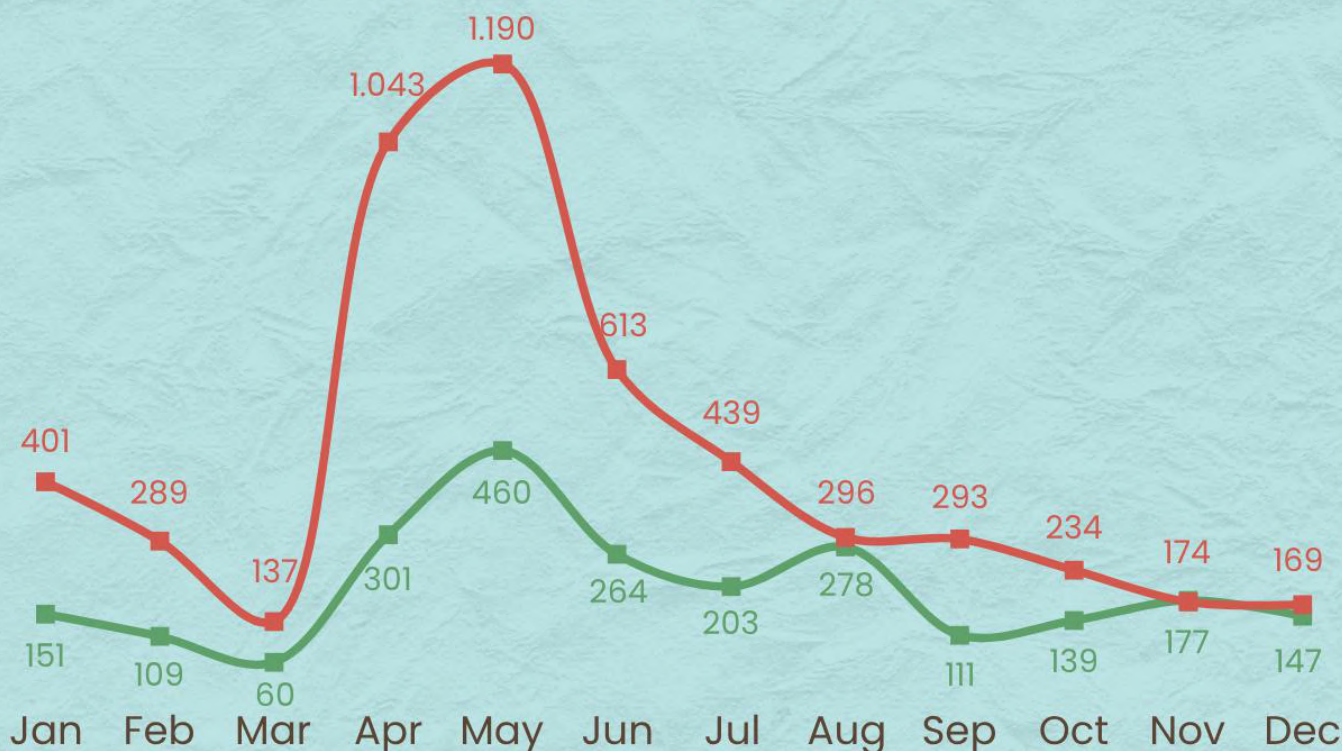


28.630
Jiwa

Jumlah Pencari Kerja per Bulan

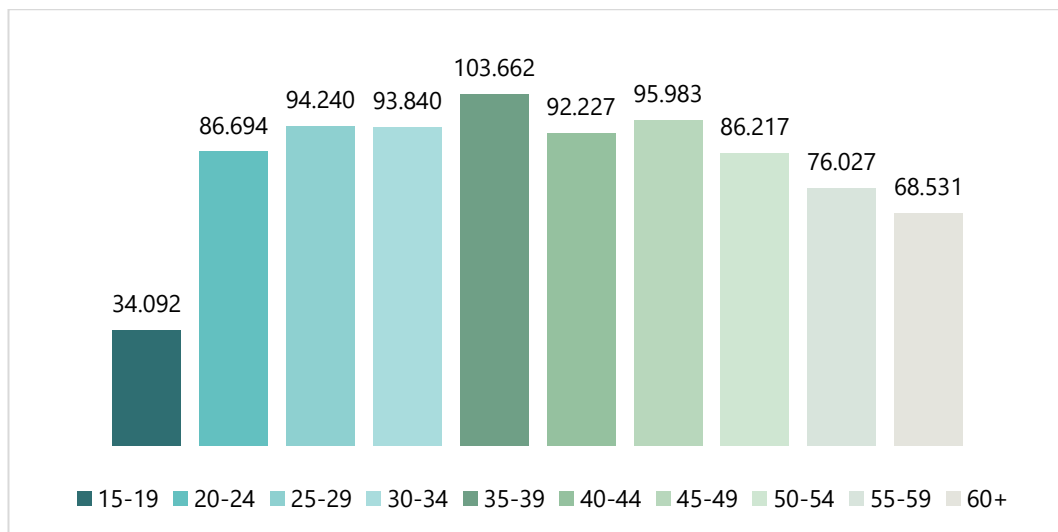
● Laki-laki

● Perempuan



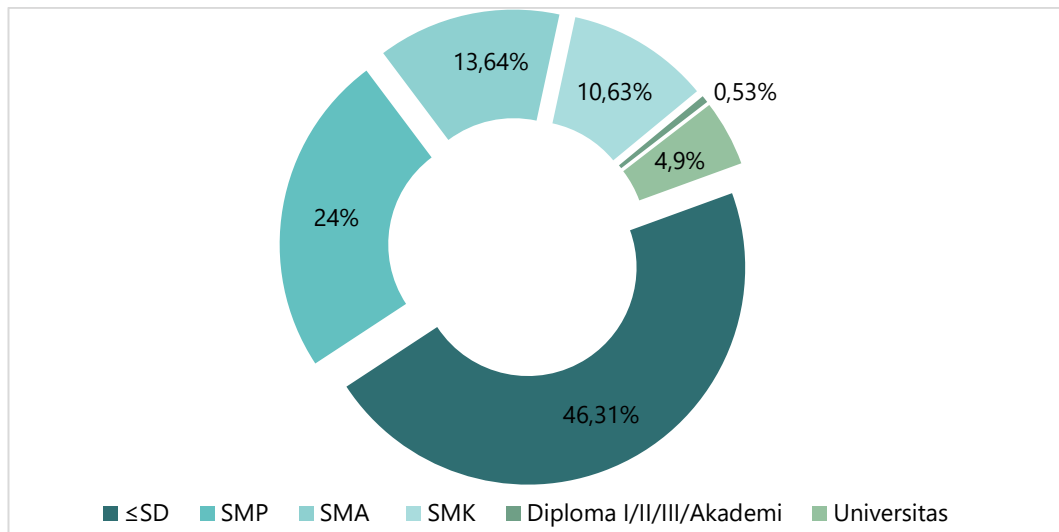
6.3 Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja yang produktif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Karakteristik angkatan kerja berdasarkan kelompok umur dan tingkat pendidikan, serta tingkat partisipasi angkatan kerja dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia serta potensi tenaga kerja yang dimiliki Kabupaten Grobogan. Informasi tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan kesempatan kerja.



Gambar 6.2 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

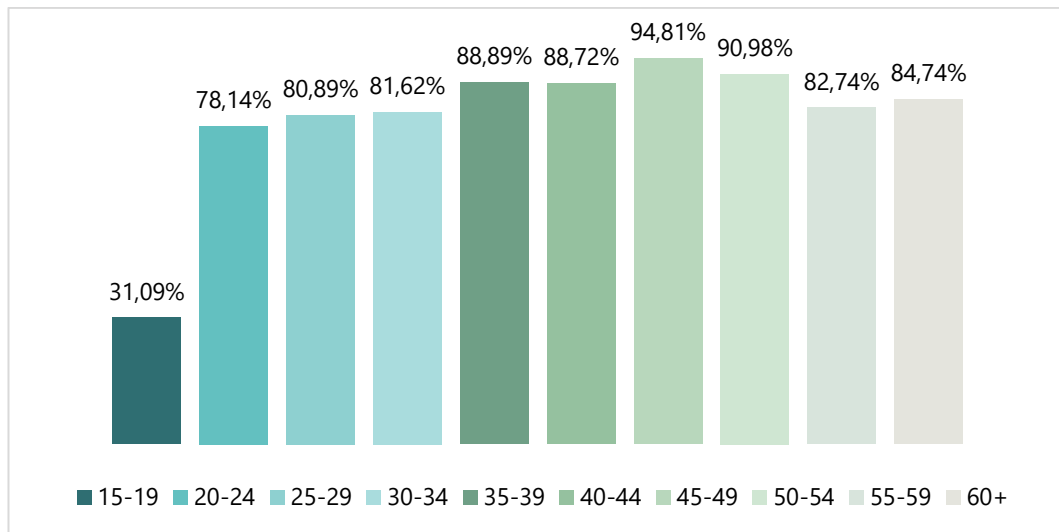
Berdasarkan kelompok umur, penduduk berumur 35-39 tahun merupakan kelompok dengan jumlah angkatan kerja terbesar yaitu sebanyak 103.662 orang, sedangkan kelompok umur 15-19 tahun merupakan yang paling sedikit dengan jumlah 34.092 orang. Jumlah angkatan kerja yang relatif tinggi pada kelompok usia produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar untuk mendukung berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, rendahnya jumlah angkatan kerja pada kelompok usia muda dipengaruhi oleh masih tingginya penduduk yang sedang menempuh pendidikan.



Gambar 6.3 Proporsi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Grobogan memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 46,31 persen atau sebanyak 425.492 orang. Sebaliknya, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi masih relatif sedikit, terlihat dari proporsi lulusan Diploma I/II/III/Akademi yang hanya 0,53 persen dan lulusan Universitas sebesar 4,9 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di Kabupaten Grobogan masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar, sementara proporsi tenaga kerja dengan pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan pelatihan kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Grobogan.



Gambar 6.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut kelompok umur menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya usia hingga mencapai puncaknya pada kelompok umur 45-49 tahun, yaitu sebesar 94,81 persen. Setelah itu, tingkat partisipasi mulai menurun pada kelompok umur yang lebih tua. Sementara itu, kelompok umur 15-19 tahun memiliki tingkat partisipasi terendah yaitu sebesar 31,09 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pada kelompok usia tersebut masih berada dalam jenjang pendidikan. Tingginya tingkat partisipasi pada usia produktif mencerminkan besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Grobogan.

Kondisi Pasar di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jumlah Pasar Berdasarkan Jenisnya



Jumlah Pasar
Tradisional

18
Daerah



Jumlah Pedagang
Pasar Tradisional

7.145
Unit

6.4 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah melalui distribusi barang dan jasa serta penyediaan kebutuhan masyarakat. Pasar tradisional masih menjadi salah satu sarana utama aktivitas perdagangan yang memiliki fungsi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah pasar tradisional dan jumlah pedagang perlu disajikan sebagai gambaran perkembangan aktivitas perdagangan di Kabupaten Grobogan.

Tabel 6.2 Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan dan Jenis Bangunan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jenis Bangunan			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Tanpa Bangunan	
33.15.01	Kedungjati	0	0	0	0
33.15.02	Karangrayung	0	0	0	0
33.15.03	Penawangan	0	0	0	0
33.15.04	Toroh	0	0	0	0
33.15.05	Geyer	1	0	0	1
33.15.06	Pulokulon	1	0	0	1
33.15.07	Kradenan	1	0	0	1
33.15.08	Gabus	0	0	0	0
33.15.09	Ngaringan	0	0	0	0
33.15.10	Wirosari	2	0	0	2
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0	0
33.15.12	Grobogan	1	0	0	1
33.15.13	Purwodadi	8	0	0	8
33.15.14	Brati	0	0	0	0
33.15.15	Klambu	0	0	0	0
33.15.16	Godong	2	0	0	2
33.15.17	Gubug	1	0	0	1
33.15.18	Tegowanu	1	0	0	1
33.15.19	Tanggunharjo	0	0	0	0
Total		18	0	0	18

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Pada tahun 2025, Kabupaten Grobogan memiliki 18 pasar tradisional, yang seluruhnya merupakan bangunan permanen. Kecamatan Purwodadi menjadi wilayah dengan jumlah pasar tradisional terbanyak yaitu 8 pasar, diikuti Kecamatan Godong dan Wirosari yang masing-masing memiliki 2 pasar. Sementara itu, beberapa kecamatan belum memiliki pasar tradisional yang dikelola pemerintah

daerah. Dominasi pasar permanen menunjukkan bahwa sarana perdagangan di Kabupaten Grobogan telah didukung oleh infrastruktur pasar yang relatif memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 6.3 Jumlah Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pasar Tradisional	Jumlah Pedagang Kios (unit)	Jumlah Pedagang Los (unit)	Jumlah Pedagang Lesehan (unit)
Pasar Purwodadi	321	1.094	0
Pasar Agroholtikultura	66	386	0
Pasar Danyang	27	87	0
Pasar Glendoh	24	23	92
Pasar Nglejok	133	155	0
Pasar Suru	6	64	116
Pasar Kalongan	8	9	31
Pasar Pagi	84	679	0
Pasar Umum Wirosari	85	326	158
Pasar Umum Kuwu	59	101	163
Pasar Umum Grobogan	77	268	0
Pasar Hewan Kunden	2	8	0
Pasar Tuko	23	117	0
Pasar Godong	259	421	266
Pasar Gubug	751	340	0
Pasar Tegowanu	281	0	0
Pasar Hewan Ketitang	0	0	0
Pasar Burung	35	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Secara umum, jumlah pedagang berbeda-beda pada setiap pasar sesuai dengan skala dan fungsi pelayanannya. Pasar Gubug merupakan pasar dengan jumlah pedagang kios terbanyak yaitu 751 unit, sedangkan Pasar Purwodadi memiliki jumlah pedagang los terbanyak yaitu 1.094 unit. Untuk pedagang lesehan, jumlah terbanyak terdapat di Pasar Godong yaitu 266 unit, diikuti Pasar Umum Kuwu sebanyak 163 unit dan Pasar Umum Wirosari sebanyak 158 unit. Perbedaan komposisi pedagang pada setiap pasar menunjukkan karakteristik aktivitas perdagangan yang beragam sesuai dengan jenis komoditas yang diperdagangkan, kapasitas pasar, serta tingkat aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah. Keberadaan pasar tradisional beserta para pedagangnya tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal sekaligus mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Grobogan.



BAB VII

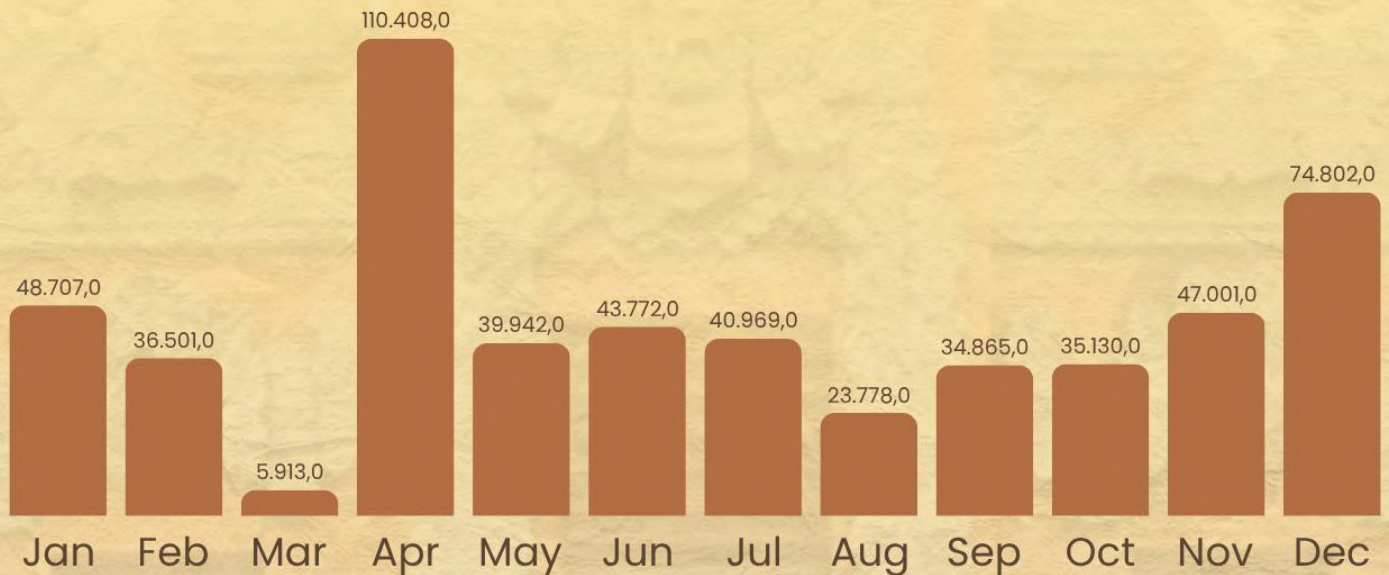
KEBUDAYAAN

DAN

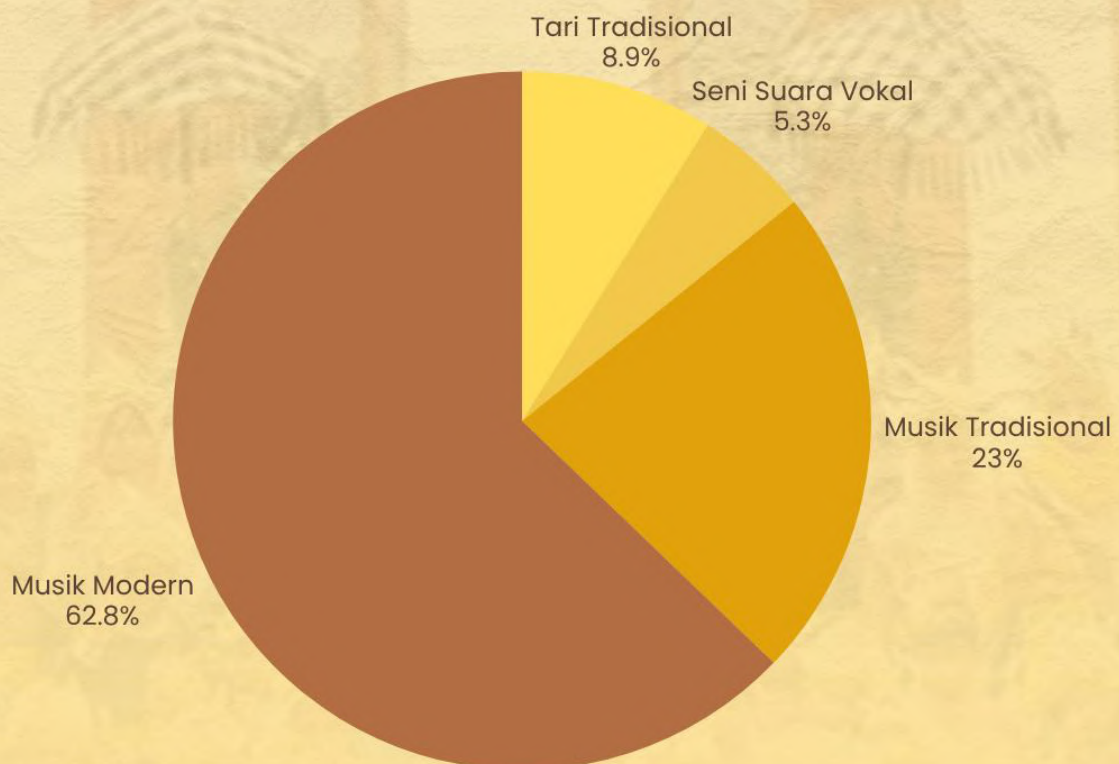
PARIWISATA

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jumlah Wisatawan Datang



Jumlah Sarana Kelompok Seni

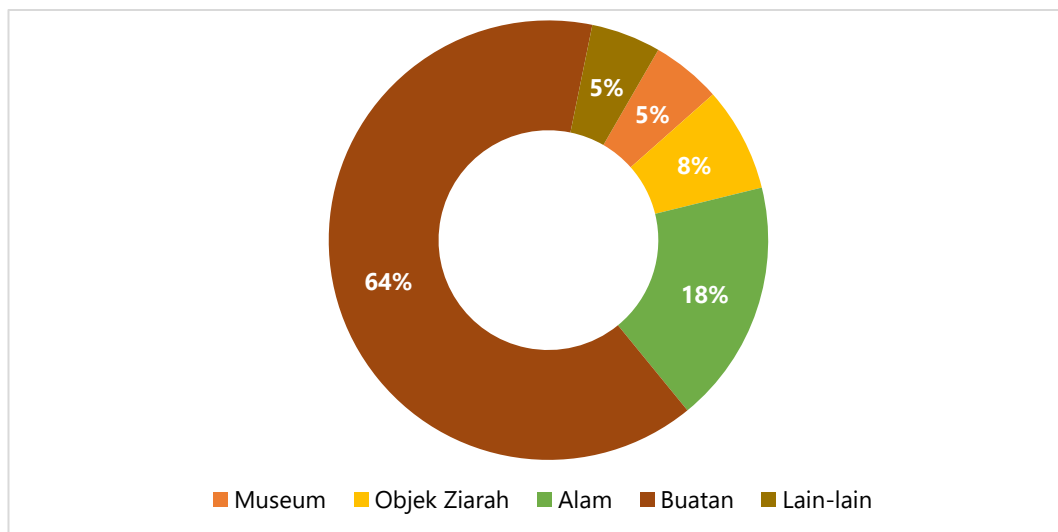


Sumber : Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Grobogan

7.1 Kebudayaan dan Pariwisata

Sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, baik melalui pelestarian nilai-nilai budaya maupun pemanfaatan potensi wisata sebagai penggerak perekonomian. Di sektor pariwisata, keberadaan objek daya tarik wisata, baik yang berbasis alam, budaya, maupun buatan, mencerminkan keragaman potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan.

Objek daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, nilai budaya, maupun kekayaan alam yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Di Kabupaten Grobogan objek daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti museum, objek ziarah, objek alam, objek buatan, dan lain-lain yang secara lebih rinci disajikan seperti pada tabel berikut



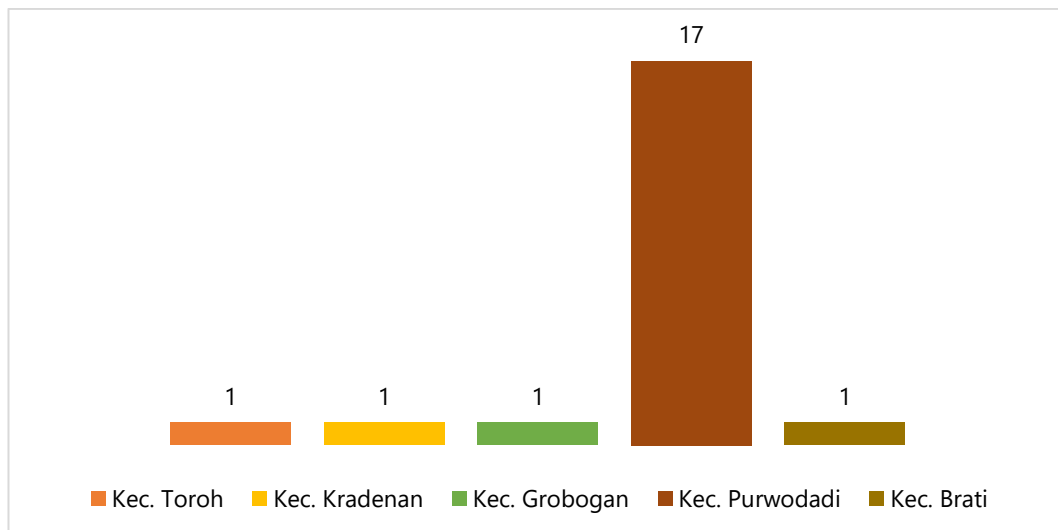
Gambar 7.1 Jumlah Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

Secara keseluruhan, jumlah objek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 39 unit dengan rincian, 2 unit museum, 3 unit objek ziarah, 7 unit objek alam, 25 unit objek buatan, dan 2 unit objek lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bertumpu pada potensi alam dan budaya, tetapi juga didukung oleh berbagai destinasi yang dibangun atau dikembangkan untuk memenuhi

kebutuhan rekreasi masyarakat. Keberadaan wisata buatan diharapkan dapat menjadi alternatif tujuan wisata sekaligus meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan.

Keberadaan objek daya tarik wisata yang beragam menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah. Potensi tersebut dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah, sehingga kebutuhan terhadap sarana penunjang pariwisata, termasuk akomodasi, menjadi semakin penting. Oleh karena itu, ketersediaan hotel merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk mendukung kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Adapun ketersediaan hotel di Kabupaten Grobogan disajikan seperti pada gambar berikut.

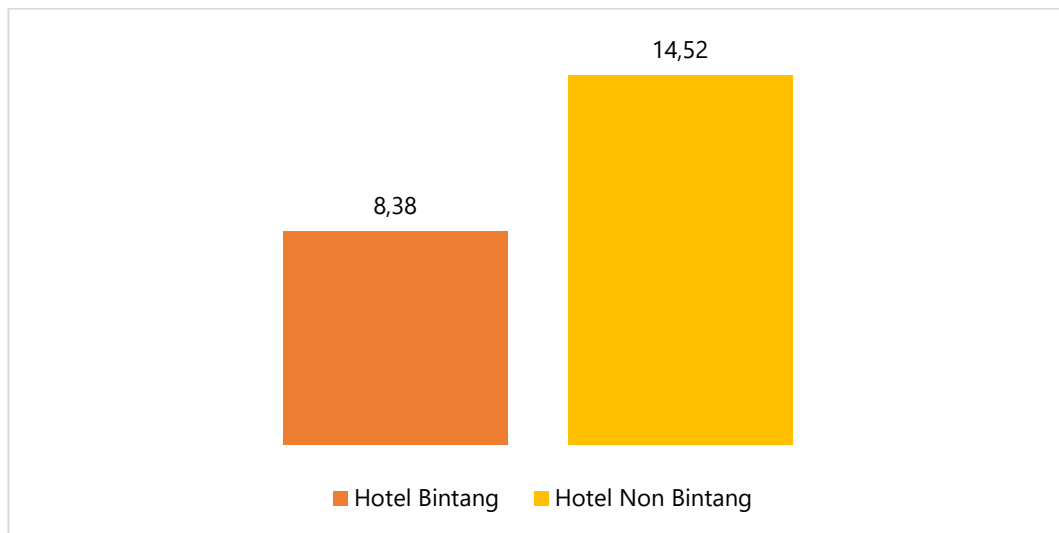


Gambar 7.2 Jumlah Hotel di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

Secara keseluruhan jumlah hotel di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 21 unit yang tersebar di beberapa wilayah. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas perekonomian, Kecamatan Purwodadi memiliki jumlah hotel paling banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebanyak 17 unit. Selain melayani wisatawan, keberadaan hotel tersebut juga mendukung kebutuhan akomodasi bagi pelaku usaha, aparatur pemerintah, maupun masyarakat yang melakukan perjalanan dinas atau kegiatan lainnya.

Banyaknya hotel di Kecamatan Purwodadi menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kapasitas akomodasi yang relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Namun demikian, banyaknya jumlah hotel tidak selalu diimbangi dengan tingkat pemanfaatannya. Maka dari itu, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut disajikan gambar sebagai berikut



Gambar 7.3 Tingkat Hunian Kamar Hotel Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

Tingkat hunian kamar di Kabupaten Grobogan menunjukkan capaian yang relatif rendah yaitu sebesar 8,38 persen untuk hotel bintang dan 14,52 persen hotel non bintang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kamar hotel yang tersedia belum terisi selama periode pengamatan. Rendahnya tingkat hunian kamar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah kunjungan wisatawan, perjalanan dinas, kegiatan bisnis, maupun karakteristik permintaan jasa akomodasi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan melalui pengembangan sektor pariwisata, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala daerah, serta peningkatan kualitas layanan dan promosi destinasi wisata.



BAB VIII

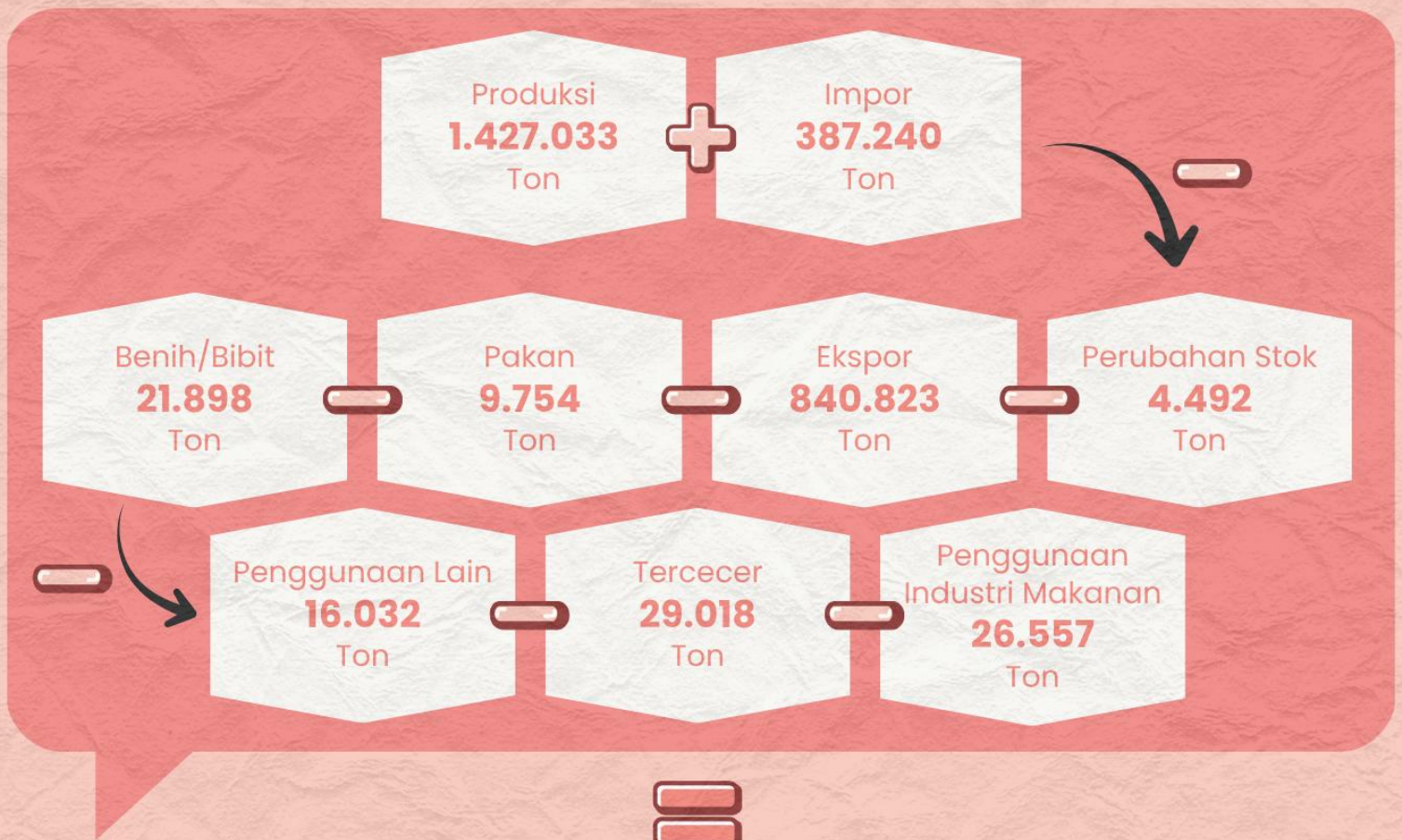
KETAHANAN

DAERAH DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Ketersediaan
Bahan Makanan
865.700
Ton

Ketersediaan
Perkapita
3.568
Kkal/Kapita/Hari

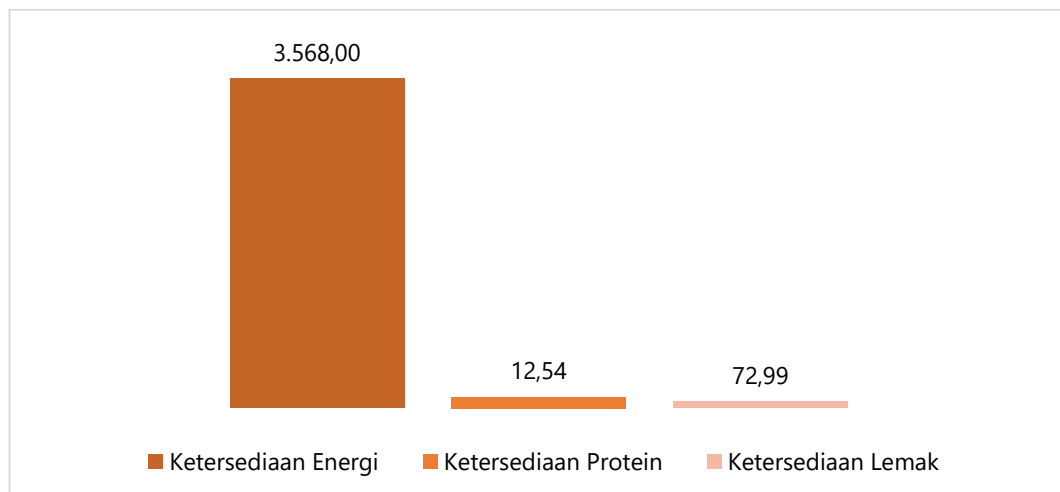
Jenis Bahan
Makanan
11
Kelompok

Pola Pangan Harapan (PPH)



8.1 Pangan

Penyelenggaraan ketahanan pangan daerah dan perlindungan pangan merupakan urusan wajib pemerintahan yang bersifat krusial dalam menjamin hak atas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif di Kabupaten Grobogan. Sebagai salah satu lumbung pangan strategis, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat stabilitas pasokan, keterjangkauan, serta diversifikasi konsumsi berbasis potensi lokal demi mengantisipasi risiko kerawanan pangan dan gejolak ekonomi. Melalui kebijakan perlindungan pangan yang integratif, instansi terkait terus mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sekaligus mengawal pemenuhan standar mutu dan gizi makro. Upaya terstruktur ini menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman krisis eksternal serta mengakselerasi penurunan angka stunting di wilayah administratif Kabupaten Grobogan secara berkelanjutan. Data mengenai angka ketersediaan pangan per kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 8.1 Angka Ketersediaan Pangan Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif Angka Ketersediaan Pangan Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2025, capaian pemenuhan zat gizi makro masyarakat dipetakan ke dalam tiga indikator utama ketersediaan harian hulu. Berdasarkan grafik tersebut, angka Ketersediaan Energi mencatatkan volume terbesar yang mencapai 3.568,00 kkal/kap/hr, yang mengindikasikan surplus produksi

karbohidrat dan kecukupan pasokan kalori daerah yang sangat aman melampaui standar baku nasional. Selanjutnya, komoditas penunjang gizi makro lainnya mencatatkan angka Ketersediaan Lemak sebesar 72,99 gram/kap/hr. Sementara itu, komponen Ketersediaan Protein mencatatkan angka terkecil di antara ketiganya, yakni sebesar 12,54 gram/kap/hr. Distribusi capaian pemenuhan zat gizi per kapita ini memberikan landasan evaluasi empiris bagi pemerintah daerah untuk merumuskan intervensi kebijakan ketahanan pangan ke depan, khususnya dalam menggalakkan diversifikasi produksi pangan lokal yang kaya akan protein guna mendorong keseimbangan konsumsi gizi masyarakat yang lebih proporsional.

Pengukuran kinerja ketahanan daerah dalam urusan pangan didasarkan pada tiga indikator makro strategis yang mencerminkan aspek ketersediaan, kualitas konsumsi, serta keamanan komoditas pangan yang beredar di masyarakat. Indikator Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg) merupakan parameter kuantitatif yang mengukur total volume pasokan komoditas pangan pokok yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Selanjutnya, indikator Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD (Bagian yang Dapat Dikonsumsi) digunakan untuk menghitung riil asupan kalori bersih harian yang dapat diserap oleh setiap individu setelah memperhitungkan faktor penyusutan atau bagian komoditas yang tidak dapat dikonsumsi. Sementara itu, indikator Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar Yang Berlaku merupakan instrumen pengawasan mutu biologis, kimia, dan fisik guna menjamin bahwa komoditas yang didistribusikan kepada masyarakat bebas dari cemaran berbahaya serta memenuhi regulasi keamanan pangan nasional. Kesatuan ketiga indikator ini menjadi acuan mutakhir bagi pemerintah daerah dalam merumuskan intervensi kebijakan guna mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Rincian data Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg), Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD, dan Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar Yang Berlaku 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.1 Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg), Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD, dan Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar Yang Berlaku 2025

Indikator	Satuan	2025
Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg)	Kg/kap/thn	587,0
Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD	Kal/kap/hari	3.568,00
Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar Yang Berlaku	sampel	172

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Grobogan

Di sisi lain, jika ditinjau berdasarkan data kuantitatif kinerja ketahanan pangan Kabupaten Grobogan tahun 2025, ketiga indikator tersebut mencatatkan realisasi capaian yang terukur. Pada aspek pasokan tahunan, Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun mencatatkan angka sebesar 587,0 dengan satuan Kg/kap/thn, yang menunjukkan bahwa kapasitas penyediaan logistik pangan pokok di tingkat hulu berada pada kondisi yang sangat memadai. Selaras dengan hal tersebut, pada indikator pemenuhan energi makro harian yang mengalikan Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD, tercatat realisasi yang cukup tinggi yaitu mencapai 3.568,00 Kal/kap/hari, mencerminkan pemenuhan kecukupan kalori masyarakat yang berada di atas ambang batas kecukupan minimal nasional. Terakhir, dari sisi penjaminan mutu dan proteksi kesehatan konsumen, instansi terkait berhasil melakukan pengujian klinis di mana Jumlah Sampel Pangan Yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar Yang Berlaku mencatatkan realisasi sebanyak 172 sampel. Rekapitulasi pencapaian angka-angka indikator ini memberikan bukti empiris bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun berjalan telah berhasil menyelaraskan kuantitas ketersediaan pangan lokal dengan pengawasan kualitas keamanan konsumsi secara optimal.

Cadangan pangan pokok pemerintah merupakan persediaan bahan pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah guna mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, terjadinya bencana alam, maupun kondisi

darurat lainnya dalam rangka menjaga stabilitas pangan wilayah. Kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Grobogan saat ini berada pada posisi yang sangat strategis sebagai salah satu daerah penyangga komoditas pangan utama, di mana kelancaran pasokan dan stabilitas harga terus terjaga melalui optimalisasi pengelolaan cadangan daerah secara berkala. Di sisi lain, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Penyelenggaraan kedua instrumen ini secara terintegrasi menjadi urusan wajib pemerintahan yang sangat krusial guna menjamin hak dasar masyarakat Kabupaten Grobogan atas kecukupan pangan yang bergizi dan aman, sekaligus menjadi indikator utama keberhasilan pemenuhan kedaulatan pangan di tingkat daerah. Rekapitulasi ketersediaan pangan di Kabupaten Grobogan tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 8. 2 Jumlah Ketersediaan Pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Indikator	Satuan	2025
Jumlah cadangan pangan pokok Pemerintah (beras)	Kg	92300
Jumlah cadangan pangan pokok yang disalurkan	Kg	33145
Jumlah infrastruktur Pergudangan, dan sarana pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	unit	122
Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	buah	1
Persentase Keamanan Pangan	%	98,26
Pola Pangan Harapan tingkat Konsumsi	Skor	95,67

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif indikator jumlah ketersediaan pangan Kabupaten Grobogan tahun 2025, tata kelola logistik dan mutu pangan daerah telah terealisasi melalui pencapaian target yang sangat akuntabel. Pada aspek

pengelolaan stok hulu, Jumlah cadangan pangan pokok Pemerintah (beras) tercatat sebesar 92.300 Kg, di mana Jumlah cadangan pangan pokok yang disalurkan guna ketahanan masyarakat telah mencapai 33.145 Kg. Operasional penyimpanan logistik tersebut didukung secara optimal oleh ketersediaan fasilitas fisik berupa Jumlah infrastruktur Pergudangan, dan sarana pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan sebanyak 122 unit. Upaya pemetaan kerawanan juga telah diperkuat dengan Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebanyak 1 buah sebagai basis pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, dari segi kualitas dan diversifikasi konsumsi, Persentase Keamanan Pangan di Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang sangat prima, yakni mencapai 98,26%, yang diselaraskan dengan capaian kualitas konsumsi masyarakat melalui Pola Pangan Harapan tingkat Konsumsi yang menyentuh Skor 95,67. Sinkronisasi angka-angka capaian ini memberikan bukti empiris bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sukses menjaga keseimbangan antara ketersediaan fisik, keandalan prasarana penyimpanan, penjaminan mutu kesehatan, serta pemenuhan gizi masyarakat di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Lumbung pangan di Kabupaten Grobogan merupakan instrumen prasarana fisik berbasis masyarakat maupun pemerintah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengelolaan, serta penyediaan cadangan pangan pokok guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat lokal. Sebagai salah satu daerah sentra pertanian utama, keberadaan lumbung pangan di Kabupaten Grobogan memiliki peran krusial dalam memperkuat cadangan pangan masyarakat (CPM), meminimalisir risiko kerawanan pangan pasca-panen, serta menghadapi situasi darurat atau masa paceklik. Pengelolaan sarana penunjang ini diarahkan untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat di tingkat perdesaan sehingga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan wilayah secara berkelanjutan. Penyajian rekapitulasi lumbung pangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8. 3 Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Grobogan 2025

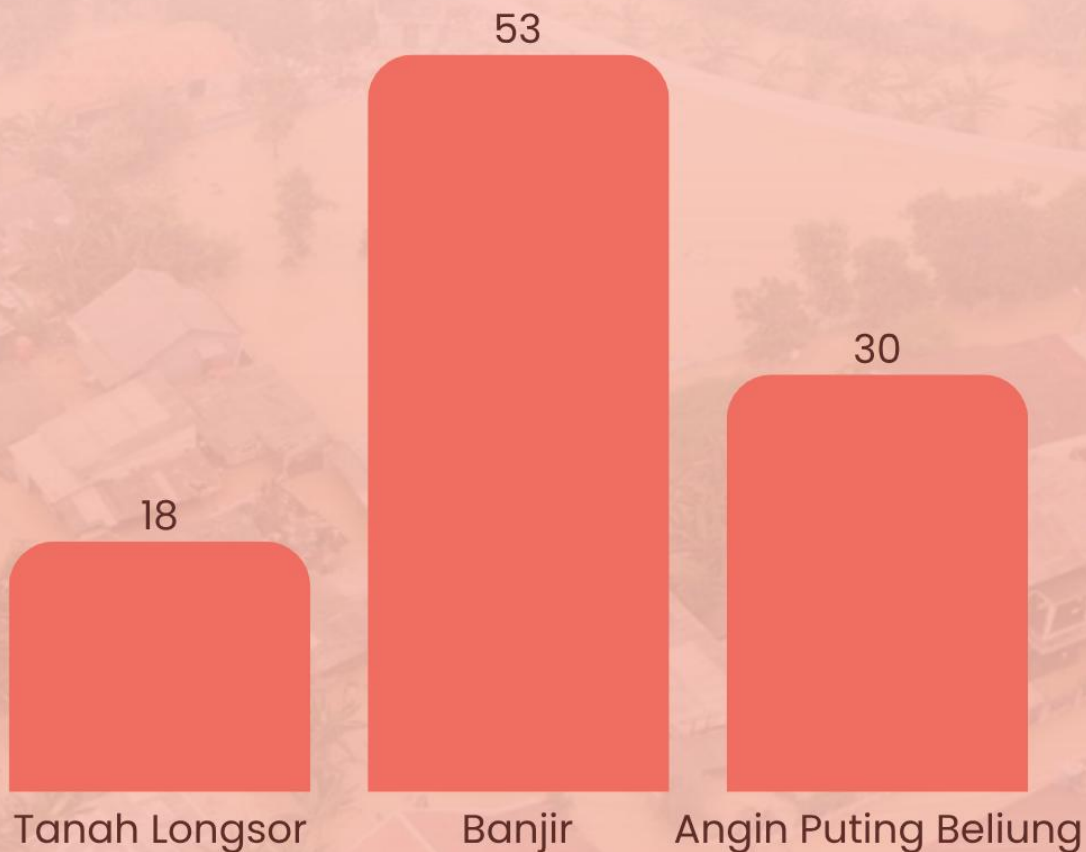
Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Lumbung	Kapasitas (Ton/Tahun)
33.15.01	Kedungjati	4	200
33.15.02	Karangrayung	10	400
33.15.03	Penawangan	10	250
33.15.04	Toroh	11	550
33.15.05	Geyer	7	250
33.15.06	Pulokulon	7	400
33.15.07	Kradenan	8	350
33.15.08	Gabus	4	200
33.15.09	Ngaringan	10	500
33.15.10	Wirosari	4	150
33.15.11	Tawangharjo	3	100
33.15.12	Grobogan	1	50
33.15.13	Purwodadi	8	400
33.15.14	Brati	6	300
33.15.15	Klambu	4	150
33.15.16	Godong	11	450
33.15.17	Gubug	5	150
33.15.18	Tegowanu	4	150
33.15.19	Tanggunharjo	5	150
Jumlah		122	5.150

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Grobogan tahun 2025, sebaran infrastruktur logistik tersebut dipetakan secara rinci di 19 wilayah kecamatan dengan akumulasi total mencapai 122 unit lumbung dan kapasitas tampung keseluruhan sebesar 5.150 Ton/Tahun. Secara spasial, jumlah lumbung pangan terbanyak berada di Kecamatan Toroh (kapasitas 550 Ton/Tahun) dan Kecamatan Godong (kapasitas 450 Ton/Tahun) yang masing-masing mencatatkan kepemilikan sebanyak 11 unit, disusul oleh Kecamatan Karangrayung, Penawangan, dan Ngaringan yang masing-masing memiliki 10 unit lumbung. Sebaliknya, Kecamatan Grobogan mencatatkan kuantitas terendah dengan hanya memiliki 1 unit lumbung yang berkapasitas 50 Ton/Tahun. Rekapitulasi sebaran angka operasional dan kapasitas simpan lumbung pangan ini memberikan landasan empiris bagi instansi pemerintahan terkait untuk mengevaluasi efisiensi distribusi logistik serta merencanakan program penguatan kelembagaan lumbung secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Statistik Kebencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jumlah Kejadian Bencana Alam



Jumlah Korban
Bencana

11.051

Kartu Keluarga

99,78% merupakan **korban bencana banjir**, sedangkan korban bencana **tanah longsor** sebanyak **11 KK** dan korban bencana **angin puting beliung** sebanyak **13 KK**.

8.2 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas wilayah serta melindungi jiwa, harta benda, dan sarana prasarana publik dari berbagai ancaman, termasuk risiko bencana alam. Hubungan antara trantibumlinmas dengan Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 terletak pada peran strategis pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kerawanan, mitigasi risiko, penanggulangan kedaruratan, hingga pemulihan pascabencana secara terpadu. Ketika terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau angin puting beliung, potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan stabilitas sosial masyarakat cenderung meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, ketersediaan basis data kejadian bencana yang valid dan berkala menjadi acuan utama bagi instansi terkait guna menyusun strategi kesiapsiagaan personel Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), mengoptimalkan jalur evakuasi, serta memastikan perlindungan masyarakat yang adaptif dan responsif di seluruh wilayah administratif Kabupaten Grobogan. Informasi mengenai kejadian bencana alam di Kabupaten Grobogan tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 8.4 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Lahan dan Hutan	Angin Puting Beliung	Abrasi	Kekeringan
33.15.01	Kedungjati	1	3	0	0	0	0
33.15.02	Karangrayung	0	2	0	2	0	0
33.15.03	Penawangan	0	1	0	3	0	0
33.15.04	Toroh	1	7	0	2	0	0
33.15.05	Geyer	1	4	0	3	0	0
33.15.06	Pulokulon	0	2	0	0	0	0
33.15.07	Kradenan	3	0	0	3	0	0
33.15.08	Gabus	0	0	0	1	0	0
33.15.09	Ngaringan	1	0	0	0	0	0
33.15.10	Wirosari	0	3	0	2	0	0
33.15.11	Tawangharjo	1	3	0	1	0	0
33.15.12	Grobogan	6	2	0	1	0	0
33.15.13	Purwodadi	3	6	0	4	0	0
33.15.14	Brati	1	1	0	2	0	0
33.15.15	Klambu	0	2	0	0	0	0
33.15.16	Godong	0	1	0	1	0	0
33.15.17	Gubug	0	6	0	3	0	0
33.15.18	Tegowanu	0	6	0	2	0	0

Kode Kecamatan	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Kebakaran Lahan dan Hutan	Angin Puting Beliung	Abrasi	Kekeringan
33.15.19	Tanggungharjo	0	4	0	0	0	0
Jumlah		18	53	0	30	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025, karakteristik ancaman hidrometeorologi di daerah ini didominasi secara signifikan oleh tiga jenis bencana utama, yaitu Banjir (53 kejadian), Angin Puting Beliung (30 kejadian), dan Tanah Longsor (18 kejadian), sementara indikator Kebakaran Lahan dan Hutan, Abrasi, serta Kekeringan tercatat berada pada angka nihil (0). Secara spasial, Kecamatan Purwodadi mencatatkan tingkat kerawanan kumulatif tertinggi dengan kombinasi kejadian berupa 3 kali tanah longsor, 6 kali banjir, dan 4 kali angin puting beliung. Selain itu, intensitas bencana banjir yang tinggi juga melanda Kecamatan Toroh dengan 7 kejadian, diikuti oleh Kecamatan Gubug dan Tegowanu yang masing-masing mencatatkan 6 kejadian banjir. Untuk klasifikasi bencana tanah longsor, frekuensi tertinggi terjadi di Kecamatan Grobogan sebanyak 6 kejadian, sedangkan bencana angin puting beliung tersebar cukup merata dengan angka tertinggi di Kecamatan Purwodadi (4 kejadian), disusul beberapa kecamatan seperti Penawangan, Geyer, Kradenan, dan Gubug yang masing-masing mengalami 3 kejadian. Sebaliknya, Kecamatan Gabus menjadi wilayah dengan frekuensi bencana paling minimal karena hanya mencatatkan 1 kejadian angin puting beliung di sepanjang tahun anggaran berjalan. Rekapitulasi sebaran angka hasil kodifikasi bencana ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan klasterisasi wilayah rawan guna mengefektifkan alokasi posko kebencanaan serta memperkuat sistem perlindungan masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

Indikator Jumlah Korban Bencana Alam (KK/Jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan parameter demografis krusial yang mengukur skala dampak paparan bencana terhadap penduduk, baik dalam satuan Kepala Keluarga (KK) maupun individu (Jiwa), yang dikelompokkan berdasarkan wilayah administratif kecamatan. Pengukuran jumlah korban ini mencakup masyarakat yang mengalami dampak langsung berupa kehilangan tempat tinggal,

mengungsi, menderita luka-luka, hingga kehilangan mata pencaharian akibat peristiwa hidrometeorologi maupun bencana lainnya. Inventarisasi berkala terhadap indikator ini menjadi acuan utama bagi instansi kedaruratan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial untuk menentukan status tanggap darurat, menyalurkan logistik bantuan sosial, serta merencanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Melalui basis data yang valid, pemerintah daerah dapat mengukur tingkat kerentanan sosial di setiap wilayah sekaligus mengevaluasi indeks ketahanan perlindungan masyarakat secara komprehensif. Rincian data korban bencana alam (KK/Jiwa) menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 8.5 Jumlah Korban Bencana Alam (KK/Jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Banjir (KK)	Longsor (KK)	Angin Puting Beliung	Kebakaran (Jiwa)	Kekeringan (Jiwa)
33.15.01	Kedungjati	1	3	0	0	0
33.15.02	Karangrayung	0	2	0	2	0
33.15.03	Penawangan	0	1	0	3	0
33.15.04	Toroh	1	7	0	2	0
33.15.05	Geyer	1	4	0	3	0
33.15.06	Pulokulon	0	2	0	0	0
33.15.07	Kradenan	3	0	0	3	0
33.15.08	Gabus	0	0	0	1	0
33.15.09	Ngaringan	1	0	0	0	0
33.15.10	Wirosari	0	3	0	2	0
33.15.11	Tawangharjo	1	3	0	1	0
33.15.12	Grobogan	6	2	0	1	0
33.15.13	Purwodadi	3	6	0	4	0
33.15.14	Brati	1	1	0	2	0
33.15.15	Klambu	0	2	0	0	0
33.15.16	Godong	0	1	0	1	0
33.15.17	Gubug	0	6	0	3	0
33.15.18	Tegowanu	0	6	0	2	0
33.15.19	Tanggunharjo	0	4	0	0	0
Jumlah		11.027	11	13	1	0

Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan

Di sisi lain, jika ditinjau berdasarkan data kuantitatif Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025, sebaran dampak korban tercatat secara spesifik pada beberapa klasifikasi bencana. Menariknya, pada baris total akumulasi kabupaten di bagian bawah tabel, tercatat jumlah total korban Banjir mencapai 11.027 KK, korban Longsor sebanyak 11 KK, korban Angin

Putting Beliung sebanyak 13 KK, korban Kebakaran sebanyak 1 Jiwa, dan korban Kekeringan berada pada angka nihil (0). Namun, sebaran angka per baris kecamatan menunjukkan visualisasi kodifikasi yang unik, di mana angka-angka pada kolom kecamatan seperti Grobogan mencatatkan dampak korban banjir sebanyak 6 KK dan longsor 2 KK, Purwodadi mencatatkan korban banjir 3 KK dan longsor 6 KK, serta Toroh mencatatkan dampak korban longsor sebanyak 7 KK. Di sisi lain, dampak korban kebakaran dalam satuan Jiwa menyebar di beberapa kecamatan seperti Purwodadi (4 Jiwa), serta Penawangan, Geyer, Kradenan, dan Gubug yang masing-masing mencatatkan 3 Jiwa. Rekapitulasi angka korban bencana alam dari basis data BPBD Kabupaten Grobogan ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pemulihan ekonomi-sosial serta memperkuat sistem proteksi kedaruratan bagi wilayah terdampak paling signifikan.

Korban bencana alam atau musibah merupakan salah satu parameter krusial dalam sistem penanggulangan bencana guna mengukur tingkat kerentanan masyarakat serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu kejadian luar biasa. Pendataan statistik sektoral yang akurat mengenai jumlah korban, baik yang meninggal dunia, hilang, luka-luka, maupun yang terpaksa mengungsi, sangat diperlukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi klaster sosial terkait. Data ini menjadi basis formulasi kebijakan tanggap darurat, pengelolaan logistik pengungsian, hingga perencanaan program pemulihan trauma (*trauma healing*) serta rekonstruksi sosial. Melalui pemantauan korban secara berkala, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mengevaluasi efektivitas sistem peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat demi meminimalkan risiko fatalitas serta dampak psikososial akibat bencana di masa mendatang. Data korban bencana alam/musibah di Kabupaten Grobogan tahun 2025 di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.6 Banyaknya Korban Bencana Alam/Musibah di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

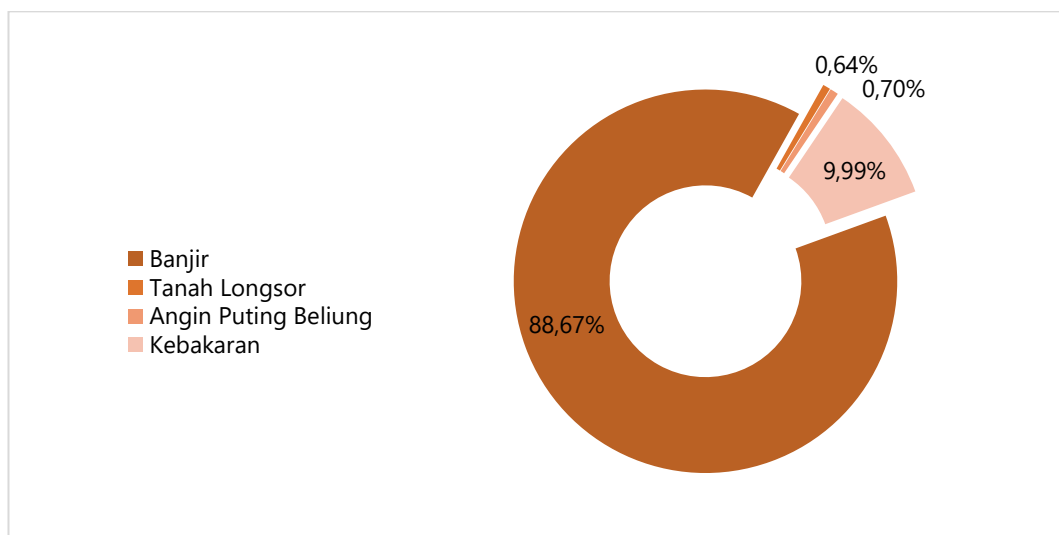
Jenis Bencana/ Musibah/ Kejadian	Jumlah Korban						
	Meninggal	Hilang	Mengungsi	Luka Berat	Luka Ringan	Luka Sedang	Keracunan
Banjir	0	0	2.484	0	0	0	0
Tanah Longsor	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
Kebakaran	1	0	0	0	0	0	0
Angin Puting Beliung	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	0	2.484	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data operasional BPBD Kabupaten Grobogan, visualisasi rekapitulasi jumlah korban bencana alam sepanjang tahun 2025 mencatatkan akumulasi korban meninggal dunia sebanyak 1 jiwa dan korban mengungsi sebanyak 2.484 jiwa. Jika ditinjau dari jenis bencana yang terjadi, sektor bencana banjir menjadi pemicu dampak sosial terbesar dengan memaksa sebanyak 2.484 jiwa untuk mengungsi demi keselamatan materiil dan jiwa, meskipun tidak mencatatkan adanya korban meninggal, hilang, ataupun luka-luka. Sementara itu, fatalitas akibat musibah di Kabupaten Grobogan pada periode ini disebabkan oleh bencana kebakaran yang merenggut 1 korban jiwa (meninggal dunia). Adapun untuk jenis bencana lainnya, meliputi tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung, dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa maupun pengungsi (nihil). Demikian pula pada kategori dampak kesehatan seperti luka berat, luka sedang, luka ringan, dan keracunan, seluruhnya mencatatkan angka nol di semua jenis kejadian. Evaluasi data ini menegaskan urgensi peningkatan manajemen pengungsian yang aman dan higienis pada titik rawan banjir, sekaligus penguatan edukasi proteksi mandiri terhadap risiko kebakaran di lingkungan pemukiman masyarakat.

Kerugian bencana alam merupakan akumulasi nilai kerusakan fisik dan kehilangan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul akibat terjadinya peristiwa alam yang merusak prasarana publik, aset produktif, serta properti milik masyarakat di suatu wilayah. Secara umum, penilaian kerugian ini

mencakup estimasi biaya perbaikan infrastruktur jalan, pemukiman warga, sektor pertanian, hingga gangguan stabilitas ekonomi mikro daerah. Di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, rekapitulasi kerugian bencana alam menjadi salah satu indikator krusial bagi pemerintah daerah untuk mengukur indeks risiko bencana dan dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah. Tingginya angka kerugian ini secara langsung memengaruhi pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menuntut strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih integratif guna mengembalikan fungsi pelayanan publik dan memulihkan roda perekonomian masyarakat terdampak. Sebagai gambaran kondisi kerugian akibat bencana alam di Kabupaten Grobogan tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 8.2 Rekap Kerugian Bencana Alam

Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kuantitatif rekapitulasi nilai kerusakan pada grafik, total kerugian finansial akibat bencana di Kabupaten Grobogan mencapai angka kumulatif yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp94.482.100.000,00. Proporsi kerugian daerah ini didominasi secara mutlak oleh bencana Banjir yang mencatatkan persentase sebesar 88,67% atau setara dengan nilai Rp83.775.900.000,00, menjadikannya sebagai ancaman dengan dampak ekonomi paling destruktif sepanjang tahun anggaran berjalan. Sektor kerugian terbesar berikutnya disumbang oleh bencana Kebakaran dengan proporsi 9,99% atau senilai Rp9.434.400.000,00. Sementara itu, dua sektor bencana hidrometeorologi

lainnya memberikan kontribusi marginal, di mana Angin Puting Beliung mencatatkan kerugian sebesar 0,70% (Rp663.000.000,00) dan Tanah Longsor sebesar 0,64% (Rp608.800.000,00), sedangkan untuk kategori Abrasi dan Kekeringan berada pada angka nihil (Rp0). Rekapitulasi angka nominal dan persentase kerugian ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi instansi pemerintahan terkait, khususnya BPBD dan BAPPEDA Kabupaten Grobogan, untuk memperkuat alokasi anggaran mitigasi struktural berbasis klaster risiko demi meminimalisir dampak kerugian finansial di masa mendatang.

Data Jumlah Kerugian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025 merupakan data yang menggambarkan besaran nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kejadian bencana alam pada masing-masing kecamatan selama tahun 2025. Nilai kerugian tersebut mencakup berbagai jenis bencana, yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kebakaran yang berdampak terhadap aset masyarakat maupun infrastruktur. Informasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana, penanganan pascabencana, serta penentuan prioritas alokasi sumber daya untuk upaya pengurangan risiko bencana. Dengan mengetahui besaran kerugian pada setiap wilayah, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mengidentifikasi kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi sehingga langkah pencegahan dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan rekapitulasi kerugian dari bencana alam (Rupiah) menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan tahun 2025.

Tabel 8.7 Jumlah Kerugian Bencana Alam (Rupiah) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan, 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Angin Puting Beliung	Kebakaran	Jumlah Kerugian (Rp)
33.15.01	Kedungjati	2.311.500.000	28.900.000	-	-	
33.15.02	Karangrayung	249.250.000	-	53.000.000	380.000.000	
33.15.03	Penawangan	9.637.600.000	-	-	340.000.000	
33.15.04	Toroh	998.000.000	10.600.000	-	3.474.500.000	
33.15.05	Geyer	970.000.000	-	33.000.000	250.000.000	
33.15.06	Pulokulon	226.000.000	-	-	327.000.000	
33.15.07	Kradenan	-	94.000.000	17.000.000	569.000.000	

Kode Kecamatan	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Angin Puting Beliung	Kebakaran	Jumlah Kerugian (Rp)
33.15.08	Gabus	-	-	345.000.000	300.300.000	
33.15.09	Ngaringan	-	13.900.000	-	575.000.000	
33.15.10	Wirosari	-	-	-	348.500.000	
33.15.11	Tawangharjo	1.304.500.000	84.600.000	-	175.000.000	
33.15.12	Grobogan	2.182.500.000	293.600.000	-	438.000.000	
33.15.13	Purwodadi	16.039.200.000	18.900.000	-	1.167.100.000	
33.15.14	Brati	12.781.250.000	64.300.000	95.000.000	209.000.000	
33.15.15	Klambu	6.630.000.000	-	-	20.000.000	
33.15.16	Godong	5.465.250.000	-	-	522.500.000	
33.15.17	Gubug	24.104.500.000	-	120.000.000	268.500.000	
33.15.18	Tegowanu	646.350.000	-	-	70.000.000	
33.15.19	Tanggungharjo	230.000.000	-	-	-	
JUMLAH		83.775.900.000	608.800.000	663.000.000	9.434.400.000	Rp94.482.100.000,00

Sumber: BPBD Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data kompilasi laporan BPBD Kabupaten Grobogan, total nilai kerugian materiil akibat bencana alam di seluruh wilayah administrasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp94.482.100.000,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Sektor bencana banjir menjadi pemicu kerugian paling destruktif dan mendominasi total kerugian daerah dengan angka mencapai Rp83.775.900.000,00, disusul oleh bencana kebakaran yang menimbulkan estimasi kerugian sebesar Rp9.434.400.000,00. Sementara itu, bencana angin puting beliung dan tanah longsor masing-masing mencatatkan total kerugian sebesar Rp663.000.000,00 dan Rp608.800.000,00. Secara spasial, Kecamatan Gubug mengonfirmasi nilai kerugian tertinggi yang menembus Rp24.493.000.000,00 yang sebagian besar dipicu oleh akumulasi kerusakan banjir sebesar Rp24,10 miliar. Wilayah terdampak masif berikutnya meliputi Kecamatan Purwodadi dengan kerugian Rp17,22 miliar dan Kecamatan Brati sebesar Rp13,14 miliar yang juga didominasi oleh bencana banjir. Di sisi lain, untuk jenis bencana non-air, Kecamatan Toroh mencatatkan tingkat kerugian akibat musibah kebakaran tertinggi di antara wilayah lainnya, yakni mencapai Rp3.474.500.000,00. Data ini menegaskan perlunya penguatan sistem drainase, tanggul sungai di kawasan rawan banjir, serta sosialisasi pencegahan kebakaran intensif di kecamatan-kecamatan dengan kerawanan tinggi tersebut.

Rekapitulasi pelanggaran di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan indikator strategis dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan hukum masyarakat serta efektivitas penegakan regulasi daerah di Kabupaten Grobogan. Penyusunan data statistik sektoral ini berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait untuk memetakan klaster pelanggaran, merumuskan kebijakan preventif, serta mengoptimalkan patroli pengawasan wilayah. Melalui pemantauan yang terstruktur terhadap dinamika pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan gangguan ketertiban, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mengambil langkah-langkah intervensi yang tepat guna menciptakan iklim lingkungan yang aman, tertib, kondusif, sekaligus menjamin perlindungan menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat. Penyajian rekapitulasi jenis pelanggaran dan jumlah yang terjadi di Kabupaten Grobogan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 8.8 Rekap Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran Peraturan Daerah Menurut Ruang Lingkup Pelanggaran	466
	Pelanggaran Peraturan Daerah Ijin Mendirikan Bangunan/Bangunan Gedung	2
	Pelanggaran Peraturan Daerah Ijin Mendirikan Bangunan/Bangunan Gedung Tertangani	2
	Pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame	206
	Pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame Tertangani	206
	Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan PKL	18
	Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan PKL Tertangani	18
	Pelanggaran Peraturan Daerah Perijinan Usaha	7
	Pelanggaran Peraturan Daerah Perijinan Usaha Tertangani	7
2	Pelanggaran Ketertiban Masyarakat	18
	PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)	18

Sumber: Satpol PP Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data operasional Satpol PP Kabupaten, tercatat total pelanggaran yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Pelanggaran Peraturan Daerah Menurut Ruang Lingkup Pelanggaran sebanyak 466 kasus dan Pelanggaran Ketertiban Masyarakat sebanyak 18 kasus. Pada kategori pelanggaran Perda, ruang lingkup penyelenggaraan reklame menjadi fokus penegakan hukum paling dominan dengan jumlah mencapai 206 kasus, di mana seluruhnya (206

kasus) dipastikan telah berhasil ditangani oleh aparat berwenang. Diikuti kemudian oleh pelanggaran terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 18 kasus, perizinan usaha sebanyak 7 kasus, serta pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Bangunan Gedung sebanyak 2 kasus, yang mana masing-masing klaster tersebut menunjukkan rasio penanganan penuh atau mencapai 100% tingkat penyelesaian (tertangani). Sementara itu, pada kategori Pelanggaran Ketertiban Masyarakat, instansi terkait membukukan 18 kasus penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Secara umum, visualisasi data ini merefleksikan performa penegakan hukum yang responsif dan tuntas, sekaligus memberikan sinyal penekanan prioritas pada pengawasan tata ruang publik dan optimalisasi penanganan isu sosial di wilayah Kabupaten Grobogan.

Pelanggaran ketertiban masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur stabilitas sosial, kenyamanan lingkungan, dan efektivitas penegakan regulasi daerah di suatu wilayah. Pemantauan terhadap dinamika gangguan ketertiban ini menjadi landasan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah untuk merumuskan langkah-langkah preventif, pembinaan sosial, serta koordinasi lintas sektoral dengan instansi penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Melalui pemetaan data pelanggaran yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mengidentifikasi pola tren gangguan ketertiban umum di masyarakat, sehingga pengalokasian sumber daya patroli dan intervensi kebijakan penertiban dapat terlaksana secara lebih berkala, tepat sasaran, dan akuntabel demi mewujudkan ketenteraman umum yang berkelanjutan. Berikut rincian pelanggaran ketertiban masyarakat menurut kecamatan di Kabupaten Grobogan selama tahun 2025.

Tabel 8. 9 Jumlah Pelanggaran Ketertiban Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan 2025

No	Bulan	Jumlah				
		PGOT	Miras	Asusila	Anak Punk	Lainnya
1	Januari	2	-	-	-	-
2	Februari	2	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	2	-	-	-	-

No	Bulan	Jumlah				
		PGOT	Miras	Asusila	Anak Punk	Lainnya
5	Mei	2	-	-	-	-
6	Juni	2	-	-	-	-
7	Juli	2	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	2	-	-	-	-
10	Oktober	2	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	2	-	-	-	-
Jumlah		18	-	-	-	-

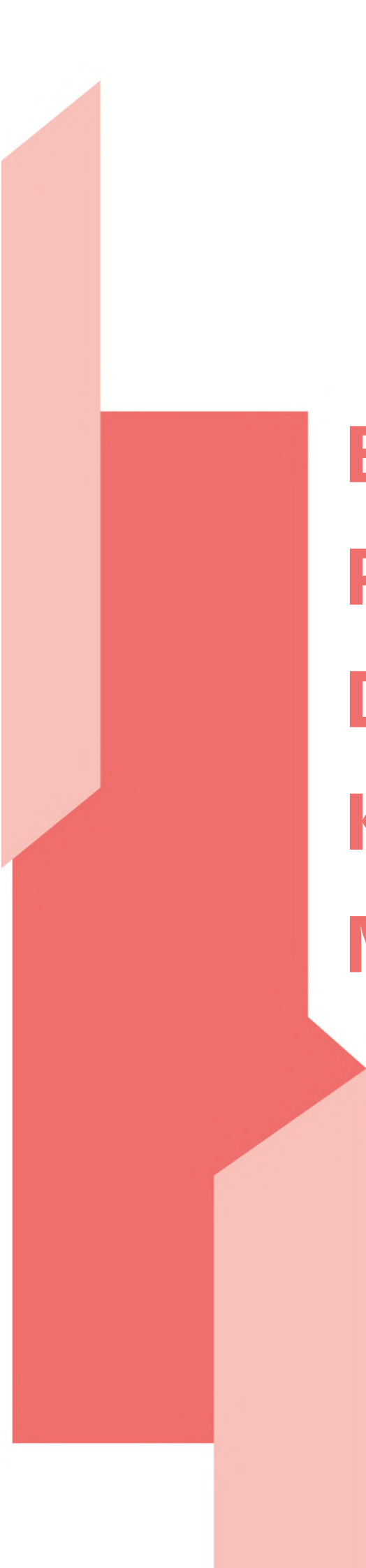
Sumber: Satpol PP Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data statistik sektoral yang dihimpun oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan untuk periode tahun 2025 sebagaimana terlampir pada foto tabel di atas, fluktuasi penanganan pelanggaran ketertiban masyarakat disajikan secara periodik menurut bulan. Sepanjang tahun anggaran tersebut, tercatat total akumulasi pelanggaran sebanyak 18 kasus, di mana seluruh pemenuhan angka tersebut secara spesifik didominasi oleh kategori penertiban PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar). Secara rinci, intensitas penindakan PGOT bergerak secara konstan dengan mencatatkan masing-masing 2 kasus pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember. Sebaliknya, nihil laporan atau tidak ada kasus yang tercatat pada bulan Maret, Agustus, dan November. Sementara itu, untuk kategori pelanggaran ketertiban lainnya seperti Minuman Keras (Miras), Tindak Asusila, Anak Punk, maupun pelanggaran lainnya tidak menunjukkan adanya catatan kasus dalam laporan periodik ini. Data operasional ini mengonfirmasi pentingnya kontinuitas pengawasan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di ruang publik serta efektivitas penertiban yang terjaga secara berkala di Kabupaten Grobogan.

Penguatan ketahanan daerah di Kabupaten Grobogan secara fundamental bertumpu pada sinergi yang berkesinambungan antara aspek pemulihan ekonomi dari dampak kebencanaan, khususnya di sektor pangan, serta pemeliharaan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tingginya kerugian materiil akibat bencana alam, terutama banjir yang secara langsung mengancam ketahanan ekosistem pertanian dan kedaulatan pangan



daerah, menuntut kesiapsiagaan mitigasi yang responsif dan alokasi anggaran pascabencana yang tepat sasaran. Komitmen tersebut harus berjalan selaras dengan konsistensi penegakan regulasi daerah oleh aparat berwenang guna menekan angka pelanggaran ketertiban umum dan mengatasi dinamika sosial di masyarakat. Melalui integrasi kebijakan perlindungan masyarakat yang komprehensif baik dalam menjaga stabilitas pasokan pangan dari ancaman bencana maupun dalam memelihara iklim lingkungan sosial yang kondusif Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat mewujudkan ketahanan daerah yang tangguh, aman, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.



BAB IX

PEMBERDAYAN

DAN

KELEMBAGAAN

MASYARAKAT

Statistik Desa Kabupaten Grobogan Tahun 2025

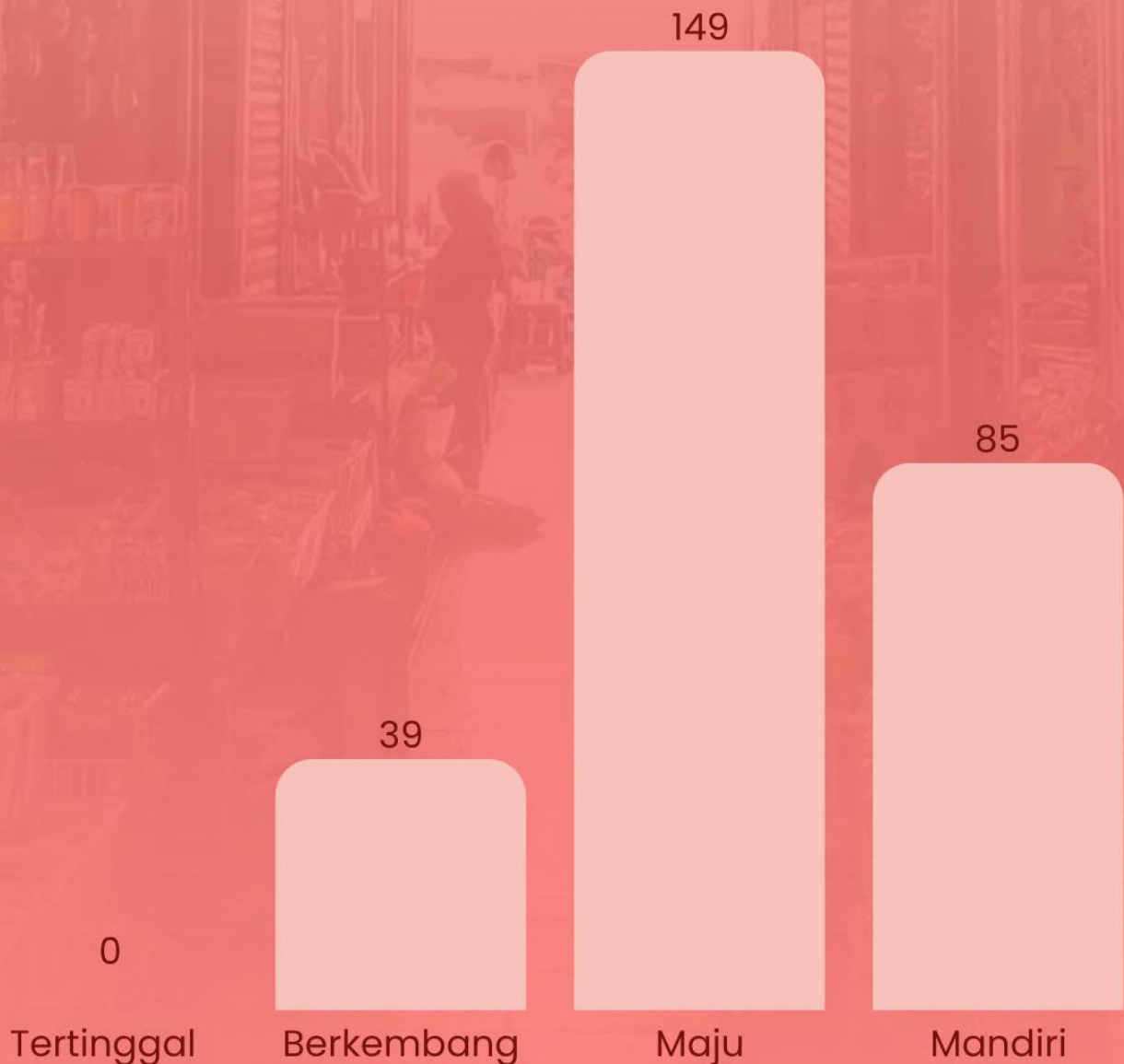


Jumlah Pasar
Desa
79



Jumlah BUMDes
273

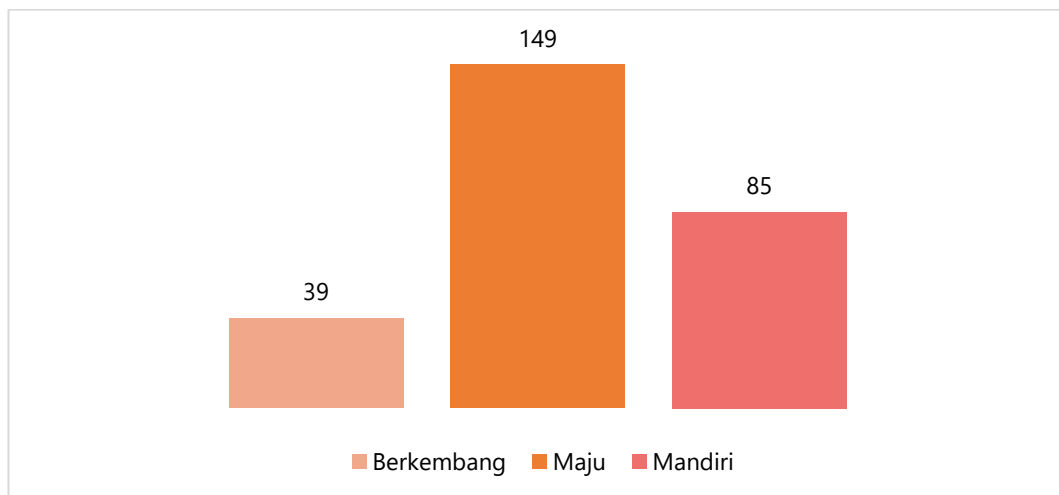
Jumlah Desa Berdasarkan Statusnya



9.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Status desa merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada Indeks Desa, status desa dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan tingkat kemajuannya seperti, Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Semakin tinggi status desa, semakin baik tingkat kemandirian dan kemampuan desa dalam mengelola potensi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan status perkembangannya desa-desa di Kabupaten Grobogan dikelompokkan menjadi 3 kategori diantaranya, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi desa dengan status desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal di Kabupaten Grobogan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan desa telah menunjukkan kemajuan yang positif, sehingga seluruh desa telah mencapai tingkat perkembangan yang memadai.



Gambar 9.1 Jumlah Desa Berdasarkan Status di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

Secara keseluruhan, mayoritas desa di Kabupaten Grobogan merupakan kategori desa maju yaitu sebanyak 149 desa. Artinya, sebagian besar desa telah memiliki tingkat perkembangan yang baik, ditandai dengan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, pelayanan dasar yang

semakin memadai, serta kemampuan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Banyaknya desa maju di Kabupaten Grobogan juga menunjukkan bahwa pembangunan desa di wilayah tersebut telah berjalan ke arah yang positif.

Selain itu, terdapat juga desa dengan status desa mandiri meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa maju yaitu sebanyak 85 desa. Keberadaan desa mandiri tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa telah mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi, baik dari aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, maupun kemampuan dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya lokal. Desa-desanya tersebut dapat menjadi contoh praktik pembangunan yang baik sekaligus menjadi motivasi bagi desa lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mencapai status yang sama.

Meskipun perkembangan desa di Kabupaten Grobogan tergolong cukup baik, namun masih ditemukan beberapa desa yang masih masuk kategori berkembang yaitu sebanyak 39 desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, optimalisasi potensi lokal, pengembangan perekonomian desa, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan statusnya menjadi desa maju dan pada akhirnya mencapai status desa mandiri. Untuk mengetahui persebaran desa berdasarkan statusnya disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 9.1 Status Perkembangan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

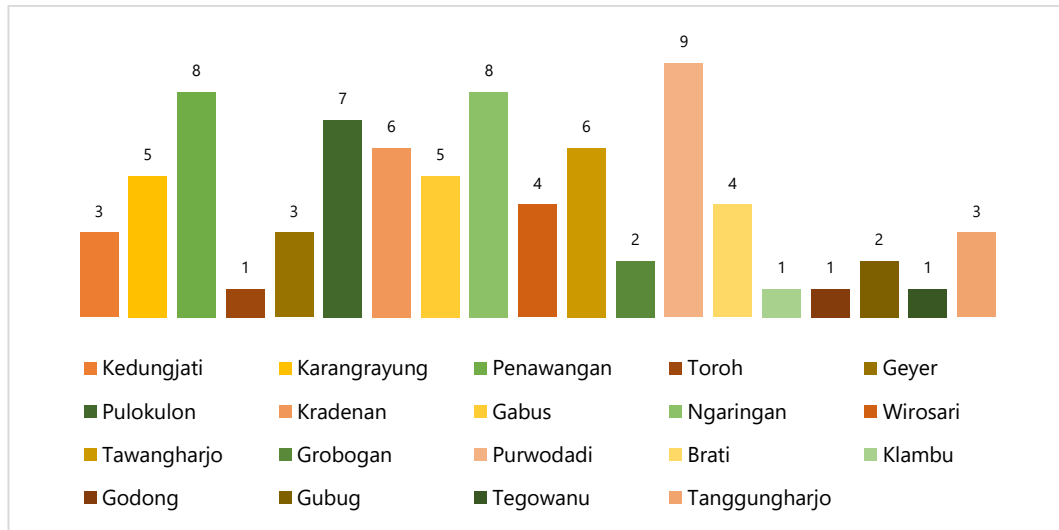
Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Desa	Tertinggal	Status Desa		
				Berkembang	Maju	Mandiri
33.15.01	Kedungjati	12	0	6	3	3
33.15.02	Karangrayung	19	0	10	7	2
33.15.03	Penawangan	20	0	2	9	9
33.15.04	Toroh	16	0	0	13	3
33.15.05	Geyer	13	0	6	6	1
33.15.06	Pulokulon	13	0	0	10	3
33.15.07	Kradenan	14	0	2	6	6
33.15.08	Gabus	14	0	1	11	2
33.15.09	Ngaringan	12	0	0	4	8
33.15.10	Wirosari	12	0	0	6	6
33.15.11	Tawangharjo	10	0	4	6	0
33.15.12	Grobogan	11	0	1	5	5

Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Desa			
			Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
33.15.13	Purwodadi	13	0	0	4	9
33.15.14	Brati	9	0	2	6	1
33.15.15	Klambu	9	0	0	5	4
33.15.16	Godong	28	0	5	19	4
33.15.17	Gubug	21	0	0	10	11
33.15.18	Tegowanu	18	0	0	14	4
33.15.19	Tanggunharjo	9	0	0	5	4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa, kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Grobogan adalah Kecamatan Godong dengan jumlah desa sebanyak 28 desa dengan rincian, 5 desa berkembang, 19 desa maju, dan 4 desa mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Godong telah mencapai tingkat perkembangan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, keberadaan Desa Mandiri mencerminkan bahwa beberapa desa telah memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat Desa Berkembang yang menunjukkan perlunya upaya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar seluruh desa di Kecamatan Godong dapat meningkatkan status perkembangannya secara lebih merata.

Perkembangan status desa tentunya tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Salah satu fasilitas yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian desa adalah keberadaan pasar desa. Pasar desa menjadi pusat perdagangan dan distribusi hasil pertanian, peternakan, maupun produk usaha masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, jumlah pasar desa di Kabupaten Grobogan sebanyak 79 pasar yang tersebar di seluruh wilayah. Untuk mengetahui persebarannya disajikan gambar seperti berikut.

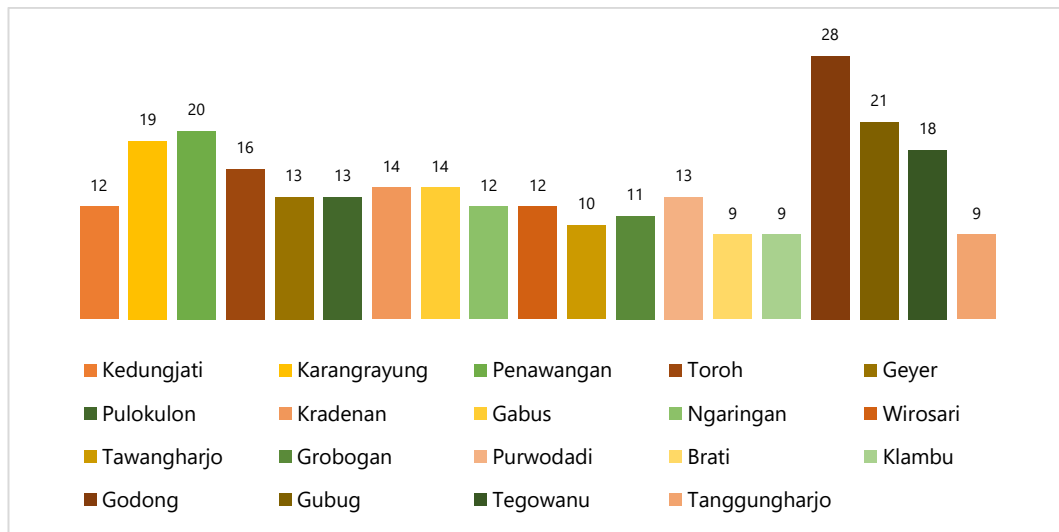


Gambar 9.2 Jumlah Pasar Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

Sebagai pusat pemerintahan serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Grobogan, ketersediaan pasar di Kabupaten Purwodadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang lain dimana jumlah pasar desa pada tahun 2025 di wilayah tersebut sebanyak 9 pasar. Sebagai salah satu sarana perdagangan, ketersediaan pasar yang memadai dapat mendukung kelancaran distribusi barang, memperluas akses pemasaran hasil produksi masyarakat, serta menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Selain didukung oleh keberadaan pasar desa sebagai sarana perdagangan, penguatan perekonomian desa juga tercermin dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh desa untuk mengelola potensi dan aset desa secara produktif, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, jumlah desa yang memiliki BUMDes di Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 273 desa yang tersebar di berbagai wilayah. Secara lebih rinci, jumlah desa yang memiliki BUMDes disajikan seperti pada gambar berikut.



Gambar 9.3 Jumlah Desa yang Memiliki BUMDes Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan seluruh desa di Kabupaten Grobogan telah memiliki BUMDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi desa telah terbentuk di seluruh wilayah sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes di setiap desa diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan aset desa, mengembangkan usaha ekonomi produktif, serta menciptakan sumber pendapatan yang dapat mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Tantangan ke depan tidak lagi berfokus pada pembentukan BUMDes, melainkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan, profesionalisme kelembagaan, serta pengembangan unit usaha agar BUMDes dapat beroperasi secara efektif, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

Statistik LSM dan ORMAS Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Jumlah LSM

1

Unit

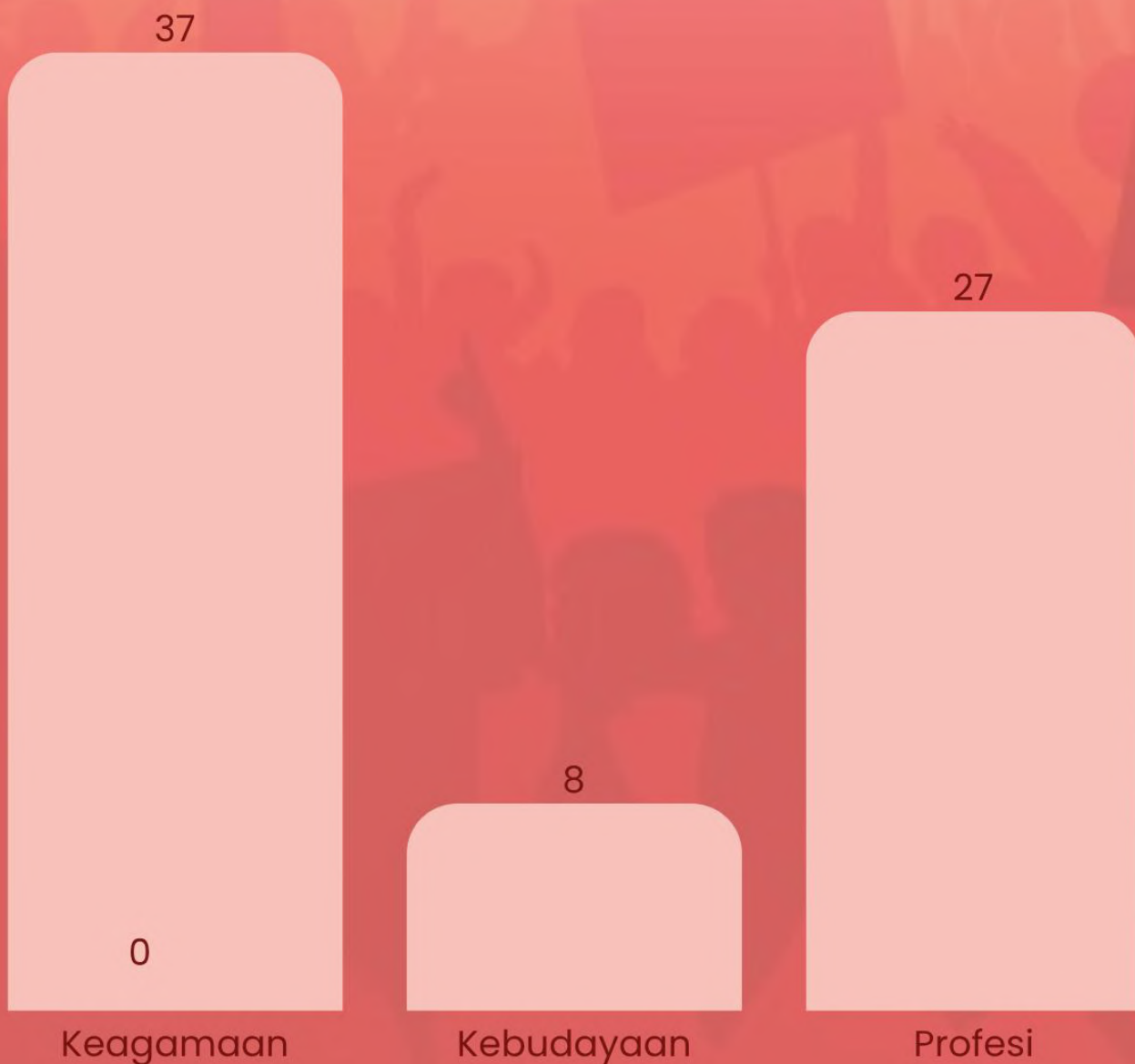


Jumlah ORMAS

72

Unit

Organisasi Masyarakat Berdasarkan Jenisnya



9.2 Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, dan partisipatif. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya kondisi tersebut adalah melalui keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, LSM berperan dalam menyalurkan aspirasi publik, meningkatkan kepedulian sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah LSM di Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 1 yang terletak di Kecamatan Brati.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan LSM di Kabupaten Grobogan belum tersedia dan tersebar secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan. Selain itu, kondisi tersebut mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat melalui lembaga formal berbentuk LSM masih belum berkembang secara luas sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penguatan kelembagaan masyarakat sipil, termasuk peningkatan kesadaran terhadap pentingnya legalitas organisasi, sehingga peran LSM dalam mendukung pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat semakin optimal.

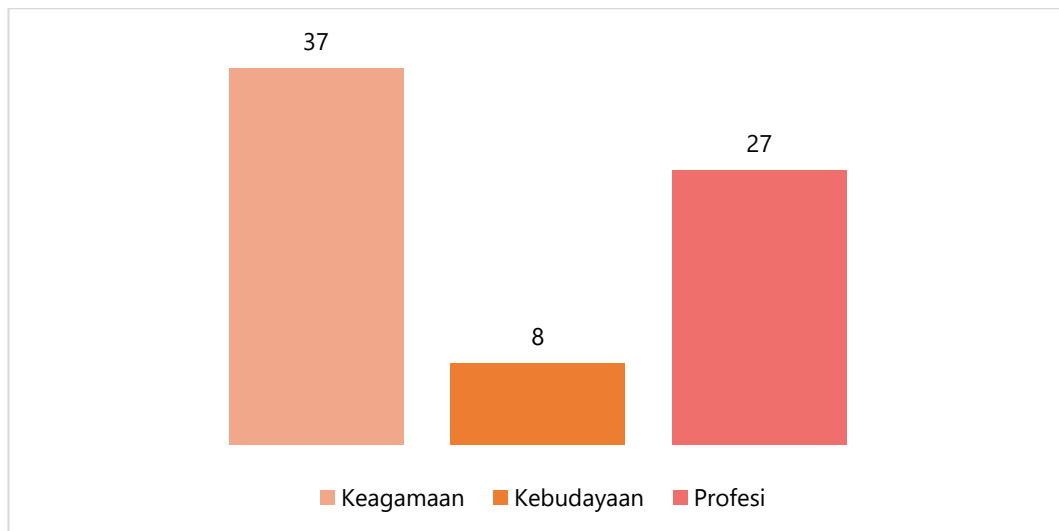
Tabel 9.2 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kecamatan	Kecamatan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)			Jumlah
		LSM Lokal	LSM Nasional	LSM Asing	
33.15.01	Kedungjati	0	0	0	0
33.15.02	Karangrayung	0	0	0	0
33.15.03	Penawangan	0	0	0	0
33.15.04	Toroh	0	0	0	0
33.15.05	Geyer	0	0	0	0
33.15.06	Pulokulon	0	0	0	0
33.15.07	Kradenan	0	0	0	0
33.15.08	Gabus	0	0	0	0
33.15.09	Ngaringan	0	0	0	0
33.15.10	Wirosari	0	0	0	0
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0	0
33.15.12	Grobogan	0	0	0	0
33.15.13	Purwodadi	0	0	0	0
33.15.14	Brati	1	0	0	1

Kode Kecamatan	Kecamatan	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)			Jumlah
		LSM Lokal	LSM Nasional	LSM Asing	
33.15.15	Klambu	0	0	0	0
33.15.16	Godong	0	0	0	0
33.15.17	Gubug	0	0	0	0
33.15.18	Tegowanu	0	0	0	0
33.15.19	Tanggunharjo	0	0	0	0
Jumlah		1	0	0	1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan

Selain melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan pembangunan juga diwujudkan melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dibandingkan dengan jumlah LSM, jumlah ormas di Kabupaten Grobogan jauh lebih banyak yaitu sebanyak 72 ormas dengan rincian, 37 ormas bidang keagamaan, 8 ormas bidang kebudayaan, dan 27 ormas bidang profesi. Keberadaan ormas yang lebih banyak mencerminkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan, profesi, maupun kemanusiaan. Namun demikian baik ormas maupun LSM memiliki peran yang saling melengkapi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 9.4 Jumlah Ormas Menurut Bidang di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan

Sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat yang berperan dalam menghimpun aspirasi, memperkuat kehidupan sosial, serta mendukung

pelaksanaan pembangunan di daerah, persebaran jumlah ormas menurut kecamatan dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan organisasi kemasyarakatan di setiap wilayah, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan penguatan peran Ormas sebagai mitra strategis dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan mendukung pembangunan daerah. Untuk mengetahui persebaran tersebut disajikan data seperti pada tabel berikut.

Tabel 9.3 Jumlah Ormas Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kec	Kecamatan	Keagamaan			Kebudayaan		
		Nasional	Lokal	Asing	Nasional	Lokal	Asing
33.15.01	Kedungjati	0	1	0	0	0	0
33.15.02	Karangrayung	0	0	0	0	0	0
33.15.03	Penawangan	0	4	0	0	0	0
33.15.04	Toroh	0	1	0	0	0	0
33.15.05	Geyer	0	0	0	0	0	0
33.15.06	Pulokulon	0	1	0	0	0	0
33.15.07	Kradenan	0	8	0	0	3	0
33.15.08	Gabus	0	6	0	0	0	0
33.15.09	Ngaringan	0	0	0	0	1	0
33.15.10	Wirosari	0	2	0	0	0	0
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0	0	1	0
33.15.12	Grobogan	0	3	0	0	0	0
33.15.13	Purwodadi	0	8	0	0	3	0
33.15.14	Brati	0	1	0	0	0	0
33.15.15	Klambu	0	0	0	0	0	0
33.15.16	Godong	0	1	0	0	0	0
33.15.17	Gubug	0	1	0	0	0	0
33.15.18	Tegowanu	0	0	0	0	0	0
33.15.19	Tanggunharjo	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	37	0	0	8	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan

Tabel 9.4 Lanjutan Tabel Jumlah Ormas Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kode Kec	Kecamatan	Profesi		
		Nasional	Lokal	Asing
33.15.01	Kedungjati	0	2	0
33.15.02	Karangrayung	0	0	0
33.15.03	Penawangan	0	1	0
33.15.04	Toroh	0	1	0
33.15.05	Geyer	0	0	0
33.15.06	Pulokulon	0	1	0
33.15.07	Kradenan	0	10	0

Kode Kec	Kecamatan	Profesi		
		Nasional	Lokal	Asing
33.15.08	Gabus	0	0	0
33.15.09	Ngaringan	0	0	0
33.15.10	Wirosari	0	0	0
33.15.11	Tawangharjo	0	0	0
33.15.12	Grobogan	0	2	0
33.15.13	Purwodadi	0	7	0
33.15.14	Brati	0	0	0
33.15.15	Klambu	0	1	0
33.15.16	Godong	0	0	0
33.15.17	Gubug	0	1	0
33.15.18	Tegowanu	0	1	0
33.15.19	Tanggungharjo	0	0	0
Jumlah		0	27	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, keberadaan ormas di Kabupaten Grobogan masih belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Grobogan. Tercatat masih terdapat beberapa wilayah yang tidak memiliki ormas, seperti Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Geyer, dan Kecamatan Tanggungharjo. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, belum terbentuknya ormas di wilayah tersebut atau belum dilakukannya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan fasilitasi agar masyarakat semakin terdorong untuk membentuk serta mendaftarkan ormas, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat dapat semakin meningkat.

Meski demikian, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Grobogan telah memiliki ormas yang terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial dan pembangunan telah terwadahi melalui organisasi kemasyarakatan. Keberadaan ormas di berbagai kecamatan juga mencerminkan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial, menyalurkan aspirasi, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



BAB IX

PENUTUP

BAB X PENUTUP

Dengan adanya penyusunan buku statistik sektoral ini, diharapkan tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mendorong keterbukaan dan transparansi data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Kabupaten Grobogan. Sebagai penutup Buku Statistik Sektoral Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini, kami ingin mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pemeliharaan data statistik yang terkandung di dalamnya. Buku ini tidak hanya mencerminkan upaya kami dalam menyusun data sektoral secara menyeluruh, tetapi juga menggambarkan komitmen kami untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data di Kabupaten Grobogan.

Melalui buku ini, kami berharap informasi yang disajikan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, perencana, serta masyarakat umum dalam memahami perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor. Data yang terkumpul diharapkan dapat memfasilitasi perencanaan yang lebih efektif, strategi pembangunan yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan buku ini tidaklah sempurna dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai setiap masukan dan umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem pengumpulan data kami guna memastikan relevansi dan akurasi informasi di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Grobogan. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang terlibat. Semoga kita dapat terus bekerja sama untuk mencapai kemajuan Kabupaten Grobogan lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

**Jl. Mayjend Sutoyo Jl. Siswomiharjo No.48, Jetis Timur,
Purwodadi, Grobogan Regency, Central Java 58111**